

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

TERMINOLOGI SEJARAH

1945--1950 & 1950--1959

wisata

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
JAKARTA
1996

TERMINOLOGI SEJARAH

1945--1950 & 1950--1959

Tim Penulis :

A. B. Lopian
Susanto Zuhdi
Sumardi
P. Suryo Haryono
Shalfiyanti
Espita Riama
Lismiarti
Andi Maryam

TERMINOLOGI SEJARAH 1945--1950 & 1950--1959

Tim Penulis Terminologi Sejarah 1945--1950 : A.B. Lopian
Susanto Zuhdi
Shalfiyanti

Tim Penulis Terminologi Sejarah 1950--1959 : Susanto Zuhdi
Sumardi
P. Suryo Haryono
Shalfiyanti
Espita Riama
Lismiarti
Andi Maryam
Zulfikar Ghazali

Penyunting

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh

: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan
Nilai Tradisional Direktorat Jenderal
Kebudayaan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.

Cetakan Pertama Tahun 1996

Jakarta 1996

Dicetak oleh

: cv. DEFIT PRIMA KARYA Jakarta

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Projek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin menyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya projek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Sedyawati', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Edi Sedyawati

NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Buku *Terminologi Sejarah* merupakan kumpulan istilah tentang kesejarahan. *Terminologi Sejarah* ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1993/1994 dan 1994/1995.

Penulisan *Terminologi Sejarah* ini mencakup dua periode, yaitu periode 1945--1950 dan 1950--1959. Periode pertama yang memfokuskan kajian pada tahun 1945--1950 memuat aspek politik dan pemerintahan, sedang pada periode kedua memuat istilah-istilah sejarah tahun 1950--1959 khususnya pada masalah-masalah kemiliteran, politik dan ekonomi.

Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat menambah khasanah kesejarahan dan memberi informasi yang memadai bagi masyarakat peminatnya. Di samping itu diharapkan dapat menjadi bahan bagi peningkatan kesadaran sejarah masyarakat pada umumnya.

Kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, November 1996

**Pimpinan Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasional**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. G.A. Ohorella', with a large, stylized loop at the beginning.

Dra. G.A. Ohorella

PENGANTAR

Pendidikan mempunyai peranan sentral dalam menciptakan manusia yang taqwa, cerdas, terampil dan berkebudayaan tinggi sehingga dapat menjadi penentu pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia. Sehubungan dengan itu, pendidikan memerlukan perangkat penunjang yang lengkap dan bermutu tinggi.

Salah satu alat penunjang dalam proses belajar-mengajar sejarah adalah " Terminologi Sejarah ". Berbeda dengan kamus yang biasa dikenal sebab Terminologi Sejarah bersifat komprehensif, isinya lebih luas.

Penyusunan Terminologi Sejarah ini bertujuan menyediakan bahan rujukan bagi guru, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas sebagai sumber informasi yang tepat dan cepat mengenai ikhwil, organisasi, peristiwa, dan lain-lain yang berkaitan dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Terminologi Sejarah ini meliputi periode 1945-1950 dan 1950-1959 dengan lima topik pembahasan, yaitu : (1) peristiwa-peristiwa politik dan militer, (2) tokoh-tokoh sejarah dengan riwayat hidupnya, (3) badan-badan, lembaga, dan organisasi-organisasi perjuangan, (4) ungkapan-ungkapan dan semboyan-semboyan, (5) perihal ketatanegaraan, undang-undang, peraturan pemerintah, surat-surat keputusan, dan lain-lain.

Bentuk Terminologi sejarah ini mengikuti pola *Dictionary of American History* (1957), eds : Michael Martin and Leonard Gelber Ames, Iowa : Littlefield, Adam & Co, 1957, dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan.

Bahan penulisan kami peroleh dengan melakukan studi kepustakaan di berbagai perpustakaan di Jakarta.

Harapan kami, mudah-mudahan Terminologi Sejarah ini berguna bagi masyarakat, sehingga pengetahuan mereka tentang masalah kesejarahan semakin bertambah.

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Pengantar	vii
Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
1945–1950	
ABDUL XARIM MS.	1
ADAM MALIK	2
AGRESI MILITER BELANDA I	3
AGRESI MILITER BELANDA II	4
ALLIED FORCES NETHERLANDS EAST INDIES (AFNEI)	6
ANAK AGUNG GDE AGUNG, IDE	6
ANGKATAN PEMUDA INDONESIA (API)	8
ASRAMA FAKULTAS KEDOKTERAN PRAPATAN 10 JAKARTA	9
ASRAMA INDONESIA MERDEKA	9
ASRAMA ANGKATAN BARU INDONESIA	10
BANDUNG LAUTAN API	10

BARISAN BENTENG	11
BARISAN KEAMANAN RAKYAT (BKR)	12
BEEL, L.J.M.	12
BEUREUEH, TEUNGKU MOHAMMAD DAUD	14
BIJEENKOMST FEDERAAL OVERLEG (BFO)	15
CRITCHLEY, THOMAS	15
DAUD, TEUKU MOHAMMAD	16
FRONT DEMOKRASI RAKYAT (FDR)	17
FROM BULLETS TO BALLOTS	17
GARIS VAN MOOK	18
GERAKAN PEMUDA BENGKEL KERETA API TEGAL	18
HAMID ALGADRIE II, SULTAN	19
HASAN, TEUKU MOEHAMMAD	21
HASJMI, ALI	22
HATTA, MOHAMMAD	23
INSIDEN MERAH PUTIH HOTEL TANAKA	25
JAMBEK, DAHLAN	26
KARTAWIDJAJA, DJUANDA	27
KARTODIWIRJO, SUKARNI	29
KARTOSUWIRJO, SEKARMADJI MARIDJAN	30
KERR , SIR ARCHIBAL CLARK	32
KIRBY , HON. SIR RICHARD CLARENCE	32
KONFERENSI ANTARINDONESIA	32
KONFERENSI DENPASAR 7--24 DESEMBER 1946	33
KONFERENSI MALINO, 16--22 JULI 1946	35
KONFERENSI MEJA BUNDAR (KMB)	36
KONFERENSI PANGKAL PINANG	37
KUSUMASUMANTRI, IWA	38
KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (KNPI)	39

KOMITE VAN AKSI	40
LASKAR RAKYAT	40
LEIMENA, JOHANNES	41
MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO X	42
MAJLIS SYURO MUSLIMIN INDONESIA (MASYUMI)	43
MALA BERDARAH DI SUMATERA TIMUR	43
MALAKA, TAN	45
MOOK, H.J. VAN	46
MOUNTBATTEN, LORD LOUIS	48
MUSSO	48
NASUTION, ABDUL HARRIS	49
PALAR, LAMBERTUS NICODEMUS	50
PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI)	51
PARTAI BURUH INDONESIA	52
PERSATUAN PERJUANGAN (PP)	52
PERLAWANAN DI KAMPUNG BIDUK-BIDUK	53
PEMBERONTAKAN PKI MADIUN	54
PEMBERONTAKAN REPUBLIK MALUKU SELATAN	55
PEMOGOKAN DELANGGU	56
PERLAWANAN MARGA	59
PERANG PANDRAH	60
PEREBUTAN KOTA MINYAK SANGA-SANGA	61
PERISTIWA ANDI AZIS	63
PERISTIWA CINANGKA	64
PERISTIWA 14 FEBRUARI 1946	65
PERISTIWA JALAN BALI	67
PERISTIWA KERETA API MAUT	68
PERISTIWA PEGANGSAAN	69
PERISTIWA RENGASDENGKLOK	70

PERISTIWA TIGA DAERAH	71
PERISTIWA TIGA MARET	72
PERISTIWA 3 JULI 1946	73
PERISTIWA PANIWEN	74
PERTEMPURAN SURABAYA	75
PERTEMPURAN TANAH ARON	76
PERISTIWA WESTERLING	76
PERTEMPURAN AMBARAWA	78
PERTEMPURAN BOJONGKOKOSAN	79
PERTEMPURAN BULAK CABE	81
PERTEMPURAN DUA HARI DI SURABAYA	81
PERTEMPURAN GEKBRONG	83
PERTEMPURAN LIMA HARI LIMA MALAM DI PALEMBANG	84
PERTEMPURAN LIMA HARI DI SEMARANG	85
PERTEMPURAN MEDAN AREA	86
PERTEMPURAN WANASABA	87
PERUNDINGAN HOOGE VELUWE	88
PERUNDINGAN KALIURANG	89
PERUNDINGAN LINGGARJATI	90
PRUNDINGAN RENVILLE	91
PERUNDINGAN ROEM-ROJEN	93
PLAS, CH. VAN DER	93
PRAWIRANEGARA, SYAFRUDDIN	94
PRINGGODIGDO, ABDUL GAFFAR	95
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA	97
RAI, I GUSTI NGURAH	97
RAPAT UMUM IKADA	98
RATULANGI, GSSJ	99

ROEM , MOHAMMAD	101
ROJEN, VAN J.H.	102
RECOMBA	103
REVOLUSI NASIONAL (INDONESIA)	103
SALEH , CHAERUL	104
SALIM, HAJI AGUS	105
SASSEN, E.J.M.A.	107
SASTROAMIDJOJO, ALI	108
SASTROSATOMO, SOEBADIO	110
SCHERMERHORN, WILLEM	111
SERANGAN UMUM 1 MARET	112
SINGODIMEDJO , KASMAN	113
SOEDIRMAN, JENDERAL	115
SOEKARNO	118
SOEMOHARDJO, OERIP	119
SOPHIAAN, MANAI	120
SOUTH EAST ASIA COMMAND (SEAC).....	120
SOUMOKIL, CHRISTIAN ROBERT	120
STAATSPARTIJ (PNI)	121
SPOOR SIMON HENDRIK	122
SUBARDJO, AHMAD	122
SUBROTO, GATOT	124
SUPOMO, RADEN	125
SYAHRIR, SUTAN	127
SYARIFUDDIN, AMIR	129
TENGCELAMNYA KAPAL LAUT RI GAJAH MADA	130
WEDYODININGRAT, RADJIMAN	131
WESTERLING, RAYMOND PAUL PIERRE	133
YAMIN, MUHAMMAD	134
DAFTAR PUSTAKA	135

1950 -- 1959

ANGKATAN TERBARU	141
AUSTERITY PROGRAM	141
BADAN KEINSYAFAN RAKYAT ACEH	142
BALAI PERSIAPAN KEWAJIBAN BELAJAR	143
BAMA	144
BANK BUMI DAYA (BBD)	144
BANK INDONESIA	145
BANK INDUSTRI NEGARA (BIN)	146
BADAN KERJASAMA PEMUDA MILITER (BKSPM)	146
BOOM KARET	147
DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959	147
DEMONSTRASI WARTAWAN INDONESIA	149
DEMOKRASI LIBERAL	150
DEMOKRASI TERPIMPIN	151
DEWAN PERANCANG NASIONAL (DEPERNAS)	152
DEWAN GARUDA	153
DEWAN GEREJA-GERAJA INDONESIA (DGI)	153
DEWAN BANTENG	154
DEWAN NASIONAL	155
DEWAN MANGUNI	156
DEWAN GAJAH	157
DWI TUNGGA PECAH	158
FRONT NASIONAL PEMBEBASAN IRIAN BARAT	159
FRONT NASIONAL	160
FRONT PEMUDA INDONESIA	160
GABUNGAN BRIDGE SELURUH INDONESIA	161
GERAKAN BENTENG (BENTENG GROUP)	161
GERAKAN ASSAAT	162
GERAKAN OPERASI MILITER TIGA	163

GERAKAN OPERASI MILITER V	164
GERAKAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT (GPIB)	165
GERAKAN BANTENG NEGARA	166
GARUDA INDONESIA AIRWAYS (GIA)	168
GABUNGAN ORGANISASI BURUH SARIKAT ISLAM INDONESIA (GBSI)	168
HARI PENDIDIKAN NASIONAL	169
IDE 4 DESEMBER 1956	170
IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA (IPKI)	171
INDONESIA MEREbut PIALA THOMAS CUP	172
INDONESIANISASI	172
JAWATAN SOSIAL SUMATERA UTARA	173
KABINET KARYA	174
KABINET NATSIR	174
KABINET WILOPO	175
KABINET BURHANUDDIN HARAHAP	177
KABINET ALI-WONGSO	177
KABINET SOEKIMAN	178
KAMPUS DARUSSALAM	179
KEADAAN DARURAT PERANG	181
KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG- ROYONG (KOSGORO)	181
KESEJAHTERAAN GURU, MURID, DAN ANAK-ANAK (KGMA)	182
KOMISI FACT FINDING PARLEMEN	183
KOMITE KESATUAN AKSI IRIAN BARAT	183
KONFERENSI MAHASISWA ASIA-AFRIKA	184
KONFERENDI ASIA AFRIKA	184
KONFERENSI TINGKAT MENTERI	185
KONFERENSI SEKOLAH MENENGAH ATAS	186

KONGRES BURUH UMUM	188
KONGRES PEMUDA SELURUH INDONESIA	188
KONGRES WANITA INDONESIA	189
KONSTITUANTE	190
KONSTITUSI RIS	191
KONSEPSI SAPTA USAHA TAMA	193
KONSERVATORI KARAWITAN	193
KURSUS SCIENCE TEACHING	194
KURSUS B I DAN B II	195
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA (LVRI)	195
LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT (LEKRA)	199
LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA (LKI)	200
LISENSI ISKAQ	201
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA (MPRS)	202
MANIPOL (MANIFESTO POLITIK)	202
MANIFEST KEBUDAYAAN	203
MILITERISASI KEPOLISIAN NEGARA	204
METODE KOMBINASI TIGA BENTUK PERJUANGAN (MKTB)	205
MUTUAL SECURITY ACT (MSA)	206
MUKTAMAR NU KE - 19	206
MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)	208
NASIONALISASI	208
NEGARA SUMATERA TIMUR	209
NEDERLANDSCH ROODE KRUIS AFDEELING INDIE (NERKAI)	210
OPERASI SAPTA MARGA	211
OPERASI TEGAS	213
OPERASI SAPTAMARGA	215
OPERASI BUKIT BARISAN	216

ORGANISASI GELAP MANGUNI	218
PERSATUAN ANGKAT BESI SELURUH INDONESIA (PABSI)	220
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D)	220
PANITIA PENAMPUNGAN OPERASI KEUANGAN (PPOK)	221
PARTAI RAKYAT INDONESIA	222
PARTAI RAKYAT NASIONAL	222
PERSATUAN BOLA VOLI SELURUH INDONESIA (PBVSI)	223
PEMBATALAN PERJANJIAN KMB	224
PEMBATALAN UNI INDONESIA-BELANDA	224
PEMBENTUKAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH	225
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH PROVINSI	226
PEKAN OLAH RAGA NASIONAL III	227
PEKAN PEMUDA	228
PEMBERONTAKAN APRA	229
PEMBERONTAKAN IBNU HADJAR	230
PEMBERONTAKAN ABDUL QAHAR MUDZAKAR	231
PEMBERONTAKAN DI/TII DAUD BEUREUH	233
PEMIKIRAN EKONOMI NASIONAL	234
PENGGUNTINGAN UANG (SANERING)	234
PENGIRIMAN MISI GARUDA	235
PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN	237
PERSATUAN HOKI SELURUH INDONESIA (PHSI)	238
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NO. 2 TAHUN 1959	238
PERSATUAN CATUR SELURUH INDONESIA (PERCASI)	239
PERISTIWA TELUK NIBUNG	239

PERJANJIAN PERDAMAIAN JEPANG DAN INDONESIA	240
PERISTIWA CINIKI	241
PERISTIWA HALIM	242
PERISTIWA 27 JUNI 1955	243
PERISTIWA 17 OKTOBER 1952	244
PERISTIWA TANJUNG MORAWA	247
PERSETUJUAN 15 MEI 1950	248
PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA (PJSI)	250
PRESIDEN (REKTOR) UNIVERSITAS INDONESIA	250
PEMERINTAHAN REVOLUSI REPUBLIK INDONESIA (PRRI)	250
PERSERIKATAN RENANG SELURUH INDONESIA (PRSI)	251
PERGURUAN TINGGI PENDIDIKAN GURU (PTGP)	252
PUSAT LATIHAN TARI BAGONG KUSSUDIARJO	252
RAPAT GELAP SUNGAI DAREH	254
RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (RPLT), 1956-1961	254
RENCANA PELAJARAN SMA TAHUN 1952	255
SAPTA MARGA	257
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TELADAN	258
SENTRAL ORGANISASI BURUH RI	259
SENTRAL ORGANISASI BURUH PANCASILA	260
SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN NO 316 TAHUN 1959	260
TRIBRATA	261
UNDANG-UNDANG POKOK PENDIDIKAN	262
UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA 1950	263
UNDANG-UNDANG PERTAHANAN	265
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA	266
YAYASAN KREDIT DAERAH	268
DAFTAR PUSTAKA	269

1945 -- 1950

ABDUL XARIM M.S

Tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan tokoh tua generasi Sumatera Timur setelah Proklamasi Kemerdekaan, lahir di Pidi, Aceh Timur pada tahun 1901. Xarim yang mempunyai nama lengkap Abdul Xarim bin Muhammad Soetan, mempunyai pendidikan Sekolah Menengah Belanda. Mulanya ia bekerja sebagai *Teekenaar* di Kantor BOW (Pekerjaan Umum) di Lhok Seumawe, dan kemudian giat dalam Serikat Buruhnya yaitu VIBON.

Sejak muda Xarim telah tertarik pada bidang politik. Kegiatan politiknya ditumpahkannya pertama kali dalam pergerakan "*National Indiche Party*" (NIP) yang beraliran nasionalis. Dalam organisasi ini ia menjadi Ketua Cabang Lhok Seumawe sampai dia dipindahkan ke Padang tahun 1920. Sementara itu, ia juga aktif sebagai wartawan dan penulis. Dia memimpin *Hindia Sepakat* (Sibolga), dan kemudian *Oetoesan Rakyat* (Langsat). Di Langsat dia menjadi anggota PKI dan menjelang akhir tahun 1924 Xarim sudah menjadi anggota pengurus pusat partai tersebut.

Pada bulan Mei 1927, Akibat kegiatannya dibidang politik Xarim M.S dibuang ke Digul. Sesudah pembebasannya pada bulan Januari 1932 dia menjadi wartawan non politik. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang yang menyediakan bidang-bidang tertentu dimana tokoh-tokoh politik boleh bekerja mengangkat Xarim, M.S. Seorang komunis yang ahli berpidato sebagai penghubung pemerintah Jepang ke persnya. Dengan keahliannya berpidato, tugasnya ditingkatkan pada kedudukan yang lebih penting sebagai propaganda pada pertengahan tahun 1943. Dia merupakan tokoh yang sangat mendukung pembentukan *heiho* (Serdadu Pembantu) yang dibuat Jepang.

Ketika Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Xarim M.S. merupakan tokoh yang sangat berjasa dalam menyampaikan berita proklamasi dan menyatukan rakyat Sumatera Timur untuk melawan Sekutu. Sebagai seorang ahli pidato yang mempunyai daya tarik di Sumatera Timur, dia menjadi propaganda utama masa Jepang dan

seorang revolusioner yang paling terkenal dari tahun 20-an, Xarim menempatkan diri, sebagai tokoh politik yang paling berpengaruh diantara tokoh-tokoh lainnya.

Karena itu dia duduk mengepalai Dewan Penasehat Badan Pemuda Indonesia (BPI), yaitu suatu organisasi yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan. Bersama golongan tua lainnya ia giat menghimpun generasi pemuda untuk melawan sekutu. Sementara itu dengan dikeluarkannya maklumat 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik oleh Mohammad Hatta, menyebabkan munculnya partai-partai di Sumatera Timur. Bersama Naskar, Joenoes Nasution dan Bustami, Xarim kembali mendirikan partai Komunis Indonesia yang diketuai Xarim M.S. Walaupun partai ini tidak mempunyai banyak pengikut, tetapi pemikiran-pemikiran revolusioner Xarim mampu mempengaruhi pemikiran para pemuda.

Hai inilah yang kemudian mendorong pecahnya "peristiwa berdarah tanggal 3 Maret 1946" yaitu penyerangan, pembunuhan dan perampokan yang dilakukan pemuda-pemuda Hisbullah, BHL (Barisan Harimau Liar) terhadap kaum bangsawan Sumatera Timur. Tahun 1952 Xarim M.S. keluar dari PKI dan delapan tahun kemudian (1960) ia pergi untuk selama-lamanya.

ADAM MALIK

Wartawan dan tokoh perjuangan yang outodidak ini lahir di Pematang Siantar pada tanggal 22 Juli 1917. Tahun 1934 sampai tahun 1935 Adam Malik terpilih sebagai ketua Partindo (Partai Indonesia Rakyat). Pematang Siantar dan Medan. Dimasa pendudukan Jepang, Adam Malik termasuk dalam gerakan bawah tanah yang anti Jepang. Bersama pemuda radikal lainnya seperti Chairul Saleh, Sukarni dan lain-lain mula-mula tergabung dalam Gerakan Rakyat Baru, tetapi akhirnya mengundurkan diri karena organisasi tersebut terikat pada pemerintah Jepang. Menjelang Proklamasi 17 Agustus 1945, Adam Malik menjadi anggota pimpinan

gerakan pemuda untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi, karena tuntutan para pemuda ini tentang pembentukan tentara nasional, mereka membentuk Komite Van Aksi yang dipimpin oleh Adam Malik pada akhir Agustus 1945. Pada tahun itu juga, Adam Malik menjadi anggota Badan Persatuan Perjuangan sampai tahun 1946, kemudian dia mendirikan Partai Rakyat. Sementara itu sejak tahun 1945-1947, Adam Malik terpilih menjadi ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merangkap sebagai anggota BPKNIP. Setelah pengakuan kedaulatan, Adam Malik tetap aktif menjadi anggota Partai Murba yang dimasukinya sejak tahun 1948 sampai tahun 1956. Selanjutnya Adam Malik terus aktif dalam pemerintahan dengan berbagai jabatan yang dipegangnya, sehingga dia terpilih sebagai wakil presiden pada tahun 1978.

Di tahun 1962, Adam Malik pernah terpilih sebagai ketua delegasi RI untuk perundingan Indonesia - Belanda mengenai Irian Barat, yang kemudian menghasilkan persetujuan penyelesaian mengenai Irian Barat.

AGRESI MILITER BELANDA I

Agresi atau Serangan Militer Belanda I adalah serangan serentak yang dilakukan Belanda terhadap daerah-daerah Republik Indonesia. Serangan dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947, perbedaan penafsiran terhadap Persetujuan Linggarjati, yang ditandatangani pada bulan Maret 1947 menjadi penyebab serangan ini. Di satu pihak Belanda menganggap "kerjasama" yang terdapat dalam pasal 2 persetujuan tersebut sebagai kedaulatan Belanda di Indonesia tetap berlangsung sampai terbentuknya Negara Indonesia Serikat (NIS).

Dipihak lain Indonesia mengartikan "kerjasama" dalam pasal tersebut sebagai suatu kerjasama dengan pertanggungjawaban bersama dalam membentuk Federasi dengan kedudukan yang setara. Sementara itu Belanda mengeluarkan nota yang merupakan ultima-

tum yang harus dijawab Pemerintah RI 14 hari sejak tanggal 27 Mei 1947. Dalam notanya itu Belanda menuntut pembentukan pemerintahan *ad interim bersama*, mengeluarkan uang bersama, menyelenggarakan pemilikan ekspor dan import bersama, disamping menuntut agar RI mengirim beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda. Hal ini tentu saja ditolak pemerintah RI. RI Bersedia mengakui kedaulatan Belanda hanya selama masa peralihan dan menolak *gendamarie bersama*.

Belanda yang tidak puas dengan jawaban tersebut kembali mengirim nota pada tanggal 15 Juli 1947, yang isinya tetap menuntut gendamarie bersama dan menuntut agar RI menghentikan permusuhan terhadap Belanda. Dalam nota itu Belanda juga memberi ultimatum bahwa dalam waktu 32 jam RI sudah harus memberi jawaban terhadap tuntutan-tuntutan Belanda.

Oleh karena RI tetap menolak tuntutan tersebut, akhirnya pada 21 Juli 1947 dinihari Belanda melakukan serangan militernya yang dikenal dengan agresi militer. Serangan berlangsung selama kurang lebih 2 Minggu. Dalam serangannya ini pasukan Belanda berhasil menggempur jalan-jalan besar dan pelabuhan-pelabuhan penting di Jawa dan Sumatera. Akhirnya setelah mendapat perintah dari Dewan Keamanan PBB (atas permintaan Australia dan India) agar menghentikan tembak menembak, pada tanggal 4 Agustus 1947 kedua negara yang bertikai mengumumkan penghentian tembak menembak. Dengan pengumuman gencatan senjata ini, maka agresi militer Belanda pertama berakhir.

AGRESI MILITER BELANDA II

Agresi Militer Belanda II adalah peristiwa penyerangan Belanda terhadap Republik Indonesia untuk yang kedua kalinya. Penyerangan terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 terhadap ibukota negara RI, Yogyakarta. Perundingan Renville yang semua diharapkan dapat mendekatkan kedua pihak yang bersengketa ternyata tidak memberi

hasil sesuai dengan yang diharapkan. Sementara Belanda tetap pada tuntutannya tentang "Garis Van Mook" yang memperkecil wilayah kekuasaan RI dan Pemerintahan ad Interim Negara Indonesia Serikat, sebaliknya RI tidak bisa menerima tuntutan tersebut. Sebagai jalan keluarnya RI, melalui Mohammad Hatta, mencoba meminta Komisi Tiga Negara (KTN) agar Belanda mau mengadakan perundingan lagi, bahkan dengan syarat " RI akan mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan". Tetapi permintaan itu ditolak Belanda dan mereka tetap pada tuntutannya tersebut. Bahkan pada tanggal 18 Desember 1948 mereka mengumumkan bahwa mereka tidak lagi mengakui dan terikat pada Persetujuan Renville. Sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 06.00. pagi Belanda melancarkan serangannya ke kota Yogyakarta. Dalam waktu singkat Belanda berhasil menguasai Lapangan Terbang Maguwo, dan selanjutnya seluruh kota Yogyakarta. Mereka berhasil menawan Presiden dan Wakil Presiden, Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta bersama sejumlah menteri yang kemudian diasingkan ke Pulau Bangka. Tetapi sebelum itu dalam sidang yang sempat diadakan pada hari itu juga diambil keputusan untuk memberikan mandat pada Menteri Kemakmuran Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selain di Sumatera, kepada Mr. A.A. Maramis, L.N. Palar dan dr. Soedarsono juga diberi mandat untuk melakukan hal yang sama bila PDRI di Sumatera tidak berhasil dibentuk. Tindakan Belanda ini menarik perhatian dan menimbulkan protes negara-negara di dunia.

Pemerintah Amerika Serikat mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mendesak Belanda agar menghentikan agresinya dan memulihkan Pemerintah RI. Atas desakan Amerika tersebut, akhirnya Pemerintah Belanda menyetujui untuk segera mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) dan mempercepat penyerahan kedaulatan Belanda atas Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 1949 pasukan Belanda ditarik dari Yogyakarta dan pada tanggal 6 Juli 1949 Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah menteri kembali ke Yogyakarta.

ALLIED FORCES NETHERLANDS EAST INDIES (AFNEI)

Dalam melaksanakan tugasnya di Indonesia, Lord Louis Mauntbatten Panglima Komando Asia Tenggara membentuk komando khusus yakni AFNEI, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison.

Tugas AFNEI yang mendarat 29 September 1945 di Jakarta adalah:

1. Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang;
2. Membebaskan para tawanan perang dan Interniran sekutu;
3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan;
4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil; dan
5. Menghimpun keterangan tentang dan menuntut penjahat perang. Pasukan-pasukan yang tergabung didalam AFNEI hanya bertugas di Sumatera dan Jawa, sedangkan pendudukan daerah lain di Indonesia diserahkan kepada Angkatan Perang Australia.

ANAK AGUNG GDE AGUNG, IDE

Dilahirkan di Gianyar (Bali) pada tanggal 24 Juli 1921 sebagai putera sulung, Ide Anak Agung Ngurah Agung, adalah bekas raja Gianyar. Ia mendapatkan pendidikan dasar di HIS Klungkung, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Lanjutan Pertama (MULO) di Malang dan Sekolah Lanjutan Atas (HBS). Dalam bulan September 1939 Ide Anak Agung Gde Agung meneruskan pendidikan pada sekolah hukum (Rechts Hoge School) di Jakarta dan berhasil meraih gelar sarjana muda di bulan Oktober 1941. Awal Maret 1942, karena pecahnya Perang Pasifik dia kembali ke Bali hingga selesai pendudukan Jepang pada tahun 1945. Pada masa Pendudukan Jepang Anak Agung menggantikan ayahnya menjadi

Syutjo (Kepala pemerintah swapraja), yang dibuang ke Lombok pada bulan Agustus 1943. Setelah Pulau Bali diduduki oleh Belanda pada bulan Maret 1946, dan kemudian dilangsungkan Konperensi Malino di Bulan Juli 1946, Anak Agung diutus menjadi wakil daerah Bali pada bulan Maret 1946, dan kemudian dilangsungkan Konperensi Malino di bulan Juli 1946, Anak Agung diutus menjadi wakil daerah Bali pada Konperensi tersebut. Kemudian pada Konperensi Den Pasar (7--24 Desember 1946) yang mewujudkan pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT), Anak Agung kembali terpilih sebagai wakil dari daerah Bali. Konperensi ini diubah menjadi Perwalian Sementara Negara Indonesia Timur, dimana Anak Agung duduk sebagai anggotanya. Pada waktu Kabinet Nadjamudin Daeng Malewa di NIT dibentuk pada awal Januari 1947, Anak Agung terpilih sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri.

Begitupula pada masa Kabinet Warrouw yang dibentuk pada bulan Oktober 1947, Anak Agung kembali terpilih sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri merangkap Wakil Perdana Menteri. Ketika kabinet Warrouw jatuh pada tanggal 9 Desember 1947, Anak Agung mendapat kepercayaan untuk membentuk kabinet dari Presiden NIT.

Tanggal 15 Desember ia berhasil membentuk kabinetnya yang pertama, dimana ia menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Urusan Dalam Negeri. Jabatan ini ia pegang hingga tanggal 19 Desember 1948 saat Belanda melakukan aksi militernya ke Yogyakarta, ibukota Republik Indonesia. Akibat tindakan Belanda itu, maka ia mengundurkan diri sebagai protes terhadap tindakan Belanda tersebut.

Tanggal 31 Desember 1948, Anak Agung kembali diangkat Presiden NIT untuk membentuk kabinet dan ia berhasil membentuk kabinetnya yang ke dua pada tanggal 12 Januari 1949, dengan jabatan yang sama seperti pada kabinetnya yang pertama. Selama masa ini ia sibuk dengan perundingan-perundingan dengan wakil-wakil pemerintah RI, Pemerintah Belanda dan negara-negara bagian antara lain yaitu, Konperensi Antar Indonesia yang berhasil diselenggarakan atas prakarsa beliau. Konperensi ini merupakan konperensi pendahuluan sebelum dilakukannya Konperensi Meja Bundar (KMB).

Dalam rangka KMB Anak Agung terpilih sebagai pemimpin delegasi NIT, dimana dia ditunjuk sebagai anggota panitia pusat KMB. Ketika penyerahan kedaulatan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949, Anak Agung menjadi Wakil Ketua Panitia Persiapan Nasional yang bertugas mengadakan segala persiapan dalam rangka penyerahan kedaulatan. Sebelum itu, tanggal 17 Desember 1949 bersama Mohamad Hatta dia membentuk kabinet RIS yang pertama. Dalam kabinet di bawah pimpinan Mohammad Hatta ini, Anak Agung diangkat sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri. Karena pengangkatan itu ia-pun mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri NIT. Setelah RI kembali pada negara kesatuan dan Kabinet Hatta membubarkan diri pada tanggal 15 Agustus 1950, Anak Agung lebih sering disibukkan dengan tugas-tugasnya di luar negeri sebagai pegawai tinggi Departemen Luar Negeri, selain sebagai staf ahli Menteri Luar Negeri baik di Jakarta maupun di luar negeri sampai pensiun pada tahun 1980-an. Di tengah-tengah kesibukannya tersebut, Anak Agung berhasil menyelesaikan ujian doktoralnya di Universitas Indonesia dan meraih gelar doktornya di bidang sejarah di Universitas Utrecht pada tahun 1984.

ANGKATAN PEMUDA INDONESIA (API)

Adalah salah satu badan perjuangan yang paling awal berdiri sejak kemerdekaan. Didirikan oleh kelompok pemuda antara lain Chairul Saleh, Adam Malik, Urkam, Sukarni pada tanggal 1 September 1945 bermarkas di Menteng Raya 31 dengan tujuan mengkoordinasikan sejumlah kelompok pemuda lainnya didalam kota Jakarta.

Pembentukannya dilatarbelakangi oleh perbedaan pendapat di kalangan pemuda. Kelompok Chairul Saleh dan Sukarni yang menyerukan untuk memulai menyerang Jepang dan kelompok Eri Sudewo yang menganut cara yang lebih hati-hati mempersiapkan para mahasiswa bagi suatu perjuangan yang lama.

API yang segera mendapat banyak dukungan telah mendorong dan memelopori sejumlah tindakan sabotase dan mengambil alih dari tangan Jepang seperti kereta api, dan trem, telepon dan banyak gedung pemerintah atau swasta yang ditulis "milik Republik Indonesia". Pada tanggal 29 September 1945 API menerbitkan surat kabar gelap, namanya "*Berita Indonesia*".

ASRAMA FAKULTAS KEDOKTERAN PRAPATAN 10 JAKARTA

Adalah salah satu "gerakan bawah tanah" pada masa akhir pendudukan Jepang di Indonesia, asrama ini lebih merupakan tempat berdiskusi memperbincangkan masa depan bangsa. Para mahasiswa disini lebih condong berorientasi ke Barat daripada gerakan-gerakan bahwa tanah lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena lembaga pendidikan ini warisan dari zaman Belanda yang tidak banyak diubah oleh Jepang. Banyak dari penghuni asrama ini berada dibawah pengaruh Sutan Syahrir. Diantara pemuda-pemuda Fakultas Kedokteran yang terkemuka adalah Syarif Thayeb, Djohar Nur, Darwis dan Tadjuludin.

ASRAMA INDONESIA MERDEKA

Didirikan pada bulan Oktober 1944 di Kebon Sirih 80. Asrama ini disponsori oleh Laksmana Tadashi Maeda, kepala **Bukanfu** kantor penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat di Jakarta. Tujuan didirikan, sebagaimana diungkapkan oleh Maeda yang sekaligus pelindung asrama ini, adalah untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang cakap dari angkatan muda bagi masa depan Indonesia. Kelompok pertama kira-kira 30 orang lulus dalam bulan April 1945, sedang rombongan kedua berjumlah lebih besar kurang lebih 40 orang yang mulai menempuh latihan dalam bulan Mei 1945, akan tetapi kemudian dihentikan karena penyerahan Jepang kepada Sekutu.

ASRAMA ANGKATAN BARU INDONESIA

Bermarkas di Menteng Raya 31 Jakarta didirikan pada awal pendudukan Jepang dengan bantuan **Sendenbu** (departemen propaganda) yang dipakai oleh Hitoshi Shimizu, bertujuan menciptakan inti dari aktivitas-aktivitas pemuda yang setelah latihan pertama akan menularkan pengetahuannya kepada kader-kader didaerah. Latihan-latihan yang pokok berisi nasionalisme yang kuat dengan guru-guru yang diundang seperti Sukarno, Hatta, Yamin, Sunario, dan Amir Syarifuddin (sebelum penahanannya). Dua orang pemuda yang dipercaya oleh Shimizu adalah Chairul Saleh dan Sukarni, keduanya memangang kedudukan di **Sendenbu** sampai bulan Juni 1945.

Perbedaan ciri asrama ini dengan asrama Prapatan 10 adalah pertama, kebanyakan pemimpin kelompok Fakultas Kedokteran tidak aktif berpolitik dalam zaman kolonial Belanda, sementara anggota terkemuka asrama Menteng 31 telah terlibat dalam kegiatan nasionalisme anti Belanda. Kedua, komposisi keanggotaan Menteng 31 lebih beragam dari yang berlatar belakang pendidikan atas seperti Chairul Saleh, Sukarni, A.M. Hanafi dan Ismail Wijaya, sampai yang relatif rendah seperti Aidit, Lukman, dan Samsudin Tjan.

BANDUNG LAUTAN API

Pembumihangusan sebelah selatan kota Bandung yang dikenal dengan Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Pembakaran itu dilakukan oleh Tentara Republik Indonesia setelah dengan berat hati harus mematuhi perintah Pemerintah Republik Indonesia untuk mengosongkan kota tersebut. Tujuan pembakaran didorong adanya pandangan, daripada diduduki pasukan Sekutu lebih baik dihanguskan saja.

Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, pada bulan Oktober 1945, tentara Sekutu mulai memasuki kota Bandung. Pada waktu Sekutu mendarat di kota tersebut, para pemuda dan pejuang kota

Bandung sedang menghadapi pergulatan untuk melaksanakan pemindahan kekuasaan dan perebutan senjata serta peralatan dari tangan Jepang. Sementara itu tentara Sekutu, menuntut agar senjata-senjata yang berhasil diperoleh dari tangan tentara Jepang diserahkan pada mereka. Selain itu, tentara Sekutu juga menuntut pengosongan kota Bandung, dengan mengeluarkan ultimatum pada tanggal 21 November 1945, yang meminta agar kota Bandung bagian Utara segera dikosongkan pihak Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945. Tetapi oleh masyarakat tuntutan tersebut tidak diindahkan. Akibatnya sering terjadi insiden antara pasukan-pasukan Sekutu dengan pejuang Republik. Pada tanggal 23 Maret 1946, Tentara Sekutu sekali lagi menuntut agar kota Bandung dikosongkan. Namun bila sebelumnya mereka menuntut Bandung bagian Utara saja, dalam tuntutan yang kedua ini, Sekutu menuntut agar seluruh kota Bandung dikosongkan. Menanggapi tuntutan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta memerintahkan agar Tentara Republik Indonesia (TRI) mengosongkan kota Bandung. Sebaliknya Markas TRI di Yogyakarta menginstruksikan agar kota Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya TRI di Bandung mematuhi perintah yang diberikan Pemerintah RI di Jakarta untuk mengosongkan kota Bandung. Namun sebelum mereka meninggalkan kota Bandung, TRI dan pejuang-pejuang Republik melakukan serangan umum ke arah kedudukan-kedudukan Sekutu, di samping membakar kota Bandung bagian Selatan.

BARISAN BANTENG

Cikal bakal organisasi paramiliter ini adalah Barisan Pelopor atau *Suishintai* yang didirikan pada tanggal 1 Nopember 1944 oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Barisan Pelopor dibentuk berdasarkan hasil sidang ke-3 Badan penasehat Pusat (*Chuo Sangi In*) pertengahan tahun 1944, sebagai wadah yang dapat mempersatukan seluruh penduduk demi kemenangan akhir dalam rangka Perang Asia Timur Raya yang dikobarkan Jepang menghadapi

Sekutu. Barisan Pelopor dipimpin oleh Ir. Sukarno dengan wakil-wakilnya R.P. Suroso, Otto Iskandardinata dan dr. Buntaran Martoatmojo. Selain mendapat latihan militer, anggota BP juga dilatih dalam cara menggerakkan massa, memperkuat pertahanan dan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. Setelah proklamasi kemerdekaan, di dalam sidangnya di Surakarta 14--15 Desember 1945, Barisan Pelopor dinyatakan berganti nama dengan *Barisan Banteng* dan berpusat di kota yang sama dr. Muwardi adalah pemimpin tertinggi *Barisan Banteng*.

BARISAN KEAMANAN RAKYAT (BKR)

Pembentukan BKR dilandaskan kepada hasil sidang PPKI (22 Agustus 1945) adalah cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Pembentukan BKR yang bukan tentara dimaksudkan oleh para pemimpin supaya tidak membangkitkan permusuhan dari kekuatan-kekuatan asing yang pada waktu itu ada di Indonesia. Itulah sebabnya BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (*BPKKP*) induk organisasi yang ditujukan untuk memelihara keselamatan masyarakat ke dalam BKR terhimpun bebas anggota-anggota *Peta*, *Heihi*, *Keisatsutai* (Polisi), *Seinendan*, *Kaibodan*, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu dibentuk pula BKR-Laut.

BEEL, L.J.M.

Louis Joseph Maria Beel, lahir di Reermond pada tahun 1902. Tamat sekolah menengah atas, dalam tahun 1920 dia magang di Sekretariat Kota Praja tempat tinggalnya di tahun 1924. Sementara itu dia kuliah pada Universitas katolik di Nijmegen dan mengikuti ujian doktoral pada tahun 1928, kemudian memperoleh gelar doktor bidang hukum pada tahun 1935. Pada tanggal 23 Pebruari 1945 Beel

diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri setelah menjabat sebagai penasihat pemerintah untuk urusan sosial. Akan tetapi dalam jabatannya ini Beel tidak pernah ikut campur mengurus masalah Indonesia, kecuali pada sidang-sidang Dewan Menteri. Baru ketika pada tanggal 3 Juli 1946 dia diangkat sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Urusan Dalam Negeri. Beel mulai ikut terlibat dalam masalah Indonesia, terutama ketika pada bulan Mei 1947 bersama Menteri Jonkman datang ke Jakarta dalam kaitannya dengan rencana Belanda untuk mengakhiri Persetujuan Linggarjati. Ketika akhirnya Belanda melakukan agresi militernya yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947, Beel merupakan orang yang mendukung aksi militer tersebut. Pada bulan September 1947 Beel melepaskan jabatannya sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri Belanda dan kini merangkap Menteri Urusan Umum yang memberi kebebasan pada Beel untuk mengurus masalah Indonesia. Setelah beberapa waktu menjabat Perdana Menteri sekaligus Menteri Urusan Umum pada tanggal 3 Nopember 1948, Beel diangkat sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia. Ketika Belanda melakukan aksi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948, menyambut Dunia Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda menghentikan aksinya dan kembali mengadakan perundingan. Menghadapi hal ini, Beel mengajukan usul yang kemudian dikenal dengan "Rencana Beel". Dalam usulnya antara lain Beel mengusulkan mempercepat penyerahan kedaulatan Belanda atas Indonesia kepada suatu pemerintahan federal yang mewakili seluruh Indonesia dan mengadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag selekas-lekasnya, yaitu sedapat dapatnya pada tanggal 12 Maret 1949. Rancangan Beel inilah yang membawa kepada persetujuan Roem Rojen pada tanggal 7 Mei 1949. Tetapi Beel tidak setuju dengan persetujuan Roem-Rojen itu. Dia sangat keberatan bila Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Akhirnya pada tanggal 11 Mei 1949 Beel mengundurkan diri dari jabatan Wakil Tinggi Mahkota Belanda Indonesia. Setelah itu dia menjadi guru besar hukum pemerintahan di Nijmegen. Tahun 1952 ia kembali ke dunia pemerintahan hingga tahun 1966, antara lain sebagai Wakil Presiden Dewan Negara (*Raad van State*).

BEUREUEH, TEUNGKU MOHAMMAD DAUD

Teungku Mohammad Daud Beureuh atau yang mana dikenal dengan Daud Beureuh lahir pada tahun 1899 di Kampung Beureueh, Keumangam, Aceh Pidie. Dia mendapatkan pelajaran tentang Agama Islam secara tradisional pada perguruan-perguruan (*dayah*) yang berlainan di Pidie. Pada tahun 1920-an, Daun Beureueh meninggalkan tempat kelahirannya karena selisih paham dengan uleebalang (kaum bangsawan) setempat dan berturut-turut mengajar di Tapaktuan dan Lhok Seumawe. Pada masa itu Daud Beureueh dikenal sebagai organisator yang ulet dan ahli dalam mengatasi pertentangan antara kaum muda dan kaum tua. Pada tanggal 6 Maret 1930, dengan mendapat dukungan dari banyak cendekiawan ilmu agama, Daud Beureueh mendirikan Perguruan Islam Djamiatul Dinijah. Dengan perguruan Islamnya ini, maka Daud Beureueh termasuk salah seorang yang berjuang untuk kebangkitan kembali Islam dalam tradisinya yang asli. Pada tahun 1939, Daud Beureueh diangkat sebagai ketua dari Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang dibentuk pada tahun itu juga. Organisasi ini lebih bersifat gerakan rakyat Aceh yang menjadi pendorong perjuangan selama pendudukan Jepang dan masa revolusi. Pada masa revolusi sebagai pemimpin PUSA, Daud Beureueh mendorong kaum muda Aceh untuk melawan Belanda. Pada tanggal 15 Oktober 1945, dia bersama empat ulama terkenal lainnya, Teungku Ahmad Hasballah, Teungku Ja'far Sidik dan Teungku Hasan menandatangani pernyataan yang menyerukan kepada rakyat Aceh untuk bersatu melawan Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Dibawah instruktur Daud Beureueh para pemimpin PUSA dalam melawan kaum uleebalang yang pro-Belanda. Hal ini dikenal dengan Peristiwa Cumbok. Pada bulan Juli 1947, Daud Beureueh oleh Pemerintah Pusat diangkat sebagai Gubernur Militer Daerah Aceh, Langsat dan Gayo. Setelah pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, Daud Beureueh yang semula mendukung pemerintah merasa tidak puas terhadap Keputusan Pemerintah pada tahun 1950 yang menetapkan status Aceh menjadi Karesidenan dibawah Propinsi Sumatera Timur. Teungku Mohammad Daud Beureueh pada tanggal 21 September 1953

menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Negera Islam Indonesia di bawah Imam Kartosuwirjo. Pemberontakan berakhir pada tahun 1962 setelah dilakukan musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat, dan Teungku Mohammad Beureueh tetap dianggap sebagai pahlawan karena perjuangannya pada masa pendudukan Jepang dan revolusi.

BIJEENKOMST FEDERAAL OVERLEG (BFO)

Sebuah komite yang pembentukannya disponsori oleh Belanda terdiri dari wakil-wakil berbagai kesatuan-kesatuan negara bagian yang berada wilayah Indonesia periode 1948-1949. Tiap mempunyai satu suara dalam keputusan-keputusan yang dikeluarkan BFO. Oleh sebab itu misalnya Riau yang berpenduduk kurang lebih 100.000 mempunyai suara yang sama dengan NIT atau Pasundan yang berpenduduk lebih dari 10.000.000. Dengan demikian lima daerah istimewa di Kalimantan dihubungkan dengan Riau, Bangka dan Biliton telah membentuk mayoritas berjumlah 8 didalam BFO, meskipun jumlah penduduk mereka hanya 300.000.

Empat dari lima daerah istimewa di Kalimantan ditambah Riau, Biliton, Sumatera Timur dan Sumatera Selatan dalam kenyataan membentuk kelompok mayoritas sayap kiri didalam BFO, kelompok yang paling dekat dengan Belanda. Sisanya, yang paling kuat pro Republik adalah Pasundan dan Madura.

CRITCHLEY, THOMAS

Pengganti Richard Kirby dalam KTN yang kemudian diganti menjadi United National Commission for Indonesia (UNCI) ini lahir di Victoria, Australia pada tanggal 27 Januari 1916. Dia pertamakali terlibat dalam masalah Indonesia-Belanda pada Konperensi Meja

Bundar (KMB) di Den Haag. Cristchley tiba di Den Haag pada tanggal 15 Agustus 1949. Pada tanggal 13 Oktober 1949 di Den Haag, Cristchley dalam kertas kerja yang diungkapkannya kepada wakil Amerika dan Belgia di UNCI, mengajukan dua usul dalam resolusi masalah Irian Barat kepada dua pihak yang bersengketa. Usul pertama Cristchley adalah agar Irian Barat ditempatkan di bawah perwalian internasional, dengan Belanda, Indonesia atau PBB sebagai pihak pelaksana. Usul kedua adalah, agar isu itu ditunda dan Irian Barat secara khusus tidak diikutsertakan dalam penyerahan kedaulatan. Usul Critchley ini kemudian menjadi salah satu keputusan KMB bahwa masalah Irian Barat akan diputuskan kemudian.

DAUD, TEUKU MOHAMMAD

Uleebalang pemimpin Perang Cumbok, Teuku Mohammad Daud Cumbok, yang lebih dikenal dengan sebutan Daud Cumbok, lahir pada tahun 1910 di Cumbok, Aceh Pidie. Dia dikenal sebagai orang yang sangat berani, berkepribadian keras, gesit, penuh semangat, pantang menyerah dan bersifat menguasai. M. Daud memperoleh pendidikan ELS di Sigli. Pada tahun 1931 setelah ayahnya meninggal dunia, Daud Cumbok diangkat menjadi Uleebalang Cumbok, tempat terpenting di Lam Meulo. Sebagai seorang uleebalang yang sejak masa kolonial Belanda dekat dengan Belanda, dia lebih bersifat Eropa dari uleebalang lainnya. Dia termasuk salah seorang uleebalang yang kaya dan paling giat dalam membuka perkebunan kopi di daerah Tangse pada tahun 1930-an. Dilatar belakangi pengaruh pro Belandanya yang keras, Lam Meulo menjadi satu-satunya kecamatan di daerah Aceh yang berhasil mendirikan *Landwacht*, pasukan pembantu yang terdiri dari anak-anak daerah Lam Meulo dalam jajaran pertahanan Belanda pada tahun 1941-1942. Menjelang mundurnya Belanda dan masuknya Jepang pada tahun 1942, Belanda telah lebih dahulu mempercayakan seluruh Kecamatan Lam Meulo kepada Daud Cumbok, dan setelah Jepang masuk dia berhasil mempertahankan kedudukannya. Teuku

Mohammad Daud Cumbok diangkat menjadi *Guncho* di Lam Meulo. Ketika berita proklamasi sampai di Aceh pada tahun 1945, Daud Cumbok merupakan uleebalang pertama yang menyatakan tidak mendukung Republik Indonesia. Dia juga menjadi uleebalang pertama yang mengirim utusan kepada pejabat-pejabat Belanda yang ditawan Jepang untuk menyatakan harapan supaya mereka selamat dan cepat kembali ke Aceh. Kemudian bersama uleebalang-uleebalang lain, Daud Cumbok memimpin pertempuran dengan ulama-ulama, pembela rakyat Indonesia dan masyarakat Aceh yang pro republik, yang dikenal dengan "Peristiwa Cumbok" pada 10 Desember 1945 hingga 16 Januari 1946. Ia melakukan berbagai kekacauan dan serangkaian pembunuhan. Akibat peristiwa ini, akhirnya Teuku Daud Cumbok ditangkap setelah sempat melarikan diri bersama pengikut-pengikutnya pada tanggal 16 Januari 1946. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, atas keputusan pengadilan Daud Cumbok dihukum mati tahun 1946.

FRONT DEMOKRASI RAKYAT (FDR)

Berdiri pada tanggal 25 Februari 1948, FDR merupakan fusi dari 3 partai yang berdasarkan Marxisme yaitu Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis yang merupakan gabungan Partai Rakyat Sosialis dan Partai Sosialis Indonesia, serta Partai Buruh Indonesia. FDR dipimpin oleh Amir Syarifuddin merupakan wadah kekuatan politik yang beroposisi terhadap pemerintah Republik Indonesia. Musso, tokoh PKI yang sejak tahun 1935 meninggalkan Indonesia, mengambil alih pimpinan FDR pada awal bulan September 1948.

FROM BULLETS TO BALLOTS

"Dari peluru ke kotak suara" adalah ucapan yang cukup terkenal dilontarkan Dr Frank Graham yang dapat menenangkan kegelisahan pemimpin-pemimpin Indonesia ketika mereka menolak menanda-

tangani perundingan Renville. Graham meyakinkan pihak Indonesia dengan menambahkan 6 pasal tambahan, dalam isi perundingan itu yang akan menggantikan perjuangan dari garis demokrasi militer sementara, yang segera menghilang menjadi garis politik demokratis. Dalam prinsip 6 pasal tambahan itu dikatakan bahwa didalam masa peralihan tidak kurang dari 6 bulan dan tidak lebih dari 1 tahun sejak penandatanganan perundingan *plebesit* (penentuan suara) untuk menentukan apakah penduduk di berbagai tempat di Jawa, Madura dan Sumatra (dalam wilayah negara federal) berkeinginan menjadi bagian RI atau menjadi negara-negara yang berdiri di lingkungan "RIS". Komite tiga negara akan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan *plebesit* jika diminta oleh salah satu pihak (Indonesia atau Belanda).

GARIS VAN MOOK

Imajinasi H.J. Van Mook yang menghubungkan pucuk-pucuk terdepan pasukan Belanda yang menyerbu ke daerah-daerah Republik Indonesia dalam Aksi Militer Pertama (mulai dilancarkan pada tanggal 21 Juli) yang dihentikan oleh perintah gencatan senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 4 Agustus 1947.

GERAKAN PEMUDA BENGKEL KERETA API TEGAL

Suatu bentuk perlawanan buruh bengkel kereta api terhadap Jepang yang masih mempertahankan kekuasaannya. Peristiwa dimulai setelah tiga minggu Proklamasi Kemerdekaan tanggal 6 September 1945, bendera Jepang *hinomaru* masih berkibar di halaman bengkel kereta api. Melihat hal tersebut, seorang pemuda kereta api, S. Rachmat dengan berani mengibarkan Sang Saka Merah Putih dan menurunkan *Hinomaru* di bengkel itu.

Akibatnya timbul perdepatan yang sengit dengan kepala bengkel yang dijabat orang Jepang, sehingga dengan terpaksa Sang Saka Merah Putih diturunkan kembali. Peristiwa tersebut menimbulkan rasa tidak puas pemuda bengkel. Karena itu pada tanggal 10 September 1945, Mohammad Yunus dan Tjiptoprojo kembali menaikkan bendera Merah Putih dengan kawalan berpuluh-puluh pemuda yang bersenjatakan kelewang, tanpa menghiraukan perintah Kempetai yang memerintahkan menurunkan Sang Saka Merah Putih. Tindakan pemuda-pemuda tersebut tidak hanya sampai disitu saja, tetapi pada tanggal 11 September para pemuda bengkel mengadakan demonstrasi pengibaran Merah Putih di kantor-kantor pemerintah di Tegal. Pengibaran pertama dilakukan di pabrik Textil Tegal disusul dengan kantor Perikanan dan lain-lain. Dengan adanya demonstrasi tersebut, komandan Kempetai mengepung kantor KNI Tegal dengan senjata mitraliur. Dalam peristiwa tersebut pemuda Yunus berhasil mempertemukan Komandan Kempetai tersebut dengan ketua KNI Tegal, Tjitrosatmoko untuk berunding. Akan tetapi ketika kantor KNI telah penuh dengan pemuda, Kempetai melarikan diri sambil melambaikan tangan dan mengucapkan kata-kata "Merdeka" terhadap para pemuda. Sejak kejadian itu rakyat makin berani bertindak. Dua orang Jepang pimpinan Bank Exim diseret dari rumahnya di jalan Gilitugel beramai-ramai, lalu dibunuh tanpa ampun. Sejak itu pula orang Jepang tak berani lagi berjalan sendiri.

HAMID ALGADRIE II, SULTAN

Mantan ketua *Bijeenkomst voor Federal overleg* (BFO) ini lahir di Pasuruan pada tanggal 10 Juli 1912. Memperoleh pendidikan dasar di ELS, kemudian melanjutkan ke MULO, AMS dan tamat Rechtshoge School (RHS). Sejak muda Sultan Hamid II telah aktif dalam berbagai organisasi. Pada masa pergerakan selain menjadi anggota *Jong Islamieten Bond* pada tahun 1930, ia juga menjadi anggota Partai Arab Indonesia (PAI). Pada tahun 1936, sejak

menjadi mahasiswa RHS, dia terpilih menjadi ketua PAI Cabang Jakarta, dan pada tahun 1942 terpilih menjadi Ketua Pengurus Besar PAI Indonesia. Antara tahun 1936-1942 Sultan Hamid II juga terpilih menjadi Wakil PAI dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI), dimana ia juga turut mendukung Petisi Sutardjo tentang "Indonesia Berparlemen". Sementara itu ia juga sibuk sebagai Redaktur Majalah USI Blad (majalah mahasiswa Indonesia) dan INSAF, sebuah majalah berhaluan politik.

Pada masa Pendudukan Jepang, Sultan Hamid aktif sebagai anggota kader gerakan anti Jepang yang dipimpin Amir Syarifuddin. Setelah kemerdekaan diproklamkan, dia diangkat menjadi salah seorang anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan anggota Badan Pekerja KNIP. Pada bulan Mei 1947, dia terpilih sebagai Kepala Daerah Istimewa Borneo Barat, salah satu negara yang berhasil dibentuk Van Mook dalam usahanya memecah belah RI. Pada pembentukan BFO, suatu badan musyawarah negara-negara federal pada tanggal 29 Mei 1948, sebagai ketua dipilih Sultan Hamid II dari Pontianak. Oleh Van Mook badan ini dimaksudkan menjadi badan federasi dimana nantinya diharapkan RI juga akan bergabung. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Menjelang Konperensi Meja Bundar (KMB), antara BFO dan RI mengadakan Konperensi yang dikenal dengan Konperensi Antar Indonesia. Dari konperensi ini, BFO memutuskan untuk mendukung tuntutan Indonesia atas penyerahan kedaulatan tanpa ada ikatan politik dan ekonomi. Selanjutnya dalam kedudukannya sebagai ketua BFO, Sultan Hamid II diangkat sebagai ketua delegasi BFO pada KMB yang berlangsung pada 23 Agustus -- 2 Nopember 1949.

Setelah pengakuan kedaulatan Sultan Hamid II terpilih menjadi Anggota DPR - RIS. Pada masa ini, dia bersama kabinet Westerling menjadi otak perencana penangkapan seluruh menteri Kabinet RIS dan Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX pada awal tahun 1950, yang berhasil digagalkan dan dia ditangkap. Setelah kembali pada negara kesatuan, Sultan Hamid beberapa kali terpilih menjadi anggota DPR hingga Pemilihan

Umum tahun 1955. Setelah itu beliau memusatkan diri pada kegiatan sosial.

HASAN, TEUKU MOEHAMMAD

Mister Teuku Mochamamd Hasan dilahirkan pada tanggal 4 April 1906 di Gampong Peukan Sot, Aceh. Dia merupakan tokoh politik dan pejuang pada masa revolusi di Sumatera. Dua tahun mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat (Volks School) 1915 - 1917. Teuku Mochammad Hasan pindah ke Europeesche Lagere School di Sigli. Tetapi karena pada waktu belum mengerti bahasa Belanda, Teuku Mochammad Hasan yang di Volks School telah duduk di kelas dua, ditempatkan di kelas nol sebagai persiapan untuk dapat mengikuti pelajaran di kelas dua. Tamat ELS pada pertengahan tahun 1924, ia masuk Sekolah Teknik (Koningen Wilhelmina School) di Jakarta hingga selesai pada tahun 1928.

Sementara itu dia juga mengikuti ujian MULO dan AMS pada tahun 1927 dan 1929, sehingga dalam waktu yang hampir bersamaan Teuku Mochammad Hasan memperoleh tiga ijazah. Setelah itu meneruskan studi pada Rechiothoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Batavia hingga Sarjana Muda (1931) dan pada Sekolah Tinggi Hukum Rijks Universiteit di Leiden sampai memperoleh gelar MR pada tahun 1933. Selama berada di negeri Belanda Teuku Mochammad Hasan aktif sebagai anggota Perhimpunan Indonesia (PI) dengan turut serta dalam rapat-rapat mengenai anti kolonialisme. Kembali ke Indonesia pada tahun 1934, kemudian dia bekerja di Departemen P dan K dan pindah pada kantor Voor Bestuurschevooming pada tahun 1936. Selama masa pergerakan Teuku Mochammad Hasan tidak aktif dalam kegiatan politik, karena kedudukannya sebagai pegawai negeri. Pada masa pendudukan Jepang, Mochammad Hasan bekerja sebagai penasihat Syu Chokan Sumatera Timur. Selain itu dia juga diangkat sebagai Ketua Koperasi Ladang Pegawai Negeri, Kepala Kantor Kemakmuran Rakyat (Kosei Kyoku) dan Kantor Permohonan Rakyat kepada Gunseibu

(Tinzukyoku). Menjelang proklamasi kemerdekaan Mochammad Hasan bersama dengan Dr. M. Amir dan Mr. M. Abbas diangkat menjadi anggota PPKI mewakili Sumatera, karena pengetahuannya yang baik tentang agama Islam dan ketaatannya beribadah. Mochammad Hasan bersama Ki Bagus Hadikusumo diminta pertimbangannya tentang kata-kata yang prinsip dan sangat peka bagi kerukunan bangsa Indonesia, yang terdapat dalam Pembukaan Pasal 6 ayat 1 dan pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus. T. Mochammad Hasan diminta Hatta untuk menyakinkan Ki Bagus Hadikusumo tentang perubahan-perubahan yang harus dilakukan, sehingga akhirnya semua sependapat dan menyetujui perubahan yang diajukan Hatta. Dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1944, T. Mochammad Hasan dicalonkan sebagai Gubernur Sumatera dan tanggal 22 Agustus 1945 diangkat sebagai Gubernur Sumatera. Dalam tugasnya sebagai gubernur ini, ia menyampaikan berita proklamasi dan membangkitkan semangat rakyat Sumatera untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh. Ketika Belanda melakukan Agresi Militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 dan dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia dan Mochammad Hasan diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama. Setelah kedaulatan RI tercapai Mr. T. Mochammad Hasan diangkat sebagai Wakil Ketua Senat Republik Indonesia Serikat (RIS), di samping menjadi anggota Panitia bersama RIS - RI untuk menyusun Naskah Undang-undang Dasar Sementara (UUDS). Setelah terbentuk Negara Kesatuan RI pada tahun 1950, dia ditunjuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara RI (DPRS - RI) sampai tahun 1955. Sementara itu Mochammad Hasan tetap aktif di dalam pemerintah sampai tahun 60-an. Selanjutnya dia aktif pada bidang sosial yang telah digemari sebelumnya.

HASJMI, ALI

Tokoh ulama dan pejuang kemerdekaan Aceh. Ali Hasjmi lahir di Aceh Besar pada tahun 1917. Sebagaimana umumnya putra-putra

Aceh. Ali Hasjmi belajar di beberapa madrasah di Aceh sebelum memasuki Sekolah Menengah Islam di Sumatera Barat. Pada waktu belajar di Sumatera Barat ini, dia terpilih menjadi Ketua Persatuan Pelajar Aceh. Tamat Sekolah Menengah Islam di Sumatera Barat, Ali Hasjmi kembali ke Aceh pada tahun 1939 dan mengajar pada madrasah milik Teungku Abdul Wahab di Seulimeum.

Sementara itu ia mulai aktif menjadi pemimpin organisasi kepanduan pemuda Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), suatu organisasi para ulama yang dibentuk pada bulan Mei 1939. PUSA dapat dikatakan sebagai penggerak perjuangan di Aceh, dan pemuda PUSA dapat diibaratkan roda perjuangan di Aceh, baik dimasa pendudukan Jepang maupun masa revolusi kemerdekaan.

Dalam kedudukannya sebagai anggota PUSA, Ali Hasjmi terlibat dalam pemberontakan di Seulimeum sebelum kedatangan Jepang. Ketika Jepang menduduki Indonesia Ali bekerja sebagai redaksi harian *Aceh Shinbun* sampai Jepang angkat kaki dari bumi Indonesia. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 yang disusul dengan kedatangan Tentara Sekutu yang membonceng NICA, Ali Hasjmi segera membentuk badan perjuangan guna mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 6 Oktober 1945, Ali Hasjmi mendirikan Badan Pemuda Indonesia yang dalam beberapa hari saja diubah menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) di bawah pimpinan dia sendiri. Dengan PRI-nya yang kemudian diubah lagi menjadi Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) pada bulan Desember 1945 dan simpatisan PUSA, Ali Hasjmi memperjuangkan kemerdekaan di Aceh. Mereka menaikan bendera Merah Putih dan melakukan berbagai pertempuran melawan uleebalang-uleebalang yang menjadi kaki tangan Belanda. Bersama Daud Beureueh, Ismail Jacobs dan T.M. Amin, Ali Hasjmi yang kemudian hari giat dalam tulis menulis, menjadi tokoh yang selalu membangkitkan semangat rakyat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

HATTA, MOHAMMAD

Proklamator dan Wakil Presiden Indonesia pertama lahir di Batuampar Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902 dengan

nama Mohammad Attar. Tamat ELS pada tahun 1916, Mohammad Attar yang kemudian dipanggil dengan nama sayang Khatta dan lama kelamaan menjadi Hatta melanjutkan ke MULO dan tamat pada tahun 1919. Hatta melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Dagang di Jakarta dan tamat pada tahun 1921. Tamat Sekolah Dagang kemudian Hatta berangkat ke Rotterdam, Belanda untuk belajar di *Nederland Handelshogeschool*, tamat dengan gelar "Drs" dalam ilmu dagang pada tahun 1932.

Selama sekolah di Belanda ini, Hatta yang sejak di MULO Padang sudah giat berkecimpung dalam berbagai organisasi pergerakan seperti Jong Sumateranen Bond dan Pedoman Besar JSB di Jakarta, aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia (PI). Pada tahun 1921-1925 Mohammad Hatta terpilih menjadi bendahara PI sekaligus duduk dalam redaksi majalah organisasi tersebut. Tahun 1925-1930 dia diangkat sebagai ketua organisasi PI. Selain giat di PI, selama di Belanda Hatta juga aktif dalam berbagai kegiatan internasional yang bertujuan untuk melawan imperialisme dan penjajahan. Selama tahun 1927-1931, Hatta menjadi anggota pucuk pimpinan Liga melawan imperialisme dan penjajahan, dan turut dalam Kongres Democratique Internasional IV di Beirville, Perancis. Oleh karena kegiatan-kegiatannya tersebut, sekembalinya di Belanda dia bersama tiga tokoh pergerakan nasional lainnya ditahan oleh Belanda.

Mendirikan dan kembali ke Indonesia, pada tahun 1932-1934 Hatta diangkat menjadi ketua Pendidikan Nasional Indonesia. Belum lama tinggal di Indonesia, pada tahun 1934 Mohammad Hatta ditangkap dan dipenjara Belanda. Sejak itu hingga kedatangan Jepang pada tahun 1942 hidup Mohammad Hatta berpindah-pindah dari tempat satu pembuangan ke pembuangan lainnya, yaitu Boven Digul, Banda Naera dan kemudian Sukabumi, bulan April 1942 Hatta diangkat sebagai kepala kantor Penasehat pada Pemerintah Balatentara *Dai Nippon*. Ketika dibentuk BPUPKI pada bulan Mei 1945, Mohammad Hatta diangkat menjadi salah seorang anggota badan tersebut. Begitu pula ketika badan tersebut diganti menjadi PPKI, Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil ketua badan ini.

Ketika terjadi peristiwa Rengasdengklok pada saat menjelang proklamasi, Hatta bersama Sukarno turut dibawa para pemuda ke Rengasdengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bersama Sukarno dia menjadi wakil bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi, pada tanggal 18 Agustus, Mohammad Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden I RI. Pada waktu Belanda melakukan agresi militernya yang ke II, Hatta bersama Sukarno dan sejumlah pejabat negara ditangkap dan diasingkan ke Bangka.

Setelah dibebaskan pada pertengahan tahun 1949, Mohammad Hatta terpilih sebagai Ketua Delegasi RI dalam Konferensi Meja Bundar dan menerima penyerahan kedaulatan RI dari Ratu Belanda, Yuliana, pada tanggal 27 Desember 1949 yang diikuti dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Pada masa pemerintahan RIS Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS sekaligus menteri luar negeri. Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Indonesia, Mohammad Hatta dipilih sebagai wakil presiden. Pada tahun 1956 dia mengundurkan diri sebagai wakil presiden, selanjutnya kegiatannya lebih banyak diisi dengan kegiatan tulis menulis di samping mengajar pada beberapa universitas negeri yang digelutinya hingga tahun 1971. Pada tanggal 14 Maret 1980 Mohammad Hatta meninggal dunia di Jakarta.

INSIDEN MERAH PUTIH DI HOTEL TANAKA

Keberhasilan seluruh pegawai Magelang mengambil kekuasaan dari tangan Jepang atas daerah Magelang ternyata tidak menghentikan kegiatan Tentara Jepang di daerah itu. Pada saat itu Tentara Jepang terus aktif bekerja, sehingga menimbulkan masalah baru yang dikenal dengan Insiden Merah Putih di Hotel Tanaka. Insiden dimulai pada tanggal 23 September 1945, dimana pada tanggal tersebut para pemuda mengadakan rapat di markas pemuda di Jalan Poncol. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengadakan aksi penempelan plakat dan Merah Putih di seluruh Magelang. Maka

keesokan harinya (tanggal 24 September 1945) seluruh kota Magelang telah penuh dengan plakat dan Merah Putih termasuk markas Jepang dan hotel-hotel. Pada pukul 12.00 siang harinya seorang prajurit Jepang menyobek plakat-palakat dan Merah Putih yang terpancang di Hotel Tanaka. Perbuatan ini dilihat pemuda-pemuda yang sedang lewat, sehingga menimbulkan pertengkaran mulut diantara pemuda dan prajurit tersebut. Dalam waktu singkat datang berkumpul para pemuda di tempat kejadian. Para pemuda menuntut agar prajurit yang menyobek Merah Putih dihukum karena telah menghina bangsa Indonesia. Untuk mengatasi keadaan ini, pasukan polisi didatangkan ke tempat itu untuk mengawal perundingan, tetapi perundingan tidak menghasilkan keputusan apa-apa, sehingga kemudian diputuskan untuk kembali mengadakan perundingan di Markas Kenpetai di Jalan Tidar, Magelang.

JAMBEK, DAHLAN

Pendiri Badan Keamanan Rakyat (BKR), pejuang dan tokoh penting pada masa Perang Kemerdekaan di Sumatera Barat, Dahlan Jambek, lahir pada tahun 1917 dari ayah seorang tokoh ulama modernis di Sumatera Barat, Syekh Jamil Jambek. Mengawali sekolah di Sumatera Barat, tetapi oleh ayahnya kemudian disekolahkan di Sekolah Kristen di Jakarta. Menjelang pendaratan Jepang pada tahun 1942, Dahlan Jambek kembali ke kampung. Selama masa pendudukan Jepang ini, ia mempunyai hubungan yang baik sekali dengan Jepang. Pada masa ini selain menjadi anggota *Giyugun* (pasukan sukarela bentukan Jepang) Sumatera, dia juga bertanggung jawab atas latihan para *Seinendan*.

Ketika akhirnya Jepang menampakan tanda-tanda kekalahan dan proklamasi kemerdekaan dinyatakan oleh Ir. Sukarno, berita proklamasi ini segera menyebar di seluruh daerah di Indonesia termasuk Sumatera Barat. Setelah berita proklamasi sampai ke Sumatera Barat, pada bulan Agustus 1945 Dahlan Jambek di

Bukittinggi segera mengorganisir opsir-opssir dan para prajurit *Giyugun* menjadi BKR, yang akan menjadi dasar Angkatan Perang Republik Indonesia di wilayah tersebut. Kemudian Dahlan Jambek diangkat menjadi Panglima Divisi III (Banteng) Tentara Republik Indonesia (TRI) yang pertama. Divisi III Banteng merupakan salah satu dari 6 buah TRI di Sumatera yang bertanggungjawab atas Sumatera Barat dan Riau. Dalam kedudukannya sebagai Panglima Divisi III, pada tanggal 13 April 1946, empat hari sebelum kedatangan delegasi pemerintah pusat yang dipimpin Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin di Bukittinggi, Panglima Dahlan Jambek memimpin TRI untuk menyerang basis-basis Gerakan Baso, suatu gerakan yang anti pemerintah. Panglima Dahlan Jambek bersama pasukannya berhasil memukul mundur gerakan tersebut sehari sebelum Amir Syarifuddin tiba di Bukittinggi. Empat bulan kemudian setelah peristiwa itu, pada bulan Agustus 1946, Dahlan Jambek diangkat menjadi Komandan Tentara Se-Sumatera. Dahlan Jambek terus memimpin perjuangan di Sumatera untuk mempertahankan Kemerdekaan RI.

KARTAWIDJAJA, DJUANDA

Lahir pada tanggal 14 Januari 1911 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Usai menamatkan ELS pada tahun 1924, dia melanjutkan pendidikan HBS di Bandung dan tamat pada tahun 1929. Tamat HBS, Djuanda meneruskan pelajaran di *Technische Hogeschool* jurusan sipil yang berhasil diselesaikannya pada tahun 1933 dengan memperoleh gelar "Ir". Lulus THS Djuanda berangkat ke Jakarta dan bekerja sebagai direktur AMS dan Kweek School Muhammadiyah.

Selama masa ini, Djuanda tidak pernah terlibat dengan kegiatan-kegiatan organisasi. Baru setelah di Jakarta, Djuanda bergabung dengan organisasi Paguyuban Pasundan. Tahun 1936 Djuanda meletakan jabatannya sebagai direktur Sekolah

Muhammadiyah, ia diangkat menjadi insinyur pada Provinciale Waterstaat (*Jawatan Pengairan Propinsi Jawa Barat*), Departement Verkeer en Waterstaat (*Departemen Perhubungan dan Pengairan*). Pada jaman pendudukan Jepang ia tetap bekerja di jawatan ini. Setelah proklamasi, pada bulan Januari 1946, Ir. Djuanda diangkat menjadi Kepala Jawatan Kereta Api Seluruh Indonesia. Belum lama memangku jabatan ini, pada bulan Maret 1946 dia merangkap menjadi menteri muda Kabinet Syahrir II. Ketika Kabinet Syahrir II diganti dengan Kabinet Syahrir III, Ir. Djuanda diangkat menjadi menteri perhubungan pada tanggal 20 Oktober 1946 yang terus dijabatnya sampai 4 Agustus 1948. Sementara itu Belanda terus melakukan serangan-serangan terhadap RI dan perundingan-perundingan untuk menyelesaikan pertikaian terus dilakukan.

Pada waktu dilakukan perundingan tentang " Persetujuan Renville " di Kaliurang, Ir. Djuanda turut menjadi anggota delegasi RI sebagai ketua Komisi Ekonomi dan Keuangan, tetapi perundingan ini mengalami kegagalan dan Belanda melakukan agresi militernya yang ke II. Ketika akhirnya kembali dilakukan perundingan di Den Haag pada bulan Agustus 1949, Ir. Djuanda yang pada waktu itu menjadi menteri negara kembali terpilih sebagai ketua Komisi Ekonomi dan Keuangan dalam delegasi RI ke Konperensi Meja Bundar (KMB). Dalam perundingan ini, khususnya yang membicarakan masalah ekonomi yaitu mengenai maskapai Belanda KLM, Ir. Djuanda berhasil memaksa Belanda (KLM-Interinsular) bersedia menyerahkan semua harta miliknya kepada Indonesia.

Setelah pengakuan kedaulatan, Ir. Djuanda kembali terpilih sebagai Menteri Kemakmuran Kabinet RIS yang dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta. Setelah RIS kembali ke negara kesatuan, Ir. Djuanda kembali terpilih sebagai Menteri Perhubungan yang dijabatnya sampai 1 Agustus 1953. Setelah itu Ir. Djuanda terus terpilih sebagai menteri negara pada kabinet-kabinet selanjutnya, bahkan menjadi perdana menteri pada 9 April sampai 10 Juli 1959. Jabatan Menteri dipegangnya sampai tahun 1962 dan setahun

kemudian (6 Nopember 1963) Ir. H. Djuanda Kartawidjaja meninggal dunia.

KARTODIWIRJO, SUKARNI

Ketua Forum Partai Murba, tokoh angkatan 45 dan pejuang kemerdekaan, Sukarni dilahirkan di desa Garum Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juni 1916. Dia mendapat pendidikan di *HIS*, *MULO*, *Kweekschool* (berturut-turut SD, SMP, sekolah guru jaman Belanda dan Volks Universiteit (Universitas Rakyat). Sejak muda Sukarni telah aktif dalam organisasi dan politik.

Pada masa pergerakan ia aktif menjadi anggota perhimpunan pemuda pelajar Indonesia, di mana empat tahun kemudian (1934) ia terpilih sebagai Ketua Pengurus Besar Organisasi tersebut. Gerak-gerik Sukarni yang "Revolusioner" menyebabkan ia selalu di awasi pemerintah Belanda. Ketika Jepang masuk Indonesia pada tahun 1942 dan menduduki Indonesia, Sukarni bekerja pada Kantor Berita Antara yang kemudian di Jepangkan menjadi "Domei".

Namun dunia wartawan tidak lama digelutinya. Jiwa politik dan semangat perjuangannya menyebabkan dia meninggalkan kerja tersebut, dan aktif dalam kegiatan perjuangan pemuda-pemuda yang tergabung di asrama Menteng di Jakarta. Di asrama ini, Sukarni duduk sebagai Ketua asrama. Di tempat ini berkumpul tokoh-tokoh angkatan 45, pemuda-pemuda yang mempunyai semangat juang yang tinggi seperti Chairul Saleh dan Adam Malik. Menjelang proklamasi 17 Agustus 1945, nama Sukarni terkenal dalam peristiwa penculikan Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok, bersama-sama pemuda-pemuda lain, Sukarni mendesak Sukarno-Hatta cepat-cepat memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Namun usaha mereka gagal, Sukarno dan Hatta dikembalikan ke Jakarta, dan proklamasi di laksanakan keesokan harinya tanggal 17 Agustus 1945. Masih dalam bulan Agustus 1945, bersama kelompoknya di jalan Menteng 31, Sukarni membentuk Komite van Aksi, suatu komite yang beranggotakan badan-badan perjuangan, seperti Angkatan Pemuda Indonesia,

Barisan Rakyat Indonesia dan lain-lain. Kegiatan Komite ini yang penting dalam mengisi kemerdekaan antara lain, giat menyebarkan peristiwa dan arti proklamasi serta kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan rakyat setelah proklamasi.

Ketika semasa perang kemerdekaan ia, aktif menjadi anggota Badan Persatuan Perjuangan (1946) milik Tan Malaka. Ia berkenalan dengan Tan Malaka pada masa pendudukan Jepang melalui Partai Republik (PARI) yang dipimpin Tan Malaka. Dalam Persatuan Perjuangan Sukarni menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Perjuangan yang beroposisi terhadap Kabinet Syahrir, iapun terlibat dalam aksi Persatuan Perjuangan yang dikenal dengan Peristiwa 3 Juli. Akibatnya Sukarni masuk penjara pada tahun 1946. Semenjak keluar dari penjara pada tahun 1948, Sukarni menjabat sebagai Ketua Umum Partai Murba yang berdiri pada bulan November tahun 1948. Jabatan ini terus di pangkunya hingga akhir hayatnya pada tahun 1971. Pemegang Bintang Jasa Maha Putera, Sukarni Kartodiwirjo wafat pada 7 Mei 1971. Namun sebelum wafatnya, Sukarni sempat memegang berbagai jabatan pemerintah antara lain anggota Konstituante dalam pemilu 1955, Duta Besar, Anggota DPA dan lain-lain. Pada masa Demokrasi Terpimpin Sukarni sempat di tangkap dan di penjara, karena peringatan yang ia lakukan kepada Presiden Sukarno untuk hati-hati terhadap PKI pada tahun 1964. Akibatnya Partai Murba di bekukan dan dia di penjara. Baru pada tahun 1966 ia dibebaskan dan pembekuan Partai Murba dicabut oleh pemerintah pengganti Presiden Sukarno.

KARTOSUWIRJO, SEKARMADJI MARIDJAN

Anak seorang mantri kehutanan ini dilahirkan di Desa Sulang, Rembang, Jawa Tengah, pada bulan September 1902. Tamat HBS ia bekerja pada perusahaan minyak Belanda *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM Cepu). Tetapi karena kegiatannya di bidang politik, Kartosuwirjo dipecat dari BPM.

Dalam masa pergerakan nasional, Kartosuwirjo aktif sebagai anggota Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Namun karena Politik Hijrah total (1938) yang dilakukannya dalam tubuh PSII yang tidak disetujui partai, menyebabkan Kartosuwirjo dipecat dari partai (dari sini sudah terlihat sikap radikal beliau).

Setelah itu dia sempat mendirikan Panitia Pembela Kebenaran PSII pada tahun 1940, sebagai partai saingan. Selanjutnya setelah berakhirnya Perang Dunia II dan kemerdekaan Indonesia, Kartosuwirjo aktif sebagai Pengurus Besar Masyumi di samping menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tetapi kegiatannya dalam Masyumi tidak berlangsung lama. Setelah penandatanganan Persetujuan Renville, ia pun meninggalkan organisasi tersebut sekaligus meninggalkan RI. Kartosuwirjo yang menentang sama sekali Perjanjian Renville menolak penarikan pasukan-pasukannya ke belakang garis damarkasi, malahan mengumumkan pembentukan Tentara Islam Indonesia pada tahun 1948/DI TII, dan memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada tanggal 1 Agustus 1949. Gerombolan-gerombolan Islam ini melakukan teror di Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian Barat Daya.

Selama hampir tiga belas tahun mereka bertualang di hutan-hutan, melakukan serangkaian penggarongan, pembunuhan, pemerasan dan kekejaman-kekejaman lain, yang memakan korban jiwa tidak sedikit. Salah satu kegiatan mereka yaitu dibunuhnya 110 rakyat dalam Peristiwa Sukamaju, Garut pada tanggal 19 Juli 1961. Setelah tiga belas tahun mengembara, pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwirjo yang ditinggalkan oleh anak buahnya berhasil ditangkap di atas Gunung Geber di daerah Majalaya oleh Kesatuan-kesatuan Siliwangi dalam rangka Operasi Bratayuda. Kartosuwirjo ditangkap bersama keluarga dan pengawalnya setelah ditinggal anak buahnya. Selanjutnya Kartosuwirjo diajukan ke pengadilan pada tanggal 14 Agustus 1962, dan pada tanggal 16 Agustus 1962 ia dijatuhi hukuman mati.

KERR , SIR ARCHIBAL CLARK

Sir Archibal Clark Kerr adalah diplomat Inggris yang diutus Pemerintah Inggris sebagai duta istimewa ke Indonesia untuk menengahi sengketa Indonesia-Belanda. Dalam rangka tugasnya ini dia melakukan pendekatan dengan kedua pihak yang bersengketa agar mau berunding. Dengan perantara dan disaksikan Sir Archibal Clark Kerr kemudian diadakan perundingan di Hoge Veluwe, Den Haag, Belanda pada bulan April 1946.

KIRBY , HON. SIR RICHARD CLARENCE

Wakil Australia pada Komisi Jasa-Jasa Baik yang pada waktu perang kemerdekaan yang dikenal dengan Richard Kirby lahir di Queensland pada tanggal 22 September 1904. Dia adalah seorang hakim tamatan Sydney University. Hakim Kirby dikenal di Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia, ketika terjadi perselisihan Indonesia-Belanda. Untuk mengatasi perselisihan itu, atas usul Dewan Keamanan PBB dibentuk suatu Komisi Jasa-jasa Baik yang kemudian dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN). Satu negara diusulkan oleh Belanda, satu oleh Indonesia dan satu negara lain yang di setuju Belanda dan Indonesia. Indonesia kemudian menunjuk Australia sebagai wakil Indonesia dalam KTN, Belanda memilih Belgia dan Amerika menjadi negara ketiga yang disetujui Indonesia-Belanda. Delegasi Australia diwakili oleh Hakim Kirby, yang kemudian digantikan oleh Thomas K. Critchley.

KONFERENSI ANTAR INDONESIA

Diadakan di Yogyakarta pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 dan dilanjutkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus 1949. Konferensi yang dihadiri oleh Republik Indonesia dan Pertemuan Musyawarah Federal (BFO), diselenggarakan dalam

kaitannya dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Dari hasil Konferensi Antar Indonesia yang pertama dibawah pimpinan Wakil Presiden Mohammad Hatta, dihasilkan dua keputusan yaitu mengenai bentuk dan hal-hal lain yang berhubungan dengan ketatanegaraan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akan dibentuk dan mengenai bidang militer. Dalam bidang ketatanegaraan diperoleh keputusan bahwa :

1. Negara Indonesia Serikat (RIS) disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat berdasarkan demokrasi dan federalisasi.
2. RIS akan dikepalai seorang presiden di bantu menteri-menteri.
3. Akan dibentuk DPR RIS dan Senat RIS.

Di bidang Militer diperoleh persetujuan :

1. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang nasional.
2. Pembentukan APRIS adalah semata-mata bangsa Indonesia, dengan inti anggota Angkatan Perang RI (TNI), orang-orang yang ada di KNIL, ML, KM, VB dan Teritoriale Batalyons.
3. Pada permulaan RIS, Menteri Pertahanan dapat merangkap sebagai Panglima Besar APRIS.

Dalam konferensi babak I yang diadakan di bekas gedung Volksraad Pejambon Jakarta pimpinan Sultan Hamid, dibicarakan mengenai pokok-pokok pelaksanaan hasil Konferensi di Yogyakarta. Dalam konferensi ini juga diputuskan untuk membentuk Panitia Persiapan Nasional yang menyelenggarakan ketertiban selama, sebelum dan sesudah Konferensi Meja Bundar (KMB). Dengan berhasilnya Konferensi, Indonesia secara keseluruhan siap melangkah menghadapi KMB.

KONFERENSI DENPASAR 7--24 DESEMBER 1946

Sebagai tindak lanjut dari Konferensi Malino, konferensi Denpasar merupakan babak akhir dari konferensi pembentukan

Negara Indonesia Timur (NIT). Dalam konperensi yang diadakan di Pendopo Hotel Bali, Denpasar - Bali ini hadir wakil-wakil dari daerah Sulawesi Selatan (20), Minahasa, Sulawesi Utara (3), Sulawesi Tengah (6), Bali (7), Lombok (5), Flores (3), Sumbawa (3) dan Sumba (3). Konperensi dibuka secara resmi oleh Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. Van Mook pada tanggal 18 Desember 1946. Sebelumnya pada tanggal 7 Desember dilakukan Konperensi Informal dibawah pimpinan Komisaris Pemerintah untuk Kalimantan dan Timur Besar, Dr. W. Hoven. Dalam konperensi yang dibuka tanggal 18 ini, dibicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan NIT yang akan dibentuk. Masalah yang dibahas antara lain, rencana peraturan tentang pembentukan NIT, penetapan peraturan tersebut, keputusan Pemerintah Belanda untuk mendirikan NIT, pemilihan kepala negara, pemilihan Ketua DPRS, keputusan pengangkatan peserta konperensi sebagai anggota DPRS, penyempahan Ketua DPRS oleh Letnan Gubernur Jenderal dan lain-lain. Dalam waktu seminggu program kerja dapat diselesaikan. Konperensi ditutup pada tanggal 24 Desember 1946. Dari hasil konperensi terpilih Tjokerde Gde Rake Sukawati dari Bali, sebagai Kepala Negara (Presiden), Mr. Tadjuddin Noor seorang pengacara di Makasar sebagai Ketua DPRS dan Nadjamuddin.

Daeng Malewa sebagai penyusun Dewan Menteri. Selain keputusan tersebut, konperensi juga menetapkan Makasar sebagai ibukota NIT. Wilayah NIT adalah Karesidenan Timur Besar, sesuai dengan yang termaktub dalam Staatblad Nomor 264, kecuali IB yang kedudukannya terhadap NIT dan JS masih akan ditetapkan. Di samping itu, ditetapkan pula bahwa hak-hak dan wewenang Pemerintah Hindia Belanda dipindahkan kepada NIT, kecuali hak-hak dan wewenang yang dalam rangka rencana susunan ketatanegaraan akan jatuh ke tangan Negara Indonesia Serikat dan Uni Indonesia - Belanda. Dengan terbentuknya NIT, berarti gagasan Van Mook untuk memecah belah Negara Indonesia menjadi kenyataan.

KOFERENSI MALINO, 16--22 JULI 1946

Salah satu dari beberapa konferensi yang dilakukan Belanda dalam usahanya mempertahankan kedudukannya di Indonesia. Konferensi merupakan satu bentuk politik Belanda untuk memecah belah rakyat Indonesia. Dengan tujuan tersebut, Belanda bermaksud untuk membentuk negara-negara bagian salah satunya Negara Indonesia Timur (NIT). Konferensi diselenggarakan di sebuah daerah sejuk dekat Makasar Sulawesi Selatan bernama Malino. Dalam konferensi yang dipimpin Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. Van Mook itu, diundang hadir tokoh-tokoh pribumi terkemuka yang dipandang Belanda dapat mewakili daerah-daerah Indonesia Timur dan Kalimantan. Tujuh tokoh terkemuka yang hadir pada konferensi tersebut Nadjamuddin Daeng Malewa (Sulawesi Selatan), Sukawati (Bali), Dengah (Minahasa), J. Tahya (Maluku Selatan), Dr. Liem Tjae Le (Bangka Belitung, Riau), Ibrahim Sedar (Kalimantan Selatan) dan Oeray Saleh (Kalimantan Barat). Tujuan konferensi, menurut konsepsi Belanda untuk memusyawarahkan pengembangan ketatanegaraan negara Indonesia yang hendak dibentuk bersama.

Di dalam konferensi itu dibicarakan persoalan-persoalan pokok yang berkaitan dengan pembentukan negara bagian. Tiga persoalan pokok yang dibicarakan, yaitu tentang sistem yang akan dipakai dalam pembentukan NIT yang akan dibentuk federal atau unitarisme, perlunya masa peralihan dibawah kekuasaan Kerajaan Belanda, tetapi dengan kerjasama yang erat untuk menyusun dan melengkapi negara yang akan dibentuk dan soal ikatan abadi negara Belanda dan Indonesia, dan mempertahankannya setelah negara Indonesia mencapai kedaulatannya. Konferensi yang dimulai pada tanggal 16 Juli berakhir pada tanggal 22 Juli 1946.

Dari konperensi ini dihasilkan keputusan untuk memilih bentuk negara federal yang terdiri dari kesatuan-kesatuan yang tidak begitu kecil. Selain itu keputusan yang menjelaskan hubungan istimewa yang abadi antara negeri Belanda dan Indonesia dapat didasarkan atas sejarah maupun atas kepentingan bersama. Untuk pembicaraan selanjutnya mengenai NIT diputuskan untuk dibicarakan pada konferensi di Bali.

KONFERENSI MEJA BUNDAR (KMB)

Perundingan antara Indonesia - Belanda tentang pembentukan negara Indonesia Serikat dan pengakuan kedaulatan Belanda terhadap Pemerintah Negara Indonesia Serikat. Konferensi diadakan di S'Gravanhage, Den Haag, Belanda sejak tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam konferensi hadir delegasi dari Republik Indonesia dibawah pimpinan Drs. Mohammad Hatta, delegasi Belanda dipimpin Mr. Van Maarseveen dan Wakil dari UNCI (utusan Dewan Keamanan PBB) Chritchley. Konferensi dibuka resmi pada tanggal 23 Agustus oleh Perdana Menteri Belanda, Dr. W. Drees. Berpidato berturut-turut Ketua Delegasi RI Drs. Mohammad Hatta, Wakil BFO Sultan Hamid II, Ketua Delegasi Belanda Mr. Van Maarseveen dan Ketua UNCI Chritchley. Masalah-masalah pokok yang dibicarakan dalam konferensi adalah mengenai Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) untuk landasan penyerahan kedaulatan kepada Pemerintahan Nasional Federal Sementara dan peraturan-peraturan pokok bagi Persekutuan Uni Indonesia - Belanda, di samping masalah sifat kerjasama Uni Indonesia - Belanda dan hutang yang sulit dipecahkan. Dalam masalah hubungan kerjasama, Indonesia menginginkan agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa ada organisasi yang permanen.

Sebaliknya Belanda menginginkan kerjasama yang luas dengan organisasi permanen yang luas pula. Sedangkan masalah hutang, Indonesia hanya mengakui hutang-hutang Hindia Belanda sampai menyerahnya Belanda terhadap Jepang. Sementara itu Belanda menginginkan Indonesia mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda sampai saat itu, termasuk biaya perang kolonial. Akhirnya setelah konferensi berlangsung selama dua bulan lebih, pada tanggal 2 November 1949 tercapailah Persetujuan Konferensi Meja Bundar. Masalah utama yang berhasil disetujui dalam KMB adalah Belanda mengakui akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Selain itu berisi pula disetujui persetujuan-persetujuan pokok mengenai keuangan, ekonomi, budaya dan lain-lain. Mengenai masalah Irian Barat, karena belum dicapai kesepakatan masalah

ditunda sampai satu tahun lamanya. Khusus untuk bidang militer, dicapai kesepakatan akan dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai inti, pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam APRIS, adanya suatu misi militer Belanda di Indonesia untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke negara Belanda.

KONFERENSI PANGKAL PINANG

Konferensi yang diselenggarakan Pemerintah Belanda dalam usahanya membentuk negara-negara bagian yang akan dijadikan imbalan terhadap Republik Indonesia, sebagai kelanjutan dari Konferensi Malino. Konferensi diadakan di Pangkal Pinang, Pulau Bangka pada tanggal 1 -- 12 Oktober 1946. Konferensi dihadiri golongan-golongan minoritas dengan maksud meminta pendapat golongan-golongan minoritas tentang rencana pembentukan ketatanegaraan Negara Indonesia Timur menurut konsepsi Belanda. Kelompok terbesar yang hadir dalam konferensi itu datang dari golongan Cina dan Belanda yang menempati 1/3 dari jumlah peserta yang hadir. Dalam konferensi yang diketuai Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. Van Mook, timbul berbagai pendapat antara pro dan kontra terhadap rencana Belanda tersebut. Sementara itu Letnan Gubernur tetap berpendapat bahwa perlu adanya suatu daerah dimana golongan minoritas dapat hidup sejajar dengan golongan-golongan masyarakat lain.

Oleh karena itu selain membentuk NIT, pimpinan konferensi berpendapat Irian Barat dapat dijadikan suatu daerah penampungan bagi kelebihan penduduk negeri Belanda. Walaupun muncul berbagai pendapat dan kecaman, konferensi berlangsung sebagai tindak lanjut dari rencana pembentukan Negara Federal, yang akan dibicarakan pada konferensi Denpasar.

KUSUMASUMANTRI, IWA

Lahir pada tanggal 31 Mei 1899 di Ciamis, Jawa Barat. Ia merupakan putera tertua dari 12 bersaudara keluarga Wiramantri. Pada mulanya Iwa dimasukan ke Sekolah STOVIA oleh orang tuanya, tetapi karena tidak berkenan di hatinya, pada tahun 1915, Iwa masuk ke Sekolah Hukum (Rechtschool). Tahun 1921 dia bekerja pada Pengadilan Negara Bandung lalu ke Surabaya. Setelah setahun bekerja pada bulan September 1922, Iwa berangkat ke Belanda untuk memperdalam ilmunya, yang berhasil diselesaikannya pada tahun 1925 dengan memperoleh gelar Meester in de Rechten (Mr). Ketika menjadi mahasiswa di Belanda ini, Iwa aktif dalam organisasi pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Di Belanda ia menjadi anggota Perhimpunan Indonesia (PI). Kemudian menjadi ketua organisasi itu ketika masih bernama Indonesische Vereniging (1923-1924). Sesampai di Indonesia, Iwa Kusumasumantri langsung menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI). Sementara itu ia juga sibuk sebagai pengacara.

Akibat sikapnya yang revolusioner, Iwa ditangkap dan dibuang ke Bandanaera lalu ke Makasar hingga tahun 1943. Tahun 1943 ketika Jepang sampai ke Makasar, dia lari ke Jakarta dan ikut membantu *Research Kaigun* cabang Jakarta. Pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan, Iwa Kusumasumantri banyak memegang peranan dalam mempersiapkan naskah proklamasi. Ia termasuk salah seorang yang ikut mengusulkan perubahan judul "Maklumat Kemerdekaan" menjadi "Naskah Proklamasi". Selain itu, Iwa juga ikut menyusun UUD 1945. Ketika dibentuk Kabinet Presidensiil setelah proklamis 17 Agustus 1945, Iwa Kusumasumantri diangkat menjadi menteri sosial dan perburuhan dalam Kabinet RI pertama.

Ketika terjadi Peristiwa 3 Juli, Iwa yang beroposisi terhadap Kabinet Sahrir turut ditangkap bersama pelaku-pelaku lain. Setelah dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain, pada tanggal 9 Agustus 1948 beliau dibebaskan setelah mendapat grasi Presiden. Kemudian namanya direhabilitasikan karena tidak terbukti

kesalahannya. Pada waktu tentara Sekutu akan masuk Bandung Iwa turut berjuang bersama pemuda untuk mempertahankan daerah Bogor, Cianjur dan Purwakarta. Setelah perjuangan menahan Sekutu yang akan masuk Bandung tidak menguntungkan lagi, ia berpindah dari satu daerah ke daerah lain dan akhirnya menetap di Tawangmangu. Ketika Belanda melancarkan aksi militernya yang ke dua pada tanggal 19 Desember 1948, bersama dengan Presiden Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta serta sejumlah pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya ia ikut ditangkap dan diasingkan ke Bangka. Setelah Persetujuan Roem-Rojen ditandatangani, para pemimpin yang ditahan Belanda dilepaskan kembali termasuk Iwa Kusumasumantri. Selanjutnya dia aktif berjuang dalam Partai Murba, partai yang dimasukinya pada bulan Nopember 1948.

Setelah pengakuan kedaulatan dia diangkat sebagai anggota DPR Pusat. Dia pun aktif sebagai menteri pertahanan pada Kabinet Ali I (1953-1955). Tahun 1958 dia diangkat menjadi rektor UNPAD, kemudian menteri perguruan tinggi pada tahun 1961, dan menteri negara pada tahun 1962. Tahun 1966 beliau pensiun dari dunia politik dan pemerintahan, dan pada tahun 1971 setelah mengalami sakit, Profesor. Mr. Iwa Kusumasumantri meninggal dunia.

KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT (KNPI)

Dalam salah satu butir keputusan sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 ditetapkan untuk membentuk Komite Nasional. KN dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta dimaksudkan sebagai "penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat".

Pada tanggal 27 Agustus, suatu daftar akhir anggota telah dicapai melalui musyawarah tak resmi oleh Soekarno dan Hatta dengan para pemimpin dari sejumlah organisasi politik sebelum perang (dunia kedua). Daftar lengkap berjumlah 137 anggota

diumumkan oleh Soekarno dan pada hari itu juga PPKI lebur ke dalam KNIP yang baru dibentuk. Pelantikan anggota KNIP dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 1945.

KOMITE VAN AKSI

Panitia Aksi yang bermarkas di Menteng Raya 31 adalah organisasi yang bersifat longgar dalam mengkoordinasikan badan-badan perjuangan untuk membela kemerdekaan. Pada tanggal 30 Agustus, satu minggu setelah Presiden Soekarno mengumumkan tujuan Komite Nasional, Komite van Aksi mengeluarkan manifestonya :

1. Negara Kesatuan R.I. telah berdiri tanggal 17 Agustus 1945 dan rakyat telah merdeka, bebas dari pemerintahan bangsa asing.
2. Semua kekuasaan harus di tangan Negara dan bangsa Indonesia.
3. Jepang sudah kalah, dan tak ada hak untuk menjalankan kekuasaan lagi di atas bumi Indonesia.
4. Rakyat Indonesia harus merebut senjata dari tangan Jepang.
5. Segala perusahaan, kantor-kantor, pabrik, tambang, kebun dll harus direbut dan dikuasai oleh rakyat Indonesia (terutama oleh kaum buruh) dari tangan Jepang.

LASKAR RAKYAT

Suatu bahan perjuangan yang berdiri karena keinginan spontanitas rakyat dimaksudkan untuk menghimpun seluruh rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. L.R. dibentuk untuk mencakup semua organisasi para militer dan juga membantu TKR. Secara serentak hampir disetiap kota, desa, dibentuk L.R. lengkap dengan seksi dan brigadenya. Perkembangan yang cepat telah mengakibatkan koordinasi menjadi lemah. Banyak organisasi cabang-

cabangnya tak terkendali. Dalam kongres 16 Februari 1946 telah ditetapkan untuk menjadi federasi dengan nama Persatuan Perjuangan *). Dalam perkembangan berikutnya LR diinfiltrasi oleh kaum komunis, yang terlibat dalam perebutan kekuasaan dalam Peristiwa Madiun (tanggal 18 September 1948).

LEIMENA, JOHANNES

Negarawan, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai peranan cukup besar pada masa perang kemerdekaan dilahirkan di Ambon pada tanggal 6 Maret 1905 dan meninggal pada 6 Maret 1977 di Jakarta. Setelah menamatkan sekolah dasarnya di *Christelijke Europeesche Lagere School* di Jakarta pada tahun 1919, dia memasuki Sekolah MULO Kristen di Jakarta dan tamat pada tahun 1922. Kemudian Leimena meneruskan pendidikan ke STOVIA sampai memperoleh gelar "dr" pada tahun 1930. Sejak di STOVIA ini Leimena giat di dalam berbagai organisasi. Selain anggota Organisasi Jong Ambon, Leimena juga aktif di dalam Organisasi *Christen Studenten Vereniging (CSV)* yang terbentuk pada tahun 1926. Setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya di STOVIA, Leimena mulai bekerja di Rumah Sakit CB Batavia, sampai tahun 1941 dan kemudian sejak 1951 di RS Kristen I Manuel Bandung. Sambil berpraktek ia menyusun disertasi yang dipertahankannya dengan sulit pada tahun 1939 di Semeskundinge Hoge school Batavia (Lever functie - proeven by Inbeemeber). Pada masa pendudukan Jepang, Leimena yang bekerja di Rumah Sakit Zending Banyu Asih Purwakarta, karena hubungannya dengan Amir Syarifuddin menyebabkan dia ditangkap dan dipenjara di Kantor Pusat Bala tentara Jepang pada tahun 1943. Setelah proklamasi ketika di bentuk Kabinet Syahrir II pada bulan Maret 1946, atas permintaan Sutan Syahrir, Dr. Leimena diangkat sebagai menteri muda kesehatan. Sementara itu ketika dibentuk Partai Kristen Nasional pada 10 Nopember 1945 yang kemudian diubah menjadi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) pada tahun 1947, Dr. Leimena terpilih sebagai salah satu anggota pimpinan. Dalam masa perang kemerdekaan ini beberapa kali Dr. Leimena diberi

kepercayaan sebagai menteri negara dan pada masa ini pula dia terpilih sebagai anggota delegasi Indonesia dalam perundingan-perundingan yang diadakan dengan Belanda. Pada perundingan Linggarjati di bulan Nopember 1946, Dr. Leimene terpilih sebagai ketua Komisi Militer. Ketika dibentuk Komisi Teknis untuk melaksanakan gencatan senjata menjelang Perundingan Renville, dr. Leimena duduk sebagai ketua Komisi Teknis.

Kemudian ketika diadakan Konperensi Antar Indonesia, Dr. Leimena terpilih menjadi salah seorang anggota konperensi dan ketika Konperensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag yang dimulai pada bulan Agustus 1949, Dr. Leimena kembali terpilih sebagai ketua Komisi Militer. Selama perundingan-perundingan ini, Komisi Militer pimpinan dr. Leimena berhasil mempertahankan keutuhan TNI APRIS. Pada waktu masalah pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) muncul pada tahun 1950, Dr. Leimena diangkat sebagai ketua panitia yang dikirim ke Maluku untuk mengadakan pendekatan agar RMS mau berdamai. Setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan RI, Dr. Leimena terus aktif dalam pemerintahan sampai tahun 1973 di samping tetap aktif sebagai pengurus Rumah Sakit Tjikini sampai hari wafatnya.

MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X

Pada tanggal 16 Oktober 1945 dalam sidang lengkapnya KNIP mengusulkan kepada Presiden agar KNIP diberikan hak legislatif selama MPR dan DPR belum terbentuk. Disamping itu dibahas perlunya dibentuk Badan Pekerja KNIP. Usul-usul itu kemudian dijawab dengan Maklumat Wakil Presiden No. X (eks) yang memutuskan : "Bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk Majelis Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan Legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan KNIP sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab

kepada Komite Nasional Pusat". Maklumat ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 16 Oktober 1945.

MAJLIS SYURO MUSLIMIN INDONESIA (MASYUMI)

Wadah penyalur aspirasi dan kepentingan umat Islam ini sudah pernah didirikan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada tanggal 7 November 1943, sebagai pengganti dari Majelis Islam A'laa Indonesia (Dewan Islam Raya Indonesia). Dengan kependekan MIAI adalah suatu federasi yang luas dari organisasi Islam yang dibentuk menjelang akhir masa kolonial Belanda. Dalam kongres di Yogyakarta, 7-8 November 1945, diputuskan untuk meneruskan nama Masyumi dan menolak nama pilihan yang lain, Partai Rakyat Islam. Periode pertama setelah kemerdekaan ketua Masyumi adalah dr. H. Sukiman Wirjosandjojo.

MALAM BERDARAH DI SUMATERA TIMUR

"Malam berdarah" adalah peristiwa pembunuhan raja-raja dan kaum bangsawan di Sumatera Timur. Peristiwa ini merupakan satu bentuk revolusi sosial yang dilakukan kelompok radikal di dalam tubuh Persatuan Perjuangan (PP) yang mencakup pimpinan Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) di samping Laskar Barisan Harimau Liar (BHL) dan Tentara Sabilillah. Peristiwa terjadi pada tanggal 3 Maret 1946, dengan tujuan untuk menenyapkan raja-raja dan kaum bangsawan yang sejak masa kolonial Belanda telah bersimpati pada Belanda, yang dalam menerima kemerdekaan bersikap ragu-ragu dan mengharap Belanda akan berkuasa kembali.

Di samping usaha penenyapan raja-raja dan kaum bangsawan itu, juga bertujuan untuk menguasai harta kekayaan yang luar biasa dari raja-raja itu yang mereka peroleh dari keistimewaan yang diberikan pemerintah kolonial Belanda. Dengan alasan tersebut

mereka melakukan serangkaian perampokan, penculikan dan pembunuhan di hampir semua wilayah di Sumatera Timur, seperti di Karo, Simalungun, Kabupaten Asahan, Labuan Batu, Tanjung Balai dan lain-lain. Di Tanah Karo, dengan alasan mengadakan rapat PP di kota Brastagi, para pemuda laskar-laskar tersebut menangkap dan mengasingkan para raja Urung dan Sibayak yang diundang hadir dalam rapat itu, sebagian dari mereka sebanyak tujuh belas orang ditangkap dan diasingkan ke Aceh. Di Simalungun, BHL yang sebagian besar terdiri dari pemuda Simalungun, pada tanggal 3 Maret malam menangkap raja dari Pane beserta keluarganya ini lalu merampas harta benda mereka. Raja dan keluarganya ini lalu dibawa ke suatu tempat dimana sedang diadakan pesta dan kemudian mereka dibunuh. Selanjutnya para pemuda tersebut menangkap raja-raja Simalungun lainnya, membunuh mereka dan merampok harta benda milik raja-raja tersebut. Begitu pula di Kabupaten Asahan.

Di Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan dengan menyerahkan ribuan orang bersenjata, pada tanggal 3 Maret mereka mengepung istana di kota itu. Para aristokrat tak luput dari sasaran mereka antara lain Teuku Musa, pejabat pendukung kerajaan yang keras yang beristrikan orang Belanda beserta keluarganya, semua dibunuh. Esok harinya semua bangsawan Melayu dibunuh, hingga dalam beberapa hari sudah sekitar seratus empat puluh orang terbunuh di kota itu. Di Labuan Batu, jauh sebelah selatan Sumatera Timur, yang raja-rajanya dikenal sangat kejam menindas tanpa kenal batas terhadap rakyat dan kaum bangsawan, tak lepas dari sasaran pemuda.

Pada tanggal 3 Maret istana Sultan di Tanjung Pasir dikepung, diserbu dan semua penghuninya ditawan. Sultan itu bersama putranya keesokan harinya ditemukan sedang sekarat karena tusukan tombak di suatu pekuburan Cina. Sementara di daerah itu juga, Wakil Pemerintah Negara Republik Indonesia, Tengku Hasan dan tiga pembantunya pada tengah malam disergap dan dibawa ke pinggir sungai untuk dibunuh. Tengku Hasan dan seorang pembantunya dipenggal kepalanya, sedang dua pembantu lainnya melarikan diri.

Demikianlah kejadian itu menyebar keseluruh wilayah Sumatera Timur termasuk Kesultanan Langkat yang megah. Revolusi sosial yang dimulai pada 3 Maret berlangsung selama hampir keseluruhan bulan Maret. Ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan oleh PP akhirnya berakhir setelah pada tanggal 11 April 1946 PP memutuskan untuk berdiri teguh di belakang pemerintah dan menyerahkan masalah penangkapan. Penangkapan dan pengadilan atas diri seseorang hanya dilakukan pemerintah dibantu PP.

MALAKA, TAN

Sutan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka atau yang lebih dikenal dengan Tan Malaka, dilahirkan di Sumatera Barat pada tanggal 19 Februari 1896. Beliau merupakan tokoh PKI, pimpinan Persatuan Perjuangan yang terkenal dengan "Peristiwa 3 Juli"-nya. Tamat dari *Europese Kweekschool* di Negeri Belanda pada tahun 1915, Tan Malaka mengikuti kursus *Europese Hoofdkate* (Kursus Pendidikan Lanjutan Nederland). Kembali ke Indonesia pada tahun 1919, dia mengajar pada *Senembah Maatschappij* Deli. Sementara itu keberhasilan revolusi Bolswyk pada tahun 1917, menyebabkan Tan Malaka memandang paham komunisme sebagai jalan yang sesuai dengan keinginannya. Selain itu dia menjadi pimpinan *Revolutionaire Vakcentrale* pada tahun 1921. Akibat dari kegiatannya pada pemogokan pegawai pegadaian pada tahun 1922, Tan Malaka ditangkap dan dibuang. Tetapi atas permintaannya sendiri, dia diijinkan untuk meninggalkan Indonesia dan pergi ke Belanda dan Rusia pada bulan Maret 1922.

Selama berada diluar negeri ini ia terus aktif dalam kegiatannya sebagai anggota PKI, disamping menulis dalam bulletin *Profintern* tentang berbagai keadaan di Indonesia. Selama berada di luar negeri ini juga, Tan Malaka juga sempat membentuk organisasi Partai Republik Indonesia (PARI) pada bulan Juni 1927. Muncul kembali ke Indonesia pada tahun 1942, yaitu pada pendudukan Jepang, Tan Malaka giat dalam gerakan bawah tanah hingga Jepang kalah pada

tahun 1945. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, dia muncul kembali dengan menjadi anggota Komite Nasional Indonesia (KNI).

Bulan Januari 1946, Tan Malaka mendirikan badan Persatuan Perjuangan yang bertindak sebagai oposisi terhadap pemerintah RI. Dalam kegiatannya sebagai badan yang beroposisi terhadap pemerintah, Persatuan Perjuangan melakukan suatu usaha perebutan kekuasaan yang dikenal dengan "Peristiwa 3 Juli". Akibatnya tokoh-tokoh yang terlibat peristiwa itu ditangkap dan dipenjara termasuk Tan Malaka. Walaupun Tan Malaka termasuk tokoh PKI, tetapi dia tidak disukai oleh PKI-Musso. Oleh karena itu ia tidak ikut terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun pada bulan September 1948. Tan Malaka juga termasuk golongan komunis yang tidak setuju dengan pemberontakan PKI tahun 1926 karena dianggap belum siap. Setelah bertualang sekian lama pada tahun 1949 Tan Malaka ditangkap pasukan gerilya RI di daerah Kediri dan ditembak mati.

MOOK, H.J. VAN

Tokoh penting Belanda dalam aksinya selama di Indonesia ini dilahirkan dengan nama Hubertus Johannes Van Mook di Hindia pada tahun 1894. Kedua orang tuanya berdarah Belanda, tetapi sebagian besar hidupnya dijalani di Hindia Belanda, sehingga dia banyak mengetahui negeri dan bangsa Indonesia. Tamat HBS Surabaya pada tahun 1922, Van Mook meneruskan pelajarannya pada bidang teknik kimia di Universitas Delft, Belanda. Tetapi ini hanya berlangsung selama dua tahun karena ia lebih tertarik pada karir di bidang pemerintahan dalam negeri Hindia Belanda.

Untuk itu ia mendalami studi Indologi pada tahun 1915, dan pada tahun 1918 kembali ke Hindia Belanda sebagai *Aspiran Kontrolir*. Sebelum memegang jabatan Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1942, banyak jabatan-jabatan yang telah dipangkunya di Hindia Belanda. Tahun 1928 setelah kembali dari Belanda untuk meraih gelar doktoral, Van Mook bekerja pada

Kantor Pembaharuan Pemerintahan. Tahun 1931-1934 menjadi anggota Volksraad, dalam tahun 1934 menjadi Amtenar Kepala di Departemen Urusan Ekonomi dan tahun 1937 menjadi direktur Departemen Urusan Ekonomi yang terus dijabatnya hingga tahun 1942, saat dia diangkat sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Sebelum itu, pada tanggal 21 Nopember 1941 diangkat sebagai menteri Daerah jajahan. Belum lama dia menjabat sebagai Gubernur Jenderal, Jepang berhasil mendarat di Indonesia dan Van Mook bersama pengikutnya melarikan diri ke Australia. Pada tanggal 14 September 1944 di saat dia masih di Australia dia diangkat sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Van Mook sendiri kembali ke Indonesia pada bulan Oktober 1945 sebagai pemimpin Netherland Indies Civiel Administration (NICA).

Dalam kedudukannya sebagai Letnan Gubernur Jenderal, ketika Belanda berhasil menginjakkan kakinya ke Indonesia, banyak tindakan-tindakannya yang merugikan bangsa dan negara Indonesia. Van Mook merupakan pencetus ide pembentukan negara-negara bagian guna memecah belah bangsa Indonesia. Melalui konperensi-konperensi yang dipimpinnya yaitu : Konperensi Malino, Konperensi Pangkal Pinang, dan Konperensi Denpasar dia berhasil mewujudkan cita-citanya membentuk negara Indonesia Timur (NIT) yang kemudian disusul dengan pembentukan Negara Pasundan, Negara Jawa Timur dan lain-lain. Van Mook juga merupakan pencetus garis damarkasi yang dikenal sebagai "Garis Van Mook", yang memperkecil luas wilayah Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Sementara itu, dia juga menjadi anggota perundingan-perundingan antara Indonesia-Belanda baik sebagai ketua maupun anggota delegasi, seperti Perundingan Linggarjati dan Perundingan Renville. Bersama wakil-wakil delegasi Indonesia-Belanda, Van Mook turut menandatangani Persetujuan Linggarjati. Tetapi menjelang Konperensi Meja Bundar (KMB) pendapat Van Mook tidak diminta lagi. Karena itu pada tanggal 1 Nopember 1948 ia mengundurkan diri dan tanggal 3 Nopember meletakkan jabatannya sebagai Letnan Gubernur Jenderal.

MOUNTBATTEN, LORD LOUIS

Dilahirkan di Windsor pada tanggal 25 Juni 1900 dengan nama Lord Louis Francis Albert Victor Nicolas. Pada tahun 1916 laksamana laut Inggris dan raja muda terakhir India ini masuk Angkatan Laut Inggris. Awal Perang Dunia II (PD II) tahun 1939, Louis Mountbatten menjadi Komandan Armada Induk *Illustrious*. Dari tahun 1942 sampai 1943, Lord Louis Mountbatten diangkat sebagai Panglima Operasi Gabungan Inggris. Dalam kedudukannya sebagai Panglima Operasi Gabungan ini, dia memimpin pertempuran di Eropa dan menyerang Madagaskar. Setelah itu Mountbatten diangkat sebagai Panglima Tertinggi Sekutu Asia Tenggara tahun 1943-1946, yang berhasil memukul Jepang dari Burma.

Pada bulan September 1945 komando Asia Tenggara (South-east Asia Command) di bawah pimpinan Lord Louis Mountbatten, pasukan serikat mendarat di Indonesia dengan tujuan untuk menerima penyerahan dari tangan Jepang dan menjaga tata tertib serta keamanan di Indonesia. Ternyata pasukan Serikat ini membawa Belanda (NICA) yang ingin berkuasa kembali di Indonesia, yang mengakibatkan timbulnya pertempuran di daerah-daerah di Indonesia. Pada tahun 1959 Lord Louis Mountbatten diangkat sebagai Panglima Staff Pertahanan. Jabatan ini bukan merupakan jabatan terakhir yang dipangkunya sebelum dia pensiun pada tahun 1967. Dia meninggal pada tanggal 28 Agustus 1979 karena terbunuh ketika tentara Republik Irlandia (IRA) meledakkan kapal pesiarnya dilepas pantai Mullaghmore, Irlandia.

MUSSO

Pemimpin pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Karena keterlibatannya dalam pemberontakan PKI pada tahun 1926, Musso kemudian pergi dan bermukim di Moskow. Setelah beberapa lama tinggal di Moskow, pada bulan Agustus 1948

dia kembali Indonesia. Kedatangannya ini ternyata membawa garis baru bagi kaum komunis. Musso mengecam keras kebijaksanaan diplomasi yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan dengan Belanda.

Sejak kedatangannya itu, Musso mulai melakukan serangkaian kekacauan di beberapa daerah. Di bawah pimpinan Musso, kekacauan yang mereka lakukan mencapai puncaknya dengan melakukan pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dikenal dengan "Pemberontakan PKI Madiun". Pemberontakan ini ditumpas pemerintah yang berakhir pada bulan Oktober 1948. Setelah sempat melarikan diri beberapa waktu, Musso berhasil ditembak mati dalam suatu pertempuran di Ponorogo pada tanggal 31 Oktober 1948.

NASUTION, ABDUL HARRIS

Lahir di Kotanopan, Tapanuli, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 1918. Tamat *Hollands Inlandsche Kweekschool (HIK)*. Nasution meneruskan pendidikan ke *Algemeene Middelbare School (AMS) B* dan kemudian menjadi guru di Bengkulu dan Palembang sejak tahun 1938 sampai tahun 1940. Dalam tahun 1940, Nasution menjadi anggota militer Hindia Belanda dalam menghadapi Perang Dunia II (PDII). Kemudian pada tahun 1941 ia memasuki Akademi Militer di Bandung, setelah itu diangkat sebagai *Vaandrig Infranteri KNIL*. Ketika Jepang masuk pada tahun 1942, Nasution, yang pada waktu itu masih taruna Akademi Militer Belanda berkedudukan di Batalyon III di Surabaya, melarikan diri dari interniran dan selama tiga bulan bersembunyi di Sukabumi.

Setelah itu Nasution menjadi pemimpin pemuda di Bandung. Pada tahun 1943 dia dilantik sebagai pegawai menengah pembantu pamong praja di Bandung. Setelah proklamasi dia merupakan salah seorang yang mendesak pemimpin politik untuk segera membentuk tentara nasional, dan menduduki berbagai jabatan dalam kemiliteran selama masa revolusi kemerdekaan ini. Pada tahun 1946, Nasution

diangkat sebagai panglima Divisi III Komandemen I/Jawa Barat. Kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) serta Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) pada tahun 1948, dan sejak tahun 1948 sampai 1949 menjadi Panglima Tentara dan Teritorium Jawa. Dengan berbagai jabatannya ini, selama perang kemerdekaan Nasution memimpin berbagai pertempuran dengan Belanda yang terjadi akibat tindakan agresi militer Belanda yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 dan tanggal 19 Desember 1948. Pada tahun 1949 sampai tahun 1952, Nasution diangkat menjadi Kepala Staff Angkatan Darat (KASAD).

Selanjutnya dia tetap aktif dibidang militer dan politik hingga jabatannya terakhir menjadi ketua MPRS 1966-1972. Di tengah kesibukannya sebagai militer dan politikus, Nasution aktif menulis buku, terutama buku-buku sejarah dan strategi militer.

PALAR, LAMBERTUS NICODEMUS

Dilahirkan di Minahasa pada tanggal 5 Juni 1900. Ia merupakan diplomat senior yang mempunyai peran dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di PBB. Setelah menempuh pendidikan di *Technische Hogeschool (THS)* Bandung pada tahun 1928 dan *Rechtshoge School (RHS)* Jakarta pada tahun 1924, dia meneruskan pendidikannya di Negeri Belanda. Di Belanda Palar menikah dengan gadis Belanda dan bergabung dengan gerakan bawah tanah anti nazi pada tahun 1940.

Pada tahun 1945-1947, Palar terpilih sebagai anggota *Tweede Kamer*, mewakili *Partij van den Arbeid*. Karena kekecewaannya terhadap Belanda yang melancarkan agresi militernya yang pertama terhadap Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947, Palar keluar dari *Partij van den Arbeid* yang dianggapnya bertanggung jawab terhadap agresi ini. Selanjutnya Palar giat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di dunia Internasional sebagai juru bicara Republik Indonesia di

dalam sidang-sidang Dewan Keamanan PBB. Dalam kedudukannya sebagai kepala kantor perwakilan Republik Indonesia di New York, pada Sidang Dewan Keamanan tahun 1948, Palar bersama delegasi RI lainnya berusaha agar masalah Indonesia-Belanda diangkat dalam sidang yang diadakan pada bulan Februari 1948 tersebut, sehingga permasalahan tersebut mendapat banyak simpati dari negara-negara lain.

Ketika Belanda melakukan aksi militernya yang kedua dan berhasil menguasai Yogyakarta pada akhir tahun 1948, Palar sedang menjabat sebagai duta besar di India bersama Sudarsono dan AA Maramis, diberi kuasa membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di India bila Syarifuddin Prawiranegara gagal di Sumatera. Sejak tahun 1950-1953 Palar menjadi wakil tetap RI di PBB sebagai Duta Besar. Selanjutnya dia menjadi duta besar di beberapa negara dan kembali menjadi wakil tetap PBB sampai RI keluar dari PBB pada tahun 1964. Setelah itu Palar menghabiskan waktunya menjadi pengikut seminar-seminar, mengajar di universitas-universitas dan college-college di Amerika Serikat dan menjadi penasihat misi RI untuk PBB hingga akhirnya dia meninggal pada tanggal 3 Februari 1991 di Jakarta.

PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA (PPKI)

Pada tanggal 7 Agustus 1945 Panglima Bala tentara Jepang di Asia Tenggara yang bermarkas besar di Dalat, Saigon mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sebagai pengganti Badan Penyelidik PBUPKI. PPKI bertugas mempercepat segala usaha yang berhubungan dengan persiapan terakhir guna membentuk Pemerintah Republik Indonesia. Anggota PPKI sebagai berikut :

Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, BPH. Poerbojo, KRT. Radjiman Wediodiningrat, Soetardjo Kartohadikoesomo, Andi Pangerang, MR. IGK. Pudja, dr. Mohommad Amir, Otto Iskandardinata, R. Pandji Soeroso, PBKA. Soerjohamidjodjo,

Ki Bagus Hadikoesoemo, Mr. Abdul Abas, Dr. J. Latuharhary, AA. Hamidhan, Abdul Kadir, Dr. Soepomo, K. H. Wahid Hajim, Dr. Teuku Mohammad Hassan, Dr. GSSJ. Ratulangie, dan Drs. Tjawan Bing. Selain itu Soebardjo diangkat sebagai penasehat khusus panitia itu.

PARTAI BURUH INDONESIA

PBI berdiri pada bulan Nopember 1945 setelah terjadi pertentangan pendapat didalam tubuh Barisan Buruh Indonesia (BBI) yang terbentuk tanggal 15 September 1945. PBI yang bertujuan mengorganisasikan kaum buruh di sekitar Jakarta, pembentukannya diprakarsai oleh Komite van Aksi Menteng 31.

Kelompok Syamsu Harya Udaya berhasil meyakinkan kongres BBI di Surakarta (bulan Nopember 1945) untuk mengubahnya menjadi PBI sebagai alat politik gerakan kaum buruh.

PERSATUAN PERJUANGAN (PP)

Badan ini adalah front perjuangan rakyat yang mewadahi paling kurang 133 organisasi dari golongan sosialis, agama, dan nasionalis yang tidak setuju terhadap kebijaksanaan politik Pemerintah Indonesia, yang mengambil cara-cara diplomasi menghadapi Belanda. Nama PP diambil dari pidato Tan Malaka yang diucapkan dalam konperensi front perjuangan rakyat yang kedua di Surakarta, 15--16 Januari 1946. PP merupakan kekuatan oposisi terhadap kabinet Syahrir. Untuk menghadapi Kabinet Syahrir yang menjalankan strategi diplomasi, PP menawarkan tekanan pada perjuangan senjata dalam menghadapi Belanda.

PERLAWANAN DI KAMPUNG BIDUK-BIDUK

Perlawanan Kampung Biduk-biduk ini terjadi pada bulan Juli dan Agustus 1945. Kejadian bermula dari tindakan tentara Jepang yang berturut-turut menangkap tokoh-tokoh terkemuka dan masyarakat Kampung Biduk-biduk, Labuan Kelembu dan Klindakan. Penangkapan pertama yang dilakukan Jepang terjadi pada akhir tahun 1944, dimana kapal perang Jepang mendarat di Talisayan untuk menangkap Asisten Wedana Aji Berni Massuwarno, tokoh masyarakat Woburhan dan Kaldak Nanang serta pengikut-pengikutnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan gerakan bawah tanah pimpinan dr. Lukardi dan kawan-kawan dan di dakwa mempunyai hubungan dengan kapal selam Sekutu di Tanjung Mangkalihat. Mereka dibawa ke Balikpapan setelah penangkapan tersebut.

Beberapa hari kemudian pasukan Jepang kembali melakukan penangkapan di Kecamatan Kalisayan dan berhasil menangkap lima belas orang yang kesemuanya juga dibawa ke Balikpapan. Selanjutnya semakin mendekati akhir kekalahannya, kegiatan penangkapan yang dilakukan Jepang semakin mengganas. Dengan alasan yang dibuat-dibuat pasukan Jepang menangkap dan membunuh tanpa mengadili masyarakat yang tak berdosa. Pada bulan Mei 1945 misalnya di daerah Berau seorang haji yang bernama Debab dan kawan-kawan ditangkap dan dibunuh tanpa diadili karena kata-katanya yang dianggap menyindir Jepang. Pada waktu itu beberapa rakyat Berau berkata, bahwa kapan rakyat Berau bisa makan susu, mentega seperti rakyat Tarakan, yang pada saat itu sudah diduduki Sekutu. Ternyata apa yang diucapkan orang-orang tersebut diadukan Jumbo-jumbo (tentara rahasia Indonesia yang dimiliki Jepang). Akibatnya H. Debab dan kawan-kawan ditangkap dan dibunuh. Oleh karena tindakan-tindakan Jepang tersebut, menimbulkan dendam dalam diri masyarakat Kampung Biduk-biduk, yang kemudian mengatur siasat untuk menyerang Jepang. Dengan alasan mengadakan selamatan, penduduk kampung tersebut mengundang tentara Jepang yang menjaga pos di desa mereka. Orang-orang Jepang itu disuguhi air

nyiur muda kegemaran mereka. Ketika orang-orang Jepang itu sedang asyik meminum nyiur muda, di saat itulah orang-orang kampung Biduk-biduk menyerang mereka. Dalam penyerangan ini tiga orang tentara Jepang tewas. Perlawanan yang dilakukan penduduk Kampung Biduk-biduk kemudian diikuti pula oleh kecamatan-kecamatan lain.

PEMBERONTAKAN PKI MADIUN

Adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh partai Komunis Indonesia (PKI) bersama organisasi-organisasi pengikutnya. Peristiwa terjadi di kota Madiun pada tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Musso, pemimpin terkemuka PKI pada pemberontakan PKI 1926. Musso yang setelah pemberontakan PKI 1926 bermukim di Rusia, pada awal Agustus 1948 kembali ke tanah air. Kedatangan Musso membawa angin baru dalam tubuh PKI. Sikap PKI diperkeras dan tujuan pokok kepertaian mulai terlihat. Dalam tahun 1948 kubu PKI sudah kuat. Kegiatan awal pemberontakan dimulai ketika dalam suatu rapat umum di Yogyakarta 22 Agustus 1948, Musso menuntut agar perundingan-perundingan dengan Belanda dihentikan dan segera diadakan pertukaran duta dengan Rusia.

Kepada pers Musso mengatakan bahwa PKI harus memperoleh 1/3 kursi pemerintahan Republik Indonesia (RI). Musso menjadikan program kabinet Hatta yang akan berunding atas Renville sebagai tema agitasi dan oposisinya. Tanggal 12 September 1948 setelah Pekan Olah Raga (PON) dimulai timbul kekacauan, pertempuran dan penculikan-penculikan di kota Solo, antara lain bentrokan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan tentara laut yang pemimpinnya bersimpati pada PKI dan Pesindo dengan Barisan Banteng, dr. Muwardi diculik dan hilang tak tentu rimbanya. Dalam mengatasi keadaan, Presiden RI mulai tanggal 15 September menyatakan daerah Solo dalam keadaan bahaya dan mengangkat Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer Daerah Istimewa

Surakarta dan sekitarnya. Sementara perhatian pemerintah tengah tertuju pada situasi di Solo, pada tanggal 18 September 1948, PKI/ Front Demokrasi Rakyat (FDR) melancarkan aksinya merebut kota Madiun dan memproklamasikan berdirinya "Soviet Republik Indonesia". Mereka berhasil melucuti senjata TNI Madiun, mengganti pejabat-pejabat pemerintah dengan orang-orang PKI / FDR, dan melakukan serangkaian pembunuhan dan penangkapan. Untuk segera mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah menggerakkan TNI untuk merebut kembali Madiun dan sekitarnya yang diduduki PKI. Sementara itu Pemerintah Pusat menjadikan Jawa Timur sebagai daerah istimewa dan mengangkat Kolonel Sungkono sebagai Gubernur. Pemberontakan dapat diatasi dan daerah-daerah yang diduduki dapat dikuasai TNI kembali, antara lain Sarangan dan Waliku (25 September), Magetan dan Ngombe (26 September), Parakan (27 September), Durgas dan Ponorogo (2 Oktober), Madiun dan Wonogiri (30 September), Cepu (8 Oktober) terakhir Pacitan (15 Oktober), Kudus (21 Oktober). Di samping itu pemimpin-pemimpin pemberontakan dapat ditangkap, antara lain Amir Syarifuddin, Suripno, Maruto dan lain sebagainya. Sedangkan Musso yang merupakan tokoh sentral setelah lari kian kemari berhasil ditembak mati di daerah Ponorogo tanggal 31 Oktober 1948.

PEMBERONTAKAN REPUBLIK MALUKU SELATAN

Pemberontakan RMS adalah peristiwa berdirinya Republik Maluku Selatan yang lepas dari Negara Kesatuan Timur (NIT). Peristiwa terjadi di Ambon pada tanggal 25 April 1950, oleh orang-orang bekas KNIL dan pro Belanda, di bawah pimpinan Mr. Dr. Ch. R. Soumokil bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Terbentuknya RIS yang diikuti pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menimbulkan masalah, terutama dari tentara KNIL yang tidak bersedia bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai pasukan inti APRIS. Soumokil yang memimpin gerakan separatistis ini telah mempersiapkan secara matang " Proklamasi RMS " dengan memindahkan pasukan

KNIL dan pasukan Baret Hijau yang terlibat pemberontakan Andi Azis ke Ambon. Maka pada tanggal 25 April 1950 mereka mengumumkan berdirinya Republik Maluku Selatan, setelah sebelumnya mereka melakukan teror dan pembunuhan. Dalam menghadapi hal ini, Pemerintah Pusat mencoba menyelesaikan peristiwa ini secara damai. Untuk itu dikirim misi yang diketuai Dr. Leimena ke wilayah tersebut, selain itu pada tanggal 13 Juli diadakan Konferensi Maluku di Semarang. Dalam konferensi ini para politikus asal Ambon menganjurkan agar dikirim misi perdamaian ke Ambon. Misi perdamaian yang terdiri dari para politikus, pendeta, dokter dan wartawan mengalami kegagalan. Usaha yang tidak berhasil itu mendorong pemerintah memutuskan untuk menumpas pemberontakan itu dengan kekuatan senjata. Untuk pelaksanaannya dibentuk sebuah pasukan di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Tanggal 14 Juli 1950, pasukan Expedisi APRIS / TNI mulai melakukan penumpasan di pos-pos penting RMS. RMS memusatkan kekuatan pasukannya di Pulau Seram dan Ambon, selain di darat para pemberontak menguasai perairan laut Maluku Tengah dengan memblokade dan menghancurkan kapal-kapal kecil milik pemerintah. Akhirnya setelah melalui pertempuran-pertempuran sengit, pada tanggal 8 November kota Ambon dapat dikuasai pasukan-pasukan APRIS.

Dalam pertempuran jarak dekat memperebutkan benteng Nieuw Victoria. Komandan Pasukan Letnan Kolonel Slamet Riyadi tertembak dan gugur. Setelah APRIS berhasil merebut kota Ambon dan menangkap tokoh mereka yang terlibat, sisa-sisa pasukan RMS yang masih ada melarikan diri ke hutan-hutan dan untuk beberapa tahun lamanya melakukan kegiatan pengacauan. Soumokil yang berhasil menyelamatkan diri, pada tahun 1962 berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 1964.

PEMOGOKAN DELANGGU

Dilancarkan secara teratur dan besar-besaran oleh Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) selama bulan Mei

hingga bulan Juni 1948. Pemogokan buruh yang pertama kali dalam alam Indonesia merdeka ini menyangkut pekerja-pekerja di pabrik karung dan tujuh perkebunan di Delanggu dan sekitar daerah Klaten, Jawa Tengah. Penyebab munculnya pemogokan diawali dengan diadakannya Konperensi Nasional Sarbupri pada 17 Februari 1948. Dalam konferensi yang dihadiri wakil-wakil Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (Sobsi), Barisan Tani Indonesia (BTI) dan cabang-cabang Sarbupri ini, diputuskan untuk membantu program-program BTI dalam perjuangannya. Diilhami konperensi itu dan dorongan dari Front Demokrasi Rakyat (FDR), suatu organisasi yang bersifat Marxist di bawah pimpinan Amir Syarifuddin, Sarbupri Delanggu mengadakan pemogokan. Anggota Sarbupri cabang Delanggu sebagian besar adalah buruh-buruh perkebunan kapas, rami dan pabrik karung goni. Pemogokan bertujuan agar Badan Tekstil Negara (BTN) menaikkan upah buruh, membagikan bahan pakaian dan membagikan jatah beras bagi para buruh beserta keluarganya. Untuk itu sejak bulan Februari Sabupri mulai mengadakan kampanye. Pemogokan-pemogokan pertama dimulai pada minggu pertama bulan Mei 1948.

Pemogokan ini berlanjut karena kegagalan-kegagalan perundingan antara BTN dan Sarbupri. BTN tidak bersedia memenuhi tuntutan Sarbupri, maka pemogokan berlangsung terus hingga tanggal 16 Juli. Aski mogok itu dilakukan dengan mogok lambat kerja, mogok tidak bekerja sama sekali secara umum, namun mereka tetap hadir dan mogok secara regu atau kelompok. Dalam pertemuan awal bulan Juli misalnya, BTN tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut terutama soal penaikan upah. BTN hanya memberikan pakaian kepada buruh tetapi sebagai jatah tahun 1947 dan memberikan beras pada setiap buruh, tetapi tidak pada keluarga. Begitu pula pada pertemuan-pertemuan selanjutnya tidak tercapai kesepakatan karena BTN tetap menolak tuntutan tersebut, walaupun Menteri Kemakmuran dan Menteri Urusan Perburuhan dan Sosial telah ikut turun tangan dalam perundingan tanggal 17 Juni.

Oleh karena kegagalan-kegagalan itu, pada akhirnya perselisihan antara BTN dan Sarbupri yang didukung oleh Lembaga Buruh dan

Tani (LBT) Delanggu tidak dapat dihindarkan lagi. Pada tanggal 23 Juni pemogokan diteruskan kembali oleh lebih lima belas ribu orang buruh. Mereka meletakkan bendera-bendera merah dilokasi perkebunan kapas, rami dan lokasi pabrik, dengan maksud memberi syarat bahwa tak seorangpun diperbolehkan meneruskan pekerjaan. Suasana semakin tegang ketika pada tanggal 26 Juni, beberapa anggota Sarekat Tani Islam Indonesia (STII) bekerja di perkebunan kapas yang sedang menjalankan pemogokan itu. Oleh karena tindakan tersebut, yang memperlihatkan STII yang cenderung mendukung pemerintah Kabinet Hatta, terjadi karena pemogokan berubah menjadi konflik. Sebagai reaksi dari aksi STII ini, kemudian LBT bersama Kesatuan Aksi Delanggu mengeluarkan pamflet-pamflet yang isinya menyatakan, bahwa mereka bukan pemberontak dan pemogokan yang mereka lakukan agar jangan diganggu.

Ternyata pamflet-pamflet itu justru menambah panas suasana. Apalagi ketika Divisi Siliwangi datang ke Delanggu yang sebenarnya datang ke Delanggu karena tekanan Belanda, dianggap akan mengganggu kaum pemogokan oleh FDR, menambah marah para pemogok. Akhirnya pada tanggal 10 Juli 1948 terjadilah pertempuran kecil antara STII yang sedang menggantikan pekerjaan kaum pemogok dengan kaum pemogok. Untuk mengatasi keadaan tersebut, mulai tanggal 9 hingga 10 Juli BP KNIP mengadakan sidang guna membahas masalah pemogokan Delanggu. Tetapi sekali lagi sidang ini mengalami kegagalan karena BTN tetap pada pendiriannya semula.

Pada akhirnya pemerintah mengadakan rapat khusus guna membicarakan masalah pemogokan Delanggu. Rapat dihadiri oleh wakil-wakil BTN, anggota KNIP dan LBT Delanggu. Dari hasil pertemuan ini dicapai kesepakatan bahwa BTN akan memenuhi tuntutan-tuntutan Sarbupri kecuali masalah peraturan upah buruh yang baru yang masih ditunda. Hasil pertemuan ini kemudian diumumkan pemerintah melalui radio Yogyakarta pada tanggal 16 Juli, bahwa semua tuntutan LBT telah diterima pemerintah. Pada tanggal 18 Juli 1948 buruh yang mogok mulai bekerja kembali.

PERLAWANAN MARGA

Perlawanan Marga yang terjadi pada tanggal 20 November 1946, adalah bagian dari percikan perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa revolusi. Peristiwa terjadi di Desa Marga setelah sebelumnya terjadi pertempuran di daerah-daerah sekitarnya yaitu di Tanah Aren dan di Tabanan. Dalam perlawanan ini, Netherland India Civil Administration (NICA) yang sejak tanggal 19 November 1946 telah mengerahkan semua pasukannya yang menempati pos-pos di Tangsi Parean, Bana Kediri, Tabanan, Penebel dan Jatiluwih, dengan berjalan kaki menuju desa Marga dan menduduki desa-desa yang berada di desa Marga. Pada pagi hari tanggal 20 November tentara NICA mulai melakukan penggrebekan ke rumah-rumah penduduk di semua banjar yang terdapat di Desa Marga. Semua penduduk baik laki-laki atau perempuan disuruh duduk di depan pasar Marga dengan pengawasan yang ketat, karena dianggap membantu dan melindungi para pemuda pejuang. Menghadapi keadaan yang demikian, Letkol I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya Ciwing Wawara untuk menyebar ke ladang-ladang di sekitar Tegalana Uma Kaang untuk mengatur posisi menghadapi kurungan tentara NICA yang sudah pula menyebar ke arah Barat, Timur dan Selatan. Pada pukul 08.00 pagi, NICA mulai menyerang Pura Dalem Sidang Rapih yang terletak di sebelah barat Pasukan Ciwing Wawara. Oleh karena pertahanan Pasukan Ciwing Wawara dirasakan kuat, tentara NICA diperintahkan mundur.

Sementara pasukan NICA mulai mundur, tiba-tiba kapal udara pengintai milik NICA mengadakan tembakan pada Pasukan Ciwing Wawara yang berada di sebelah barat. Tembakan dibalas oleh anggota Pasukan Ciwing Wawara Letnan Sueto. Berawal dari tembak-menembak tersebut, pada pukul 12.00 tentara NICA mengadakan pengepungan serentak di daerah Marga. Maka pertempuran sengitpun berlangsung antara Pasukan Ciwing Wawara pimpinan Letkol I Gusti Ngurah Rai dengan tentara NICA yang terdiri dari seluruh pasukan yang ada di Bali, ditambahkan dengan bantuan pesawat Udara Bomber yang didatangkan dari Makasar.

Pertempuran berlangsung hingga pukul 05.00 sore, karena jumlah pasukan yang tak seimbang dan persenjataan yang kurang modern, pasukan Ciwing Wawara gugur satu persatu. Dalam perlawanan ini gugur delapan puluh enam orang anggota pasukan Ciwing Wawara, termasuk Letkol I Gusti Ngurah Rai, pemimpin pasukan tersebut.

PERANG PANDRAH

Perang Pandrah berlangsung beberapa bulan menjelang Jepang meninggalkan Aceh. Peristiwa terjadi akibat sikap Jepang yang kurang menghargai agama Islam, agama mayoritas Aceh, dan sikap Jepang yang sering melakukan perampasan harta benda rakyat. Dengan tujuan untuk membela agama dan mempertahankan hak milik mereka, masyarakat Aceh mengadakan perlawanan terhadap Jepang. Penyerangan pertama dilakukan dengan menyerang tangsi militer Jepang di Pandrah. Sebelum dilakukan penyerangan, pada tanggal 24 April 1945 Kepala Kampung Lheue Simpang, Usman, terlebih dahulu mengadakan rapat guna mengadakan perlawanan dan menghadapi serangan Jepang. Dari hasil rapat tersebut diputuskan untuk melakukan serangan ke tangsi Pandrah. Penyerangan dipimpin oleh Keuhik Djohan dan Panglima Perang Teuku Jacob. Penyerangan ke tangsi Pandrah dilakukan pada malam hari sewaktu pasukan Jepang sedang tidur nyenyak. Pada waktu itu hanya tiga orang tentara Jepang yang sedang dinas juga. Akibatnya serangan tersebut satu orang diantaranya sempat lolos dan melarikan diri serta melapor ke Asrama Jeunieb. Dari Jeunieb, berita penyerangan terus merambat ke pusat militer Bireun, Lhok Seumawe, Sigli dan Banda Aceh.

Untuk menanggulangi peristiwa Pandrah, pihak Jepang mendatangkan sebanyak satu kompi tentara Jepang dari Bireun dan Sigli. Namun demikian tokoh yang melakukan serangan tidak ditemui karena telah pergi/melarikan diri ke Gle Bangkalang sebuah hutan tempat markas tahanannya. Dimulai dari penyerangan tangsi Pandrah, serangan dilanjutkan ke tempat pemusatan pasukan Jepang

di daerah Kampung Lheue Simpang. Serangan dilakukan oleh pasukan Muslim yang bemarkas di Gle Bangkalang dibawah pimpinan Teuku Ibrahim Peudada. Dalam peristiwa ini empat puluh tiga orang Aceh dan dua ratus orang Jepang terbunuh. Akibat peristiwa tersebut, Jepang terus melakukan pengejaran, penangkapan dan menghukum orang-orang yang terlibat dalam penyerangan tersebut.

PEREBUTAN KOTA MINYAK SANGA-SANGA

Peristiwa berlangsung empat hari sejak tanggal 27 hingga tanggal 30 Januari 1947. Perebutan kota Sanga-sanga terjadi antara pemuda Sanga-sanga yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Indonesia (BPRI), KNIL yang pro perjuangan RI dan rakyat Sanga-sanga melawan tentara Belanda yang ingin berkuasa kembali. Peristiwa ini dimulai dengan digantinya Tentara Sekutu Australia yang bertugas untuk melucuti senjata Jepang dan menjaga ketertiban di Sanga-sanga dengan Tentara Belanda.

Pergantian ini mengubah suasana daerah Sanga-sanga. Jika saat tentara Australia datang rakyat merasa gembira dan lega karena tentara Australia menunjukkan keramah tamahan, senang bergaul dengan masyarakat dan memberi kebebasan rakyat untuk melakukan kegiatan asalkan tetap menjaga ketertiban. Tidak demikian halnya dengan tentara NICA. Sebaliknya tentara Belanda mulai melakukan tindakan-tindakan antara lain melarang menggunakan Lencana Merah Putih, mengibarkan bendera Merah Putih, dan melarang semua kegiatan yang bersifat politik dan perjuangan. Adanya larangan tersebut tentu saja menghambat gerak langkah masyarakat.

Badan Penolong Perantau Jawa (BPPD) sebagai pusat kegiatan masyarakat yang beranggotakan tidak saja perantau-perantau Jawa tetapi juga daerah lain. BPPD dibentuk saat Australia masih bertugas di Sanga-sanga. Apalagi ketika mereka mulai melakukan pembersihan dengan melakukan penangkapan terhadap anggota-anggota BPPD. Tindakan Belanda ini membangkitkan semangat rakyat untuk

membentuk Badan Pembela Rakyat Indonesia (BPRI) dan menyerang serta merebut kota Sanga-sanga dari kekuasaan Belanda.

Maka berdirilah BPRI, gabungan badan-badan perjuangan, yang didirikan oleh anggota-anggota BPPD yang baru dibebaskan Belanda (1946) antara lain Soekasmo, Margono, Supriadi dan lain-lain. Perjuangan awal dilakukan dengan mengadakan berbagai gangguan dan kekacauan yang dilakukan oleh BPRI, KNIL yang pro Indonesia dan rakyat Sanga-sanga. Mereka membakar penampungan minyak, tongkang minyak, mencuri senjata, menyebarkan isu yang merugikan Belanda dan lain-lain.

Ketika rencana penyerbuan dan perebutan Sanga-sanga akan dilaksanakan, ternyata mengalami kegagalan karena Belanda telah mengetahui rencana tersebut. Hal itu beberapa kali terjadi. Oleh karena itu direncanakan mengadakan perebutan kekuasaan dan akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1947. Tetapi rencana tersebut berubah, karena Belanda yang telah mengetahui rencana tersebut, telah lebih dahulu melakukan pembersihan pada tanggal 26 Januari pukul 23.00 malam. Dalam menghadapi hal ini, BPRI segera mengadakan rapat untuk menghadapi serangan dari perebutan kekuasaan.

Sementara itu, dari Radio Pemberontakan Bung Tomo, diinstruksikan pada seluruh rakyat Indonesia untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Akhirnya pada tanggal 27 Januari 1947 dinihari rakyat Sanga-sanga, BPRI dan KNIL yang pro Belanda mulai melakukan penyerangan rumah-rumah dan pos-pos milik Belanda. Hari itu juga daerah Sanga-sanga berhasil dikuasai Republik dan Belanda mengundurkan diri. Akan tetapi keesokan harinya pasukan bantuan Belanda datang dan melakukan serangan balasan ke kota Sanga-sanga, dimana rakyat sedang bergembira atas keberhasilannya mengusir Belanda dari Sanga-sanga. Serangan Belanda yang mendadak dengan taktiknya yang cerdas, menimbulkan kepanikan rakyat, sehingga kembali pecah pertempuran.

Pertempuran berakhir pada tanggal 30 Januari, setelah pasukan Sanga-sanga mengundurkan diri karena kurangnya persenjataan. Dalam pertempuran ini banyak pasukan Sanga-sanga yang gugur

dan ditangkap kemudian dihukum mati. Salah seorang yang dihukum mati adalah Budioyo, seorang tentara KNIL yang pro Republik, yang dihukum mati pada tanggal 17 Maret 1947.

PERISTIWA ANDI AZIS

Pemberontakan kesatuan-kesatuan mantan KNIL di bawah pimpinan Andi Azis. Peristiwa terjadi di Makasar (Ujung Pandang) pada tanggal 5 April 1950. Dibentuknya RIS yang diikuti dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRIS) telah menimbulkan ketegangan-ketegangan. Andi Azis, yang pada masa sebelumnya menjadi Ajudan Wali Negara-negara Indonesia Timur, beserta anak buahnya mantan anggota KNIL pada tanggal 30 Maret 1950 diterima masuk APRIS. Andi Azis diangkat sebagai komandan kompi dengan pangkat kapten. Akan tetapi setelah beberapa hari dilantik dengan didukung batalyon KNIL di Makasar yang tidak masuk ke dalam APRIS, kapten Andi Azis mengerahkan pasukannya untuk menawan Pejabat Panglima Territorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta beserta seluruh stafnya. Andi Azis menuntut agar pasukan-pasukan APRIS dan KNIL saja yang bertanggung jawab terhadap keamanan di daerah Negara Indonesia Timur. Mereka mengganggu Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak memperdulikan keinginan anggota-anggota KNIL di Ujung Pandang yang menginginkan agar setelah mereka menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), selama satu tahun tidak diadakan integrasi dengan pasukan-pasukan TNI di Jawa.

Di samping itu mereka menginginkan agar NIT tetap dipertahankan. Oleh karena itu ketika batalyon Worang tiba di Perairan Ujung Pandang dalam perjalanannya ke Minahasa, Andi Azis dengan pasukannya meninggalkan pos mereka dan memulai penyerbuan terhadap pos-pos TNI lainnya. Dalam menghadapi tindakan dan tuntutan Andi Azis beserta pasukannya, pemerintah segera mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan agar Andi Azis menghadap pemerintah dalam mempertanggung jawabkan perbuatan.

Setelah batas ultimatum tidak dipenuhi, akhirnya Pemerintah Pusat mengirim pasukan Expedisi ke Makasar untuk menumpas kekacauan tersebut. Pasukan Expedisi terdiri dari berbagai kesatuan dari ketiga angkatan dan kepolisian dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Dengan didahului batalyon Worang yang telah mendarat pada tanggal 18 April 1950, seluruh pasukan Expedisi berhasil didaratkan pada tanggal 26 April 1950. Kemudian setelah semua pasukan berhasil didaratkan, APRIS segera bergerak dan menguasai kota Makasar dan sekitarnya.

Akhirnya Andi Azis menyerahkan diri pada akhir April 1950. Tetapi, walaupun Andi Azis telah menyerahkan diri, pertempuran-pertempuran terus berlangsung antara pasukan APRIS dan pasukan KNIL. Pertempuran baru berakhir pada bulan Agustus 1950. Pada tahun 1953 tokoh pemberontakan Andi Azis dihadapkan ke pengadilan Militer Yogyakarta. Dari hasil sidang itu ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

PERISTIWA CINANGKA

Peristiwa terjadi di Cinangka, sebuah kecamatan di Banten Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa ini disebabkan keadaan ekonomi yang sangat buruk yang melanda masyarakat Banten termasuk kecamatan Cinangka. Di Cinangka, keadaan ekonomi yang sudah memburuk sejak masa kolonial Belanda, pada masa pendudukan Jepang menjadi semakin buruk. Sistem setoran padi yang besar mengharuskan para petani menyerahkan 66% sampai 75% dari hasil panen mereka dan kegagalan Camat Cinangka membagikan bahan sandang pangan sebagai pengganti telah menyebabkan kekurangan sandang pangan yang sangat parah dalam masyarakat Cinangka.

Hal ini menimbulkan rasa tidak puas pada masyarakat Cinangka, terutama para petani. Sementara itu hak-hak istimewa yang diberikan kaum penjajah sejak masa kolonial Belanda kepada elite birokrasi

yang menimbulkan kesenjangan sosial, telah menimbulkan kebencian rakyat terhadap para birokrat. Akibatnya menimbulkan rasa dendam dalam diri mereka.

Pada tanggal 16 Agustus para petani Cinangka mendatangi tempat kediaman Camat Cinangka. Para petani menuntut agar semua persediaan bahan sandang pangan yang masih ada ditangannya diserahkan kepada para petani. Tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Camat Tubagus Mohammad Arsyad. Karena penolakan tersebut, para petani yang sudah mulai marah segera merampok rumah tersebut.

Camat Tubagus Mohammad Arsyad berhasil menyelamatkan diri dan kabur ke Anyer. Di Anyer, Camat Cinangka meminta bantuan Wedana Anyer, Raden Sukrawardi dan dua orang polisi. Kemudian Camat Cinangka datang ke Cinangka. Namun begitu mereka tiba di desa tersebut, para petani segera menyerang rombongan yang baru tiba. Dalam kerusuhan tersebut Raden Sukrawardi terbunuh sedangkan yang lain berhasil menyelamatkan diri. Selama dua hari tidak dilakukan tindakan-tindakan apa-apa terhadap kerusuhan tersebut. Baru pada tanggal 18 Agustus dikirim 30 orang polisi bersama-sama serdadu-serdadu Jepang ke daerah itu. Dalam perkelahian antara polisi dan serdadu-serdadu Jepang melawan petani-petani, seorang polisi dan tujuh petani tewas.

PERISTIWA 14 FEBRUARI 1946

Peristiwa terjadi di kota Manado, Sulawesi Utara antara masyarakat Sulawesi Utara dan NICA yang didukung serdadu-serdadu KNIL yang baru lepas dari tawanan. Pada pertengahan bulan September 1945 mendaratlah di Ujung Pandang pasukan-pasukan Sekutu dibawah pimpinan Brigadir Jenderal Mac Dougherty. Oleh karena sikap panglima tentara Sekutu yang simpati, selama dua bulan sesudah proklamasi tidak terjadi insiden apa-apa. Insiden baru terjadi ketika pada awal bulan Oktober tentara Belanda menembaki secara membabi buta orang-orang yang memakai lencana

Merah Putih. Akibat penembakan tersebut sejumlah orang Indonesia tewas, demikian pula orang-orang Cina.

Sementara itu Brigjen. Mac Dougherly kembali ke Australia dan diganti dengan Jendral dari Australia yang lain yang tidak mengerti perjuangan bangsa Indonesia. Ia menyatakan bahwa NICA adalah bagian dari Sekutu, karena itu semua raja dan pegawai negeri wajib membantu pemerintah Belanda, sedangkan yang tidak mau tunduk akan ditindak tegas. Akibatnya banyak pegawai-pegawai negeri dan raja-raja meletakkan jabatannya.

Hal tersebut mendorong Sam Ratulangi mengajukan petisi yang ditandatangani lima ratus empat puluh pemuka-pemuka masyarakat Sulawesi ke PBB. Dalam petisi tersebut mereka menyatakan bahwa Sulawesi merupakan wilayah yang tidak bisa dipisahkan dari Republik Indonesia. Akhirnya pada bulan Desember 1945 atas permintaan Belanda diadakan perundingan antara pihak Sekutu dan wakil pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Dr. Sam Ratulangi. Dari perundingan tersebut dihasilkan suatu persetujuan yang berisi pernyataan-pernyataan :

- a. Kota Makasar (Ujung Pandang) diperintah oleh komite bersama yang terdiri dari petugas-petugas Indonesia dan Belanda dibawah pengawasan Panglima Tertinggi Tentara Sekutu.
- b. Daerah-daerah lainnya akan diperintah langsung oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini oleh Gubernur Ratulangi.
- c. Status politik yang pasti untuk Sulawesi akan ditentukan nanti sesuai dengan status seluruh Indonesia berdasarkan atas persetujuan antara pemerintah RI dengan pemerintah Belanda.

Sebelum hasil perundingan sempat dilaksanakan, Belanda menggagalkan terlebih dahulu hasil perundingan tersebut, dengan mengirim pasukan-pasukannya ke daerah-daerah pedalaman pada tanggal 14 Februari 1946. Akibatnya seluruh rakyat Sulawesi menjadi marah, sehingga pecah pertempuran antara lain di Manado, yang diawali dengan peristiwa 14 Februari 1946. Peristiwa berlangsung selama dua puluh empat hari. Waktu itu bendera Merah Putih telah

berkibar di Sulawesi Utara, pasukan KNIL dibubarkan dan diganti dengan Tentara Rakyat Indonesia Sulawesi Utara (TRISU) dan menempatkan BW. Lopian sebagai pimpinan pemerintah sipil di Sulawesi Utara dengan Pangkat Residen.

Pada tanggal 10 Maret 1946, Belanda berhasil menguasai Sulawesi Utara. Tokoh-tokoh peristiwa itu ditangkap dan dipenjara, termasuk Dr. Sam Ratulangi yang diasingkan ke Serui (Irian Jaya).

PERISTIWA JALAN BALI

Peristiwa penyerangan markas serdadu-serdadu Ambon KNIL di Jalan Bali, Medan yang dikenal dengan peristiwa Jalan Bali terjadi pada tanggal 14 Oktober 1945. Peristiwa ini merupakan insiden pertama yang terjadi sejak tentara Sekutu mendarat di Sumatera Timur. Peristiwa diawali ketika seorang pengawal dari Sekutu Ambon telah merenggut dan menginjak-nginjak lambang Merah Putih yang sedang dipakai seorang anak Indonesia.

Hal ini menimbulkan kemarahan para pemuda. Serombongan pemuda mulai berkumpul didepan asrama serdadu Ambon itu untuk menyerang mereka. Maka baku hantam segera terjadi antara para pemuda Sumatera Timur dengan serdadu-serdadu bekas KNIL. Di tengah baku hantam itu, dua orang Belanda yang berada di kendaraan yang sedang meluncur melepaskan tembakan kearah rombongan yang menyebabkan tewasnya seorang Indonesia. Akibatnya suasana menjadi semakin panas.

Untuk mengatasi hal ini, pasukan Jepang bersama BPI dibawah pimpinan Ahmad Tahir segera tiba dan menyebarkan rombongan itu dengan janji orang-orang Ambon akan dipindahkan dari Pension Wilhelmina di Jalan Bali secepatnya. Akhirnya khalayak ramai itu segera bubar dan meninggalkan gedung asrama, akan tetapi belum dua jam mereka bubar tiba-tiba sejumlah besar pemuda datang menyerang asrama dan setiap orang Ambon yang ditemui diserangnya. Akibatnya enam orang meninggal, dan sejumlah besar

orang Ambon dan Manado terbunuh. Diawali dari peristiwa ini gelombang kekerasan pemuda menjalar dengan cepat ke daerah-daerah lain. Kekerasan di Jalan Bali telah membawa perubahan-perubahan besar dalam gerakan pemuda yang membangkitkan kegairahan untuk ikut ambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

PERISTIWA KERETA API MAUT

Satu bentuk kekejaman Belanda terhadap rakyat Indonesia pada masa Perang Kemerdekaan. Peristiwa terjadi pada tanggal 23 November 1947 dalam sebuah gerbong kereta api yang sedang dalam perjalanan dari Bondowoso ke Surabaya. Pada waktu itu, seratus orang tawanan penjara Bondowoso berbaris di muka penjara Bondowoso dan disuruh masuk dalam gerbong barang kereta api yang terbuat dari seng. Seratus orang tawanan itu dibagi dalam tiga buah gerbong masing-masing, gerbong III, tiga puluh delapan orang, gerbong II tiga puluh orang dan gerbong I tiga puluh dua orang.

Setelah mereka masuk kedalam gerbong-gerbong tersebut, kemudian gerbong-gerbong itu dikunci dari luar oleh anggota KNIL yang mengawal mereka. Selanjutnya ketika datang kereta api dari Situbondo, ketiga gerbong tersebut digandengkan dengan kereta itu dan diberangkatkan ke suatu tujuan yang tidak mereka ketahui sama sekali. Kereta api diberangkatkan pukul 07.00 pagi, selama perjalanan gerbong-gerbong yang berisi tawanan tersebut tidak diberi udara sama sekali. Akibatnya baru 20 menit perjalanan sudah mulai ada yang pingsan. Teriakan minta tolong untuk dibukakan pintu dan teriakan minta minum, yang berasal dari dalam gerbong tidak dihiraukan, tetapi mereka malah menerima ejekan dan caci maki dari para pengawal tersebut.

Gerbong-gerbong itu dibuka ketika kereta api berhenti di stasiun Wonokromo (Surabaya), yang memang tujuan akhir perjalanan. Pada waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 19.15, ketika gerbong tersebut

dibuka ternyata didalam gerbong nomer tiga gerbong paling belakang tiga puluh delapan orang tawanan yang berada didalamnya tidak ada seorangpun yang hidup. Mereka meninggal dalam keadaan yang mengenaskan, kulit dan daging mereka hangus bagaikan terbakar.

Sementara itu digerbong tengah (nomer II) yang berisi tiga puluh orang ada delapan orang tawanan yang meninggal. Sedangkan gerbong nomer I yang berjumlah tiga puluh dua orang semuanya masih hidup, tetapi dalam keadaan menyedihkan. Perkara itu kemudian diajukan kemuka pengadilan militer Belanda (2 Agustus 1948). Oleh pengadilan militer, sepuluh orang pelakunya dijatuhi hukuman antara dua sampai enam bulan. Akan tetapi terdakwa utama, yang memimpin pengangkutan tawanan-tawanan tersebut, Kapten Antinan tidak ditahan atau dibebaskan dari tindakan atau penganiayaan tersebut.

PERISTIWA PEGANGSAAN

Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16/17 Agustus 1948 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, antara pemuda-pemuda dan pandu-pandu RI dengan polisi Belanda. Kejadian diawali dengan bentrokan antara pemuda-pemuda dan pandu-pandu RI yang sedang mengadakan peringatan usia tiga tahun negara RI dengan polisi Belanda yang tiba-tiba menyerang gedung tempat peringatan diselenggarakan. Sehingga menyebabkan pertengkaran mulut antara kedua belah pihak. Setelah terjadi pertengkaran mulut, polisi Belanda melepaskan tembakan-tembakan dan menewaskan seorang pandu yang bernama Suprpto.

Selain melepaskan tembakan-tembakan, polisi Belanda berhasil menduduki gedung dan menyita dokumen-dokumen milik pemerintah. Akibat peristiwa tersebut, pemerintah RI menolak untuk melanjutkan perundingan dengan Belanda sebelum kekebalan diplomatik RI di Jakarta dijamin dan dihormati. Sementara itu, sebagai protes atas kejadian tersebut Dwidjo Soewodjo, ayah dari pandu Suprpto dan Dr. Verdoorn minta berhenti sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda.

PERISTIWA RENGASDENGKLOK

Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dibawa ke sebuah desa di sebelah utara karawang yang bernama Rengasdengklok. Peristiwa terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 Pk. 04.30. WIB. Pada waktu itu Ir. Soekarno dan Moh. Hatta, tokoh-tokoh tua yang menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dibawa dan diamankan ke Rengasdengklok oleh golongan muda (Chairul Saleh cs) yang menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Sebelumnya golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan disalah satu lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur Jakarta, pada tanggal 15 Agustus. Dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan, dilepaskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Ir. Soekarno pada malam harinya. Tetapi usul tersebut ditolak Ir. Soekarno, karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI, badan persiapan kemerdekaan. Dengan tujuan untuk menghindari Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dari segala pengaruh Jepang, mereka membawa kedua tokoh golongan tua itu ke Rengasdengklok. Mereka mendesak agar pernyataan proklamasi segera dinyatakan, karena menurut mereka keadaan sudah mendesak dan jika proklamasi tidak segera dinyatakan akan terjadi pemberontakan dari rakyat yang tidak menginginkan proklamasi ditunda.

Menghadapi desakan tersebut, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tetap tidak berubah pendirian. Sementara itu di Jakarta Chairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota Pembela Tanah Air (PETA) mendukung rencana tersebut. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Jusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Mr. Achmad Soebardjo, Kunto dan Mbah Sudiro ke Rengasdengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati dan Guntur. Pada tanggal 16 tengah malam rombongan tersebut

sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945 pernyataan proklamasi dikumandangkan.

PERISTIWA TIGA DAERAH

Peristiwa Tiga Daerah terjadi di sebagian wilayah Jawa Tengah (Brebes, Tegal, Pekalongan) pada bulan Oktober 1945. Peristiwa ini merupakan salah satu dari pergolakan yang muncul di beberapa daerah di Indonesia pada bulan-bulan pertama sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan disebut Revolusi Sosial. Peristiwa terjadi akibat rasa tidak puas secara sosial ekonomis rakyat setempat pada elite birokrasi yang telah memerintah atas nama Belanda pada dasawarsa kekuasaan kolonial. Taraf hidup kalangan elite birokrasi yang sangat berbeda secara menyolok dengan penduduk kelas bawah memperlebar jurang pemisah dua kelompok tersebut. Hubungan tradisional patron clien antara birokrasi dan petani telah rusak. Dalam diri kelas bawah telah tertanam dendam untuk membalas hal tersebut dikemudian hari. Dengan tujuan memecat elite birokrasi dan menggantinya dengan penguasa Indonesia yang berbeda nilai dan sikapnya, masyarakat di bawah pimpinan Pemimpin-pemimpin Nasionalis Lokal melakukan serangan terhadap elite-elite birokrasi.

Serangan atau revolusi sosial dimulai ketika seorang kepala Desa dipermalukan dan dipecat dari jabatannya di sebuah Kecamatan di Tegal Selatan. Diawali dari peristiwa itu, dalam tempo satu Minggu revolusi sosial telah melanda kawasan pedesaan tiga daerah (Brebes, Tegal, Pekalongan). Mereka menyerang, menculik dan membunuh wedana, camat, kepala desa, dan pejabat-pejabat elite birokrasi lainnya. Selain itu polisi, Tentara Keamanan Rakyat, orang-orang Cina dan Eropa turut menjadi serangan rakyat. Harta kekayaan orang Cina yang kelihatan seperti toko-toko dan penggilingan padi, dirampok dan diambil alih. Akibatnya banyak pejabat-pejabat elite birokrasi, orang-orang Cina dan Eropa yang tewas terbunuh. Puncak dari kekejaman masyarakat terjadi ketika pada pertengahan bulan

Oktober, lebih dari seratus orang Indo-Eropa, Ambon dan Manado mati terbunuh karena dianggap pro tentara Belanda. Peristiwa berakhir pada awal bulan November 1945. Setelah berhasil menggulingkan elite birokrasi setelah itu disusun orang-orang yang akan menggantikan administrator lama. Tokoh lokal yang paling tersohor dalam peristiwa Tiga Daerah ialah Kutil dari desa Talang, sebuah kecamatan di Selatan Tegal. Oleh karena itu peristiwa Tiga Daerah sering juga disebut dengan "Gerakan Kutil".

PERISTIWA TIGA MARET

"Peristiwa Tiga Maret" adalah peristiwa pemberontakan laskar-laskar Islam terhadap Pemerintah Daerah Republik Indonesia di Sumatera Barat. Peristiwa terjadi pada tanggal 3 Maret 1947 di beberapa kota dataran tinggi dan Bukit Tinggi, dengan tujuan untuk merebut kekuasaan Pemerintah. Terjadinya peristiwa disebabkan rasa tidak puas tentara partai-partai politik Islam (Hizbullah dan Sabillah) terhadap pemerintah, terutama sejak Ismael Lengah menggantikan Dahlan Djambek sebagai komandan Divisi III, sebuah divisi yang bertanggung jawab atas daerah Sumatera Barat dan Riau pada tahun 1946. Bila pada awal revolusi mereka mempunyai peranan yang cukup kuat, maka sejak Ismael Lengah menjadi komandan pengaruh mereka mulai berkurang, mereka yang semula mendapat dana dari pemerintah, kini harus menghidupi laskar mereka, karena bantuan yang seharusnya dibagi langsung disalurkan kepada Tentara Republik Indonesia oleh pemerintah. Sementara itu laskar-laskar ini tidak diijinkan untuk menghimpun sumbangan masyarakat karena pemerintah telah mengambil kekuasaan untuk menghimpun sumbangan. Bahkan ketika gerombolan-gerombolan kecil bersenjata disatukan dalam Batalyon Divisi III (Divisi Banteng), tidak ada usaha untuk memasukan Hizbullah ke dalam Divisi tersebut. Karena hal itu, maka pada rapat ulama se Sumatera di Padang Panjang dari tanggal 28 Februari hingga 3 Maret 1947, mereka menyatakan kecurigaannya bahwa para pemimpin pemerintah yang berpendidikan

Barat seperti Residen Rasyid dan Ismael Lengah bersimpati dan sependapat dengan Belanda. Akhirnya diputuskan untuk melakukan pemberontakan terhadap mereka. Pemberontakan dilakukan pada tanggal 3 Maret malam dibawah pimpinan Sutan Mangkuto. Dalam pemberontakan ini laskar Hizbullah, beberapa laskar yang lain dan tentara berusaha menculik dan menawan Rasyid, Lengah dan para pejabat tinggi. Tetapi usaha mereka mengalami kegagalan, karena walaupun berhasil menawan sejumlah pejabat tinggi, mereka tidak berhasil menangkap Rasyid dan Lengah, karena mereka telah lebih dahulu melarikan diri. Akhirnya usaha perebutan kekuasaan ini dihentikan pada 3 Maret pagi. Selanjutnya dengan perantara tentara-tentara TRI yang beragama Islam kedua pihak didamaikan dan para pelaku dibebaskan, kecuali beberapa pemimpin yang mendapat penundaan hukum.

PERISTIWA 3 JULI 1946

Adalah percobaan perebutan kekuasaan yang dilakukan kelompok Persatuan Perjuangan (PP) untuk menggulingkan dan mengganti pemerintah Republik Indonesia. Peristiwa terjadi di Istana Presiden Yogyakarta pada tanggal 2 menjelang 3 Juli 1946. Peristiwa diawali kelompok PP yang menentang politik berunding pemerintah RI (Syahrir) dengan merencanakan untuk mengadakan rebutan kekuasaan. PP mengancam keras nota jawaban Syahrir pada tanggal 27 Maret yang hanya menuntut pengakuan kedaulatan de facto atas Jawa dan Madura saja, karena itu ketegangan semakin meruncing. Sementara itu pemerintah telah mengetahui rencana perebutan kekuasaan PP. Sebab itu tokoh-tokoh PP seperti Tan Malaka dan Ahmad Soebardjo di tangkap dan ditahan. Namun rencana kudeta tetap tidak berubah, maka mereka mulai menjalankan rencana tersebut. Kegiatan dimulai dengan penculikan Perdana Menteri Syahrir dan tokoh-tokoh lainnya seperti Menteri Kesehatan dr. Darmasetiawan, Jenderal Soedibjo dan lain-lain di Solo pada tanggal 27 Juni 1946. Berkat seruan Presiden melalui radio, mereka yang diculik dibebaskan kembali pada tanggal 1 Juli 1946. Tetapi peristiwa

ini tidak menghentikan usaha PP untuk merebut kekuasaan, karena keesokan malamnya menjelang tanggal 3 Juli, Mr. Achmad Soebardjo, Mr. Iwa Koesoemasumantri dan Mayor Jenderal Soedarsono mencoba memaksa Presiden agar menandatangani konsep baru yang diajukan, yaitu :

1. Agar Presiden memberhentikan semua Menteri dalam Kabinet Syahrir dan Amir Syarifuddin.
2. Agar Presiden menyerahkan kekuasaannya dibidang militer kepada Panglima Besar Angkatan Perang, serta di bidang politik, sosial, dan ekonomi kepada DPP.
3. Presiden mengangkat sepuluh orang anggota DPP yang namanya telah disebut dalam naskah.
4. Presiden mengangkat tiga belas orang menteri yang memegang kementrian dan dua belas ornag menteri negara, yang namanya juga telah disebut dalam naskah.

Presiden menolak permintaan tersebut. Pada saat itu juga keempat orang tersebut ditangkap. Selain mereka, tokoh-tokoh lain yang berada di belakang peristiwa tersebut juga ditangkap, yang keseluruhannya berjumlah empat belas orang termasuk Tan Malaka. Masing-masing tokoh dijatuhi hukum penjara sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

PERISTIWA PANIWEN

Peristiwa paniwen merupakan salah satu bentuk kekejaman Tentara Kolonial Belanda dalam aksi militernya di Indonesia. Peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 1949 di Paniwen, Jawa Timur. Pada hari itu, masyarakat yang hendak bersembahyang di gereja terhalang karena Tentara Belanda sedang mengadakan "pembersihan". Dalam "pembersihan" ini Belanda menembak orang-orang yang tidak bersalah yang berada di sekitar gereja. Akibat tindakan tersebut, sepuluh orang meninggal diantaranya seorang anggota majelis gereja.

PERTEMPURAN SURABAYA

Pertempuran Surabaya merupakan salah satu dari serangkaian pertempuran yang terjadi di Surabaya, pada tanggal 10 Nopember 1945. Peristiwa ini diawali ketika Brigade 49/Divisi India ke-23 tentara Sekutu (AFNEI) di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Kota Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Pada mulanya rakyat Surabaya menyambut kedatangan mereka dengan baik. Tetapi uluran tangan ini tidak disambut dengan baik oleh Tentara Sekutu, bahkan mereka menyerbu penjara Republik untuk membebaskan perwira-perwira Sekutu dan pegawai RAPWI (*Relief of Allied Prisoners of War and Internees*). Akibatnya rakyat Surabaya menjadi marah dan pada tanggal 28 Oktober menyerang pos-pos sekutu di seluruh kota Surabaya. Menghadapi keadaan yang demikian, pimpinan Tentara Sekutu meminta bantuan kepada pemimin-pemimpin Indonesia untuk memerintahkan penghentian tembak-menembak. Dengan bantuan Presiden Soekarno akhirnya berhasil disetujui perjanjian penghentian tembak-menembak. Tetapi kemudian perjanjian penghentian tembak menembak ini tidak dihormati Tentara Sekutu.

Tanpa berunding terlebih dahulu, pada tanggal 9 Nopember 1945 pimpinan sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pimpinan dan orang-orang Indonesia yang bersenjata untuk melapor dan meletakkan senjatanya ditempat-tempat yang telah ditentukan untuk selanjutnya menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Karena rakyat Surabaya tidak mengindahkan ultimatum tersebut, maka pecalah pertempuran pada tanggal 10 Nopember 1945. Pertempuran berlangsung sampai awal Desember 1945. Dalam pertempuran yang tidak seimbang ini banyak pejuang-pejuang Indonesia yang gugur. Sementara itu, dipihak sekutu kehilangan pimpinannya, Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, yang ditemukan mati tanpa diketahui sebabnya.

PERTEMPURAN TANAH ARON

Pertempuran Tanah Aron merupakan salah satu dari dua pertempuran yang mengawali pertempuran Margarana. Pertempuran terjadi pada bulan Juli 1946 antara pasukan Belanda (NICA) melawan pejuang-pejuang Bali di bawah pimpinan Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, yang tidak senang dengan kedatangan NICA di Tanah Aron khususnya dan Bali umumnya. Oleh karena itu pada tanggal 5 Juli 1946 pasukan induk resimen Ngurah Rai dan pasukan-pasukan lain mulai mengadakan rapat dan persiapan-persiapan untuk menyambut kedatangan pasukan NICA. Pasukan Pombar segera disebar di daerah-daerah yang akan dilalui pasukan NICA. Di sebelah timur Laut desa Ababi, Abang dan Culik. Di sebelah selatan Bukit Pawon dan di sebelah barat Pawon, desa Persagi.

Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Juli 1946 sekitar jam 07.00 pagi, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai memerintahkan untuk mengatur posisi yang telah ditentukan. Pada kurang lebih pukul 09.00 mulai terdengar suara tembakan dari arah selatan Bukit Pawon. Dimulai dari sini, beberapa menit kemudian pertempuran menjalar ke wilayah-wilayah lain yang dilalui Tentara NICA. Maka pecahlah pertempuran di sekitar daerah Tanah Aron. Pertempuran seru ini berlangsung sampai sekitar pukul 15.00.

Sementara itu kabut telah mulai menutupi daerah pertahanan pasukan induk tentara kita yang dipimpin Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, sehingga sulit bagi Tentara NICA untuk mengetahui kemana pasukan induk bergerak. Dalam pertempuran ini kurang lebih 82 orang Tentara NICA menjadi korban, sedangkan pasukan Republik tetap utuh.

PERISTIWA WESTERLING

Pembantaian secara besar-besaran yang dilakukan oleh seorang Kapten Belanda, Raymond Westerling terhadap rakyat Sulawesi Selatan. Pada waktu itu, tentara Australia yang telah menyelesaikan

tugasnya melucuti tentara Jepang, menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda. Kedatangan pasukan Belanda (NICA) menimbulkan ketegangan antara pemuda-pemuda dengan NICA, yang mulai memecah belah masyarakat dengan mempengaruhi tokoh-tokoh daerah. Maka tampillah pemuda-pemuda pelajar, antara lain A. Rivai, Paersi dan Wolter Mongisidi yang mengusulkan kepada Pusat Pemuda Pelajar Nasional untuk mengadakan perlawanan dengan kekerasan.

Mereka kemudian melakukan aksi-aksi yang mengganggu keamanan Belanda, merebut tempat-tempat strategis di kota Makasar yang telah diduduki NICA antara lain Stasiun Radio Makasar, Tangsi Polisi di Jalan Gowa, serta H. Express. Tindakan yang dilakukan para pemuda itu tentu saja menjengkelkan kalangan NICA. Dalam perkembangan selanjutnya Westerling mengadakan "pembersihan" dengan tujuan untuk membersihkan daerah Sulawesi Selatan dari pejuang-pejuang Republik dan mematikan perlawanan terhadap pemberontak Negara Indonesia Timur (NIT).

Dengan pasukannya yang bersenjata lengkap, Westerling mendatangi berpuluh-puluh desa satu-persatu, kemudian mengumpulkan semua penduduk desa baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak dalam sebuah lapangan terbuka. Setiap penduduk ditanyakan satu-persatu dimana gerilyawan-gerilyawan bersembunyi dengan posisi siap ditembak. Bila mereka tidak menjawab, maka dalam sekejap peluru menembus badan mereka, dengan maksud agar orang selebihnya ketakutan dan mau berbicara, akan tetapi tidak satupun jawaban keluar dari mereka, sehingga tembak-tembakan menyusul ke arah kumpulan manusia tersebut. Demikianlah hal tersebut berlangsung di desa-desa. Selanjutnya peristiwa ini berlangsung selama tiga bulan sejak tanggal 11 Desember 1946. Dalam peristiwa ini kurang lebih empat puluh ribu orang tak berdosa mati akibat kekejaman Westerling.

PERTEMPURAN AMBARAWA

Pertempuran terjadi di kota Ambarawa, pada bulan November hingga pertengahan Desember 1945. Pertempuran diawali ketika pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel mendarat di Semarang. Tentara Sekutu yang ketika datang berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan rakyat Indonesia, tetapi hanya mengurus tawanan perang. Tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah disambut baik oleh rakyat semarang. Tetapi kebaikan rakyat Semarang itu tidak dibalas setimpal oleh Tentara Sekutu. Karena mereka membebaskan secara sepihak para interniran Belanda di Magelang. Akibatnya timbul insiden bersenjata di Magelang, yang meluas menjadi pertempuran antara Sekutu dan NICA dengan pasukan Indonesia. Setelah dilakukan perundingan antara Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel, secara diam-diam tentara Sekutu meninggalkan Magelang, mundur ke Ambarawa. Oleh Resimen Kedu Tengah pimpinan Letnan Kolonel M. Sarbini segera dilakukan pengejaran.

Gerakan mundur mereka, berhasil ditahan oleh pasukan AM di bawah pimpinan Sastrodihardjo yang diperkuat pasukan Ambarawa, Suruh dan Surakarta. Begitu pula ketika mereka mundur ke Desa Ngipik, tentara Sekutu kembali berhasil dihadang Batalyon Satu Surjosumpeno. Pada saat pengunduran ini tentara Sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa, yang menewaskan Komandan Resimen Banyumas, Letnan Kolonel Isdiran, ketika sedang berusaha membebaskan kedua desa tersebut.

Sementara itu di saat terjadi pertempuran di desa sekitar Ambarawa, di Ambarawa terjadi insiden bersenjata antara rakyat dan tentara Sekutu. Insiden meluas menjadi pertempuran yang terjadi di sepanjang rel kereta api yang membelah kota Ambarawa. Dalam pertempuran ini pasukan Indonesia membentuk jajaran pertahanan sepanjang rel sebelah utara, sedangkan tentara Sekutu bertahan di tangsi-tangsi militer sebelah selatan rel. Pada tanggal 23 November 1945 mulai berlangsung tembak menembak antara kedua pasukan. Tentara Sekutu bertahan di komplek gereja dan perkuburan Belanda

di jalan Marga Agung. Mereka mengerahkan tawanan-tawanan Jepang yang berusaha menyusup wilayah yang diduduki pasukan Indonesia, karena itu pasukan Indonesia meninggalkan kedudukannya dan pindah ke Bedonò. Pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan Indonesia kembali melancarkan serangan secara serentak. Pertempuran berakhir pada tanggal 16 Desember 1945, setelah pasukan atau tentara Sekutu berhasil dihalau mundur ke Semarang.

PERTEMPURAN BOJONGKOKOSAN

Peristiwa Bojongkokosan merupakan peristiwa yang mengguncangkan tentara Sekutu yang terjadi di Jawa Barat. Pertempuran dilakukan oleh rakyat Sukabumi, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Laskar-laskar rakyat dengan cara memotong hubungan bantuan militer pihak Sekutu yang membonceng NICA dari Jakarta ke Bandung. Peristiwa terjadi pada tanggal 19 Desember 1945, di desa Kompa - Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sukabumi merupakan daerah perkebunan yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi di samping merupakan daerah palang pintu bagi kekuatan Belanda/NICA, sehingga ada istilah "apabila ingin menguasai Jakarta kuasai dulu Jawa Barat, dan apabila ingin menguasai Jawa Barat kuasai Sukabumi".

Sebelum pertempuran Bojongkokosan telah terjadi pertempuran melawan sekutu di daerah Sukabumi lainnya yaitu di daerah Gekbrong, yang terjadi pada akhir bulan. Diawali pertempuran Gekbrong, terjadi peristiwa Bojongkokosan. Pertempuran Bojongkokosan diawali ketika pada tanggal 2 Desember masyarakat Bojongkokosan melakukan gangguan kecil terhadap tentara Sekutu yang berada di sana. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember kembali tentara Sekutu diganggu ketika sedang menuju ke arah Bogor. Bila kedua gangguan yang dilakukan itu masih bersifat kecil-kecilan yang tidak memakan korban, maka gangguan yang dilakukan rakyat, TKR

dan Laskar-laskar rakyat mencapai puncaknya pada hari Minggu tanggal 9 Desember 1945.

Pada waktu itu setelah mendapat berita dari pos Cigombong bahwa kurang lebih pada pukul 12.00 siang akan ada dua truk tentara Sekutu yang menuju Sukabumi, maka Komandan Kompi III wilayah Bojongkokosan, Kapten Murad Idrus, menginstruksikan agar TKR, bersama Barisan Kelaskaran Rakyat dan rakyat menduduki beberapa tempat pertahanan yang telah dipersiapkan di antara kedua pinggir utara dan selatan Bojongkokosan. Dengan kekuatan pasukan TKR sebanyak 165 orang dan persenjataan seperti pistol, granat tangan, golok, bambu runcing dan sebagainya bersiap-siaplah mereka menyambut kedatangan konvoi Sekutu. Sekitar pukul 15.00 bergerak tank-tank raksasa diikuti panzer negara dan truk-truk yang berisi pasukan Gurkha (pasukan andalan Sekutu), yang keseluruhannya berjumlah seratus truk dan persenjataan-persenjataan lain. Konvoi ini diikuti pula pesawat udara.

Melihat masuknya konvoi Sekutu, segera brikade menghalangi perjalanan tersebut yang menimbulkan kepanikan di pihak mereka. Pada saat itulah Komandan kompi pihak Republik Indonesia memberi isyarat tembakan dua kali sebagai tanda komando pertempuran dimulai, maka pecalah pertempuran sengit antara pasukan Sekutu dengan pasukan dan masyarakat Bojongkokosan. Pertempuran berlangsung selama hampir tiga jam dengan diselingi guyuran hujan. Kira-kira pukul 17.00 hujan mulai reda, pasukan Sekutu melakukan tembakan-tembakan dari pesawat udara kearah pertahanan Republik Indonesia yang sebenarnya sudah kosong dan diisi oleh tentara Sekutu. Akibatnya banyak tentara Sekutu yang menjadi korban pasukannya sendiri. Akhirnya setelah cuaca terang kembali, Sekutu memberikan isyarat sebagai tanda penghentian pertempuran. Sisa pasukan yang ada meneruskan perjalanan sambil terus menembaki sepanjang jalan sekelilingnya menuju Sukabumi. Dengan demikian berakhir pertempuran Bojongkokosan. Dalam pertempuran ini kurang lebih empat puluh orang gugur, diantaranya Komandan Regu I Seksi II yaitu Saudara Saban dan Saudara Aceng.

PERTEMPURAN BULAK CABE

Pada tanggal 9 Oktober 1945 sebuah kapal terbang Sekutu yang memuat 26 orang serdadu India jatuh di daerah Bekasi. Bagi rakyat Bekasi, yang tidak menyukai kedatangan Tentara NICA, ke 26 orang serdadu Sikh yang selamat itu justru melawan tetapi akhirnya mereka menyerah. Oleh karena para pejuang dan rakyat yang dalam keadaan marah, sehingga semua serdadu itu diadili dengan mempergunakan hukum revolusi (hukuman mati), karena dianggap sebagai tentara NICA.

Akibat peristiwa itu, Tentara Sekutu dan NICA melakukan serangkaian serangan ke beberapa daerah Bekasi dan sekitarnya termasuk Desa Bulak Cabe. Serangan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 1945 pukul 11.00 siang hari jum'at, disaat penduduk Desa Bulak Cabe akan melakukan sembahyang Jum'at. Mereka sengaja memilih hari tersebut sebab mereka menganggap pada hari itu semua rakyat dalam keadaan tidak siap tempur, sehingga mereka dapat leluasa melakukan serangan. Akan tetapi ternyata apa yang menjadi dugaan mereka meleset, sebab para pejuang selalu dalam keadaan siap tempur sekalipun mereka akan menjalankan ibadah. Dengan semangat berjihad di jalan Allah, mereka menyambut serangan pasukan NICA.

Maka pada tanggal 12 Oktober pecalah pertempuran antara pejuang-pejuang dan rakyat Bulak Cabe melawan Tentara NICA. Menghadapi perlawanan rakyat, pasukan NICA lari ke Pondok Gede dengan meninggalkan 6 mayat. Keesokan harinya pasukan NICA memperbesar kekuatannya. Oleh karena kekuatan yang tidak seimbang, akhirnya dengan terpaksa pasukan Republik mundur ke daerah Kampung Pedurenan dan Kampung Kranji dan bertahan di daerah itu.

PERTEMPURAN DUA HARI DI SURABAYA

Pertempuran berlangsung mulai tanggal 28 hingga 30 Oktober 1945. Pertempuran itu terjadi antara tentara Sekutu yang dipimpin

Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby melawan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), serta pemuda-pemuda dan rakyat Surabaya. Kejadian diawali ketika pada tanggal 28 Oktober 1945, tentara Inggris mulai mengganggu penduduk Surabaya dengan merampas mobil-mobil dan senjata milik pemuda-pemuda Surabaya. Sebelumnya beberapa kapal udara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang berisi perintah kepada penduduk Surabaya dan Jawa Timur untuk menyerahkan kembali semua senjata dan peralatan Jepang bagi tentara Inggris. Dan diancam bila ada orang yang memegang senjata serta tidak bersedia menyerahkan pada Sekutu akan ditembak.

Penyebaran pamflet itu tentu saja melanggar persetujuan yang dibuat pada tanggal 26 Oktober 1945, bahwa yang dilucuti senjatanya hanya tentara Jepang. Tentara Inggris sebagai wakil Sekutu akan membantu dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban dan perdamaian, dan setelah semua tentara Jepang dilucuti, mereka akan diangkut melalui laut. Oleh karena itu dr. Mustopo mengontak Brigjen A.W.S. Mallaby. Ternyata Mallaby merasa tidak mengetahui hal tersebut. Namun walaupun begitu, Mallaby memberi alasan bahwa walaupun telah ada persetujuan, selaku militer ia tetap harus mentaati perintah atasannya. Pada tanggal 28 Oktober tentara Inggris mulai mengganggu penduduk Surabaya. Tindakan tentara Sekutu menimbulkan kemarahan Pemuda Republik Indonesia Daerah, pemuda-pemuda dan rakyat Surabaya. Pemerintah yang baru saja mengkonsolidasi kekuasaan dan wibawanya tidak mampu menahan kemarahan pemuda-pemuda dan masyarakat Surabaya.

Begitu pula TKR dan Polisi, merasa bahwa Inggris telah bersikap sewenang-wenang dan menginjak kehormatan Republik Indonesia, karena itu diadakan perundingan antara para pemimpin pemuda seperti Sumarsono pemimpin Pemuda Republik Indonesia (PRI) dan Sutomo pemimpin BPRI dengan dr. Mustopo. Dari perundingan tersebut didapat kesepakatan untuk membalas tindakan Belanda. Hasil perundingan tersebut kemudian disiarkan melalui Radio Pemberontakan. Pada tanggal 28 Oktober 1945 malam mulailah dilakukan pengepungan daerah-daerah pasukan Inggris baik yang berada di dalam kota maupun yang berada di pelabuhan, sehingga

pihak Inggris terpaksa mundur. Dalam serangan ini para pemuda dan rakyat Surabaya berhasil merebut lapangan terbang Morokrembangan. Karena keadaan yang sudah terdesak dan tak mampu mengatasi kemarahan rakyat Surabaya, akhirnya pihak Inggris meminta Presiden Sukarno di Jakarta untuk mengadakan perundingan gencatan senjata. Pada tanggal 29 Oktober 1945, dimulai perundingan gencatan senjata antara Pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan pihak Inggris pimpinan Brigjen Mallaby. Malam itu juga berhasil dicapai enam pokok persetujuan yang kemudian disiarkan lewat Radio Pemberontakan. Sedangkan hasil persetujuan secara terperinci baru dapat disetujui pada keesokan harinya, tanggal 30 Oktober 1945. Hasil persetujuan tersebut antara lain tentara Sekutu tidak akan menjaga keamanan kota dan TKR diakui, serta penggunaan senjata oleh kalangan tersebut tetap diperbolehkan.

PERTEMPURAN GEKBRONG

Adalah pertempuran rakyat Sukabumi, Jawa Barat melawan tentara Sekutu dan Netherland India Civil Administration (NICA), yang sedang melakukan perjalanan Jakarta ke Bandung melalui Bogor, Puncak, Cianjur dalam rangka memberi bantuan pasukan dan perlengkapan senjata bagi Sekutu yang sedang bertempur di Bandung dan sekitarnya.

Karena mengetahui kedatangan Sekutu ke tiap-tiap daerah selalu di bonceng tentara NICA, maka timbulah kemarahan rakyat terhadap Sekutu yang bertugas melucuti senjata Jepang. Peristiwa terjadi pada akhir November 1945. Pada waktu itu massa rakyat yang terdiri dari pemuda-pemuda dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang berjumlah kurang lebih sepuluh ribu telah berkumpul di sekitar daerah Gekbrong. Pada pukul 13.00, ketika satu konvoi besar sebanyak kurang lebih seratus truk yang datang dari Cianjur menuju Sukabumi tiba di daerah Senggam Pancuran Lulur, daerah yang tidak jauh dari Gekbrong, massa yang telah siap segera menyerang.

Maka pecahlah pertempuran. Pertempuran berlangsung hingga pukul 05.00 sore dengan membawa korban pada kedua belah pihak. Pertempuran berakhir setelah Barisan Pemuda dan TKR terpaksa mengundurkan diri dari medan pertempuran karena persenjataan Sekutu yang lebih kuat dari pihak Republik. Selanjutnya tentara Sekutu meneruskan perjalanannya menuju Bogor. Pertempuran ini merupakan pertempuran pertama dengan Sekutu di daerah Sukabumi. Walaupun dalam pertempuran Gekbrong ini pihak Republik belum berhasil, namun tidak mengurangi semangat juang rakyat Sukabumi. Bahkan dapat dikatakan pertempuran Gekbrong merupakan pendorong munculnya pertempuran Bojongsokosan.

PERTEMPURAN LIMA HARI LIMA MALAM DI PALEMBANG

Terjadi pada bulan Maret 1947 antara rakyat Palembang melawan tentara Sekutu dengan tentara Netherland India Civil Administration (NICA). Pertempuran berlangsung selama lima hari lima malam, mulai tanggal 1 Januari 1947 sampai tanggal 6 Januari 1947. Peristiwa diawali ketika tentara Sekutu yang mengikutsertakan tentara NICA mendarat di kota Palembang pada tanggal 12 Oktober 1945 di bawah pimpinan Letnan Kolonel (Letkol.) Carmichel. Pemerintah Republik Indonesia di Palembang menerima kedatangan mereka, dan menetapkan bahwa pasukan Sekutu itu hanya diperbolehkan menempati daerah Palang Semut.

Perintah tersebut ternyata tidak dituruti pasukan Sekutu, tetapi mereka meluaskan daerahnya ke tempat-tempat lain dan menggeledah rumah-rumah penduduk untuk mencari senjata. Akibatnya timbul insiden-insiden antara pasukan sekutu dengan pemuda setempat. Sementara itu, dalam suasana yang demikian tentara Sekutu terus menambah kekuatannya, sehingga dalam bulan Maret 1946 pasukan Sekutu telah berjumlah kurang lebih dua Batalyon. Disamping terus menambah pasukannya, mereka juga melindungi masuknya pasukan Belanda, sehingga jumlah pasukan

Belandapun semakin banyak. Ketika tiba saatnya tentara sekutu meninggalkan Palembang pada bulan Oktober 1946, mereka menyerahkan kedudukan-kedudukannya pada Belanda. Akibatnya insiden-insiden bersenjata makin sering terjadi dan kota Palembang menjadi semakin hangat. Keadaan semakin tegang ketika Belanda menuntut agar kota Palembang di kosongkan. Permintaan itu ditolak oleh para pemuda, sehingga meletuslah pertempuran. Disaat pertempuran tempat berlangsung, untuk mengulur waktu guna mendatangkan bala bantuan, Belanda mengajak berunding. Pemerintah Republik Indonesia menerima ajakan Belanda itu, tetapi disaat perundingan tengah berlangsung, pada tanggal 1 Januari 1947 pertempuran meletus kembali. Dengan pesawat terbang, tembakan alteleri dengan meriam-meriam kapal dan berbagai senjata berat, Belanda menggempur kota Palembang. Sebaliknya dengan peralatan yang sederhana rakyat Palembang membalas serangan tersebut, mereka berhasil menenggelamkan sebuah kapal pemburu dan menenggelamkan perahu motor milik Belanda di Sungai Musi. Pertempuran berlangsung selama lima hari lima malam. Pertempuran itu baru berakhir ketika dicapai persetujuan gencatan senjata antara Belanda dan pemerintah Republik Indonesia di Palembang, pada tanggal 6 Januari 1947. Sesuai dengan isi persetujuan itu, pasukan Indonesia mengundurkan diri dari kota Palembang sejauh 20 kilo meter.

PERTEMPURAN LIMA HARI DI SEMARANG

Pertempuran yang terjadi antara Tentara Keamanan Rakyat dan Pemuda-pemuda dengan Veteran Angkatan Laut Jepang dan Pasukan *Kidobutai* Jepang. Peristiwa diawali dengan pemberontakan kurang lebih empat ratus orang Veteran Angkatan Laut Jepang yang pernah bertempur di Solomon. Mereka (tawanan-tawanan) itu yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula menjadi pabrik senjata, menyerang Polisi Indonesia yang mengawal mereka pada waktu dipindahkan ke Semarang. Tawanan-tawanan tersebut

melarikan diri dan bergabung dengan *Kidobutai* di Jatingaleh (Batalyon setempat Jepang pimpinan Mayor Kido). Kemudian mereka bergerak melakukan perlawanan dengan alasan mencari dan menyelamatkan orang-orang Jepang sementara itu didalam masyarakat timbul desas-desus yang menggelisahkan bahwa cadangan air minum di Candi telah diracun, sehingga menambah hangat situasi. Keadaan itu makin diperuncing dengan tindakan polisi Jepang yang melucuti delapan orang polisi yang menjaga tempat tersebut, dengan alasan untuk menghindari peracunan cadangan air minum. Akibatnya pada tanggal 5 Oktober 1945 dini hari pecah pertempuran antara pasukan *Kidobutai* dibantu oleh batalyon lain yang kebetulan singgah di Semarang dengan TKR dan pemuda-pemuda. Pertempuran berlangsung selama lima hari sampai tanggal 19/20 Oktober 1945, dan baru berhenti setelah pimpinan TKR berunding dengan pimpinan pasukan Jepang. Upaya perdamaian di percepat setelah pasukan Sekutu (Inggris) mendarat di Semarang, yang selanjutnya menawan dan melucuti pasukan Jepang. Dalam pertempuran ini sekitar dua ribu rakyat Indonesia terbunuh, diantaranya dr. Karjadi, Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat (Puru Sara) di Semarang. Pertempuran paling seru dan meminta banyak korban terjadi di Simpang Lima.

PERTEMPURAN MEDAN AREA

"Pertempuran Medan Area" terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 di kota Medan. Ini merupakan pertempuran pertama yang terjadi di Medan antara para pemuda yang ingin menegakan kedaulatan RI melawan pasukan Belanda yang membonceng tentara Sekutu. Setelah berita proklamasi sampai ke kota Medan, pada tanggal 27 Agustus 1945, para pemuda yang dipelopori seorang mantan perwira tentara sukarela pada waktu pendudukan Jepang, Ahmad Tahir, segera membentuk Barisan Pemuda Indonesia pada tanggal 13 September 1945. Mereka melakukan pengambil alihan gedung-gedung pemerintah dan merebut senjata-senjata dari tangan

Jepang pada tanggal 4 Oktober 1945. Di tengah kegiatan perebutan senjata dari tangan Jepang, pada tanggal 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly, Tentara NICA yang membonceng Tentara Sekutu mendarat di Kota Medan. Sebelum itu, di bawah pimpinan Westerling Belanda telah mendaratkan suatu kelompok komando yang kemudian melakukan kekacauan di Medan.

Dalam menghadapi kedatangan Belanda, para pemuda segera membentuk Divisi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di kota Medan. Pada tanggal 13 Oktober 1945 pecah pertempuran pertama antara para pemuda kota Medan dengan pasukan Belanda yang dikenal sebagai "Pertempuran Medan Area". Diawali pertempuran antara pemuda dengan pasukan Belanda yang menjalar ke seluruh kota Medan. Dalam perkembangan selanjutnya tentara Sekutu di Medan mengeluarkan maklumat yang berisi larangan kepada rakyat untuk membawa senjata dan menyerukan agar semua senjata yang ada diserahkan kepada Tentara Sekutu pada tanggal 18 Oktober 1945. Tetapi maklumat itu tidak diindahkan rakyat Medan. Akhirnya Tentara Sekutu melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap kota Medan pada tanggal 10 Desember 1945. Hampir seluruh kota Medan menjadi sasaran Sekutu yang menelan banyak korban dari kedua belah pihak.

PERTEMPURAN WANASABA

Salah satu dari beberapa pertempuran yang terjadi di Nusa Tenggara Barat pada masa perang kemerdekaan. Pertempuran dipelopori oleh Basmi, orang kelasykaran rakyat yang meliputi desa-desa di NTB. Rakyat desa Mamban yang juga anggota Basmi sudah lama merasa tidak senang terhadap pos tentara Jepang di desa Wanasaba. Pos itu dirasakan sangat mengganggu kegiatan para pejuang yang terdapat di desa Mamban dan Wanasaba. Rakyat Mamban menginginkan agar pos itu diserbu secara terbuka. Namun tidak demikian dengan rakyat di desa Wanasaba. Mereka merasa khawatir peluru nyasar dapat mengenai anak-anak dan wanita yang

tidak berdosa, mereka menghalangi niat rakyat Memban. Tetapi karena dipanasi, pertempuran di desa sebelumnya (Brang Panas), orang Mamban tetap kepada keputusannya untuk menyerang Jepang.

Pertempuran terjadi pada hari Senin 17 Desember 1945. Dalam pertempuran itu beratus-ratus rakyat Mamban dibawah pimpinan pemuka-pemuka desa dan dusun-dusun menyerbu tentara Jepang. Dengan hanya bersenjata pedang, tombak dan keris, mereka berlomba-lomba mendekati tentara Jepang. Tentara Jepang yang telah siap dengan senjatanya, ketika rakyat sudah dekat dengan tentara Jepang. Kemudian melepaskan senjatanya kearah rakyat yang datang menyerbu. Akibatnya beberapa orang masyarakat Mamban terbunuh. Kemudian kedua belah pihak mundur ke pos mereka masing-masing. Pihak Jepang walaupun menang dalam pertempuran tersebut, tetapi karena kedudukannya terancam, akhirnya tentara Jepang mengkosongkan pos mereka di Wanasaba. Dalam pertempuran ini enam warga desa Mamban tewas dan satu orang luka parah. Mereka adalah, Haji Tahir, H. Samsudin, H. Sapinah, H. Masdah, Amach Zaenur, H. Jehran dan seorang yang luka yaitu Sirajudin.

PERUNDINGAN HOOGE VELUWE

Merupakan perundingan lanjutan dari perundingan-perundingan yang telah dilakukan dalam usaha menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda. Perundingan Hooge Veluwe diadakan di kota Hooge Veluwe, Belanda pada bulan April 1946. Dalam perundingan ini delegasi Belanda diwakili oleh Dr. H.J. Van Mook, Dr. Idenburg, Prof. Logemann, Dr. Van Royen, Prof. van Asbeck, Sultan Hamid II dan Suryo Santoso. Sedangkan delegasi Indonesia diwakili Mr. Suwandi, dr. Sudarsono dan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Tetapi perundingan yang diselenggarakan selama 10 hari sejak tanggal 14-25 April 1946 mengalami kegagalan. Masing-masing pihak tetap pada pendiriannya masing-masing.

Belanda tetap menginginkan memberi pengakuan atas Jawa dan Madura saja dengan dikurangi daerah-daerah yang diduduki pasukan

diduduki pasukan Serikat, menginginkan RI yang dimaksud tetap menjadi bagian kerajaan Nederland dan menolak campur tangan Republik dalam menentukan perwakilan daerah di luar daerah Indonesia. Pihak Indonesia menginginkan Belanda mengakui RI secara *de facto* atas Jawa dan Sumatera dan agar Belanda dan RI bersama membentuk RIS. Akibat perbedaan pendapat diantara keduanya, akhirnya konperensi berakhir tanpa menghasilkan apa-apa bagi perbaikan hubungan kedua pihak yang bersengketa.

PERUNDINGAN KALIURANG

Di tengah-tengah berlangsungnya Perundingan Renville, delegasi Indonesia yang dipimpin perdana Menteri Syahrir mengadakan perundingan dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Perundingan diselenggarakan di Kaliurang, Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 1948. Tujuan perundingan untuk membicarakan masalah yang menyangkut daerah kekuasaan Republik Indonesia dalam kaitannya dengan usul-usul yang diajukan Belanda dalam Perundingan Renville. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan RI dalam proyek usul-usul Belanda itu, sebelum menentukan pendiriannya tentang usul-usul tersebut, maka pihak Republik meminta KTN untuk datang ke Kaliurang.

Di dalam perundingan ini KTN diwakili oleh DR. Frank Graham (Amerika Serikat). Ketika di dalam perundingan pihak delegasi RI menanyakan apa dan bagaimanakah kedudukan RI di dalam proyek-proyek yang diusulkan Belanda dan KTN didalam Perundingan Renville, maka DR. Graham memberikan jawaban singkat yang terkenal : "You are what you are" (kamu adalah kamu). Mendapat jawaban yang demikian pemerintah RI menafsirkan bahwa sebelum menjadi negara bagian dari suatu negara federal, RI akan tetap berstatus seperti sediakala.

Di samping pernyataan itu, Dr. Frank Graham juga menegaskan bahwa jika pihak Republik tidak mau menerima "12 azas dan 6 azas tambahan", maka dengan terpaksa KTN akan mengembalikan

mandatnya kepada Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Dr. Graham juga memberi bayangan jika Republik menyetujui persetujuan itu, maka kedudukan RI menurut status quo pada waktu itu akan dijamin Amerika. Delegasi RI menerima azas-azas tersebut. Pada akhirnya Perundingan Kaliurang berakhir dan delegasi RI kembali melangkah ke Perundingan Renville, yang diakhiri dengan ditandatanganinya Persetujuan Renville pada tanggal 17 Januari 1948.

PERUNDINGAN LINGGARJATI

Salah satu dari beberapa perundingan yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan sengketa Indonesia- Belanda. Setelah gagal dalam perundingan-perundingan sebelumnya, atas prakarsa Inggris kembali diadakan perundingan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Sebelum perundingan resmi dimulai, terlebih dahulu diadakan perundingan gencatan senjata pada tanggal 7--14 Oktober 1946, yang dilanjutkan dengan perundingan politik mulai tanggal 7 November 1946 di Jakarta. Setelah kedua perundingan itu selesai, baru pada tanggal 10 November 1946 diselenggarakan perundingan di Linggarjati.

Linggarjati adalah sebuah kota sejuk di sebelah selatan Cirebon, Jawa Barat, yang termasuk wilayah R. I., Perundingan dihadiri oleh kedua belah pihak yang bertikai (Indonesia-Belanda) dan seorang duta istimewa Inggris untuk Indonesia, Lord Killearn, yang bertugas sebagai pemimpin perundingan. Delegasi Indonesia diketuai Sutan Syahrir, dengan anggota delegasi tiga orang yaitu, Mr. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprodjo dan dr. A.K. Gani, beserta anggota-anggota cadangan Mr. Amir Syarifuddin, dr. Sudarsono dan Dr. J. Leimena. Sedangkan delegasi Belanda beranggotakan tiga orang yaitu, Max van Poll, F. de Broer dan H.J. Van Mook, di bawah pimpinan Prof. William Schermerhorn. Perundingan berlangsung mulai tanggal 10 hingga selesai tanggal 15 November 1946. Dari perundingan yang berlangsung selama lima hari itu, berhasil disusun

sebuah naskah persetujuan yang terdiri atas 17 pasal. Naskah yang berbahasa Belanda ditandatangani oleh kedua negara yang bertikai pada tanggal 15 November sore di kediaman Sutan Syahrir. Sedangkan naskah yang berbahasa Inggris dan Indonesia ditandatangani pada tanggal 18 November di tempat yang sama. Isi dari persetujuan Linggarjati itu antara lain, pasal satu menyebutkan pemerintah Belanda mengakui secara *de facto* kekuasaan pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Madura dan Sumatera. Pasal dua menetapkan bahwa pemerintah Belanda dan pemerintah RI akan segera bersama-sama menyelenggarakan berdirinya Negara Indonesia Serikat (NIS).

Pasal tiga menentukan bahwa wilayah Negara Indonesia Serikat akan meliputi Hindia Belanda, dengan ketentuan bahwa penduduk suatu daerah secara demokrasi dapat menyatakan tidak atau belum suka masuk ke dalam NIS. Pasal empat tentang negara NIS meliputi negara-negara RI, Kalimantan dan Timur Barat. Sedangkan pasal-pasal lain memuat hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan NIS. Walaupun dapat dihasilkan kesepakatan, ternyata persetujuan Linggarjati tidak memberi manfaat bagi perbaikan hubungan Indonesia Belanda karena masing-masing pihak menginterpretasikan perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing.

PERUNDINGAN RENVILLE

Diadakan di atas sebuah kapal pengangkut tentara Amerika Serikat, "USS Renville" yang didatangkan ke Teluk Jakarta. Konperensi dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan berakhir pada tanggal 17 Januari 1948. Perbedaan penafsiran terhadap persetujuan Linggarjati menyebabkan Belanda melakukan aksi militernya yang pertama. Untuk menghentikan permusuhan di antara kedua negara yang bertikai, atas usul Amerika Serikat oleh Dewan Keamanan PBB dibentuk Komisi Jasa-jasa Baik (Komisi Tiga Negara (KTN)) yang akan membantu menyelesaikan masalah. Dalam KTN ini duduk tiga negara, dimana dua negara dipilih masing-masing negara yang bersengketa dan satu lagi dipilih oleh kedua negara tersebut. Indonesia memilih Australia sebagai wakilnya yang diwakili

Richard Kirby, Belanda memilih Belgia oleh Paul Van Zeeland dan Amerika Serikat yang diwakili Dr. Frank Graham dipilih oleh Indonesia-Belanda. KTN berusaha mendekatkan kedua belah pihak guna menyelesaikan masalah-masalah militer dan politik yang dapat dipakai sebagai dasar perundingan selanjutnya.

Di dalam bidang militer hanya akan mengambil sikap inisiatif, sedangkan untuk pemecahan masalah-masalah politik, KTN hanya akan memberi usul. Setelah melalui berbagai pendapat mengenai tempat perundingan atas usul KTN, perundingan di tempat yang netral, di atas sebuah kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat "UUS Renville" yang berlabuh di Teluk Jakarta. Tempat ini dianggap netral karena letaknya di luar daerah pendudukan Belanda. Perundingan ini dibuka resmi pada tanggal 8 Desember 1948 di bawah pimpinan Herremans wakil Belgia dalam KTN. Dalam perundingan ini delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dengan Dr. Ali Sastroamidjojo sebagai wakil ketua dan dr. Tjoa Siek Ien, Sutan Syahrir, H.A. Salim, Mr. Nasrun, Ir. Djuanda beserta Setiadji sebagai anggota. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo dengan Mr. H.A.L. Van Vredenburg sebagai wakil ketua dan dr. P.J. Koets, Mr. Dr. Ch. R. Soumokil, Tengku Zulkarnain, Mr. Adji Pangeran Kertanegara, Mr. Marjarie, Thio Thian Tjiang, Mr. A.H. Ophuysen beserta A. Th. Baud sebagai anggota. Setelah melalui berbagai perdebatan panjang, akhirnya konperensi dapat menghasilkan persetujuan yang dikenal sebagai "Persetujuan Renville". Persetujuan ditandatangani pada tanggal 17 Januari. Hasil persetujuan tersebut secara garis besar adalah :

1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera.
2. Sebelum RIS terbentuk Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia.
3. Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada suatu pemerintah pro-federal.
4. RI dalam RIS merupakan negara bagian.
5. Akan dibentuk UU Indonesia-Belanda dimana keduanya mempunyai kedudukan yang sama.

6. Akan diadakan plebisit untuk menentukan kedudukan politik rakyat Indonesia dalam RIS.

PERUNDINGAN ROEM-ROJEN

Setelah Belanda melakukan aksi militer ke II nya, atas prakarsa UNCI (dahulu KTN) kembali diadakan perundingan tidak resmi antara Belanda yang dipimpin Dr. Van Rojen dan delegasi Indonesia dipimpin Mr. Mohammad Roem pada tanggal 14 April 1949. Perundingan ini mengalami kemacetan karena masing-masing pihak berpegang teguh pada pendiriannya. Di tengah kemacetan pembicaraan Indonesia-Belanda itu, Bung Hatta yang ditawarkan di Bangka datang ke Jakarta pada tanggal 24 April untuk mencoba memecahkan kesulitan itu.

Atas campur tangan Bung Hatta, pada tanggal 17 Mei 1949 diadakan pertemuan antara delegasi Indonesia di bawah pimpinan Mr. Mohammad Roem dengan delegasi Belanda yang dipimpin Dr. Van Rojen. Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut, akhirnya tercapai persetujuan yang dikenal dengan "Pernyataan Roem-Rojen (Roem-Rojen Statement)". Yang terpenting dari isi pernyataan itu adalah menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta, menyetujui adanya RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat dan berusaha agar Konferensi Meja Bundar segera dilaksanakan. Untuk masa selanjutnya pemerintahan RI dikembalikan ke Yogyakarta, yang kemudian disusul dengan KMB dan pengakuan kedaulatan dan pembentukan RIS.

PLAS, CH. VAN DER

Pimpinan Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang mendarat di Indonesia pada bulan September 1945. Beberapa waktu setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Tentara Sekutu

mendarat di Indonesia dengan maksud untuk menjaga keamanan, mempelajari dan melaporkan keadaan Indonesia. Dalam rombongan ini turut Van der Plas, yang mewakili Dr. HJ. Van Mook, kepala NICA. Selain berperan dalam pendaratan tentara NICA, Van der Plas muncul kembali dalam pembentukan negara boneka, Negara Jawa Timur. Dalam pembentukan negara boneka kali ini, peran yang biasanya dilaksanakan oleh Van Mook yang diberhentikan dengan hormat karena mengundurkan diri, dijalankan oleh Van der Plas. Negara Jawa Timur berhasil dibentuk pada suatu konferensi "Negara Jawa Timur" yang berlangsung di Bondowoso pada tanggal 16 November sampai 13 Desember 1948.

PRAWIRANEGARA , SYAFRUDDIN

Pemimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, Syafruddin Prawiranegara lahir di Anyer Kidul (Banten), pada tanggal 28 Februari 1911. Setamat dari Sekolah Menengah, Syafruddin melanjutkan pendidikan pada bidang hukum, dan memperoleh gelar *Meester in de Rechten* pada tahun 1939. Pada masa penjajahan Belanda, Syafruddin termasuk golongan yang percaya bahwa Belanda bertujuan untuk mendidik bangsa Indonesia sampai pada taraf tertentu.

Pada masa pendudukan Jepang Syafruddin tidak yakin Jepang akan melepaskan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Oleh karena itu ia sangat mendukung Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Secara aktif ia membujuk teman-temannya yang masih ragu-ragu untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Ketika dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada tanggal 16 Oktober 1945, badan yang akan menjalankan tugas sehari-hari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Syafruddin diangkat menjadi anggota badan tersebut. Pada bulan maret 1946, Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi Menteri Muda Keuangan dan Menteri Keuangan dalam Kabinet Syahrir II.

Kemudian dalam Kabinet Syahrir III bulan Oktober 1946, Syafruddin Prawiranegara kembali terpilih sebagai Menteri Muda Keuangan dan Menteri Keuangan. Tatkala Belanda melakukan aksi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948 dan berhasil menguasai Ibukota RI Yogyakarta serta akhirnya menahan Presiden Sukarno, Wapres Moh. Hatta dan sejumlah Menteri. Sebelumnya diadakan sidang Kabinet, walaupun Menteri-menterinya tidak hadir lengkap. Dalam sidang diputuskan untuk memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera, sebelum agresi dilakukan, Pemerintahan Darurat RI akan dibentuk. Dengan tujuan agar Pemerintahan RI tetap ada maka dibentuk PDRI oleh Syafruddin Prawiranegara. Setelah para pemimpin RI dikembalikan ke Yogyakarta dan Pemerintah RI dipulihkan kembali pada bulan Juli 1949, Syafruddin diangkat sebagai Menteri Keuangan RIS hingga tahun 1951, Pimpinan Javasche Bank (Bank Indonesia) sampai tahun 1958. Setelah itu Syafruddin aktif dalam kegiatan dakwah hingga akhir hayatnya.

PRINGGODIGDO, ABDUL GAFFAR

Wakil kepala BPUPKI dan Menteri Sekretaris Negara RI pertama. Abdul Gaffar Pringgodigdo, lahir di desa Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada tanggal 14 Januari 1889. Ia anak Bupati Tuban, R.M.A.A. Moedomo Kesoemohadiningrat dan R.A. Windarti Notomidjoyo. Tahun 1910 mengikuti pendidikan ELS dan tamat pada tahun 1918. Selanjutnya A.G. Pringgodigdo meneruskan ke HBS hingga tamat pada tahun 1923. Kemudian A.G. Pringgodigdo berangkat ke Belanda untuk memperdalam bidang hukum sampai memperoleh gelar "Mr" pada tahun 1927. Selama menjadi mahasiswa di negeri Belanda, A.G. Pringgodigdo aktif mendukung kegiatan Perhimpunan Indonesia (PI), walaupun tidak menjadi anggota organisasi tersebut.

Setelah kembali ke Indonesia pada tahun 1928 dia bekerja sebagai *Administratief Ambtenaar* di Surabaya, dan kemudian

berturut-turut bekerja sebagai *Adjunct Referendaris*, *Referendaris 2 Klasse dan Referendaris* sampai pada tahun 1938. Selain itu dia pernah diangkat sebagai Sekretaris Comissie Visman, yang bertugas meneliti keinginan-keinginan rakyat. Menjelang proklamasi kemerdekaan, A.G. Pringgodigdo yang pada waktu itu sedang menjabat sebagai Wedana Purwokerto dipanggil ke Jakarta dan diangkat sebagai Wakil Kepala Sekretariat Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Di dalam badan ini A.G. Pringgodigdo kembali diangkat sebagai Wakil Kepala Sekretariat. Setelah proklamasi dia diangkat sebagai Menteri Sekretaris Negara yang pertama dalam alam kemerdekaan. Tetapi belum genap setahun berada dalam alam kemerdekaan, Belanda kembali menginjakan kakinya di Indonesia dan melakukan agresi militernya. Dalam agresi militernya yang ke II ke Ibukota RI, Yogyakarta, Belanda berhasil menawan Presiden dan Wakil Presiden beserta sejumlah pejabat negara termasuk A.G. Pringgodigdo. A.G. Pringgodigdo ikut diasingkan ke Pulau Bangka. Selama dalam pengasingan ini dia menjadi orang kepercayaan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk memonitor keadaan di Yogyakarta melalui alat radio, alat komunikasi satu-satunya yang ada di tempat itu.

Dengan disetujuinya hasil-hasil KMB sebagai upaya menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda, maka terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada masa pemerintahan RIS ini, A.G. Pringgodigdo diangkat sebagai Menteri Kehakiman Kabinet RIS. Setelah RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan RI, dia memusatkan diri pada dunia pendidikan dengan mengajar pada berbagai universitas sampai beliau menutup mata pada tahun 1984. Namun sebelum itu antara tahun 1971 sampai tahun 1978 A.G. Pringgodigdo sempat diangkat sebagai anggota DPR RI sebagai wakil Golongan Karya.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Suatu pernyataan kemerdekaan tanah air dan bangsa Indonesia dari penjajahan. Pernyataan dilakukan oleh Ir. Soekarno atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00. pagi di muka gedung Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dalam peristiwa ini selain hadir Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta yang kemudian ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama, juga hadir tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan. Naskah proklamasi yang diketik oleh Sajuti Melik, ditandatangani oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.

Setelah pembacaan naskah proklamasi, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Bersamaan dengan naiknya bendera Merah putih, perlahan-lahan tanpa ada yang memberi komando, para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Usai pengerekan bendera acara diteruskan dengan sambutan Walikota Jakarta, Soewirjo dan dr. Muwardi. Berakhirnya sambutan kedua tokoh tersebut berakhir pula peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa ini hanya berlangsung satu jam. Namun walaupun berlangsung sangat singkat dan sederhana, peristiwa yang penuh khidmat ini membawa perubahan yang sangat berarti bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Proklamasi tersebut disiarkan dengan cepat ke seluruh Tanah Air dan juga luar negeri secara rahasia dan terbuka melalui radio, surat kabar, dari mulut kemulut dan kurir.

RAI, I GUSTI NGURAH

Lahir di Carangsari, Badung pada tanggal 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai adalah Komandan Tentara Republik Indonesia (TRI) Sunda Kecil, yang memimpin pertempuran-pertempuran di Bali selama masa revolusi. Tamat HIS pada tahun 1933, I Gusti Ngurah Rai melanjutkan ke MULO. Dua tahun di MULO, pada tahun 1936 dia masuk *Officiers Opleiding Corps Prayodu* (Pendidikan

Calon Perwira) di Gianyar Bali. Ketika Jepang masuk pada tahun 1942 dan menduduki Indonesia, I Gusti Ngurah Rai bekerja di *Mitsui Bussan Kaisha (MBK)*. Pada tahun 1946 dia diangkat sebagai Komandan Tentara Republik Indonesia Sunda kecil. Pada masa perang kemerdekaan ini bersama pasukan yang dipimpinnya, Resimen Ngurah Rai, melakukan pertempuran melawan Tentara NICA yang ingin menguasai Tanah Aron. Dimulai dari Tanah Aron, kemudian bersama Kapten I Gusti Wayan Debes dan Wagimin, I Gusti Ngurah Rai yang pada waktu itu berpangkat Letnan Kolonel merencanakan untuk menyerbu tangsi polisi di Tabanan.

Penyerbuan dilaksanakan pada tanggal 18 November 1946 tengah malam. Setelah penyerangan di Tabanan, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai selaku Komandan Resimen Ngurai Rai dan pimpinan Markas Besar Umum (MBU) TRI Sunda Kecil memimpin perlawanan terhadap NICA di Desa Marga, sebelah Timur Laut Tabanan, Bali Selatan, yang dikenal dengan "Puputan Margarana". Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 Nopember 1946. Dalam pertempuran ini gugur 86 pejuang-pejuang Bali diantaranya Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai.

RAPAT UMUM IKADA

Adalah rapat raksasa yang diadakan di Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Jakarta) pada tanggal 19 September 1945. Dalam rapat akbar ini direncanakan Presiden Soekarno akan mengadakan pidato resminya yang pertama. Mendengar rencana tersebut, Jepang segera mengeluarkan pernyataan yang melarang diadakannya rapat tersebut, tetapi rencana tersebut tetap diselenggarakan. Pada tanggal 19 September berbondong-bondong rakyat Indonesia membanjiri lapangan itu setelah sebelumnya diadakan pemeriksaan di lapangan tersebut kalau-kalau Jepang telah meletakkan ranjau disitu.

Sementara itu pagi-pagi sekali Jepang telah meletakkan pasukan bersenjata di sekitar lapangan. Namun hal ini tidak mengurangi keinginan rakyat untuk datang, rakyat terus mengalir. Setelah

menunggu beberapa waktu, Presiden Soekarno pun datang. Presiden menyampaikan pidato singkat. Setelah itu rakyat dibubarkan dan disuruh pulang dengan tenang.

RATULANGI, GSSJ

Gerungan Sabul Samuel Jacob Ratulangi atau Sam Ratulangi, lahir pada tanggal 5 November 1908 di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Ayahnya Josias Ratulangi, adalah orang terpelajar, guru *Hoofden School* (setingkat SMP) di Tondano yang memiliki ijazah *Kweek School* dari negeri Belanda pada tahun 1880. Oleh karena itu tidak mengherankan bila ketiga putera-puteranya juga merupakan orang terpelajar. Umur 6 tahun Sam Ratulangi memperoleh pendidikan dasar di *Europesche Lagere School* (ELS). Tamat ELS pada tahun 1903, ia melanjutkan ke *Hoofden School Tondano* dan kemudian ke Sekolah Teknik *Koningin Wilhemina School* di Jakarta 1904-1909. Tidak lama bekerja, Sam Ratulangi menempuh pendidikan di *Lagere Orderijs* (LO) dan *Middelbare Acte* dalam Ilmu Pasti dan Ilmu Pendidikan. Tahun 1919 memperoleh Doktor dalam bidang Ilmu Pasti dan Ilmu Alam dari *Universitas Zurich*.

Sejak Mahasiswa di Eropa, Sam Ratulangi sudah aktif dalam berbagai kegiatan. Selain aktif menulis di berbagai Majalah dan Koran, ia juga menjadi anggota *Indische Vereniging* (Perhimpunan Indonesia), organisasi mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda. Tahun 1914-1915 ia terpilih menjadi Ketua Organisasi ini. Pada masa ini pula Sam berkenalan dengan tokoh-tokoh Pergerakan Nasional *Indische Party* yang sedang dalam pembuangan di negeri Belanda. Kembali ke Indonesia Sam Ratulangi bekerja sebagai guru di Yogyakarta. Tahun 1922-1924 mendirikan "Maskapai Asuransi Indonesia". Sementara itu ia terus aktif dalam berbagai aktivitas menentang pendudukan Belanda. Pada jaman Jepang, di samping giat di bidang sosial, Sam Ratulangi juga giat memupuk semangat persatuan Nasional rakyat Sulawesi melalui perkumpulan Persatuan Nuanbasa. Pada saat-saat Proklamasi Kemerdekaan, Dr. Sam Ratulangi giat mengikuti sidang-sidang Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia. Ia turut aktif dalam sidang penetapan UUD 45, tanggal 18 Agustus 1945. Sam Ratulangi merupakan salah satu dari beberapa anggota yang banyak menyumbangkan pikiran dalam rapat itu. Satu usulnya yaitu penambahan satu alinea pada pasal 23 ayat 1. Bila sebelumnya hanya berbunyi "APBN ditetapkan tiap-tiap tahun dengan UU. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu". Dalam Panitia Kecil yang dibentuk pada rapat PPKI yang membantu Presiden menentukan pembagian wilayah Gubernur, ia pun terpilih menjadi anggota Panitia tersebut, bahkan terpilih menjadi Gubernur Sulawesi.

Ketika tentara Sekutu yang membonceng NICA menginjakkan kakinya di Indonesia, dibawah pemimpin dr. GSSJ Ratulangi dibentuk " Pusat Keselamatan Rakyat " untuk melawan Belanda yang hendak berkuasa kembali di Indonesia. Dalam menghadapi Sekutu, dr. Ratulangi mengajukan petisi dan PBB yang berisi keinginan rakyat Sulawesi untuk tidak memisahkan diri dari RI, yang pada akhirnya menghasilkan perundingan antara kedua belah pihak.

Tetapi kemudian Belanda menangkap Ratulangi pada bulan Maret 1946 dan dibuang ke Serui Irian Jaya. dr. GSSJ Ratulangi beserta staf dan keluarga dikembalikan ke daerah RI, Yogyakarta, pada tahun 1948. Disini dr. SGGJ Ratulangi segera ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan. Ia menjadi anggota Delegasi RI dalam perundingan-perundingan yang diadakan selama tahun 1948-1949 antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948 ketika Ibu kota RI Yogyakarta di serang Belanda, Ratulangi bersama dengan Presiden Soekarno, Wapres Hatta dan sejumlah pemimpin RI di tangkap dan ditahan di Istana Yogyakarta.

Tetapi karena kesehatannya yang makin memburuk ia tidak jadi dikirim ke Bangka. Walaupun dalam keadaan sakit, pada malam tanggal 24 Juni 1949 dr. Ratulangi masih sempat berunding dengan Wolter Saerang tentang rencana untuk mengambil alih percetakan Belanda di Jalan Asemka, Jakarta Kota. Tetapi belum sempat melanjutkan rencana itu, menjelang pukul 08.00 tanggal 30 Juni 1949,

dr. Ratulangi menutup mata yang selama-lamanya, akibat serangan jantung. Satu buah pikiran Sam Ratulangi yang sangat penting bagi pergerakan Indonesia adalah anjurannya untuk bersatu bagi seluruh rakyat Indonesia baik Republik maupun Federal dalam menghadapi utusan Belanda di KMB sehingga terbentuk RIS.

ROEM , MOHAMMAD

Lahir di Desa Klewogan, Kawedanan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 16 Mei 1908. Pendidikannya diawali dengan masuk *Volkschool* pada tahun 1915, yang dilanjutkan dengan HIS pada tahun 1917 dan tamat pada tahun 1924. Kemudian Mohammad Roem meneruskan pendidikan ke STOVIA, selama 3 tahun dan dilanjutkan ke AMS sampai tamat pada tahun 1930. Tahun 1932 Mohammad Roem masuk *Rechts Hoogeschool* (RHS), lulus pada tahun 1939 dengan memperoleh gelar "Mr".

Setelah itu Mohammad Roem bekerja sebagai pengacara di samping aktif dalam kegiatan partai politik yang telah digelutinya sejak ia bersekolah di AMS. Pada masa pergerakan ini selain pernah menjadi anggota *Jong Islamieten Bond* pada tahun 1925, Mohammad Roem juga menjadi anggota Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1932 dan Partai Penyedar yang muncul dalam tubuh PSII. Setelah proklamasi kemerdekaan, Mohammad Roem diangkat sebagai ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Jakarta.

Ketika itu dia aktif sebagai anggota Partai Masyumi, Mohammad Roem diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri Kabinet Syahrir III pada bulan Oktober 1946 dan memegang jabatan yang sama pada Kabinet Amir Syarifuddin. Sebagai Menteri Dalam Negeri, Mohammad Roem turut serta dalam berbagai perundingan yang diadakan dengan Belanda baik sebagai anggota biasa maupun sebagai ketua delegasi yaitu perundingan pendahuluan sebelum Perundingan Linggarjati, perundingan pelaksanaan persetujuan Renville, perundingan pendahuluan Konperensi Meja Bundar (KMB) dan

KMB itu sendiri. Pada perundingan pendahuluan sebelum KMB, Mohammad Roem sebagai ketua delegasi RI dan dr. Van Rojen, pimpinan delegasi Belanda berhasil membuat pernyataan yang dikenal dengan Roem-Rojen Statement, yang mengantarkan masalah Indonesia-Belanda pada KMB dan pengakuan kedaulatan. Pada waktu terjadi kemacetan dalam KMB, bersama Anak Agung Gde Agung, Mohammad Roem menjadi wakil Indonesia dalam panitia yang mengatasi kemacetan-kemacetan pembicaraan sehingga didapat kata sepakat. Setelah pengakuan kedaulatan, Mohammad Roem terpilih sebagai Menteri tanpa *portofolio* pada Kabinet RIS di bawah pimpinan Mohammad Hatta. Selanjutnya beberapa kali Mohammad Roem masih mendapat kesempatan duduk di dalam Kabinet RI, di samping aktif dalam berbagai kegiatan organisasi Islam. Pada tanggal 24 September 1983 Mohammad Roem meninggal dunia.

ROJEN, VAN J.H.

Dr. Van Rojen, diplomat Belanda yang tidak berpartai muncul pertamakali dalam masalah Indonesia-Belanda pada perundingan Hooge Veluwe pada bulan April 1946 di Negara Belanda. Setelah kegagalan perundingan-perundingan selanjutnya antara Indonesia-Belanda yang diikuti dengan agresi militer oleh Belanda, Dr. Van Rojen muncul kembali dalam perundingan pendahuluan Konperensi Meja Bundar tanggal 14 April 1949. Dalam perundingan ini Dr. Van Rojen menjadi ketua delegasi Belanda.

Namun perundingan ini mengalami kemacetan. Oleh karena itu atas prakarsa Mohammad Hatta diadakan pertemuan informal antara Mohammad Hatta dan Van Rojen, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan resmi antara kedua delegasi di bawah pimpinan Mohammad Roem (Indonesia) dan Van Rojen (Belanda). Perundingan menghasilkan apa yang dikenal dengan "Roem-Rojen Statement".

RECOMBA

Komisioner Pemerintah Belanda untuk urusan-urusan pemerintahan yang bertugas sebagai koordinator (penanggung jawab) dan wakil kekuasaan pusat yang ditempatkan di negara-negara bagian di Jawa, Madura, dan Sumatera periode 1948-1949.

REVOLUSI NASIONAL (INDONESIA)

Menunjuk kepada perubahan besar dan mendasar yang terjadi pada periode 1945-1948 yang menyangkut sejumlah tindakan yang memaksa untuk menggantikan sistem pemerintahan atau untuk menggantikan prorses-proses pemerintahan dari sistem legalitas pemerintahan militer pendudukan Jepang oleh sistem legalitas Indonesia sebagai negara merdeka yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Proses politik itu melibatkan bukan saja unsur-unsur : Jepang, Tentara Sekutu dan Belanda melainkan juga konflik-konflik di antara golongan di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Jika konflik-konflik yang terjadi dengan pihak asing berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan secara *de facto* maupun *de jure*, maka konflik-konflik internal yang terwujud sebagai pergolakan daerah atau revolusi sosial diatasi agar gejolak-gejolak itu dipadamkan dan tunduk kepada tujuan revolusi yang bersifat nasional.

Revolusi Indonesia memperlihatkan unsur-unsur paksaan dan kekerasan, baik ketika bangsa Indonesia menghadapi tentara Jepang, yang untuk sementara waktu menjalankan perintah Sekutu untuk menjaga *status quo*, maupun dalam menghadapi kedatangan Belanda yang akan menjajah kembali. Di beberapa tempat bangsa Indonesia malah berperang melawan tentara Inggris (Sekutu) seperti di Surabaya, 10 Nopember 1945 dan di Bojongsokosan, 19 Desember 1945.

Di selang-selingi dengan upaya untuk mengatasi gejolak sosial dan revolusi sosial serta pemberontakan terhadap pemerintah nasional, revolusi Indonesia telah berakhir dengan pengakuan kedulatan dari pihak Belanda kepada Republik Indonesia (Serikat) atau wilayah bekas koloni Hindia Belanda, pada tanggal 27 Desember 1949, yang dinyatakan dalam Konperensi Meja Bundar di Den Haag, Negeri Belanda.

SALEH , CHAERUL

Salah seorang tokoh pemuda radikal pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang Chaerul Saleh bersama Adam Malik, Pandu Wiguna dan Maruto Nitimihardjo bergabung dalam gerakan bawah tanah. Melalui Maruto mereka selalu mengadakan hubungan dengan gerakan bawah tanah pimpinan Sutan Syahrir yang anti Jepang. Pada waktu Kongres Pemuda yang diadakan sebelum terbentuknya BPUPKI pada pertengahan Mei 1945, Chaerul Saleh bersama Sukarni merupakan orang-orang yang tidak menyetujui resolusi yang mendukung dan bekerjasama dengan Jepang dalam mencapai kemerdekaan. Mereka bermaksud untuk membentuk suatu gerakan Angkatan Baru Indonesia, yang sebagian besar kegiatannya digerakan oleh para pemuda dari Asrama Menteng 31.

Salah satu tujuan dari gerakan ini adalah mencapai kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Akan tetapi ketika organisasi ini diresmikan pembentukannya oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 28 Juli 1945, tokoh-tokoh pemuda radikal ini tidak bersedia duduk di dalamnya, karena gerakannya yang dibatasi pemerintah Jepang. Ketika melihat tanda-tanda Jepang mendekati kekalahan, Chaerul Saleh bersama para pemuda radikal mendesak Sukarno menolak desakan itu, maka mereka kemudian membawa Sukarno dan Mohamad Hatta ke Rengasdengklok, yang dikenal dengan Peristiwa Rengasdengklok. Setelah Proklamasi, Chaerul Saleh dipilih menjadi anggota PPKI mewakili golongan pemuda. Tetapi setelah sidang PPKI yang membahas mengenai hal-hal penting dalam kehidupan kenegaraan,

dia keluar dari sidang tersebut karena menganggap PPKI buatan Jepang. Chaerul Saleh bersama Adam Malik, Sukarni dan lain-lain membentuk Komite Van Aksi, suatu komite yang menyatukan badan-badan perjuangan. Pada bulan Januari 1946 oleh Tan Malaka, Chaerul Saleh bergabung dalam badan perjuangan ini. Dan ketika badan perjuangan ini melakukan aksi Peristiwa 3 Juli, Chaerul Saleh termasuk salah seorang penggerak peristiwa itu yang menyebabkan dia ditangkap dan dipenjara. Ia menjadi tokoh partai Murba dan duduk dalam kabinet dimasa Demokrasi Terpimpin. Ia meninggal dalam tahun 1966.

SALIM, HAJI AGUS

Diplomat dan pejuang Indonesia Haji Agus Salim, lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 di kota Gadang, Bukittinggi. Tamat sekolah dasar Belanda, *Europeesche Lagere School (ELS)* pada tahun 1898, Agus Salim ke Jakarta untuk melanjutkan pelajarannya ke *Hogere Burger School (HBS)* selama lima tahun. Dari HBS pada mulanya ia ingin melanjutkan ke STOVIA, tetapi karena sesuatu hal gagal melanjutkan pendidikan ke STOVIA dan terus bekerja. Dalam tahun 1906 Agus Salim berangkat ke Mekah dan menetap di sana sampai tahun 1911. Berkat persahabatannya dengan seorang ulama besar yang telah lama bermukim disana, mendorong Agus Salim memperdalam agama Islam.

Kembali ke Indonesia pada tahun 1911, Haji Agus Salim bekerja pada Departemen Pendidikan. Kemudian mendirikan sekolah HIS di Bukittinggi, dan bekerja pada penerbitan Neraca pada tahun 1915. Sejak bekerja di dunia pers dia mulai mengenal dunia politik, diantaranya Sarekat Islam dimana kemudian beliau aktif menjadi anggota organisasi tersebut. Pada Kongres Al-Islam II di Garut pada tanggal 19--21 Mei 1924, Haji Agus Salim sebagai wakil Sarekat Islam bertindak sebagai pimpinan kongres. Begitupula ketika Volksraad (Dewan Rakyat) dibentuk pada tanggal 18 Mei 1918, Haji Agus Salim duduk menjadi anggota sebagai wakil dari Sarekat Islam di badan

tersebut. Pada masa Pendudukan Jepang, Haji Agus Salim bekerja sebagai penterjemah di salah satu kantor Jepang. Ketika Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) dibentuk Haji Agus Salim turut menjadi anggotanya. Pada waktu Jepang mendekati kekalahan dan dibentuk, Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Haji Agus Salim ikut terpilih sebagai salah seorang anggota diantara 60 anggota lain, dimana dia duduk sebagai yang bertugas merancang undang-undang dasar.

Ketika dibentuk Panitia Kecil diantara sidang-sidang BPUPKI yang dikenal dengan nama "Panitia Sembilan", Haji Agus Salim menjadi salah seorang anggotanya. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta (Jakarta Carter), yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, Haji Agus Salim diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pada Kabinet Sjahrir III. Dalam rangka mencari pengakuan secara de jure tentang kemerdekaan Indonesia, sejak tanggal 10 Juni 1947 sampai Desember 1949, dia mengadakan pendekatan dengan negara-negara Islam, yang akhirnya berhasil diperoleh pengakuan tentang kemerdekaan Indonesia oleh mereka. Sementara itu Belanda telah menguasai Indonesia kembali. Dalam rangka menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda di PBB, pada tanggal 12 Agustus 1947 Pemerintah RI mengutus Haji Agus Salim untuk menghadiri sidang dewan tersebut. Sidang ini berhasil membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang akan menjadi penengah kedua negara yang bersengketa untuk perundingan selanjutnya. Dalam Perundingan Renville tanggal 18 Desember 1947, Haji Agus Salim kembali diangkat sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan itu.

Ketika Belanda melancarkan aksi militernya pada akhir tahun 1948, bersama Presiden Sukarno dan Sutan Sjahrir dia ditawan di Prapat dan diasingkan ke Bangka. Setelah pemimpin-pemimpin yang ditawan itu dikembalikan ke Yogyakarta dan dilakukan pendekatan antara pihak yang bertikai, pada tanggal 23 Agustus 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Dalam konferensi ini Haji Agus Salim ikut menjadi anggota delegasi Indonesia.

Setelah Republik Indonesia kembali pada negara kesatuan pada tahun 1950, Haji Agus Salim aktif sebagai dosen tamu pada universitas-universitas di luar negeri. Selain itu ia juga tetap menjadi penasihat Menteri Luar Negeri di samping kesibukannya menulis buku. Setelah merayakan hari ulang tahunnya yang ke 70 pada tanggal 8 Oktober 1954, Haji Agus Salim menutup mata untuk selamanya di Rumah Sakit Jakarta.

SASSEN, E.J.M.A.

Mantan Menteri seberang lautan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, Emmanuel Josep Marie Anthony Sassen lahir di Hertogenbosch pada tahun 1911. Tamat dari Lyseum (SMA) Katholik, Sassen melanjutkan studi pada Fakultas Hukum *Universitas Nijmegen* dan lulus ujian doktoral pada tahun 1936.

Setelah itu ia bekerja sebagai pengacara. Ditengah kesibukannya sebagai pengacara pada tahun 1939 Sassen diangkat sebagai anggota *Provinsiale Staten* (DPRD) provinsi Noord Brabant sampai tahun 1945. Dari tahun 1945 sampai tahun 1946 Sassen diangkat menjadi *Gedeputeerde* (Badan Pekerja DPR), dan dari tahun 1946 sampai 1948 menjadi anggota *Tweedekamer*. Dalam tahun 1948 ini, Sassen diangkat sebagai Menteri Daerah Seberang Lautan dalam Kabinet Drees. Dalam kedudukannya sebagai Menteri Daerah Seberang Lautan, bersama Menteri Luar Negeri, D.U. Strikker dan Wakil Pemerintah Agung Belanda, L. Neheer, datang ke Indonesia sebagai Ketua delegasi anggota Belanda pada perundingan di Kaliurang pada tanggal 27 November -- 1 Desember 1948. Karena kegagalan perundingan ini Belanda memutuskan untuk melakukan perundingan kembali dan melakukan penyelesaian dengan jalan militer. Ketika masalah ini dibicarakan dalam sidang parlemen Belanda, Sassen merupakan pendukung kuat rencana tersebut. Dia berpendapat bawah pemerintah Belanda harus tetap mengejar tujuannya. Begitu pula ketika akhirnya Belanda melakukan aksi militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948, yang menimbulkan kecaman negara-negara di dunia.

Karena kecaman-kecaman itu dan desakan AMRK, akhirnya dewan Keamanan PBB mendesak Belanda untuk menghentikan aksinya dan dilakukan perundingan kembali. Menghadapi hal ini kemudian PM Beel mengajukan suatu rencana, yang pada garis besarnya berisi usul tentang pembentukan RIS secepatnya dan penyerahan Kedaulatan. Ternyata Sassen menentang rancangan tersebut, karena menurutnya usul itu pada akhirnya mengakhiri kebersamaan Indonesia-Belanda, atau dengan kata lain takut bila pengaruh Belanda di Indonesia akan berakhir.

Walaupun akhirnya setuju, tapi ia mengusulkan pada parlemen Belanda untuk meminta PBB tidak ikut campur tangan sehingga Belanda dapat bebas melakukan sikap dan mengusulkan Belanda untuk melepaskan semua tanggung jawabnya atas Indonesia. Usul ini tidak diterima oleh sebagian besar anggota parlemen karena itu akhirnya Sassen mengundurkan diri pada tanggal 11 Februari, dan pada tanggal 14 Februari ia pun berhenti dari jabatannya.

SASTROAMIDJOJO, ALI

Lahir dari pasangan R. Ng. Sastroamidjojo dan Kustiah di Grabak Merbabu Jawa Tengah, pada tanggal 21 Mei 1903. Mengawali pendidikan di *Eerste Europase Lagere Shcool*, tamat tahun 1918. Kemudian melanjutkan pendidikan ke *Hogere Burger School* hingga memperoleh diploma pada tahun 1922. Setelah itu berangkat ke negeri Belanda untuk meneruskan pendidikan pada bidang hukum, memperoleh ijazah "Mr" pada tahun 1927. Sejak mahasiswa, Ali Sastroamidjojo sudah tertarik pada dunia politik. Pada masa pergerakan nasional, saat menjadi mahasiswa di negeri Belanda, Ali aktif sebagai anggota Perhimpunan Indonesia, organisasi yang didirikan pelajar-pelajar Indonesia di negeri Belanda dengan tujuan Indonesia merdeka. Karena kegiatannya dalam organisasi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ia bersama empat anggota Perhimpunan Indonesia (PI) lainnya sempat ditangkap dan ditahan Pemerintah Belanda pada tanggal 23 Agustus 1927.

Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1928 Ali Sastroamidjojo masuk menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) cabang Yogyakarta, organisasi yang dianggapnya mempunyai pemikiran yang sama dengan PI. Dalam waktu singkat dia telah terpilih menjadi anggota pengurus organisasi tersebut. Sementara itu beliau mulai membuka kantor pengacara sendiri di rumahnya. Pada masa Pendudukan Jepang, Ali Sastroamidjojo ditempatkan Pemerintah Jepang di bagian Urusan Umum (*Noiseibu*) sebagai seorang pegawai tinggi di kantor Propinsi Jawa Timur. Ketika Jepang kalah dan Belanda kembali menduduki Indonesia, Ali Sastroamidjojo atas nama PNI giat berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 3 Juli 1947--29 Januari 1948, Ali Sastroamidjojo terpilih sebagai menteri pendidikan (PP dan K) pada Kabinet Amir Syarifuddin. Bulan Juni 1948 dia mewakili RI dalam Sidang Dewan Keamanan PBB di New York, yang memperdebatkan laporan interim dari Komisi Tiga Negara (KTN) tentang Persetujuan Renville.

Sebelum itu, dalam Perundingan Renville yang diadakan di atas kapal USS "Renville" pada bulan Januari 1948, Ali Sastroamidjojo terpilih menjadi wakil ketua delegasi Indonesia ke konferensi tersebut. Tetapi ketika persetujuan berhasil dicapai, dia tidak bersedia menandatangani persetujuan itu karena dianggap menguntungkan Belanda. Pada akhirnya Belanda sendiri menghancurkan persetujuan tersebut dengan melakukan agresi militernya yang ke II terhadap Ibukota negara, Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Ketika Belanda melancarkan agresinya ini, bersama sejumlah pejabat negara dia diasingkan ke Bangka. Selama di pengasingan ini beliau tetap aktif berhubungan dengan Dewan Pimpinan Pusat PNI.

Ketika akhirnya berhasil dilakukan pendekatan untuk mengadakan perundingan kembali, Ali Sastroamidjojo turut serta dalam perundingan (KMB) sebagai anggota delegasi, tetapi sebelumnya dalam pertemuan yang dilakukan antara Indonesia dan KTN yang dilakukan menjelang KMB (14 April 1949), Ali diangkat sebagai Wakil Ketua delegasi dengan ketuanya MR. Mohammad Roem. Dari hasil pertemuan tersebut yang dikenal dengan Roem-

Rojen Statement, diputuskan kedua negara akan mengadakan Perundingan KMB secepatnya.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 dimulailah KMB yang berakhir pada tanggal 2 November 1949. Berdasarkan hasil konperensi tersebut, pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda ke Indonesia. Setelah Persetujuan KMB, Ali Sastoadmidjojo menghentikan kegiatannya di PNI selama tiga tahun karena disibukkan dengan tugas sebagai duta besar. Setelah itu Ali kembali aktif dalam PNI dan berturut-turut menjadi perdana menteri (1953-1955 dan 1955-1956). Selanjutnya beliau menjadi kepala perwakilan tetap RI di PBB, dan kemudian menjadi wakil ketua MPRS. Tahun 1960 Ali Sastroamidjojo mendapat gelar kehormatan Doctor of Law dari Farleigh Dickenson University, New Jersey, USA.

SASTROSATOMO, SOEBADIO

Lahir di Pangkalan Brandan pada tanggal 26 Mei 1948. Tamat HIS Kanisius tahun 1933 di Klaten, Soebadio meneruskan pelajaran di MULO Yogyakarta dan tamat pada tahun 1936. Kemudian Soebadio melanjutkan ke AMS B Kota Baru, Yogyakarta hingga tamat pada tahun 1939. Selanjutnya Soebadio meneruskan pendidikan pada *Genees Kundige Hogeschool* (Sekolah Tinggi Kedokteran) di Salemba. Tetapi baru 1 tahun di G. H itu, ia pindah ke *Rechts Hogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) yang juga hanya bertahan selama 1 tahun karena kesibukan politik.

Sejak itu dia lebih banyak memusatkan perhatian pada dunia organisasi politik yang memang telah digelutinya sejak menjadi pelajar. Pada masa pergerakan Soebadio tergabung Jong Islamieten Bond, Indonesia Muda dan organisasi mahasiswa-mahasiswa sosialis Indonesia. Di masa pendudukan Jepang, dia mendirikan Polit Biro pada tahun 1943 dan aktif pada gerakan bawah tanah bersama pemuda-pemuda seperti Chaerul Saleh, Adam Malik dan lain-lain. Para pemuda ini merupakan kelompok pemuda radikal yang anti

Jepang dan menginginkan agar kemerdekaan Indonesia dilakukan tanpa ikatan dan hubungan dengan Jepang, yang menyebabkan terjadinya Peristiwa Rengasdengklok menjelang proklamasi 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi, Soebadio diangkat menjadi anggota BPKNIP untuk Yogyakarta, dia menjadi ketua Fraksi Sosialis Indonesia dalam parlemen (1945-1948).

Setelah pengakuan kedaulatan dan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), Soebadio terpilih menjadi salah seorang anggota DPR RIS dan Ketua Fraksi Partai Sosialis Indonesia. Setelah RIS kembali ke Negara Kesatuan RI, Soebadio kembali diangkat sebagai anggota DPR RI sampai badan tersebut dibubarkan. Setelah itu Soebadio menghabiskan waktunya dengan menulis dan "ikut" dalam gerakan mahasiswa Indonesia pada tahun 1974.

SCHERMERHORN, WILLEM

Willem Schermerhorn lahir pada tahun 1894 di Akkersloot, Belanda Utara. Dalam tahun 1908 sampai tahun 1913 dia bersekolah di HBS Alkmaar. Pada tahun 1913 sampai tahun 1918 meneruskan pendidikan di Universitas Delft untuk menjadi insinyur sipil. Setelah itu dia menjadi asisten guru besar bidang geodesi, dan dalam tahun 1926 menjadi guru besar dalam bidang tersebut. Sebelum Perang Dunia II, Schermerhorn adalah ketua dari Perhimpunan Persatuan Sosial Demokrat Belanda, dan selama perang Schermerhorn merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan bawah tanah. Pada tanggal 24 Juni 1945, Schermerhorn diangkat sebagai perdana menteri di negeri Belanda sampai tanggal 3 Juli 1946. Selanjutnya selama setahun dia menjadi ketua dari Komisi Jenderal untuk Hindia Belanda. Dalam kedudukannya sebagai perdana menteri Schermerhorn terlibat dalam perundingan dengan delegasi RI yang berlangsung di Hoge Veluwe mulai tanggal 14 sampai 24 April 1946.

Sebagai Ketua Komisi Jenderal, pada tanggal 25 Maret 1947 dia telah mewujudkan Persetujuan Linggarjati dan selanjutnya

mengalami hal-hal yang tegang sebelum Belanda melakukan agresi pertamanya terhadap Indonesia, dimana Schermerhorn menentang aksi militer Belanda tersebut. Bagi dia yang mempunyai intelegensi tinggi, demokratis dan berkemauan baik, aksi militer tidak akan menyelesaikan masalah. Karena itu sebelum aksi militer terjadi Schermerhorn telah mengirim dua buah telegram untuk mencegah aksi militer, tetapi usaha itu mengalami kegagalan karena ternyata pemimpin-pemimpin Belanda lainnya menyetujui rencana tersebut. Belanda melakukan serangan militernya pada tanggal 27 Juli 1947 dini hari. Peristiwa ini menjadi suatu kekecewaan bagi Schermerhorn, bahwa ia telah gagal mencegah suatu tindakan militer. Ia yang sangat anti peperangan pada akhirnya harus menyaksikan pertempuran terjadi. Setahun setelah menjabat sebagai ketua Komisi Jenderal, pada bulan Juli 1947 ia mengakhiri jabatannya sekaligus mengakhiri karir politiknya. Selanjutnya ia kembali pada dunia pendidikan sebagai guru besar pada bidang studi yang ditekuninya, bidang geodesi, di samping menyelesaikan catatan hariannya "Dag Boek" yang diterbitkan pada tahun 1970 oleh Historisch Genootschap (Perhimpunan Sejarah) di Utrecht.

SERANGAN UMUM 1 MARET

Serangan umum terhadap kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Serangan dilakukan dengan tujuan untuk menduduki kota Yogyakarta dan membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan, di samping mematahkan moral pasukan Belanda. Kurang lebih satu bulan setelah Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan pada bulan Desember 1949, TNI mulai menyusun strategi guna melakukan pukulan balik terhadap tentara Belanda. Pukulan-pukulan dimulai dengan memutuskan garis-garis komunikasi Belanda dengan cara memutuskan kawat-kawat telepon, merusak jalan kereta api dan menyerang konvoi-konvoi Belanda.

Oleh karena itu Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah diduduki. Hal ini berarti kekuatan pasukan Belanda tersebar pada pos-pos kecil di seluruh daerah republik yang kini merupakan medan gerilya. Dalam keadaan pasukan Belanda yang sudah terpencar-pencar, mulailah TNI melakukan serangan terhadap Belanda. Puncak serangan dilakukan dengan serangan umum terhadap kota Yogyakarta (ibukota negara) pada tanggal 1 Maret 1949, di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade 10 daerah *Wehrkreise III* yang membawahi daerah Yogyakarta. Serangan dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Serangan dilakukan pada kurang lebih pukul 06.00 pagi.

Pos komando ditempatkan di desa Muto. Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan telah merayap mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai menyusupkan ke dalam kota. Pagi hari sekitar pukul 06.00 sewaktu sirene dibunyikan serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor barat dipimpin Ventje Sumual, sektor selatan dan timur dipimpin Mayor Sardjono, sektor utara oleh Mayor Kusno. Sedangkan untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 siang, sebagaimana yang telah ditentukan semula pasukan TNI mengundurkan diri.

SINGODIMEDJO , KASMAN

Dilahirkan di Purworejo, Jawa Tengah, pada tanggal 25 Februari 1904. Kasman Singodimedjo adalah tokoh politik, tokoh Islam, dan Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang pertama. Setelah tamat sekolah menengah, dia melanjutkan studi pada

Geneeskundige hooschool (Sekolah Tinggi Kedokteran). Tetapi karena kegiatannya pada bidang politik di kalangan pemuda dan mahasiswa, Kasman dikeluarkan dari sekolah tersebut. Kemudian ia memasuki *Rechtschogeschool* (Sekolah Tinggi Hukum) sampai meraih gelar sarjana hukum. Tetapi walaupun dia dapat memasuki sekolah tinggi hukum ini, tidak berarti dia menghentikan kegiatan politiknya. Kasman yang sejak masa muda telah menggemari politik, pada masa pergerakan pernah menjadi anggota pengurus Jong Java pada tahun 1923, Ketua pengurus Besar Kepanduan Nasional Indonesia 1925-1929, dan Ketua Jong Islamieten Bond Jakarta pada tahun 1929-1935. Ia juga aktif mengajar di berbagai sekolah swasta di Jakarta hingga menjelang pendudukan Jepang.

Semasa pendudukan Jepang, Kasman masuk pendidikan militer, kemudian diangkat sebagai *Daidancho* pada tahun 1943 sampai 1945. Menjelang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Kasman Singodimedjo menjadi salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kemudian ketika dibentuk Komite Nasional Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1945, sebagai badan penasehat presiden dan kabinet, Kasman Singodimedjo ditetapkan sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat yang pertama. Pada tahun 1946-1947, Kasman Singodimedjo diangkat sebagai kepala Urusan Hukum Kementrian Pertahanan, dan pada tahun 1947 sampai 1948 menjadi Menteri Kehakiman. Pada waktu dibentuk Pemerintahan Darurat RI di Bukittinggi, Sumatera Barat, akibat agresi Belanda II, Kasman menjadi juru bicara PDRI di Jawa. Ketika akhirnya Belanda bersedia menarik pasukannya, mengembalikan pemerintah RI ke Yogyakarta dan mengadakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Kasman Singodimedjo dipilih menjadi penasehat delegasi RI pada Konferensi tersebut. Setelah pengakuan kedaulatan, dia menjadi anggota parlemen dan Konstituante hingga lembaga tersebut dibubarkan. Setelah itu Kasman Singodimedjo giat dalam bidang pendidikan dan agama Islam antara lain, di Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga akhir hayatnya pada tanggal 25 Oktober 1982 di Jakarta.

SOEDIRMAN, JENDERAL

Lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, pada tanggal 7 Pebruari 1912. Tamat Kweekschool Muhammadiyah, kemudian dia bekerja sebagai guru HIS Muhammadiyah. Dalam masa Pendudukan Jepang, Soedirman mengikuti pendidikan pada Lembaga Pendidikan Perwira PETA di Bogor. Dia merupakan salah seorang **Daidancho** di Jawa, Madura dan Bali, dengan jabatan sebagai Komandan Batalyon di Kroya. Setelah proklamasi 17 Agustus, Soedirman diangkat sebagai Ketua Badan Keamanan Rakyat (BKR) Banyumas, kemudian Komandan Resimen I Divisi I TKR dan Komandan Divisi V Banyumas.

Dalam rapat pucuk pimpinan TKR pada bulan Nopember 1945, Soedirman diangkat sebagai Panglima Besar Angkatan Perang oleh Presiden pada tanggal 18 Desember 1945. Dalam kedudukannya sebagai Panglima Besar ini, prestasi besarnya dimulai dengan berhasilnya Soedirman mengusir Tentara Inggris dari Magelang-Ambarawa ke Semarang pada bulan Desember 1945, yang dikenal dengan peristiwa "Palagan Ambarawa".

Ketika Belanda melakukan serangan terhadap Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, Jenderal Soedirman selaku Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia/TNI turun bergerilya bersama pasukan TNI. Hampir selama 7 bulan Jenderal Soedirman yang sedang sakit paru-paru memimpin gerilya di daerah selatan Yogyakarta, Surakarta, Madiun dan Kediri sampai masuk Kota Yogyakarta pada bulan Juli 1949, sebagai hasil kelanjutan penandatanganan pernyataan Roem-Rojen pada tanggal 7 Mei 1949 karena penyakit paru-parunya itu, pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Soedirman tutup usia di Magelang.

SOEKARNO

Proklamator, Presiden RI pertama yang lebih dikenal dengan sebutan Bung Karno lahir di Surabaya, pada tanggal 6 Juni 1901. Pendidikannya diawali dengan masuk Sekolah Dasar (HIS),

kemudian masuk Sekolah Dasar (*Europeesche Lagere School*), tamat tahun 1915. Tamat ELS, Soekarno meneruskan pendidikan ke *Hogere Burgerschool* (HBS) dan tamat pada tahun 1920, Selanjutnya Soekarno melanjutkan pendidikan *Technische Hooges School* (Sekolah Tinggi Teknik) hingga memperoleh gelar Insinyur Jurusan Arsitektur pada tahun 1925. Sejak di HBS Soekarno telah mengenal dunia politik, karena sejak di HBS dia tinggal serumah dengan H. O. S Tjokroaminoto, pemimpin utama Sarekat Islam yang aktif berjuang menentang penjajahan.

Semasa kuliah di THS cita-cita politiknya dipupuk dan dimantapkan. Namanya menjadi tenar di Bandung karena pidato-pidato anti kolonialismenya yang berani. Tamat THS Soekarno sempat mendirikan sebuah biro bangunan, tetapi karena hasilnya tidak memuaskan terpaksa dia menutup biro bangunan tersebut. Kegiatan Soekarno sekarang sepenuhnya dicurahkan pada dunia politik pergerakan nasional. Pada tahun 1925, Soekarno mendirikan *Algemene Studie Club* di Bandung dengan majalahnya *Soeloeh Indonesia Moeda*. Dua tahun kemudian bersama Mr. Iskaq Tjokroadisoerjo, Sunario dan lain-lain mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bandung. Oleh karena kegiatan partai tersebut, pada bulan Desember 1926 Soekarno beserta tiga orang pengurus lainnya ditangkap pemerintah Hindia Belanda dengan tuduhan menghasut pemberontakan dan dijatuhi hukuman penjara 4 tahun mulai tahun 1930, di penjara Sukamiskin. Pembelaannya yang terkenal ialah *Indonesia Menggugat*.

Sebelum itu, pada tahun 1928, ia mengadakan badan federasi antara partai-partai politik yang berhaluan kebangsaan, PPPKI. Baru satu tahun dipenjara, Soekarno dibebaskan oleh Gubernur Jenderal Jhr. A. CD. De Graff pada bulan Desember 1931. Lepas dari penjara Soekarno menggabungkan diri dengan Partai Indonesia (Partindo) pada bulan Agustus 1932, karena PNI telah membubarkan diri oleh karena kegiatan politiknya itu, untuk kedua kalinya dia ditangkap dan diasingkan ke Ende pada Juli 1933, kemudian dipindah ke Bengkulu pada bulan Maret 1937. Ketika Jepang mendarat pada awal tahun 1942 Soekarno dibebaskan dan kembali ke Jakarta.

Selama masa pendudukan Jepang ini dia memangku berbagai jabatan. Tahun 1943 dia diangkat sebagai Ketua Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Ketika Putera dirombak menjadi *Jawa Hokokai* (Kebangkitan Rakyat Jawa), Soekarno tetap menjadi ketua sekaligus menjadi ketua *Cuo Sangi In*, semacam badan penasehat balatentara Jepang di Jawa. Di samping itu, Soekarno diikutsertakan pula sebagai pimpinan bentukan-bentukan lain seperti *PETA*, *Heiho*, *Keibodan*, *Seinendan* dan lain-lain. Ketika dibentuk Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soekarno menjadi salah seorang anggotanya. Pada sidangnya tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengucapkan pidato tentang dasar negara bagi negara Indonesia merdeka yang dinamakan Pancasila. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama Mohammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan RI, setelah sebelumnya mengalami "Peristiwa Rengasdengklok". Setelah proklamasi, Soekarno diangkat sebagai presiden RI pertama dengan wakilnya Mohammad Hatta. Pada tahun 1949, ketika Belanda melakukan aksi militernya yang ke II, Soekarno kembali ditangkap Belanda dan dengan sejumlah pemimpin Indonesia lainnya diasingkan ke Bangka. Pertengahan tahun 1949, mereka yang ditawan kembali ke Yogyakarta dan dipulihkan kembali kedudukannya sebagai presiden RI. Setelah pengakuan kedaulatan dan terbentuknya RIS, Soekarno dinobatkan sebagai Presiden RIS dan kembali ke Jakarta.

Dalam Negara Kesatuan RI yang dibentuk pada bulan Agustus 1950, Soekarno kembali menjadi presiden RI. Pada tahun 1959 dia membubarkan hasil pemilu serta mendekritkan kembali dipakainya UUD 1945. Setelah peristiwa G 30 S/PKI pada tahun 1965 dan aksi-aksi Tritura pada tahun 1966 yang melahirkan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret, peranannya menyusut dalam politik dan pemerintahan negara. Tanggal 22 Februari 1967 Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto dan beberapa tahun kemudian tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970 Soekarno meninggal dunia di Jakarta.

SOEMOHARDJO, OERIP

Tokoh Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Oerip Soemoharjo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada tanggal 22 Februari 1893. Tamat STOVIA Magelang pada tahun 1910, Oerip mengikuti kursus *Inlandsche Officer* hingga selesai pada tahun 1914. Pada tahun 1917 dia berhasil mengikuti ujian persamaan kedudukan dengan perwira Belanda. Selama sepuluh tahun, ia bekerja di berbagai tempat dan berpindah-pindah batalyon, sampai kemudian diangkat sebagai Komandan Depot Batalyon II, yang merupakan jabatan terakhir saja. Pada tahun 1938 atas permintaan sendiri Oerip berhenti dengan hormat dari dinas kemiliteran. Tetapi pada tahun 1940 dia dipanggil bertugas kembali sampai pemerintah Hindia Belanda menyerah pada Jepang pada bulan Maret 1942. Selama masa Pendudukan Jepang dia kembali ke desa tempat tinggalnya di Genten, Yogyakarta, setelah terlebih dahulu menjadi tawanan Jepang selama tiga bulan di Cimahi. Setelah terbentuknya Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Pemerintah memanggil Oerip Soemoharjo ke Jakarta untuk disertai tugas menyusun tentara nasional.

Berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 tentang tentara nasional, maka berdirilah sebuah tentara nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat, yang kini bernama Tentara Nasional Indonesia setelah mengalami beberapa kali penggantian nama. TKR inilah yang menjadi tulang punggung perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi aksi-aksi militer Belanda. Berdasarkan Maklumat itu juga, kemudian diadakan pertemuan dengan sejumlah perwira dan calon perwira KNIL yang kini berdiri di belakang RI. Dari hasil pertemuan tersebut dibentuk Markas Besar Umum TKR yang berkedudukan di Yogyakarta dengan ketuanya Oerip Soemoharjo terpilih sebagai Kepala Staf Umum. Pada tanggal 17 Mei 1946 ketika dilakukan penyusunan peraturan bentuk kementerian pertahanan dan badan-badan perjuangan, Letnan Jenderal Oerip Soemoharjo kembali diangkat sebagai Kepala Markas Besar Umum. Pada tahun 1947, Oerip Soemoharjo terpilih menjadi anggota Komisi Teknis Indonesia untuk merundingkan gencatan

senjata dengan Komisi Teknis Belanda. Perundingan ini dilakukan sebagai langkah awal sebelum Perundingan Renville, yang dibuka pada tanggal 8 Desember 1948. Tetapi sayang ketika perundingan Renville itu sendiri berlangsung, beliau tidak dapat mengikuti perundingan tersebut karena penyakit jantung telah merenggut nyawanya pada tanggal 17 Nopember 1948.

SOPHIAAN, MANAI

Lahir di Takalar, Sulawesi Selatan pada tahun 1915. Tamat Sekolah Taman Siswa Yogyakarta dan Sekolah Guru di Jawa pada tahun 1936, dia mengajar di Perguruan Taman Siswa di Makasar sampai dipenjarakan oleh Belanda pada tahun 1940. Setelah bebas pada tahun 1942, Manai bekerja sebagai Pemimpin Redaksi *Pewartu Selebes* sampai tahun 1945. Selama masa pendudukan Jepang ini, dia berhubungan erat dengan Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Manai diangkat sebagai anggota BPKNIP dan DPR disamping sebagai Pemimpin Redaksi *Suara Indonesia* (1945-1946). Sementara itu dia juga giat berjuang bersama pemuda-pemuda lain dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Manai Sophiaan diangkat sebagai ketua Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI), sebuah federasi dari kelompok-kelompok pemuda dan laskar yang berorientasi politik.

Organisasi ini mempunyai hubungan erat dengan pemimpin nasional tua. Bersama dengan laskar-laskar lain di bawah pimpinan para anggota PPNI, mereka berhasil menggagalkan penyerbuan Belanda ke Makasar. Karena kegiatannya ini menyebabkan Manai Sophiaan ditahan Belanda pada tahun 1945 sampai 1946. Setelah pengakuan kedaulatan ia terus aktif dalam dunia kewartawannya dengan menjadi Pemimpin Redaksi *Suluh Indonesia* (1954-1955). Ia juga sempat diangkat sebagai Duta Besar Uni Soviet (1963-1967) dan juga menjadi diplomat di beberapa negara lainnya setelah menjadi utusan pengganti Indonesia untuk PBB pada tahun 1959-1961.

SOUTH EAST ASIA COMMAND (SEAC)

Adalah komando Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten. Tugas Komando yang dibentuk oleh Gabungan Pimpinan Tentara Sekutu ini adalah untuk menduduki dan melucuti tentara Jepang di Asia Tenggara, sesudah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dalam perang Pasifik pada tanggal 15 Agustus 1945.

SOUMOKIL, CHRISTIAN ROBERT

Pimpinan Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang lebih sering disebut dengan Soumokil, lahir dan dibesarkan serta dididik diluar tanah kelahirannya, Ambon. Soumokil dikelompokkan dalam masyarakat Ambon yang sangat mendambakan kemajuan sebagaimana intelektual lainnya. Didorong oleh cita-citanya tersebut, ia menjadi ahli hukum dan hakim yang terhormat dalam masyarakat Hindia Belanda. Ia termasuk sedikit orang bumi putera yang statusnya disamakan dengan orang Belanda. Oleh karena itu tidaklah terlalu mengherankan bila cita-citanya bertolak belakang dengan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin segera bebas dari kekuasaan Belanda. Ketika dibentuk Negara Indonesia Timur (NIT) oleh Van Mook, Soumokil termasuk orang yang mendukung pembentukan NIT. Meskipun tidak punya pengalaman politik dia diangkat menjadi Menteri Kehakiman NIT.

Menurutnya NIT dapat menjamin kepentingan-kepentingan dia, maka Soumokil merupakan salah seorang penentang utama kembalinya NIT pada Negara Kesatuan RI. Begitu pula pada masa sebelumnya, yaitu pada waktu pembentukan RIS. Ketika dibentuk APRIS sebagai Tentara RIS dengan intinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan KNIL harus dibubarkan atau disalurkan ke TNI, beberapa tokoh NIT tidak menyetujui hal tersebut termasuk Soumokil.

Mereka yang tidak menyetujui pembubaran KNIL melakukan berbagai kekacauan didaerah-daerah dengan tujuan untuk membentuk negara sendiri. Dalam kekacauan inilah Soumokil bersama pengikutnya memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan di Ambon pada tanggal 24 April 1950. Pada akhirnya pemberontakan RMS dapat ditumpas dan Soumokil berhasil ditangkap pada tahun 1962 setelah beberapa lama melarikan diri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ia dihadapkan ke depan sidang militer dan dijatuhi hukuman mati.

STAATSPARTIJ (PNI)

Partai Nasional Indonesia sebagaimana diputuskan oleh sidang PPKI 22 Agustus 1945 dimaksudkan sebagai satu-satunya partai politik Indonesia atau disebut sebagai partai negara (*staatspartij*). Sehari kemudian Presiden Soekarno berpidato di radio mempropagandakan konsep PNI, yang dianggapnya akan mempersatukan seluruh golongan. PNI menurut Presiden (akan) menjadi motor perjuangan rakyat dalam segala suasana dan lapangan, " sementara Komite Nasional adalah suatu Komite, Partai Nasional Indonesia adalah suatu partai. Komite diadakan untuk sementara waktu, partai kita hajatkan pula terus sampai dimasa yang akan datang (ia akan) memperkuat persatuan bangsa dan negara, memperbesar rasa cinta, setia, bakti kepada tanah air; mengikhtiarkan program ekonomi dan sosial sebagai tersebut dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia, membantu tercapainya keadilan sosial dan perikemanusiaan dengan jalan perdamaian internasional".

Dengan Maklumat Pemerintah tanggal 31 Agustus, diputuskan bahwa gerakan dan persiapan PNI ditunda dan segala kegiatan dicurahkan ke dalam KNI. Semenjak itu gagasan partai tunggal ini tidak pernah dihidupkan lagi.

SPOOR, SIMON HENDRIK

Dilahirkan di Amsterdam pada tanggal 12 Januari 1902. Simon Hendrik Spoor adalah Jenderal tentara Belanda yang memimpin agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Pada tahun 1934 sampai tahun 1938, Spoor mengajar pada Akademi Militer Kerajaan Belanda. Tahun 1940 dia ditempatkan di Staf Jenderal KNIL. Di tahun 1942, Simon Hendrik Spoor dikirim ke Australia untuk menjadi kepala NEFIS (*Inteligens*). Empat tahun kemudian Spoor diangkat sebagai panglima tentara Belanda di Indonesia merangkap kepala Departemen Perang dengan pangkat Letnan Jenderal. Dalam bulan Nopember 1946, Letnan Jenderal Spoor terpilih menjadi salah seorang anggota Komisi Gencatan Senjata antara Indonesia-Belanda, sebagai langkah awal sebelum dilakukannya perundingan di Linggarjati. Ketika akhirnya Belanda menyatakan tidak berlakunya Perjanjian Linggarjati, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Spoor tentara Belanda melakukan gerakan militernya terhadap Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 1947. Begitu pula pada tahun 1948, ketika Belanda tidak mengakui gencatan senjata dan Persetujuan Renville, di bawah pimpinan Letnan Jenderal Spoor Belanda kembali melakukan aksi militernya yang ke II pada tanggal 19 Desember 1948. Oleh keberhasilannya itu, pada bulan Mei 1949, Letnan Jenderal Spoor diangkat sebagai Jenderal. Dua hari setelah pengangkatannya, Jenderal Simon Hendrik Spoor meninggal dunia. Ia meninggal di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1949. Atas jasa-jasanya Jenderal Spoor secara anumerta diberi gelar *Commandeur in de Militaire Willems Orde*.

SUBARDJO, AHMAD

Diplomat, mantan menteri luar negeri pertama RI, Mr. Ahmad Subardjo, lahir di Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1886. Tamat sekolah menengah, dengan bekal otak yang cukup pintar, pada tahun 1919 Subardjo berangkat ke Belanda untuk melanjutkan

pelajarannya pada bidang hukum di Universitas Leiden. Pada saat belajar di Negeri Belanda inilah Subardjo mulai mengenal dunia politik. Ia menjadi anggota Perhimpunan Indonesia (PI), suatu perkumpulan mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda, dan pernah terpilih menjadi ketua organisasi itu pada tahun 1919-1926. Bersama anggota PI lainnya, dia pernah menjadi anggota delegasi ke Kongres Liga Anti Imperealisme untuk kemerdekaan nasional. Kembali ke Indonesia pada tahun 1934, Subardjo memusatkan diri pada pekerjaannya di Bandung.

Ketika Jepang berhasil menduduki Indonesia pada tahun 1942, Subardjo bekerja pada kantor penasihat Angkatan Darat Jepang. Kemudian dia bekerja pada *Kaigun Bukanfu*, kantor penghubung Maeda, salah seorang pimpinan Angkatan laut Jepang. Disini dia mulai mengenal pribadi-pribadi tokoh pemerintah militer Jepang, yang nantinya sangat bermanfaat saat menjelang proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ahmad Subardjo menjadi penghubung antara Soekarno-Hatta dengan pimpinan militer Jepang, sehingga melapangkan jalan bagi peristiwa bersejarah dan sangat penting sebagai penghubung antara Soekarno-Hatta dengan para pemuda radikal yang menuntut pemimpin-pemimpin itu melakukan proklamasi lebih cepat sehingga tidak dianggap kemerdekaan itu sebagai buatan Jepang, yang dikenal dengan "Peristiwa Rengasdengklok". Subardjo adalah orang yang menjemput kedua pemimpin tersebut yang diculik dalam peristiwa Rengasdengklok ini. Dia juga yang menghubungi para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan RI pada rapat bersejarah menjelang 17 Agustus, dan meminjam ruang di rumah Laksmana Maeda sebagai tempat rapat.

Selain itu, dia merupakan salah seorang peserta rapat kecil untuk menyusun teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya sebagai pernyataan resmi kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, Ahmad Subardjo terpilih sebagai anggota BPUPKI dan kemudian menjadi salah seorang dari Panitia Sembilan yang bertugas menyusun rancangan UUD 1945 dan Dasar Negara Pancasila. Setelah proklamasi, pada tanggal 19 Agustus 1945 Subardjo menjadi ketua panitia kecil yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan

organisasi pemerintah pusat yang melahirkan Kabinet RI pertama dimana Subardjo sendiri terpilih sebagai menteri luar negeri pertama.

SUBROTO, GATOT

Lahir di Desa Tanjung Kecamatan Jatilawang, Purwokerto pada tanggal 10 Oktober 1909. Setelah menempuh taman kanak-kanak (*Frobel School*) selama 2 tahun, pada tahun 1916 Gatot Subroto masuk ke *Europeesch Lager School* (ELS). Menginjak kelas VI ELS karena sesuatu hal dia dikeluarkan dari sekolah tersebut. Kemudian Gatot Subroto masuk *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) dan tamat pada tahun 1927. Tahun 1928 Gatot Subroto mengikuti pendidikan militer (*Aanbevolen Militaire KNIL*) di Magelang dan tamat pada tahun 1931 dengan pangkat sersan pribumi kelas dua KNIL dan ditempatkan di Padang Panjang. Pada tahun 1934 dia mendapat tugas belajar pada sekolah polisi di Sukabumi. Tamat sekolah polisi pada tahun 1936, Gatot Subroto bekerja pada Kesatuan Marsose di Jatinegara.

Menjelang kedatangan Jepang, dalam rangka menghadapi invasi Jepang, Gatot Subroto bersama pasukannya di kirim ke Ambon. Tetapi dalam waktu singkat pertahanan anggota pasukan KNIL bercerai berai dan Jepang berhasil menduduki Indonesia pada tahun 1942. Gatot Subroto kembali ke kampung halamannya, tak lama kemudian Gatot Subroto diangkat sebagai Komandan Detasemen Polisi Banyumas. Dan tidak lama kemudian diangkat sebagai *Cudanco* (Komandan Kompi PETA) dari *Dai Ichi* pada *Dai Ni Daidan* di Sumpyuh sampai proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Proklamasi, Gatot Subroto mendapat kepercayaan untuk menjabat Kepala Kepolisian Karesidenan Banyumas.

Sementara itu dengan membonceng tentara Sekutu Belanda kembali menginjakkan kakinya di Indonesia yang menimbulkan perlawanan di seluruh tanah air termasuk daerah Ambarawa, Jawa Tengah di bawah pimpinan Kolonel Soedirman. Dalam menghadapi

kesibukan pemilihan Panglima Besar, maka Kolonel Soedirman memilih Gatot Subroto sebagai komandan sektor pertempuran Ambarawa untuk menggantikannya. Selanjutnya pertempuran Ambarawa dipimpin Gatot Subroto yang kemudian berhasil memukul mundur pasukan musuh dari Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945. Setelah Palagan Ambarawa, Gatot Subroto kembali ke induk pasukannya dan langsung ditunjuk sebagai Panglima Divisi II atau Divisi Sunan Gunung Jati sampai tahun 1948. Kemudian diangkat sebagai Panglima Corps Polisi Militer. Ketika terjadi pemberontakan PKI Madiun pada bulan September 1948, atas keputusan Markas Besar Angkatan Perang (MBAP), Kolonel Gatot Subroto diangkat menjadi Gubernur Militer daerah Solo (Surakarta). Bersama dengan pasukan-pasukan lain, pasukan militer Surakarta dibawah Kolonel Gatot Subroto akhirnya dapat menguasai Madiun dan sekitarnya pada bulan Oktober 1948. Dalam rangka menghadapi Agresi Militer Belanda II pada bulan Desember 1948, dengan instruksi Markas Besar Komando Djawa (MBKD) Kolonel Gatot Subroto yang sedang menjabat sebagai Gubernur Militer merangkap tugas sebagai Panglima Divisi II yang wilayahnya meliputi Karesidenan Semarang, Surakarta, Pati dan Madiun. Dengan instruksi MBKD mulai dilakukan perang gerilya rakyat semesta. Pada tanggal 6 Oktober 1949 Gatot Subroto diangkat sebagai Panglima Divisi seluruh kesatuan Jawa Tengah sampai tahun 1952. Pada awal tahun 1952, Kolonel Gatot Subroto diangkat sebagai Panglima Territorium VII. Setelah menjadi orang sipil selama 3 tahun, pada tahun 1956 Gatot Subroto diangkat sebagai Wakil Kepala Staff Angkatan Darat sampai tanggal 11 Juni 1962 beliau menutup mata untuk selamanya.

SUPOMO, RADEN

Dilahirkan di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari 1903. Ia adalah Sarjana Hukum, ahli dan guru besar Hukum Adat yang turut aktif dalam menjelang dan semasa perang kemerdekaan. Tahun 1927 Supomo menamatkan pendidikan dari Universitas

Leiden, negeri Belanda, dimana ia mencapai gelar Doktor. Setelah kembali ke Indonesia bekerja sebagai Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto. Selanjutnya Supomo bekerja sebagai pegawai *Tinggi Departemen Justiche* merangkap guru besar luar biasa ilmu hukum adat pada Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshogeschool*). Selama masa ini Supomo tidak aktif pada bidang politik maupun pemerintahan. Dia lebih mencurahkan perhatiannya pada bidang hukum sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya.

Pada waktu menjelang proklamasi kemerdekaan, Supomo mulai tampil pada bidang pemerintahan. Pada waktu menjelang Proklamasi, Supomo terpilih menjadi salah satu anggota Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar (UUD 1945) yang berjumlah tujuh orang. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Prof. Dr. MR. Supomo diangkat menjadi Menteri Kehakiman pada Kabinet RI Pertama (Kabinet Soekarno-Hatta). Pada bulan Agustus 1949 ketika akhirnya Belanda dan Indonesia maju kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara keduanya, Supomo terpilih menjadi salah seorang anggota delegasi RI pada perundingan, yang dikenal dengan Konperensi Meja Bundar itu. Dalam delegasi ini Supomo menjadi Ketua Panitia Ketatanegaraan delegasi Indonesia.

Setelah berakhirnya KMB yang ditandai dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). Prof. Dr. Mr. Supomo diangkat sebagai Menteri Kehakiman pada Kabinet RIS yang dibentuk pada awal tahun 1950. Dalam kaitannya dengan pembentukan RIS ini, Supomo memegang peranan penting dalam merencanakan UUD RIS. Ketika akhirnya RIS berakhir pada bulan Agustus 1950 dan menjadi Negara Kesatuan RI, kabinet RIS pun dibubarkan, yang dengan demikian berakhir pula jabatan Supomo sebagai Menteri Kehakiman Kabinet RIS.

Setelah berakhir jabatannya sebagai Menteri Kehakiman, dia diangkat sebagai presiden (Rektor) Universitas Indonesia. Di bulan April 1954 Prof. Dr. Mr. Supomo diangkat sebagai Duta Besar RI untuk Inggris setelah sebelumnya menjadi Ketua Delegasi Indone-

sia dalam perundingan penyelesaian bentrokan GIA-KLM. Empat tahun kemudian, yakni pada tanggal 12 September 1958, Prof Dr. Mr. Supomo meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa judul karya tulisnya.

SYAHRIR, SUTAN

Tokoh politik di masa perjuangan yang sangat menonjol pada masa perang kemerdekaan ini lahir pada tanggal 5 Maret 1909. Ia dilahirkan di kota Gadang (Bukittinggi) Sumatera Barat, sebagai anak seorang Jaksa Kepala. Selesai menamatkan pelajarannya di AMS (*Algemene Middelbare School*) di Bandung, Syahrir melanjutkan pendidikannya ke Negeri Belanda. Sejak masih dibangku sekolah, Sutan Syahrir telah giat di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dalam masa pergerakan ia aktif sebagai pemimpin PNI- Merdeka yang kemudian menjadi Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru). Oleh karena kegiatannya ini, bersama Moh. Hatta, ia ditangkap dan dibuang ke Digul (Februari 1934). Dari Digul ia di buang ke Banda Naira hingga awal tahun 1942. Pada masa pendudukan Indonesia, Syahrir merupakan salah seorang dari tokoh-tokoh pemuda yang sangat membenci Jepang. Bersama dengan pejuang lain, ia tergabung dalam gerakan bawah tanah.

Ketika dibentuk Komite Nasional Indonesia pada tanggal 29 Agustus 1945, dua bulan kemudian Syahrir diangkat sebagai Ketua Badan Pekerja (KNIP). Sebulan kemudian 14 Nopembeer 1945, Syahrir terpilih menjadi Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri. Ini merupakan Kabinet Syahrir Pertama, karena kemudian berturut-turut ia terpilih menjadi Perdana Menteri sampai Kabinet Syahrir ke tiga (2 Oktober 1946-26 Januari 1947). Sementara itu bersama Amir Syarifuddin, Syahrir aktif sebagai pemimpin Partai Sosialis. Dalam kedudukannya sebagai Perdana Menteri, Sutan Syahrir sangat menonjol dengan politik berundingnya dengan Belanda dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda. Pada tanggal 1 April 1947 Syahrir berangkat ke New Dehli berhubung

dengan berlangsungnya *Asian Retion Convergence*, dimana masalah Indonesia juga dibicarakan dalam konperensi ini. Ia bertemu Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan meminta dukungannya.

Ketika perundingan Linggarjati (10 Nopember 1946), ia dipilih sebagai Ketua Delegasi Indonesia ke perundingan. Politik perundingan ini menyebabkan Syahrir mendapat tantangan keras terutama dari golongan Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka, yang menghendaki sikap yang lebih tegas dalam menghadapi Belanda. Bersama beberapa Menteri lainnya ia diculik pada tanggal 27 Juni 1946, untuk kemudian dilepas kembali (1 Juli) setelah ada perintah dari Presiden Soekarno. Akibat politik berunding ini pula, akhirnya Kabinet Syahrir jatuh, dan diganti dengan Amir Syarifuddin (26 Juni 1947). Ia diangkat sebagai penasehat presiden (30 Juni 1947) dan memegang jabatannya sebagai Ketua Delegasi RI untuk perundingan-perundingan dengan Belanda dalam waktu yang tidak lama. Walau pun sudah tidak menjabat sebagai Ketua Delegasi perundingan, Syahrir tetap giat melakukan perundingan dan mencari dukungan bagi penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda. Ketika Belanda melakukan aksi militer yang pertama (21 Juli 1947), Syahrir sebagai duta berkeliling melakukan perjalanan ke Singapura, New Dehli dan Lakesucces/PBB untuk mendapatkan dukungan. Sewaktu mendapat kesempatan kemudian dalam sidang Dewan Keamanan PBB (14 Agustus 1947), beliau mendesak PBB membantu penyelesaian sengketa RI-Belanda, dan meminta dibentuknya suatu badan yang bersifat netral. Dari PBB ia berangkat ke London dengan tujuan yang sama.

Sementara itu timbul perpecahan dalam partai sosialis. Amir Syarifuddin tetap meneruskan partai sosialis yang kemudian berfusi dengan PKI. Sedangkan Syahrir mendirikan partai sosialis Indonesia yang terus dipimpnnya hingga partai tersebut dibubarkan pada tahun 1960. Syahrir dan pemimpin-pemimpin lainnya dipenjara (15 Januari 1962). Dalam masa penahanan ini ia terserang penyakit yang mengharuskan ia berobat ke luar negeri (Mei 1965). Tetapi penyakitnya tidak dapat disembuhkan lagi. Sebelumnya ia sempat ke Indonesia, Sutan Syahrir meninggal di rumah sakit Zurich, Swiss

pada tanggal 9 April 1966, dalam kedudukan sebagai tahanan politik negara.

SYARIFUDDIN, AMIR

Dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1905. Beliau merupakan tokoh politik dan salah seorang tokoh pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Setamat dari *Garnesium* melanjutkan pelajarannya ke Jakarta, dan kemudian ke *Universitas Leiden*, Belanda sampai memperoleh gelar Sarjana Hukum (Mr.). Sejak muda Amir telah aktif dalam berbagai kegiatan politik. Di masa pergerakan ia terkenal sebagai pendiri dan pemimpin Gerakan Rakyat Indonesia (1937) dan salah seorang pemimpin Gabungan Politik Indonesia (GAPI) pada tahun 1939. Oleh karena kegiatannya di bidang politik ini, ia pernah ditangkap dan dipenjarakan pemerintah Hindia Belanda. Ketika pada bulan Oktober 1945 dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) sebagai penyelenggaraan pemerintahan, Amir Syarifuddin diangkat menjadi salah satu anggota tersebut. Sementara itu pada awal November 1945 bersama Abdul Majid Djojohadiningrat mendirikan Partai Solial Indonesia (PSI). Partai ini bergabung dengan Partai Sosial.

Sutan Syahrir menjadi Partai Sosial pada bulan Desember 1945. Pada masa Kabinet Syahrir (Nopember 1945-Maret 1945), Amir Syarifuddin diangkat menjadi Menteri Penerangan. Pada kabinet Syahrir II beliau terpilih menjadi Menteri Pertahanan. Setelah jatuhnya kabinet Syahrir III pada bulan Juni 1947, Amir Syarifudin diangkat menjadi Menteri Penerangan. Pada kabinet Syahrir II beliau terpilih menjadi Menteri pertahanan. Setelah jatuhnya Kabinet Syahrir III pada bulan Juni 1947, Amir Syarifudin diangkat sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan sampai bulan Januari 1948. Dalam kedudukannya sebagai Perdana Menteri, Amir Syarifuddin memimpin delegasi RI pada perundingan Renville dan menandatangani hasil persetujuan tersebut pada tanggal 17 Januari

1948. Akibat persetujuan tersebut, Amir mendapat kecaman dari kalangan oposisi terhadap kabinet.

Oleh karena itu pada 23 Januari Amir meletakkan jabatan. Sementara itu terjadi perpecahan antara kelompok Syharir dan Amir dalam Partai Sosialis. Amir bersama Tan Liang Djie dan Abdul Majid membentuk Partai Sosialis baru yang kemudian menjadi Front Demokrasi Rakyat (FDR) di bawah pimpinan Amir syarifuddin. Dalam kegiatan politiknya FDR merongrong Kabinet Hatta dengan memancing bentrokan dengan lawan politiknya. Di bawah pengaruh FDR terjadi berbagai pemogokan antara lain, pemogokan Delanggu pada tanggal 5 Juli 1948. Bersamaan dengan kegiatan FDR, pada bulan Agustus muncul seorang tokoh PKI kawakan yang telah lama bermukim di Moskow, yaitu Musso. Ia kemudian mengadakan pembaharuan struktur organisasi politbiro PKI. Dalam struktur organisasinya yang baru ini, Amir Syarifuddin ditetapkan sebagai Sekretaris Urusan Pertahanan. Semenjak kedatangan Musso insiden-insiden yang didalangi oleh FDR/PKI terus meningkatkan PKI pada 18 September 1948. Pemberontakan ini dihapus oleh pemerintah, dan tokoh-tokohnya berhasil di tangkap, termasuk Amir Syarifuddin, yang kemudian dijatuhi hukuman pada tahun itu juga.

TENGGEAMNYA KAPAL LAUT RI GAJAH MADA

Peristiwa ini terjadi di teluk Cirebon pada bulan Januari 1947. Ketika itu Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang tengah mengadakan latihan gabungan antara unsur Angkatan Darat dan Armada Pangkalan III Cirebon, dalam upaya meningkatkan ketrampilan dan kewaspadaan mendapat serangan dari kapal perang Belanda. Latihan berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 5 Januari di Teluk Cirebon. Selama latihan berlangsung kapal Belanda terus menerus melakukan pengintaian dari jauh. Di saat kapal-kapal Angkatan laut sedang menuju ke utara dalam formasi beriringan, pada hari terakhir mereka bertemu dengan kapal Belanda. Kapal

perang Belanda tersebut memberi isyarat yang memerintahkan agar kapal-kapal Republik Indonesia tersebut berhenti. Oleh tentara-tentara Republik Indonesia isyarat yang berbentuk pemerintah itu tidak diindahkan, mereka terus melakukan perjalanan.

Oleh karena hal tersebut, kapal Belanda melakukan penembakan. Ternyata serangan yang mulai dilakukan Belanda tidak dapat dihindarkan atau ditolak tentara Republik Indonesia. Sebaliknya tentara RI memutar haluan dengan posisi menghadapi lawan, sehingga pertempuran tidak dapat dihindarkan lagi. Dalam pertempuran laut ini kapal perang RI Gajah Mada berkali-kali mendapat tembakan dari kapal perang Belanda yang lebih berdaya tembaknya. Akhirnya kapal perang RI Gajah Mada tenggelam bersamaan dengan tenggelam bersamaan dengan tenggelamnya kapal perang RI Gajah Mada, gugur pula Letnan Samadikun, Komandan kapal RI Gajah Mada.

WEDYODININGRAT, RADJIMAN

Lahir di Yogyakarta pada 2 April 1879. karena kedua orang tuanya sudah meninggal, sejak kecil Radjiman diambil anak angkat oleh Dokter Wahidin Sudirohusodo, seorang tokoh pergerakan nasional pendiri Budi Utomo. Radjiman Wedyodiningrat menamatkan pendidikan dasar di ELS pada tahun 1893. Kemudian melanjutkan sekolah dan lulus sebagai dokter jawa pada tahun 1898. setelah itu dia bekerja sambil memperdalam pengetahuannya di bidang kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri.

Tahun 1930 dia telah menjadi ahli bedah, ahli ilmu bersalin dan ahli penyakit kandungan. Tetapi sayang dunia kedokteran tidak lama digelutinya. Tahun 1936 beliau pensiun sebagai dokter. Jiwa politiknya dan semangat perjuangan yang diwariskan ayah angkatnya, telah menyebabkan dia lebih tertarik pada pergerakan nasional ini, selain menjadi anggota Budi Utomo sejak organisasi itu berdiri pada tahun 1908, ia juga pernah menjadi anggota Parindra yang berubah menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) pada tahun 1935, dan

menjadi anggota *Studie Club*. Di dalam organisasi ini Radjiman duduk sebagai pemimpin majalah tengah bulanan "Timur" pada tahun 1926-1930. Ketika Jepang menduduki Indonesia, Dr. Radjiman Wedyodiningrat diangkat sebagai anggota Majelis Pertimbangan *Jawa Hokokai*, anggota *Shy-sa-ngi-kai* Madiun (semacam Dewan Perwakilan Rakyat Karesidenan) dan anggota *Cuo-Sangi-In* (Dewan Perwakilan Rakyat Pusat) tahun 1943. Peranan Dr. Radjiman Wedyodiningrat yang menonjol pada tahun 1945 terutama pada saat menjelang proklamasi 17 Agustus 1945. Ketika Jepang melihat tanda-tanda kekalahannya dan hendak memenuhi janjinya kepada Indonesia untuk memberikan kemerdekaan, kemudian dibentuk badan yang akan menyelidiki persiapan-persiapan bagi sebuah negara yang akan merdeka. Badan ini dinamakan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan Dr. Radjiman sebagai ketua. Pada bulan Agustus 1945, BPUPKI diubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Dalam badan yang baru ini yang diketuai Ir. Sukarno, Dr. Radjiman Wedyodiningrat duduk sebagai salah seorang anggotanya. Menjelang proklamasi, Dr. Radjiman bersama Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta berangkat ke Dalat (Vietnam Selatan) atas undangan Marsekal Terauci, penguasa perang tertinggi di seluruh Asia Tenggara, untuk membicarakan masalah kemerdekaan Indonesia. Akhirnya kemerdekaan Indonesia pun diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi, anggota PPKI dengan ditambah beberapa orang anggota menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Dr. Radjiman Wedyodiningrat juga terpilih menjadi anggota badan ini. Di samping sebagai anggota KNIP, pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), dia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) RIS.

Ketika negara kembali pada negara kesatuan RI pada tahun 1950, bersama anggota DPA lainnya Dr. Radjiman masuk menjadi anggota DPR RI. Namun belum lama duduk dalam lembaga tersebut, Dr. Radjiman Wedyodiningrat dipanggil Yang Maha Kuasa pada tanggal 20 September 1952 dan dimakamkan di Yogyakarta.

WESTERLING, RAYMOND PAUL PIERRE

Pimpinan Peristiwa Pembantaian $\pm$ 40.000 jiwa rakyat Sulawesi Selatan dan kekacauan-kekacauan lain pada masa revolusi kemerdekaan. Westerling, lahir di Istanbul, Turki pada tanggal 31 Agustus 1919. Ayahnya adalah seorang Belanda dan ibunya berasal dari Turki. Pada tahun 1940, Westerling masuk pendidikan militer di London, Inggris. Kemudian selama lima tahun berperang melawan Jerman di daratan Eropa. Setelah turut dalam peperangan di Eropa, selanjutnya dia diterjunkan di medan perang Burma. Tidak lama setelah itu, Westerling pindah ke Colombo, Srilanka, untuk latihan militer dan Bahasa Indonesia sebelum diterjunkan ke Medan, Sumatera Utara untuk menyambut pendaratan Tentara Sekutu yang membawa serta Tentara Belanda (NICA). Di Medan dia membentuk pasukan khusus yang terdiri dari orang-orang keturunan Cina dengan nama Poh An Tui (PAT).

Pasukan inilah yang kemudian melakukan kerusuhan-kerusuhan di Sumatera Utara. Setelah kerusuhan ini, pada bulan Juli 1946 Westerling mendarat di Jakarta. Di sini dia juga membentuk pasukan khusus dengan markas berpindah-pindah antara lain, Jatinegara, Kalibata dan Batujajar. Pada awal Desember 1946, dia ditugaskan sebagai pemimpin pasukan NICA yang dikirim ke Sulawesi Selatan, khususnya Makasar. Dalam tugasnya di Sulawesi Selatan ini, pada tanggal 7 Desember pasukan Westerling secara membabi buta membunuh beribu-ribu rakyat Makassar. Akibat peristiwa ini Westerling berhenti dari dinas militer dan kembali ke Batujajar karena perbedaan politik operasional militer dengan Jenderal Spoor. Kemudian dia membentuk Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang membuat kekacauan-kekacauan di Pulau Jawa. Di Bandung pada tanggal 23 Maret sampai 23 Januari 1950, Westerling dengan pasukannya yang menamakan diri "APRA" melancarkan serangan terhadap kota Bandung.

Kemudian di Jakarta, bekerjasama dengan Sultan Hamid II, yang menjadi anggota Kabinet RIS, merencanakan untuk menyerang gedung kabinet yang pada waktu itu akan diadakan sidang dan

penculikan semua menteri serta usaha pembunuhan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX. Tetapi usaha ini mengalami kegagalan berkat kesiagaan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS). Pada bulan Pebruari 1950, *dengan menggunakan pesawat Belanda Westerling lari ke Singapura*. Setelah diinterogasi oleh *Criminal Investigation Department* Tentara sekutu, dia dibebaskan dan kembali ke Belanda.

YAMIN, MUHAMMAD

Dilahirkan di Sawahlunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia adalah seorang Sarjana Hukum, pengarang, politikus, tokoh pergerakan Indonesia dan juga Sastrawan. Pendidikan di peroleh Muhammad Yamin di *HIS* tamat tahun 1918. Dilanjutkan ke Sekolah Pertanian (*Algemene Middelbare Landbouwschool*) di Bogor selama lima tahun. *AMS* di Yogyakarta tamat 1927, dan sekolah *Rechtschthoogeshool* di Jakarta, selesai tahun 1932.

Semenjak muda Muhammad Yamin telah aktif dalam dunia politik. Dia antara lain pernah menjadi Ketua Pergerakan Pemuda Jong Sumateranen Bond (1926-1928) dan Ketua Indonesia Muda (1928) yang mempunyai peranan di dalam pencetusan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada masa pendudukan Jepang ia bekerja sebagai anggota Dewan Penasehat Departemen Penerangan, di samping sebagai anggota PUTERA. Dan ketika Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dalam rangka kemerdekaan Indonesia, Muhammad Yamin merupakan anggota yang cukup menonjol terutama dalam merumuskan dasar negara Pancasila.

Dalam rangka perumusan Pancasila, Muhammad Yamin adalah salah seorang dari tokoh-tokoh yang memberi rumusan Pancasila. Ia dianggap yang pertama kali merumuskan materi Pancasila, dan ia juga yang memberi nama "Piagam Jakarta" pada dokumen yang

dipergunakan sebagai Konsep Perumusan Dasar Negara RI. Pada masa permulaan RI (masa perang kemerdekaan), Muhammad Yamin tergabung dalam Badan Persatuan Perjuangan pimpinan Tan Malaka, yang beroposisi keras terhadap perjuangan diplomasi, yang dilakukan Kabinet Syahrir. Dalam kedudukannya sebagai anggota Persatuan Perjuangan, ia merupakan salah seorang pemimpin dalam perebutan kekuasaan pemerintah, yang terkenal sebagai Peristiwa Tiga Juli (1946). Sebagai akibat perbuatannya itu, dalam pengadilan Muhammad Yamin dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

Tetapi pada hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1948, ia memperoleh Grasi dan dibebaskan. Kemudian dalam perundingan mengenai " penyerahan kedaulatan" yang dikenal dengan Konperensi Meja Bundar (KMB) di negeri Belanda, Muhammad Yamin diangkat sebagai penasehat delegasi RI. Setelah negara RI kembali menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, Muhammad Yamin tetap aktif dalam dunia pemerintahan baik sebagai anggota DPR, sebagai Menteri, maupun jabatan lain. Hal ini terus digelutinya hingga akhir hayatnya. Muhammad Yamin meninggal di Jakarta tanggal 17 Oktober 1962, di saat ia masih menjabat sebagai Ketua Dewan Perancang Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*. Jakarta : Gunung Agung, 1966.
- A.S., Mohamad Noor. *Generasi Soekarno - Hatta*, Jakarta : UI Press dan Lembaga Studi Pembangunan, 1990.
- Badan Pengurus Exponen BPRI Sanga-sanga Bekerjasama dengan JARAHDAM IX/Mulawarman. *Palagan Perebutan Kota Minyak Sanga-Sanga*, Balikpapan : Yayasan 27 Januari, 1982.
- Djojomardono, Drs. Muljono, Dkk. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imprealisme dan Kolonialisme di Jawa Tengah, Proyek IDSN*, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1982/83.
- Hitipeuw, Frans, DR. Johannes Leimena : *Karya dan Pengabdiannya*, Jakarta : Proyek IDSN, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Nasional, Depdikbud, 1986.
- Kahin, Audrey R. *Pergolakan Daerah pada awal Kemerdekaan*. Jakarta : PT Grafitti, 1990.
- K, Sukardi Heru, Dkk. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jawa Timur*. Jakarta : Proyek IDSN, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Nasional, Depdikbud, 1991.
- Leirissa, R.Z.Drs. Dkk. *Sejarah Perlawanan Terhadap dan Kolonialisme di Nusatenggara Barat*. Jakarta : Proyek IDSN Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1983/84.
- , Dkk. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imprealisme dan Kolonialisme di Daerah Bali*. Jakarta : Proyek IDSN, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1983/84.

- Masjkuri, DR. *GSSJ. Ratulangi*. Jakarta : Proyek IDSN, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1985.
- Mukayat, *Haji Agus Salim : Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta : Proyek IDSN, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1985.
- Nanulaita, I.O. Ir. *Haji Juanda Kartawijaya*. Jakarta : Proyek IDSN, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1983.
- Oemar, Drs. Moh. *Jenderal Gatot Subroto*. Jakarta : Depdikbud Proyek Biografi Pahlawan Nasional, 1976.
- Patikayhatu, Drs. John A, Dkk. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imprealisme dan Kolonialisme di Daerah Maluku*. Jakarta : Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983/84.
- Reid, Anthony. *Perjuangan Rakyat : Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*. Jakarta : Sinar Harapan, 1987.
- Smit, C, Mr. DR. *Dekolonisasi Indonesia*, Jakarta : Pustaka Azet, 1986.
- Sastroamidjojo, Ali. *Tonggak-tonggak di Perjalananku*. Jakarta : P.T. Kinta, 1974.
- Suratmin. Mr. *Mohamad Roem : Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta : Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Nasional, 1986.
- Sukardi, Drs. Heru, Dkk. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imprealisme dan Kolonialisme di Sulawesi Utara*. Jakarta : Proyek IDSN, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1987.

- Wacana, Lalu, B, Dkk. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imprealisme dan Kolonialisme di Nusa Tenggara Barat*. Jakarta : Proyek IDSN, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1983/84.
- Warmansjah, G.A, Dkk. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) DKI Jakarta*. Jakarta : Proyek IDSN, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Depdikbud, 1991.
- Wild, Colin dan Peter Carey (penyunting). *Gelora Api Revolusi : Sebuah Antalogi Sejarah*. Jakarta : Gramedia, 1986.

1950 -- 1959

ANGKATAN TERBARU

Suatu istilah untuk sastawan yang tampil ke muka sejak atau setelah tahun 1950. Istilah ini pertama kali dimunculkan dalam Simposium Sastra dan Kesenian Mahasiswa di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960 oleh Ajip Rosidi. Namun sebelum Ajip Rosidi memperkenalkannya, istilah tersebut telah lebih dahulu dipergunakan Nugroho Notosusanto yang menjadi Ketua Simposium itu.

Ciri khas sastrawan pada periode ini adalah mereka tidak lagi berat sebelah pada Belanda atau Eropa Barat, tetapi jangkauan orientasinya benar-benar seluruh dunia. Mereka tidak lagi menguasai bahasa Belanda, karena medium mereka untuk mengenali karya-karya luar negeri adalah bahasa Inggris. Guru-guru mereka pada periode ini adalah sajak-sajak dari Chairil Anwar atau Sitor Situmorang, sedang bagi pengarang-pengarang cerita pendek, guru mereka adalah Pramoedya Ananta Toer atau Idrus.

AUSTERITY PROGRAM

Suatu kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Kabinet Wilopo 1952-1953. Kebijakan ini dikeluarkan karena jatuhnya harga-harga komoditi ekspor dipasaran dunia akibat Perang Korea yang membawa dampak terhadap ekonomi dan keuangan di Indonesia. Akibatnya pemerintah menghadapi penurunan pendapatan dalam tahun 1952 dibandingkan tahun 1951, sehingga Kabinet Wilopo mengalami Defisit sebesar 4 milyar rupiah. Pemerintah berarti harus melakukan tindakan-tindakan drastis untuk mengatasi keadaan ini.

Namun demikian, walaupun dapat mengadakan tindakan-tindakan drastis dalam pengeluaran negara dan menghindarkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, pemerintah tidak mungkin mengurangi pengeluaran terhadap perusahaan-perusahaan produktif yang pada

waktu itu mendapat bantuan pemerintah. Untuk mengatasi keadaan ini dan melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, kabinet melancarkan apa yang dikenal dengan "*Austerity Program*", yang salah satu diantaranya adalah menghentikan kenaikan pendapatan para menteri dan pejabat-pejabat tinggi yang sudah diputuskan Kabinet Sukiman, kabinet ini ada sebelum Kabinet Wilopo.

BADAN KEINSYAFAN RAKYAT ACEH

Badan keinsyafan rakyat Aceh merupakan organisasi rakyat Aceh yang terbentuk pada tanggal 8 April 1951 berkedudukan di Kutaraja. Dalam Anggaran Dasarnya tercantum tujuan BKRA antara lain : membantu Pemerintah dengan memberi penerangan, penjelasan kepada anggota dan rakyat umum tentang peraturan dan pengumuman Pemerintah. Juga berusaha mempererat silaturahmi antara rakyat dengan rakyat, golongan dengan golongan, rakyat dengan golongan dan Pemerintah.

Pada tanggal 15 April 1951 Badan Keinsyafan Rakyat Aceh ini telah mengajukan resolusi dan mendesak Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar secepatnya : menggantikan pegawai-pegawai yang memotong keputusan pemerintah yang telah disetujui Parlemen, memberhentikan dan menuntut pegawai-pegawai yang korupsi, membuktikan bahwa Pemerintah benar-benar melindungi jiwa dan harta rakyat seperti tercantum dalam UUD, membubarkan Panitia Pemilihan Umum di Daerah Aceh dan menggantikan dengan baru, Dinas Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman agar menjalankan kewajiban dengan tepat, pemerintahan memberi kenyataan dalam memperhatikan kemakmuran rakyat seperti ekonomi, irigasi, perhubungan lalu lintas serta pendidikan dan kebudayaan, dan menggantikan

Pemerintah Sipil dengan Pemerintah Militer. Atas Resolusi ini BKRA siap membantu Pemerintah RI.

Maksud baik BKRA itu oleh sebagian golongan ada yang menuduh PUSA (Persatuan Umum Seluruh Aceh) yang dipimpin ketua : Daud Beureueh itu mau melaksanakan monopoli kekuasaan di daerah Aceh. Mereka dituduh membela gerakan Said Ali dan kawan-kawannya. Fitnahan ini termuat dalam surat kabar "Rakyat" di Medan. Tindak lanjutnya ada hubungan dengan peristiwa pemberontakan Daud Beureueh bulan September 1953 itu, karena daerah Aceh menginginkan menjadi daerah otonom lepas dari Sumatera Utara (Propinsi Sumatera Utara).

BALAI PERSIAPAN KEWAJIBAN BELAJAR

Dalam rangka melaksanakan kewajiban belajar dalam tahun 1954, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. 41076/Keb tanggal 19 Juli 1955 Jawatan Pengajaran membentuk Balai Persiapan Kewajiban Belajar. BPKB bertugas menyusun rencana kewajiban belajar, menyusun rancangan UU kewajiban belajar, melaksanakan percobaan kewajiban belajar, memberikan penerangan kepada masyarakat tentang rencana kewajiban belajar dan melaksanakan kewajiban belajar.

Pelaksanaannya diselenggarakan oleh Biro Pusat Pembangunan masyarakat Desa dan usaha masyarakat sendiri. Dinas PP dan K setempat bertugas menyelenggarakan teknis edukatif, bantuan peralatan serta tenaga pengajar. Sampai tahun 1959 daerah-daerah yang telah melaksanakan kewajiban belajar adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Bali, Kalimantan Selatan dan Sulawesi.

Ketentuan kewajiban belajar ini sampai sekarang masih tetap berlaku dalam memberantas tiga buta dan tujuan utama diprioritaskan bagi anak-anak yang diatas usia sekolah tetapi tidak atau belum sekolah.

BAMA

Nama instansi yang berwenang dalam mengurus masalah sandang pangan terutama beras. Instansi semula bernama BAMA, kemudian diubah menjadi Urusan Bahan Makanan (UBM) dan kini dikenal dengan nama Badan Urusan Logistik (BULOG). Bama ada sejak masa pemerintahan Kabinet Sukiman yang ketika itu sebagai Menteri Perekonomian adalah Wilopo. Pada masa Kabinet Sukiman, Wilopo dikenal dengan politik Berasnya.

Suatu kebijaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah memasukkan sandang pangan ke dalam program Kabinet Sukiman. Sebagai realisasinya pada tanggal 9 Mei 1952 DPR menyetujui program tersebut dan pemerintah segera memberi jawaban bahwa diantara bahan-bahan makanan yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah adalah masalah beras.

BANK BUMI DAYA (BBD)

BBD semula bernama *De Nationale Handelsbank* (NHB). Pada tanggal 19 Agustus 1959, melalui Peraturan Pemerintah No. 39/1959, dilakukan nasionalisasi untuk mengalihkan seluruh pengelolaan serta kekayaan NHB kepada Bank Umum Negara (BUNEG). NHB pada masa sebelumnya memegang peranan penting dalam ekspor hasil-hasil perkebunan di Jawa dan Sumatera seperti, lada, kopi, karet dan sebagainya, sehingga memegang peranan penting dalam pembiayaan ekspor hasil-hasil perkebunan dan pertanian Indonesia ke luar negeri. Pada 9 tanggal September 1959, dengan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1/1959, Menteri Keuangan menetapkan

Anggaran Dasar (AD) BUNEG. Dalam masa integrasi bank-bank pemerintah (17 Agustus 1965), BUNEG diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia (BNI) Unit IV.

Setelah penghapusan integrasi Bank, dan bank-bank dikembalikan kepada nama aslinya, keluar UU No. 19/1968, dimana BNI Unit IV dilebur dalam Bank Bumi Daya dengan modal yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga BBD dalam aktivitasnya terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara. Dengan sendirinya sektor perkebunan yang pernah berada dalam tangah NHB masih ditetapkan sebagai prioritas utama BBD, di samping meluas ke sektor-sektor pertambangan, perminyakan, pariwisata, dan sebagainya, serta pemberian kredit bagi pengusaha pribumi.

BANK INDONESIA

Bank Indonesia yang semula bernama N.V. De Javasche Bank, adalah sebuah bank swasta Belanda yang mendapat hak oktroi untuk bertindak sebagai bank sentral dari sirkulasi di Hindia Belanda (1828). Dengan Keputusan Pemerintah No. 118/1951, 2 Juli 1955, di bentuklah Panitia Nasionalisasi *De Javasche Bank N.V.* (UU No. 24/1951), 6 Desember 1951. Jabatan Presiden orang Indonesia adalah Mr. Syarifuddin Prawiranegara yang menggantikan pejabat lama, seorang Belanda. Dengan U.U. pokok Bank Indonesia, yang mulai berlaku 1 Juli 1953, *N.V. De Javasche Bank* diganti dengan Bank Indonesia dan seluruh saham-sahamnya menjadi Pemerintah Republik Indonesia (RI). Pengambilalihan itu dilakukan dengan pembayaran kerugian.

Modal Bank Indonesia ditetapkan sejumlah Rp. 25 Juta, dan ditentukan untuk semata-mata bertindak sebagai Bank sentral dan sirkulasi. Kegiatan-kegiatan di *Javasche Bank* sebagai Bank biasa dan dagang dan disewakan kepada Bank-Bank lain yang akan ditunjuk dengan undang-undang. Sebutan Presiden diganti dengan Gubernur.

Dalam masa politik ekonomi terpimpin, semua Bank-bank yang dikuasai negara disatukan dengan nama Bank Negara Indonesia. Pada bulan Agustus 1965, Bank Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit I. Selanjutnya sejak pemerintahan Orde Baru, nama-nama dikembalikan sebagai semua. Selanjutnya perbankan diatur dengan UU pokok perbankan no. 14/1967.

BANK INDUSTRI NEGARA (BIN)

Didirikan berdasarkan UU No. 5 tanggal 28 Februari 1952, yang berlaku surut sejak tanggal 5 April 1951. Bank Industri Negara merupakan lanjutan perluasan dari *Bureau Herstel Financiering* (BHF), yang waktu itu lembaga ini bawah *Staatssecretarie Voor Financien* Pemerintah Federal Belanda sejak 1948.

Oleh karena bidang usahanya dapat dicakup oleh Bank Pembangunan Indonesia, maka pada tanggal 16 Agustus 1960 digabungkan menjadi satu ke dalam Bapindo.

BADAN KERJASAMA PEMUDA MILITER (BKSPM)

Badan kerjasama pemuda militer adalah wadah penggerak dan pemersatu organisasi-organisasi pemuda (dalam) pada saat kondisi dimana *Staats van Oorlog en van Beleg* (SOB) atau negara dalam keadaan bahaya. Pembentukan BKSPM diprakarsai oleh Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal A.H. Nasution, dengan tujuan sebagai satu badan pertahanan negara, terutama untuk menggalang persatuan pemuda dalam usaha mengatasi perpecahan bangsa yang semakin meruncing. Dengan tujuan tersebut, pada bulan Juni 1957 dibentuk suatu organisasi terdiri wakil-wakil gerakan pemuda dan wakil-wakil pengusaha militer yang disebut BKSPM. Organisasi ini diketuai oleh Kolonel Pamoerhardjo, Koordinator Pemerintahan Staf Penguasa Perang Pusat, beranggotakan 69 organisasi pemuda dan mahasiswa.

Dalam kegiatannya BKSPM banyak berperan dalam kampanye perebutan Irian Barat. Dengan semakin banyaknya badan-badan perjuangan untuk membantu pemerintah memperjuangkan Irian Barat, maka untuk mempersatukannya dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB), dan BKSPM lebur di dalamnya.

BOOM KARET

Pada masa pemerintahan Kabinet Natshir (1950-1951) Indonesia mengalami keuntungan besar dalam bidang ekonomi. Keuntungan tersebut diperoleh dari hasil penjualan karet Indonesia ke Korea. Pada permulaan 1950-an di Korea terjadi perang yang disebut oleh negara Indonesia dengan "**Korean Boom**" Artinya keuntungan besar yang dapat ditarik karena Perang Korea dan mengakibatkan harga karet Indonesia sangat baik.

Dengan adanya keuntungan besar tersebut sangat diharapkan oleh pihak Angkatan Bersenjata dapat menutupi kebutuhan Tentara Indonesia dan juga bisa mengatasi kesulitan Ekonomi. Namun harapan ini tidak terwujud, hasil Korean Boom bagus habis begitu saja.

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959

Oleh karena Undang-undang Dasar 1950 masih bersifat sementara, kepada Konstituante diberi tugas bersama-sama dengan pemerintah untuk selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar 1950. Dalam pasal 135 UUDS 1950 dinyatakan, bahwa anggota konstituante dipilih melalui pemilihan umum. Yang diadakan pada bulan Desember 1955, yaitu dua bulan setelah pemilihan Umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat selesai. Pada tanggal 10 Nopember 1956 sidang pertama konstituante dibuka oleh Presiden Soekarno di Bandung, disertai harapan konstituante dapat menyelesaikan tugasnya dalam tempo yang singkat.

Dalam perkembangan selanjutnya Konstituante menjadi tempat perdebatan yang tidak berkesudahan. Hasil kerja konstituante diperkirakan sangat sukar dapat diselesaikan. Hal-hal tersebut makin mendorong Presiden Soekarno untuk merealisasikan konsepsinya mengenai Demokrasi Terpimpin. Pemunculan konsep demokrasi terpimpin itu disebabkan oleh perkembangan politik di Indonesia sejak tahun 1950 menunjukkan kelemahan-kelemahan, antara lain karena terlalu banyak partai politik dan fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat, kabinet tidak stabil, dan banyak terjadi penyelewengan dibidang sosial dan ekonomi.

Pada permulaan tahun 1959 Presiden dan Pemerintah menganjurkan kepada Konstituante supaya UUD 1945 ditetapkan saja menjadi UUD Republik Indonesia untuk menggantikan UUDS 1950, sesuai dengan wewenang yang dimilikinya menurut pasal 134 UUDS 1950. Adapun alasan Presiden dan Pemerintah mengemukakan anjuran tersebut adalah karena susunan pendirian yang terdapat dalam Konstituante dianggap tidak akan memberikan harapan, bahwa Konstituante akan dapat memenuhi tugasnya seperti yang diharapkan dalam UUDS 1950.

Pemerintah pada tanggal 12 Maret 1959 memberikan keterangan mengenai putusan Dewan Menteri dihadapan sidang DPR, sedangkan pada tanggal 22 April 1959 Presiden menyampaikan amanatnya dihadapan sidang pleno Konstituante yang memuat anjuran Kepala Negara dan Pemerintah untuk kembali ke UUD 1945.

Dalam pemungutan suara mengenai penerimaan kembali UUD 1945 yang berturut-turut dilakukan pada tanggal 30 Mei, tanggal 1 dan 2 Juni 1959 tidak diperoleh dukungan suara yang diperlukan, yaitu sekurang-kurangnya oleh dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat pleno konstituante, maka permufakatan tidak diambil.

Setelah tiga kali berturut-turut diadakan pemungutan suara, maka ini merupakan suatu pertanda bahwa konstituante tidak mungkin lagi dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat kepadanya. Hal ini ditambah lagi dengan adanya pernyataan dari sebagian

besar anggota konstituante yang menyatakan tidak mau lagi menghadiri sidang-sidang pleno konstituante. Sehingga dengan demikian konstituante tidak mungkin lagi mengadakan sidang-sidangnya. Akibatnya tugas pembuatan UUD untuk mengganti UUDS 1950 juga tidak dapat dilanjutkan.

Atas dasar hal-hal tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan sebuah "Dekrit" yang isinya "Kembali Kepada UUD 1945". Dekrit tersebut dikenal dengan nama "Dekrit Presiden 5 Juli 1959".

DEMONSTRASI WARTAWAN INDONESIA

Demonstrasi Wartawan pernah terjadi di Jakarta berlangsung pada tanggal 5 Agustus 1953 yang merupakan puncak perhatian terhadap perkara Asa Bafagih (alm) dan soal perlakuan yang tidak selayaknya atas diri wartawan-wartawan di Balikpapan. Dalam sejarah pers Indonesia demonstrasi wartawan ini adalah yang pertama kali terjadi. Lebih dari 100 wartawan Ibu kota ditambah beberapa puluh mahasiswa Akademi Wartawan, beberapa ratus orang buruh surat kabar serta perscetakan dan pihak-pihak lain yang bersimpati ikut serta dalam demonstrasi.

Asa Bafagih selaku Pemimpin Redaksi harian "Pemandangan" di tuntutan Kejaksaan Agung karena menolak menyebutkan sumber berita mengenai penanaman modal asing baru yang termuat dalam "Pemandangan" tanggal 18 Maret 1953. "Pemandangan" juga menyairkan berita rencana gaji baru pegawai negeri dalam terbitan tanggal 21 Agustus 1952. Asa Bafagih tidak bersedia memberikan keterangan dan tidak mungkin untuk melanggar kode Jurnalistik. Ia dituduh membocorkan rahasia negara berdasarkan pasal 224 KUHP.

Selain pengurus PWI cabang Jakarta, ikut serta dalam barisan anggota-anggota pengurus PWI Pusat dan Serikat Penerbit Surakarta (SPS). Asa Bafagih berjalan dibarisan depan dengan dikawal dua

pemudi dari Akademi Wartawan. Demonstrasi bejalan serba tertib dimeriahkan juga oleh musik menuju ke Kejaksaan Agung, Parlemen dan Kabinet Perdana Menteri dan kembali lagi ke Balai Wartawan. Petisi dibacakan Sanyoto selaku Ketua PWI Cabang Jakarta dan ditanggapi oleh Jaksa Agung R. Soeprapto, Ketua Parlemen Mr. Sartono, Wakil Perdana Menteri I Mr. Wongsonegoro, Menteri Kehakiman Mr. Djody Gondokusumo serta Drs. Roeslan Abdulgani sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan Republik Indonesia. Semboyan-semboyan yang dibawa antara lain berbunyi :

1. Bebaskan Asa Bafagih
2. Akui Hak Ingkar Wartawan
3. Hapuskan Undang-undang Kolonial
4. Hormati kode Journalistik

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan bijaksana dalam Keputusan Jaksa Agung mengenyampingkan perkara Asa Bafagih. Keputusan itu dimuat dalam Harian Pemandangan terbitan tanggal 15 Agustus 1953. Berdasarkan pertimbangan politis dalam hubungan Pembocoran Rahasia Negara oleh Asa Bafagih, penutupan secara hukum oleh pemerintah tidak diteruskan.

DEMOKRASI LIBERAL

Yaitu suatu bentuk sistem politik dan pemerintahan yang bersendikan pada asas-asas liberalisme yang ada dan berkembang di Eropa dan Amerika Serikat. Di Indonesia sistem Demokrasi Liberal berlangsung sejak tahun 1950 sampai tahun 1959 saat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa ini pergantian kabinet dilatar belakangi oleh perbedaan yang tajam antara partai penduly dengan lawan pemerintah. Bahkan pernah terjadi partai pemerintah menjatuhkan kabinetnya sendiri.

Akibatnya banyak progam-program kabinet yang tidak dapat diselesaikan, sehingga mendorong ketidakstabilan politik. Untuk mengatasi keadaan ini, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno

mengeluarkan Dekrit yang salah satu isi pokoknya tentang berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin.

DEMOKRASI TERPIMPIN

Demokrasi Terpimpin adalah suatu paham yang tidak didasarkan atas paham Liberalisme, Sosialisme-Nasional, Fasisme, dan Komunis, akan tetapi suatu paham demokrasi yang didasarkan kepada keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menuju pada suatu tujuan mencapai masyarakat adil dan makmur yang penuh dengan kebahagiaan material dan spiritual sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno telah mengeluarkan sebuah Dekrit yang dinamakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dikeluarkannya Dekrit tersebut disebabkan oleh karena ketidakmampuan konstituante untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan dasar pemikiran supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan oleh bangsa dan negara seperti yang telah terjadi dimasa-masa yang lampau yang membuat ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut dan penyimpangan-penyimpangan, maka pada waktu itu oleh Presiden Soekarno sebagai pemegang eksekutif dalam sistim pemerintahan yang "Presidensial" diterapkanlah apa yang dinamakan dengan "Demokrasi Terpimpin"

Namun demikian di dalam praktek ketatanegaraannya apa yang dinamakan dengan Demokrasi Terpimpin yang mempunyai tujuan yang luhur ini tidak pernah dilaksanakan secara konsekuen, bahkan justru sebaliknya, karena di dalam praktiknya sangat jauh dan menyimpang dari arti yang sebenarnya, realisasinya justru yang memimpin demokrasi ini bukan Pancasila sebagai yang dicanangkan, akan tetapi dipimpin oleh sang pemimpinnya sendiri. Akibatnya demokrasi yang dijalankan tidak lagi berdasarkan keinginan luhur bangsa Indonesia dengan menggunakan Pancasila sebagai pedoman-

nya, akan tetapi justru didasarkan kepada keinginan-keinginan atau ambisi-ambisi politik dari pemimpinnya sendiri.

Hal tersebut sangat terlihat jelas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan Presiden di bidang politik dan pemerintahannya yang justru menyimpang dari UUD 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia sendiri.

DEWAN PERANCANG NASIONAL (DEPERNAS)

Dewan Perancang Nasional (Depernas) merencanakan pembangunan ekonomi dibawah Kabinet Karya. Pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang No. 80 tahun 1958 mengenai pembentukan Dewan Perancang Nasional. Menurut pasal 2 dari Undang-undang itu, Dewan Perancang Nasional tugasnya adalah : (a) mempersiapkan rancangan Undang-undang Pembangunan Nasional yang berencana dan (b) menilai penyelenggaraan Pembangunan itu (pasal 3)

Berdasarkan Undang-undang tanggal 19 Januari 1958, dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1958 diatur lebih lanjut tugas dan susunan Dewan Perancang Nasional.

Pada tanggal 15 Agustus 1959 terbentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas), dibawah pimpinan Mr. Muh. Yamin sebagai Wakil Menteri pertama yang beranggotakan 80 orang wakil golongan Masyarakat dan daerah. Dalam waktu kurang lebih satu tahun, yaitu pada tanggal 26 Juli 1960, Depernas berhasil menyusun suatu "Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Sementara Berencana tahapan tahun 1961-1969. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyetujui rancangan tersebut dengan Tap. No. 2/MPRS/1960.

DEWAN GARUDA

Dewan Garuda didirikan pada tanggal 25 Januari 1957 di Sumatera Selatan oleh Letnan Kolonel Barlian. Dewan Garuda dibentuk oleh sekelompok golongan politik bersama pimpinan militer setempat mencetuskan Piagam Pembangunan, yang fungsinya sama dengan Dewan Garuda yaitu sebagai wadah yang dapat menampung segala aspirasi daerah. Kegiatan yang dilakukan Dewan Garuda antara lain : mencetuskan tuntutan kepada pemerintah pusat agar daerah Sumatera Selatan diberi otonomi seluas-luasnya, menuntut agar Dwitunggal Soekarno-Hatta memimpin pemerintahan Republik Indonesia.

Selanjutnya Letkol Barlian mengeluarkan keputusan bahwa daerah Sumatera Selatan dinyatakan dalam keadaan bahaya dan Gubernur Sumatera Selatan Winarno Danuatmodjo diminta untuk menyerahkan kekuasaannya agar usaha pembangunan di daerah Sumatera Selatan lancar. Tindakan yang di ambil oleh Dewan Garuda tersebut serupa dengan apa yang dilakukan oleh Dewan Banteng. Kegiatan yang dilakukan Dewan Garuda di pimpin oleh wakil kepala Staf TT II Mayor Nawawi mendapat dukungan dan perlindungan oleh panglimanya sendiri.

DEWAN GEREJA-GEREJA INDONESIA (DGI)

DGI adalah himpunan gereja-gereja Protestan di Indonesia. Dewan ini didirikan pada tahun 1950 sebagai hasil musyawarah tiga puluh pengurus gereja-gereja, dengan pusat organisasi di Jakarta. Menurut anggaran dasarnya, DGI mempunyai tujuan untuk mencapai persatuan dalam kasih Kristus di Indonesia, sambil tetap menghargai sifat aneka ragam dalam hidup gereja-gereja itu. Pimpinan tertinggi Dewan berada di tangan Sidang Pleno, yang mengadakan sidang tiga tahun sekali. Di dalam kegiatannya selain menghimpun gereja-gereja Protestan, diadakan juga kerjasama dengan organisasi-organisasi kristen di bidang sosial, ekonomi, politik, kepemudaan dan lain-lain.

Gereja-gereja yang tergabung dalam DGI antara lain : Huria Kristen Batak Protestan, Gereja Kristen Protestan, Gereja Batak Karo Protestan, Gereja Metodis Indonesia, Beninnha Kristen Protestan, Gereja Kristen Pemancar Injil, Gereja Kristen Toraja Mamasa, Gereja Kristen Toraja, Geraja Kristen Sulawesi Tenggara, Gereja Kristen Kalimantan, Gereja Kristen Injil Irian Barat, Gereja Kristen Sumba, Gereja Kristen Pasundan, Gereja Isa Al Masih, Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat dan lain sebagainya.

DEWAN BANTENG

Sejak awal tahun 1950 beberapa daerah di luar Jawa merasa tidak puas dan kecewa terhadap kebijaksanaan politik, ekonomi pemerintah pusat Jakarta. Akibatnya rakyat yang berada di daerah-daerah sejak pertengahan 1950-an tidak lagi menaruh kepercayaan kepada pemerintah. Dengan keadaan bangsa dan negara yang jauh dari memuaskan tersebut menjadi pemikiran sekelompok anggota Divisi Banteng.

Sebagai langkah pertama dianggap perlu untuk segera mengadakan reuni eks Divisi Banteng. Pada tanggal 20 sampai tanggal 24 November 1956 berlangsunglah reuni eks Divisi Banteng yang dihadiri oleh 612 orang. Pertemuan ini menghasilkan suatu keputusan bahwa usaha pembangunan daerah akan dilakukan dengan cara mengganti otonomi seluas-luasnya Selain itu menyusun Sejarah Perjuangan Sumatera Tengah, Pembangunan Museum Perjuangan, Veteran dan invalid, panji, masalah janda dan yatim piatu serta persoalan makam pahlawan, semua itu dalam pelaksanaannya langsung akan diatasi dan diselesaikan oleh anggota eks Divisi Banteng yang ada di daerah Sumatra Tengah, sehingga dibentuk wadah penyalur sebuah badan non-pemerintah dengan nama Dewan Banteng, sesuai dengan nama divisinya. Dewan ini dibentuk oleh Letnan Kolonel Achmad Husein, Komandan Resimen Infanteri 4 pada tanggal 20 Desember 1956.

Pusat kegiatan Dewan Banteng terutama di kota Padang dan Bukittinggi yang kemudian mempersiapkan diri untuk merealisasi

keputusan rapat reuni. Sementara itu sebagai kelanjutan keputusan rapat reuni eks Divisi Banteng, Letkol Achmad Husein selaku ketua Dewan Banteng telah mengambil keputusan untuk mengambil alih pemerintah daerah Sumatera tengah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember 1956 digubernuran Padang. Alasan yang dikemukakan bahwa gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat itu dipandang kurang berhasil dalam membangun daerah Sumatera Tengah. Mengenai masalah otonomi daerah dapat dipahami oleh pemerintah pusat, tapi tindakan Dewan Banteng mengambil alih pemerintahan di Sumatera Tengah dipandang sebagai tindakan yang menyalahi hukum. Berbagai reaksi muncul atas terjadinya peristiwa tersebut, antara lain adanya tantangan. Tantangan terhadap dewan terutama datang dari pihak PKI dan PNI, tetapi kenyataannya masyarakat sebagian besar mendukung.

Bahkan masyarakat pernah menyatakan kesiapannya mendukung kegiatan Dewan Banteng pada pertemuan organisasi di Gedung Nasional Bukittinggi pada tanggal 3 sampai tanggal 5 Januari 1957. Di samping kalangan militer, elit negeri Sumatera Barat dan para pegawai pemerintah yang meleburkan diri dalam kegiatan dewan. Keadaan ini mencerminkan bahwa gerak Dewan Banteng didukung sepenuhnya oleh berbagai lapisan masyarakat Sumatera Tengah.

DEWAN NASIONAL

Dewan Nasional adalah suatu lembaga atau dewan yang akan membantu presiden dalam usaha mengatasi keadaan sosial, politik dan ekonomi yang semakin memburuk. Dewan ini dibentuk di Jakarta dalam pertengahan tahun 1957 (masa kabinet Djuanda), berdasarkan ketetapan Undang-Undang darurat Nomor 7 Tahun 1957. Tujuan pokok Dewan yaitu menampung dan menyalurkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat guna menyempurnakan kelancaran roda pemerintahan menuju kesejahteraan negara dan masyarakat.

Dewan Nasional ini diketuai oleh Presiden, dengan jumlah anggota 45 orang yang terdiri dari a) golongan-golongan fungsional dalam

masyarakat (karya), b) orang-orang yang dapat mengemukakan persoalan-persoalan daerah, c) pejabat-pejabat sipil dan militer yang dianggap perlu, d) menteri-menteri yang dipandang perlu. Setelah Presiden Soekarno memegang kekuasaan eksekutif pada tahun 1958, Dewan Nasional berakhir, dimana sebagian anggota-anggotanya diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

DEWAN MANGUNI

Dewan Manguni yang dibentuk pada tanggal 18 Februari 1957 di Manado, Sulawesi Utara, adalah hasil bentukan dari Letnan Kolonel H. N. V. Sumual. Beliau ketika itu menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorium VII. Latar belakang terbentuknya Dewan Manguni berawal dari suhu politik di Indonesia yang semakin memanas. Dengan terbentuknya Kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tanggal 24 Maret 1956, membuat partai PKI merasa tidak senang dan berusaha untuk menjatuhkan kabinet tersebut. Hal ini didukung pula bahwa pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II ini, pemerintah mengalami adanya ketidaksetujuan dari pihak daerah-daerah di Indonesia.

Salah satu daerah Sulawesi Utara disebabkan merasa tidak puas dengan alokasi biaya pembangunan yang diterima dari pusat. Disamping itu daerah Sulawesi Utara tidak menaruh kepercayaan lagi kepada Pemerintah Pusat. Puncak dari ketidaksetujuan yang timbul di Sulawesi Utara tersebut diwujudkan dalam bentuk pergolakan yang mengarah kepada perlawanan terhadap pemerintah pusat. Singkatnya Kolonel Sumual mengambil alih pemerintah sipil dari Gubernur.

Dengan adanya tindakan dari Letnan Kolonel H. N. V. Sumual ini, maka pihak pemerintah berusaha mengadakan pendekatan. Usaha yang dilakukan adalah memulihkan keamanan dalam negeri yang dikacaukan oleh gerombolan-gerombolan ilegal yang memberontak terhadap negara dengan nama apapun dalam menamakan dirinya.

Kemudian pemerintah menyempurnakan koordinasi antara alat-alat negara terutama dalam tindakan-tindakan pemulihan keamanan. Sebagai realisasinya disamping mengirim Maengkom ke Sulawesi Utara, pemerintah juga menyelenggarakan MUNAS dan disusul dengan MUNAP. Seluruh pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah tersebut semata-mata bertujuan untuk memperbaiki kondisi di daerah Sulawesi Utara.

DEWAN GAJAH

Dewan Gajah dibentuk pada tanggal 22 Desember 1956 oleh panglima Tentara Teritorium I (TT I) Kolonel Mauludin Simbolon di Medan, Sumatera Utara. Beliau mengumumkan pernyataan bahwa mulai tanggal 22 Desember 1956 tidak lagi mengakui Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan untuk sementara melepaskan hubungan dengan pemerintah pusat. Dengan demikian mulai tanggal 22 Desember 1956 ia mengambil alih pemerintahan di wilayah TT I. Mulai dari jam 6.00 waktu Sumatera berlaku keadaan S. O. B di seluruh wilayah Komando TT I. Tindakan Kolonel Mauludin Simbolon tersebut dilatarbelakangi adanya penyelenggaraan reuni para pejuang perang kemerdekaan yang diprakarsai oleh perwira-perwira Angkatan Darat di daerah-daerah. Tujuan semula dari reuni tersebut adalah untuk membina persatuan dan kekompakan.

Namun Akhirnya Angkatan Darat terpanggil untuk memelopori demokrasi kekerasan. Kolonel Simbolon merasa tidak puas terhadap kebijaksanaan pembangunan di Jakarta saja. Ia melihat bahwa keadaan sudah kritis. Sebagai tindak lanjutnya, Kolonel Simbolon segera mengadakan aksi yaitu dengan menguasai RRI Medan dan beberapa Instansi pemerintah yang penting di kota Medan. Disamping itu pernyataan Kolonel Simbolon dengan tindakannya bertolak belakang. Sebab di satu sisi beliau menyerukan tetap taat kepada kepala negara presiden Soekarno, sedangkan di lain pihak beliau melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji.

Menanggapi tindak tanduk Kolonel Simbolon tersebut, pemerintah segera menyerukan kepada beliau agar secepatnya kembali ke jalan yang seharusnya ditempuh oleh anggota tentara. Namun teguran ini tidak ditanggapi, bahkan Simbolon menuntut agar kerukunan Dwi-Tunggal Sukarno -Hatta dipulihkan kembali dan posisi Presiden RI hendaklah dibawah kendali Dwi tunggal. Suasana semakin runyam, sebab Kolonel Simbolon sama sekali tidak menghiraukan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat. Sementara itu perwira dan pejabat yang ada di Sumatera Utara seperti Kepala staf TT I Letkol Djamin Ginting dan Letkol Wahab Makmur turut menentang tindakan Kolonel Simbolon yang melanggar hukum. Dengan demikian ada dua kekuatan untuk melawan Kolonel Simbolon, yaitu pihak Djamin Gintings cs dan pemerintah pusat secara bersama-sama menentang tindakan Simbolon tersebut. Sebagai tindakan selanjutnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo memecat Kolonel Mauludin Simbolon sebagai Panglima TT I. Pada tanggal 27 Desember 1956 Letkol Djamin Ginting atas keputusan Pemerintah Pusat mengambil alih Jabatan Kolonel Mauludin Simbolon.

DWI TUNGGA PECAH

Pada tanggal 1 Desember 1956 Drs. Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Meskipun telah mengundurkan diri, namun banyak orang Indonesia yang menghendaki agar Bung Hatta aktif kembali. Antara lain di dalam Musyawarah Nasional yang diselenggarakan pada bulan September 1957 dibahas pula " Masalah Dwi Tunggal Soekarno-Hatta". Demikian pula di DPR, beberapa anggota DPR mengajukan usul interpelasi mengenai "Pemulihan Kerjasama Dwi Tunggal Soekarno-Hatta". DPR kemudian menerima usul mengenai pembentukan Panitia Ad Hoc untuk mencari "bentuk kerjasama Soekarno-Hatta".

Panitia tersebut di bentuk pada tanggal 29 Nopember 1957 dan dikenal sebagai Panitia Sembilan, yang diketuai oleh Ahem

Erningpradja, dengan anggota-anggotanya : Anwar Tjokroaminoto, Achmad Sjaichu, Mr. Memet Tanumidjaja, Asrarudin, Katamsi Sutisna Sendjaja, M. Siregar, Anwar Harjono, dan I. J. Kasimo. Panitia Sembilan dibubarkan pada bulan Maret 1958.

FRONT NASIONAL PEMBEBASAN IRIAN BARAT

Front Nasional Pembebasan Irian Barat disingkat FNPIB merupakan wadah dari organisasi-organisasi atau panitia-panitia yang dibentuk dalam rangka pembebasan Irian Barat. Organisasi ini dibentuk di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1958, dengan ketuanya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal A. H. Nasution. Pada awalnya di dalam usaha membebaskan Irian Barat telah terbentuk berbagai macam organisasi dan badan-badan perjuangan Irian Barat.

Untuk menghindari terjadinya perjuangan sendiri-sendiri karena banyaknya panitia-panitia perjuangan Irian Barat, atas perintah KSAD Jenderal A.H. Nasution sebagai penguasa perang pusat yang disertai tugas untuk memimpin perjuangan Irian Barat, mengadakan pertemuan pada pertengahan bulan Desember 1957. Dari hasil pertemuan ini dibentuk suatu organisasi yang akan memimpin aksi-aksi pembebasan Irian Barat dengan nama "Front Perjuangan Buruh-Tani-Wanita-Pemuda dan Militer" disingkat Front Perjuangan, yang diketuai oleh Letnan Kolonel Pamoe Rahardjo.

Organisasi ini kemudian disempurnakan setelah diadakan pertemuan antara KSAD dengan anggota-anggota Front Perjuangan, yang diadakan pada tanggal 4 Januari 1958, dengan mengambil tempat di Gedung Pantja Prastya, Jalan Merdeka Timur No. 6 Jakarta. Dari hasil pertemuan ini, pada tanggal 4 Januari 1958 atas persetujuan KSAD nama organisasi diubah menjadi Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB), yang dikukuhkan dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Kpts/Peperpu/013/1958. Alasan diubahnya nama organisasi, karena tujuan dari bentuknya organisasi adalah semata-mata untuk membebaskan Irian Barat tanpa tujuan lain, dan organisasi

tersebut bersifat nasional yang mempunyai arti luas karena selain dibentuk di pusat, organisasi ini juga dibentuk di daerah-daerah.

FRONT NASIONAL

Front Nasional adalah organisasi massa, yang secara resmi berada di bawah Pimpinan Tertinggi Presiden Republik Indonesia selama pemerintahan Soekarno. Organisasi ini dibentuk di Jakarta pada bulan September 1957. Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangganya ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 1959, Keputusan Presiden RI No. 165 dan No. 166 Tahun 1960. Organisasi massa ini bersendikan Demokrasi Terpimpin, berdasarkan USDEK, dengan tujuan menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, membangun semesta, mencapai masyarakat adil dan makmur dan mengembalikan Irian Barat. Tugas dari organisasi massa ini yaitu : a) menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner, b) memimpin gerak masyarakat dalam segenap gerak pembangunan. c) menyelenggarakan dan mempererat kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaganya.

Dalam gerakannya ternyata sejak dibentuk Front Nasional belum memperlihatkan hasil yang sesuai dengan tugas-tugasnya. bahkan banyak dari anggota yang terlibat dalam Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI). Oleh karena itu dengan Keputusan Presiden tertanggal 27-9-1966 No. 214/1966, sehingga sejak tanggal 10 Agustus 1966 Front Nasional dibubarkan.

FRONT PEMUDA INDONESIA

Front Pemuda Indonesia disingkat FPI dilahirkan pada Kongres Pemuda ke empat yang berlangsung mulai tanggal 8 sampai 14 Juni 1950 di Surabaya. Dengan tujuan untuk mempersatukan seluruh organisasi yang ada, maka kongres menyepakati untuk membentuk sebuah federasi yang dinamakan Front Pemuda Indonesia (FPI).

Setelah itu kongres masih memerlukan waktu satu bulan penuh untuk menyusun Badan Pengurus Organisasi. Pimpinan FPI ini dikukuhkan pada sidang tanggal 8 sampai 10 Juli 1950, sebagai ketua diangkat A. Dahlan Ranuwihardjo dari Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), dan Suroso dari Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) sebagai wakil ketua. Di dalam perkembangannya FPI kurang mampu mempersatukan seluruh pemuda Indonesia, sehingga banyak organisasi-organisasi pemuda yang keluar dan membentuk organisasi tandingan, seperti Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) yang membentuk Front Pemuda Islam Seluruh Indonesia (FPII) dan Pemuda Katolik yang juga keluar dari federasi pada tanggal 9 Juli 1950.

GABUNGAN BRIDGE SELURUH INDONESIA

Singkatan dari Gabungan Bridge Seluruh Indonesia. Didirikan pada tanggal 12 Desember 1953, yang di prakarsai oleh Willy Roling yang pada waktu itu sebagai Letnan Angkatan Laut Republik Indonesia. Bridge adalah semacam permainan kartu remi yang dilakukan oleh 4 orang.

Dalam permainan ini titik berat pada olah fikir daripada kegiatan fisik, memerlukan adanya ketekunan dan antisipasi yang tinggi serta perhitungan yang cermat dan kesabaran yang dilandasi dengan sistim dan teorinya, karenanya kondisi tersebut dapat dicapai melalui latihan dan pendidikan.

GERAKAN BENTENG (*BENTENG GROUP*)

Gerakan Benteng adalah gagasan dari Sumitro kemudian dituangkan ke dalam program Kabinet Natsir (September 1950-April 1951); ketika itu ia menjabat Menteri Perdagangan. Gerakan Benteng ini telah dimulai sejak bulan April 1950. Selama tiga tahun (1950-1953)

lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia yang mendapat kredit bantuan dari program benteng ini. Program pemerintah ini pada hakekatnya adalah kebijaksanaan untuk melindungi usaha-usaha Pribumi.

Namun usaha ini tidak tercapai tujuannya, karena pengusaha Indonesia lamban menjadi dewasa, bahkan ada yang menyalahgunakan maksud pemerintah dengan mencari keuntungan secara cepat. Bantuan kredit ini ternyata tidak efektif, sehingga program pemerintah tidak berhasil. Padahal pemerintah menambah beban keuangannya, yang mendorong salah satu sumber defisit.

GERAKAN ASSAAT

Gerakan Assaat adalah pernyataan Assaat yang mendapat sambutan dimana-mana. Pemerintah menanggapi dengan keluarnya statement dari Menteri Perekonomian Burhanuddin (NU) bahwa pemerintah akan memberi bantuan terutama pada perusahaan-perusahaan yang 100% diusahakan oleh bangsa Indonesia. Anti Cina ini menimbulkan tindakan kekerasan antara lain pengrusakan toko, mobil, milik seorang pengusaha keturunan Cina sebagai ekor pemukulan olehnya terhadap seorang dokter tentara. Selain itu juga tidak sedikit tulisan-tulisan anti Cina disebar, baik di Jakarta, Bandung, Semarang maupun Solo.

Ditandatangani Undang-undang pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB) oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1956, menimbulkan persoalan tentang bagaimana nasib modal Belanda yang ada di Indonesia. Ada anjuran untuk melaksanakan nasionalisasi atau Indonesiasinasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, tetapi sebagian anggota Kabinet menolak tindakan tersebut. Dalam hal ini banyak perusahaan-perusahaan Belanda yang menjual perusahaannya, terutama kepada orang-orang Cina. Orang-orang Cina ini memang sejak lama sudah mempunyai kedudukan yang kuat dalam ekonomi Indonesia.

Itulah sebabnya maka pada tanggal 19 Maret 1956 Mr. Assaat di depan kongres Nasional Importir Indonesia di Surabaya mengatakan perlunya Pemerintah mengeluarkan peraturan yang melindungi pengusaha-pengusaha Nasional. Hal ini penting sebab pengusaha Indonesia tidak mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha Non-pribumi, khususnya orang-orang Cina. Pernyataan Assaat mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan lahirilah gerakan Assaat dimana-mana.

GERAKAN OPERASI MILITER TIGA

Ekspedisi militer menumpas RMS disebut Gerakan Operasi Militer (GOM) III. Selaku pemimpin ekspedisi ditunjuk Kolonel Kawilarang, panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur.

Pada tanggal 14 Juli 1950 pagi, pasukan ekspedisi APRIS sebanyak 850 orang di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang mendarat di Laha, Pulau Buru. Dengan susah payah karena belum mengenal medannya, TNI berhasil merebut pos-pos penting di Pulau Buru. Komandan pasukan RMS menyerah dan menghadap Kolonel Kawilarang.

Setelah Pulau Buru dikuasai, pasukan APRIS menuju Seram. Pendaratan dilakukan di Seram barat pada tanggal 19 Juli 1950 dan dengan mudah Seram barat dapat dikuasai oleh APRIS pada hari itu juga. Dari sini gerakan pasukan APRIS dilanjutkan ke bagian lain Pulau Seram. Rupanya RMS bermaksud memusatkan kekuatan dan kekuasaannya di Pulau Seram dan Ambon. Pertempuran kemudian terjadi di Namlea. Pada tanggal 28 September 1950 pasukan ekspedisi mendarat di Ambon dan dengan demikian Pulau Ambon bagian utara berhasil dikuasai.

Serangan selanjutnya ditujukan ke Teluk Poso. Dalam serangan itu pasukan dibagi atas tiga grup, yaitu Grup I dipimpin oleh Mayor Achmad Wiranatakusumah, Grup II dipimpin oleh Letkol Slamet Riyadi, dan Grup III dipimpin oleh Mayor Suryo Subandrio. Ketiga

Grup tersebut akhirnya berhasil merebut kota Ambon. Dengan jatuhnya kota Ambon, maka perlawanan RMS praktis telah dipatahkan.

GERAKAN OPERASI MILITER V

Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo mencita-citakan pembentukan Darul Islam di Jawa Barat. Kedudukannya sebagai sekretaris pertama Masyumi seluruh Jawa Barat sangat menguntungkan untuk merealisasikan cita-citanya. Masa kekosongan pemerintah Republik Indonesia di Jawa Barat tidak disia-siakan oleh Kartosuwirjo. Inceran pertama ditujukan kepada pasukan-pasukan Sabilillah/Hisbullah karena ia harus mempunyai dukungan yang kuat untuk menjadikan idenya menjadi nyata. Dalam fase pertama Kartosuwirjo masih berselubung di dalam bentuk Majelis Islam dan garis perjuangannya masih ditujukan kepada usaha membantu pemerintah Republik Indonesia.

Di dalam kedok membantu pemerintah Republik Indonesia, secara diam-diam ia mengadakan rapat-rapat rahasia dengan para ulama fanatik. Pada tanggal 10 dan 11 Februari 1948 diadakan semacam konperensi di Cisayong (Tasikmalaya Selatan). Keputusan yang diambil yaitu merubah sistem ideologi Islam dari bentuk kepartaian menjadi bentuk kenegaraan. Konperensi kedua diadakan di Cijoho pada tanggal 1 Mei 1948. Hasilnya ialah mulai direncanakan apa yang disebut ketatanegaraan Islam yaitu dibentuknya suatu Dewan Imamah yang dipimpin sendiri oleh Kartosuwirjo. Disusun pula semacam UUD yang disebut Kanun Azasi. Di dalam Kanun Azazi ini dinyatakan pembentukan Negara Islam Indonesia yang berbentuk sebagai suatu Republik. Hukum tertinggi adalah Qur'an dan Hadith, sebagai imamnya adalah Kartosuwirjo.

Divisi Siliwangi yang kembali ke daerah Jawa Barat menemukan Jawa Barat dalam keadaan genting. Insiden pertama dengan TNI terjadi pada tanggal 15 Januari 1949 tatkala TNI harus menghadapi tentara Belanda dan kelompok Kartosuwirjo secara bersama-sama, dimana secara mendadak pasukan Siliwangi diserang oleh Kartosuwirjo.

Divisi Siliwangi sama sekali tidak menduga akan terjadinya pengkhianatan pasukan eks Hisbullah/Sabilillah. Terbukalah sekarang tabir permainan sandiwara Kartosuwirjo, yaitu usaha menghalang-halangi TNI masuk ke Jawa Barat.

Pada tanggal 7 Agustus 1949 Kartosuwirjo memproklamkan Negara Islam Indonesia di desa Cisampah, Kecamatan Cilugar, Kawedanan Cisayong dengan tentaranya yang disebut Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Pemerintah berusaha mencoba menyelesaikan persoalan DI/TII dengan jalan damai. Sebuah misi Pemerintah dikirim untuk berunding dengan Kartosuwirjo. Tetapi dengan sombong Kartosuwirjo menolak misi Pemerintah tersebut. Dikatakan olehnya, bahwa ia hanya mau berunding dengan pejabat Pemerintah yang tinggi. Sikap membangkang ini harus dihadapi dengan tindakan yang keras oleh Pemerintah. Negara harus diakui kedaulatannya dan rakyat harus dijamin keselamatannya. Untuk itu, usaha Angkatan Perang (AP) adalah mengisolasi Gerakan Kartosuwirjo dari daerah kantong dan memaksa mereka ke daerah kosong. Operasi yang dilancarkan di daerah Priangan Timur disebut operasi Pasopati di bawah pimpinan Letkol Tjakradipura. Operasi ini berhasil dengan baik berkat disiplin yang tinggi serta kepercayaan rakyat kepada AP.

GERAKAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT (GPIB)

GPIB tidak dapat dipisahkan dari peristiwa aksi-aksi pengambilalihan modal dan milik Belanda. Peristiwa diawali dengan diadakannya rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta pada tanggal 18 November 1957, setelah kegagalan usaha-usaha diplomasi secara bilateral dalam lingkungan Uni Indonesia-Belanda antara tahun 1950-1953, yang diikuti dengan pembatalan KMB secara sepihak oleh Indonesia pada tahun 1956.

Di dalam suasana anti Belanda yang makin meningkat ini, diadakan rapat umum pada tanggal 18 November 1957, yang diikuti

dengan adanya aksi pemogokan total oleh buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957. Dimulai dari pemogokan buruh, pada hari tu juga pemerintah melarang semua terbitan dan film-film yang menggunakan bahasa Belanda, melarang KLM melakukan penerbangan di atas wilayah Indonesia, dan akhirnya menghentikan kegiatan konsuler Belanda di Indonesia pada tanggal 5 Desember 1957.

Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan serentetan pengambil alihan modal dan milik Belanda di Indonesia, yang semula dilakukan oleh rakyat dan buruh, kemudian secara teratur dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Dalam situasi yang demikian inilah kemudian dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat, dengan tujuan untuk menggalang gerak rakyat dalam perjuangan pembebasan Irian Barat. (Lihat juga FNPIB).

GERAKAN BANTENG NEGARA

Komando Gerakan Banteng Negara merupakan suatu komando operasi gabungan. Kesatuan tempurnya terdiri dari pasukan-pasukan Divisi Siliwangi. Diponegoro dan Brawijaya serta kesatuan-kesatuan Senjata Bantuan. Tujuan utama untuk memisahkan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Jawa Barat pimpinan S.M. Kartosuwiryo dengan DI/TII Jawa Tengah pimpinan Amir Fatah. Selanjutnya operasi-operasinya untuk mengakhiri gerakan DI/TII Jawa Tengah dan pemberontakan-pemberontakan batalyon 426 dan lain-lain.

Gerakan Banteng Negara (GBN) dibentuk pada bulan Januari 1950 berdasarkan Instruksi Siasat Panglima Divisi III/GM III Kol. Gatot Subroto No. 130/PS/KS/MOB/49 tanggal 30 Desember 1949. Staf Komando bermarkas di Slawi, Tegal Jawa Tengah, dengan pimpinan Let. Kol. Sarbini. Pada bulan Agustus

1950 tongkat komando dipegang Moch. Bakhrun dan pada tanggal 26 Oktober 1951 pimpinan GBN dipegang Kol. Ahmad Yani sampai tahun 1955.

Wilayah komando GBN meliputi batas-batas sebelah utara laut I Jawa. Sebelah timur mulai muara Sungai Cacaban Karanganyar - Lebaksiu masuk perbatasan Kabupaten Tegal - Pemalang sampai daerah gunung Slamet. Sebelah selatan dari Gunung Slamet sampai Kabupaten Pekalongan, Banyumas, jalan raya Purwokerto - Banjar sampai perbatasan dengan Jawa Barat. Sebelah barat adalah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah.

Daerah GBN dibagi menjadi 4 sektor : Sektor Banteng I meliputi Brebes, Ketanggungan, Banjarharjo, Malahayu, Jatibarang dan Songgom. Sektor Banteng II meliputi Bumiayu, Buaran, Paguyangan, Tonjong, Bendo, Salem dan Bantarkawung. Sektor Banteng III meliputi Balapulang, Slawi, Lebaksiu, Prupuk, Margasari, Bumijawa, Cempaka dan Banjaranyar. Sektor Banteng IV meliputi Tegal, Kaliguwa, Adiwerna dan Pangkah.

Mengingat gangguan keamanan makin meningkat dengan timbulnya pemberontakan Batalyon 426, Batalyon 423 yang dipimpin Kapten Munawar dan Kapten Sofjan serta pemberontakan Kyai Sumolangu di Kebumen, maka diantara pasukan GBN ditingkatkan menjadi Banteng Raiders. Komandan Batalyon Banteng Raiders Kapten Hardoyo dengan komandan kompiunya antara lain Yasir Hadibroto, Ali Murtopo dan Pujadi melancarkan tugas-tugas GBN dalam menumpas pemberontakan DI/TII, batalyon 423, 426, MMC dan Gerakan Kyai Sumolangu di daerah GBN.

GARUDA INDONESIA AIRWAYS (GIA)

Garuda Indonesia Airways (GIA) terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Dinyatakan berdiri secara resmi pada tanggal 31 Maret 1950, ditandai dengan penandatanganan serah terima dan kerjasama antara Pemerintah RIS dengan KLM. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan kontrak antara pemerintah RIS dengan KLM berjalan sampai tahun 1980, disertai catatan dalam jangka waktu 10 tahun pemerintah dapat mengambil alih saham yang dimiliki oleh KLM dalam rangka nasionalisasi GIA.

Pada saat GIA baru berusia 4 tahun, pemerintah meninjau kembali perjanjian tersebut. Kemudian diadakanlah perundingan kembali antara pemerintah RI dengan KLM dan disusul dengan penandatanganan perjanjian nasionalisasi GIA pada tanggal 24 Maret 1954, dibawah pimpinan bangsa Indonesia sendiri.

Semula pemerintah RI akan menasionalisasi GIA sesuai dengan batas waktu sepuluh tahun mendatang sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian, namun banyak hal yang dianggap tidak menguntungkan pemerintah RI, maka dalam tempo 4 tahun pemerintah RI menasionalisasikan GIA.

Adapun sebab utama sehingga GIA segera dinasionalisasi adalah sistim manajemen GIA dikuasai oleh direksi KLM di Belanda akibatnya menjadikan tidak efisien karena segala keputusan berada di tangan direksi KLM di Belanda, sedangkan pemerintah RI sendiri tidak memiliki wewenang dalam mengambil keputusan.

GABUNGAN ORGANISASI BURUH SARIKAT ISLAM INDONESIA (GBSI)

Gabungan Organisasi Buruh Sarikat Islam Indonesia (GBSI) adalah sebuah organisasi buruh yang berada di bawah naungan Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII). Organisasi ini berdiri pada akhir

April 1955, setelah PSII dalam sidang majelisnya pada bulan Maret 1953 memutuskan untuk menggalang organisasi buruh.

Dua tahun kemudian setelah Majelis Taklim mempelajari program perburuan yang memuat antara lain politik perburuan, garis perjuangan dan peraturan GOBSII, maka dibentuklah GOBSII. Di dalam perkembangannya organisasi buruh ini mendapatkan anggota yang umumnya berasal dari kalangan buruh perkebunan yang beragama Islam.

HARI PENDIDIKAN NASIONAL

Tanggal 2 Mei 1889 adalah hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, Bapak Taman Siswa. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 316 tanggal 16 Desember 1959 tanggal 2 Mei telah ditetapkan menjadi hari pendidikan nasional. Subiadinata sebagai Pengurus Besar PGRI waktu itu juga setuju tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Penetapan hari lahir Ki Hajar Dewantara sebagai hari pendidikan nasional dilandasi oleh jasa-jasanya terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Beliau telah memberikan garis-garis tegas dalam pendidikan nasional kita, baik konsepsi maupun praktek. Pada tahun 1932 beliau telah berjuang dengan menentang Ordonansi sekolah liar serta berlakunya sistem pajak rumah tangga Taman Siswa dan menentang diskriminasi tunjangan anak di sekolah pemerintahan dan sekolah swasta. Kristalisasi konsepsi pendidikan digariskan dalam Panca Dharma yang sesuai dengan falsafah Pancasila.

Ki Hajar Dewantara pernah menjabat Menteri PP dan K pada awal kemerdekaan Indonesia serta ikut merumuskan UU Pokok Pendidikan (UU No. 12 tahun 1954). Konsepsi Ki Hajar dikhianati PGRI Non Vak Central sehingga lahir Penetapan Presiden No. 19 tahun 1965 yang menyebutkan tujuan pendidikan, melahirkan warganegara-warganegara sosialis Indonesia, yang susila, yang

bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur.

Setelah peristiwa G. 30. S/PKI timbul penolakan pihak PB. PGRI atas nama Kesatuan Aksi Guru Indonesia terhadap peringatan 2 Mei tahun 1967 sebagai Hari Pendidikan Nasional (hasil rapat PB. PGRI ke V tanggal 14 April 1967). KAGI ingin menempatkan tanggal 25 Nopember, lahirnya PGRI, sebagai hari pendidikan nasional menggantikan tanggal 2 Mei. Hal ini menimbulkan tanggapan terhadap kontroversi untuk menjernihkan dan menegaskan kembali tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional. Atas keputusan Pejabat Presiden Jenderal Suharto pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 1967 yang menyerukan tanggal 2 Mei 1967 sebagai garis awal dalam mewujudkan Pendidikan Nasional dalam arti luas. Pendidikan akan melahirkan manusia pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil-makmur berdasarkan Pancasila.

IDE 4 DESEMBER 1956

Adalah gagasan-gagasan tentang pembubaran pemerintah, DPR dan penggantian pimpinan Angkatan Darat. Munculnya gagasan ini diawali pada tanggal 4 Desember 1956 oleh Kolonel Simbolon yang turut di dalam pertemuan perwira-perwira Korps SSKAAD di Medan, dimana hadir pula perwira-perwira dari Sumatera Tengah dan Sumatera Utara. Rapat ini membicarakan gagasan kesimpulan soal-soal yang pernah dibicarakan di Bandung pada waktu Luustrum SSKAD, yaitu tentang pembubaran pemerintah, DPR dan penggantian pimpinan Angkatan Darat.

Oleh karena rapat tidak menghasilkan kebulatan tekad, maka Kolonel Simbolon mengambilalih gagasan-gagasan itu, yang ia namakan "Ide 4 Desember 1956". Berdasarkan ide tersebut Kolonel Simbolon mengumumkan tentang pemutusan hubungan daerah Sumatera Utara dengan pemerintah pusat, tidak mengakui kabinet yang ada dan mengambil alih pemerintahan di wilayah Tentara dan Territorium II.

IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA (IPKI)

IPKI lahir pada hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1954 di Jakarta atas inisiatif pejuang-pejuang, pembela-pembela dan pendukung-pendukung kemerdekaan Indonesia dalam perang kemerdekaan 1945-1950 dari berbagai daerah seluruh Indonesia.

Para pendiri bertekad bulat disertai perasaan yang penuh hikmat akan kesucian pejuang-pejuang yang telah gugur dalam medan perang dan kini beristirahat dalam makam pahlawan dan tulang belulang korban suci yang masih berserakan di hutan-hutan dan gunung-gunung. Hasrat usaha ini terlepas sama sekali dari ikatan organisasi yang di dirikan oleh beberapa ex-pejuang dan perwira-perwira sekarang, dan terlepas pula seluruhnya dari partai politik yang manapun juga.

IPKI telah disahkan oleh Panitia Pemilihan Indonesia dengan tanda gambar Tugu Proklamasi dilingkari lapangan padi serta kapas kiri dan kanan. IPKI membentuk pengurus-pengurus wilayah hampir disemua daerah pemilihan seantero Indonesia dan di berbagai wilayah sudah beranting sampai kecamatan-kecamatan bahkan kedesa-desa atas pimpinan pejuang, pembelaan pendukung kemerdekaan dan atas dukungan simpatisan dimana-mana. Calon-calon akan terdiri dari masa perjuangan kemerdekaan yang selalu terkenal baik pada puncak nasional, maupun pada daerah-daerah gerilya, bahkan bukan saja dari pada pejuang luar negeri, di daerah-daerah pendudukan dan sebagainya, yang konsekwen membela dan mendukung kemerdekaan Indonesia dari Patriot-patriot sejati baik yang masih berada dalam alat-alat negara maupun yang berada dalam masyarakat umum.

Maka IPKI dengan berpangkal semangat proklamasi serta ideologi dan konstitusi 45, berpedoman pada kalimat negara Bhineka Tunggal Ika, dengan ini berseru kepada Seantero para pejuang khususnya, dan rakyat umumnya, berhimpun kembalilah untuk melanjutkan serta meluruskan arah revolusi, dan untuk membela dan meneruskan semangat dan jiwa proklamasi dan konstitusi 1945 dengan jalan turut aktif dalam pemilihan yang akan datang, karena justru yang akan menentukan bentuk, isi serta haluan negara seterusnya.

INDONESIA MEREBut PIALA THOMAS CUP

Pada bulan Juni 1958 Indonesia mengirimkan regu nasional bulu tangkis ke Singapura untuk turut serta dalam perebutan Thomas Cup.

Regu Indonesia yang terdiri dari pemain-pemain Ferry Sonneville, Tan Yoe Hok, Eddy Yusuf, Tan King Gwan, dan Nyo Kim Bie, meskipun baru pertama kali mengikuti pertandingan Thomas Cup, telah berhasil keluar sebagai pemenang dan memboyong Piala Thomas Cup ke Tanah Air.

INDONESIANISASI

Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo selaku Menteri Perekonomian di bawah Kabinet Ali I lebih mengutamakan kebijaksanaan Indonesianisasi yaitu mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi dalam usaha untuk merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Langkah-langkah yang diambil antara lain mewajibkan perusahaan-perusahaan asing memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan staf, mendirikan perusahaan-perusahaan negara, menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional serta memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.

Kebijaksanaan pemerintah dibidang perekonomian, terutama mengenai lisensi istimewa telah menimbulkan perdebatan di Parlemen. Oleh Tjikwan dari Masyumi diajukan mosi introspeksi terhadap Menteri Perekonomian, Iskaq. Meskipun Mosi Tjikwan dapat dikalahkan, namun kabinet menjadi goyah, karena NU menyampaikan nota politik yang menghendaki perubahan personalia kabinet. Pada bulan Nopember 1954 Mr. Iskaq digantikan oleh Ir. Roosseno Suryodikusumo.

JAWATAN SOSIAL SUMATERA UTARA

Jawatan Sosial Propinsi Sumatera Utara dibentuk pada tanggal 17 Maret 1951 dengan perluasan Kantor-kantor sosialnya di kabupaten-kabupaten. Jawatan Sosial ini, tidak sama dengan usaha sosial, jaman sebelum kemerdekaan yang hanya menjadi bagian Departemen *Van justitue*. Tujuan Jawatan Sosial antara lain berusaha memperbaiki dan mendidik orang-orang yang rusak atau lemah kesosialannya.

Jawatan Sosial melancarkan aksinya pertama, mengatasi fakir miskin yang bergelandangan dikota-kota besar, menjadi pengemis-pengemis. Pembangunan rumah-rumah perawatan sosial untuk membangkitkan mereka yang dirawat agar berjiwa baru, segar, bersemangat dan giat berusaha dalam mengurangi kepincangan kesosialannya sesuai dengan rencana pemilihan kesosialan. Ada anggapan bahwa Jawatan Sosial itu sesuatu badan tempat mengadukan nasibnya, tempat mereka minta perlindungan dan jaminan penghidupan. Memang ada kemungkinan Jawatan Sosial memberikan bantuan-bantuan material tetapi sangat terbatas. Oleh karena itu yang sangat diutamakan adalah tindakan membimbing golongan lemah kesosialannya kearah pembangunan jiwa bagi pengerahan tenaga bersama.

Terhadap ujud bantuan bencana alam sebenarnya jawatan sosial hanya berfungsi mengisi kekosongan, ketika bencana alam itu timbul agar tidak terjadi kemelaratan yang parah. Oleh karena itu bukan berarti Jawatan Sosial atau pemerintah mau mengganti kerugian yang diakibatkan bencana alam itu.

Selanjutnya usahanya ditujukan untuk membangun potensi masyarakat sekitarnya dengan melalui gerakan-gerakan organisasi. Dalam bulan Maret 1952 Jawatan Sosial Propinsi Sumatera Utara melibatkan diri dalam memasyarakatkan kembali 304 orang bekas pejuang yang tergabung dalam organisasi BRRI sebagai gerombolan pengacau yang telah menyerahkan diri kepada pemerintah. Jawatan Sosial dengan konsekwensinya menampung bekas gerombolan itu untuk mempercepat pemulihan keamanan daerah Deli/Serdang dan sekitarnya.

KABINET KARYA

Kabinet Karya adalah kabinet Republik Indonesia yang ke 17, dengan masa kerja dari tanggal 9 April 1957--22 Juli 1959. Kabinet Karya dikenal juga dengan sebutan Kabinet Juanda dan merupakan Zaken Kabinet Darurat Extra-Parlementer. Kabinet ini terbentuk pada waktu masih berlakunya UUD Sementara 1950 dalam Negara Kesatuan. Keunikan Kabinet Karya ini adalah bahwa pembentukannya langsung diambil alih oleh Presiden Sukarno yang mengangkat dirinya sebagai Formatur.

Lahirnya Kabinet Karya dilatarbelakangi tiga kejadian penting yaitu :

1. Penyerahan mandat Kabinet Ali-idham kepada Kepala Negara pada tanggal 14 Maret 1957.
2. Gagalnya formatur Suwirjo untuk membentuk Kabinet, hingga terpaksa mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 April 1957.
3. Diumumkannya SOB (negara dalam keadaan darurat perang) bagi seluruh wilayah negara RI.

Program Kabinet Karya/Juanda disebut juga dengan Panca Karya yaitu Pembentukan Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik, melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB, memperjuangkan Irian Barat dan mempercepat pembangunan.

KABINET NATSIR

Kabinet Natsir yang memerintah dari tanggal 6 September 1950 sampai tanggal 20 Maret 1951 adalah kabinet koalisi di mana Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta karena merasa tidak diberi kedudukan yang sesuai. Inti kabinet ini adalah Masyumi, meliputi anggota-anggota yang non-partai. Banyak di antara anggota yang cukup punya nama dan dianggap ahli dalam bidangnya, sehingga sesungguhnya kabinet

ini termasuk kuat formasinya. Tokoh-tokoh terkenal diantaranya ialah Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Assaat (bekas pejabat Presiden RI), Ir. Djuanda dan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo. Diantara program-program yang penting ialah :

1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan
3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan Pemulihan bekas anggota-anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat
4. Memperjuangkan penyelesaian soal Irian secepatnya
5. Mengembangkan dan memperluas kekuatan ekonomi rakyat sebagai dasar bagi melaksanakan ekonomi Nasional yang sehat.

Selain soal keamanan, yang menjadi beban pemerintah ialah perjuangan pengembalian Irian ke tangan Indonesia. Belanda tidak bermaksud untuk mengembalikan Irian kepada Indonesia. Perundingan soal Irian antar Indonesia dengan Belanda dimulai pada tanggal 4 Desember 1950 semasa kabinet Natsir. Tetapi perundingan ini mengalami jalan buntu, karena masing-masing pihak tidak beranjak dari pendirian. Hal ini menimbulkan mosi tidak percaya dari parlemen terhadap Kabinet.

Krisis menjadi mendalam dengan adanya mosi Hadikusumo (PNI) pencabutan PP No. 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diterima baik oleh Parlemen, sehingga Kabinet Natsir mundur. Pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno.

KABINET WILOPO

Setelah kabinet Soekiman jatuh, dibentuk kabinet dibawah Perdana Menteri Wilopo (PNI) yang juga merupakan koalisi partai terbesar Masyumi dan PNI. Program Kabinet Wilopo tidak banyak berbeda dengan Kabinet sebelumnya yaitu meliputi :

1. **Organsisasi Negara**
 - a. melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan-dewan Daerah.
 - b. menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi Daerah
 - c. menyederhanakan organisasi pemerintah pusat
2. **Kemakmuran**
 - a. memajukan tingkat penghidupan rakyat dan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat, dan
 - b. melanjutkan usaha perubahan agraris
3. **Keamanan**
Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum, menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, dan mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
4. **Perburuhan**
Memperlengkap perundang-undangan perburuhan untuk meningkatkan derajat kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional.
5. **Pendidikan dan Pengajaran**
Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran
6. **Luar Negeri**
 - a. mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia.
 - b. menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia Belanda atas dasar *Unie-statuu*t menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa dan menghilangkan hasil-hasil Konperensi Meja Bundar yang merugikan rakyat dan negara dan
 - c. meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia secepatnya.

Di Sumatera terjadi Peristiwa Tanjung Morawa, yang ditanggapi oleh PKI yang berhubungan dengan masalah pembagian tanah. Hal ini telah menimbulkan rasa tidak puas terhadap Pemerintah Pusat. Sementara itu di Sulawesi timbul masalah alokasi keuangan yang diberikan oleh Pusat kepada Daerah. Masalah-masalah tersebut disamping rentetan peristiwa 17 Oktober 1952, serta keretakan dalam Kabinet menyebabkan mundurnya kabinet Wilopo pada tanggal 3 Juni 1953.

KABINET BURHANUDDIN HARAHAP

Kabinet Ali-Wongso digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1953. Kabinet ini adalah Kabinet koalisi dengan Masyumi sebagai intinya, sedang partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi Partai Oposisi. Salah satu program Kabinet Burhanuddin Harahap adalah "mengembalikan kewibawaan (gezag) moral Perintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat terhadap pemerintah".

Selain dari itu, kabinet ini juga mencantumkan dalam programnya pelaksanaan pemilihan umum, desentralisasi, masalah inflasi, pemberantasan korupsi, perjuangan Irian Barat dan politik kerja sama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas aktif. Dalam masa Kabinet Burhanuddin Harahap inilah di selenggarakan pemilihan umum yang pertama sejak Indonesia Merdeka. Kabinet ini mengembalikan manfaatnya setelah Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum terbentuk pada bulan Maret 1956.

KABINET ALI-WONGSO

Setelah melalui masa krisis 58 hari lamanya. Kabinet berikutnya terbentuk pada tanggal 1 Agustus 1953 dengan perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI) dan Wakil Perdana Menteri

Me. Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya, PIR). Kabinet ini dikenal dengan turut sertanya Nahdatul Ulama (NU) setelah keluar dari Masyumi. Program Ali-Wongso juga tidak jauh berbeda dengan kabinet-kabinet sebelumnya, yaitu meliputi :

1. Program dalam negeri yang mencakup soal keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan, organisasi negara, perburuhan dan perundang-undangan.
2. Pengembangan Irian Barat, dan
3. Politik Luar Negeri bebas aktif

Pada masa Kabinet ini gangguan keamanan makin meningkat selain aksi teror dan pengacauan-pengacauan yang makin gencar oleh DI/TII di Jawa Barat, pecah pula pemberontakkan Daud Beureueh di Aceh dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Di samping itu, gerakan-gerakan daerah makin meningkat pula.

Meskipun dihindangi oleh kesulitan-kesulitan tersebut, pada masa kabinet ini dilaksanakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung dan persiapan-persiapan pemilihan umum. Pemilihan umum itu sendiri dilaksanakan pada masa kabinet berikutnya karena Kabinet Ali-Wongso jatuh sebelum dapat melaksanakannya.

Hal ini berhubungan dengan terjadinya masalah pergantian Pimpinan Angkatan Darat (AD) yang dikenal sebagai "Peristiwa 27 Januari 1955", beberapa anggota Parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang sebelum diterima oleh Parlemen, Kabinet mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955.

KABINET SOEKIMAN

Kabinet berikutnya setelah Kabinet Natsir jatuh adalah suatu kabinet koalisi. Kedua partai terbesar waktu itu yakni Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI) duduk didalamnya. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Soekiman dengan programnya :

1. Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Mengumpulkan organisasi alat-alat kekuasaan negara.
2. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran Nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat. Mempertahankan hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani. Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan.
3. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum, dan dalam yang singkat mempercepat terlaksananya otonomi daerah.
4. Menyiapkan undang-undang tentang :
 - a. Pengakutan Serikat Buruh
 - b. Perjanjian kerjasama (*Collectieve arbeidso vereenkomst*).
 - c. Penetapan upah minimum
 - d. Menyelesaikan pertikaian buruh.
5. Menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif yang menuju perdamaian. Menyelenggarakan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar *Unie-statuu*t menjadikan hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa. Mempercepat peninjauan kembali persatuan lain-lain hasil Konperensi Meja Bundar dan meniadakan perjanjian yang nyata merugikan rakyat dan negara.
6. Memasukan Irian Barat kedalam wilayah Republik Indonesia secepat-cepatnya.

Belum cukup satu tahun, Kabinet ini pun jatuh menjadi kabinet demisioner sejak tanggal 23 Februari 1952 sampai terbentuknya baru pada bulan April 1952.

KAMPUS DARUSSALAM

Mulai tahun 1958 pemerintah mengembangkan pendidikan di daerah Aceh. Perluasan pendidikan isi sebagai salah satu usaha

pemulihan keamanan setelah pemberontakan Daud Beureuh bulan September 1953 itu. Peletakkan batu pertama pembangunan Kampus Darussalam dilaksanakan Menteri Agama RI yaitu K.H. Moh. Hijas yang mewakili pemerintah pada tanggal 17 Agustus 1958. Keberadaan Kampus Darussalam atas prakarsa tokoh-tokoh masyarakat Aceh seperti gubernur Aceh : Ali Hasyimi, Kol syammaun Gaharu (Panglima KODAM I/Iskandar Muda), Teuku Hamzah (Kepala Staf KODAM I.), Teuku M. Ali Balay dan lain-lain.

Pada tanggal 24 Agustus 1958 Menteri P dan K Prof Dr. Priyono melaksanakan upacara peletakan batu pertama pembangunan gedung pertama di dalam kampus. Peresmian pembukaan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam berlangsung tanggal 2 September 1959 dilakukan Presiden Sukarno. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 90/1960 tanggal 5 Oktober 1960 tanggal 2 September ditetapkan sebagai hari pendidikan Daerah Istimewa Aceh. Tanggal 2 September 1959 merupakan peresmian berdirinya Fakultas Ekonomi.

Dalam perkembangan Kampus Darussalam dibina sebuah perguruan tinggi Islam yang realisasinya dimulai dengan didirikannya Fakultas Syariah IAIN Al Jamiah Al Hukumiyah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 40 tahun 1960 tanggal 20 Agustus 1960. Peresmian dilakukan oleh Prof R.H.A. Sunarjo, SH, Presiden IAIN Al Jamiah Hukumiyah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 89 tahun 1963 tanggal 20 September 1963. IAIN itu diresmikan menjadi IAIN Jamiah Arraniri Banda Aceh yang berdiri sendiri.

Kampus Darussalam tetap berdiri sendiri bahkan sejak tahun 1965 mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 12/1965 tanggal 15 Mei 1965. Pimpinannya yang pertama Teuku Usman Jacob.

Sampai sekarang dalam Kampus Darussalam telah dibina lembaga perguruan tinggi Islam yang berbentuk pesantren (dayah) dengan nama Dayah Teungku Chik Pante Kulu. Peresmian dayah ini dilakukan Presiden Suharto pada tanggal 31 Agustus 1968.

KEADAAN DARURAT PERANG

Setelah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya pada tanggal 14 Maret 1957, Presiden Soekarno menyatakan seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk semua perairan teritorialnya, dalam keadaan darurat perang.

Keadaan darurat perang tersebut kemudian ditingkatkan menjadi keadaan bahaya tingkat keadaan perang tanggal 17 Desember 1957.

Keadaan perang ini telah memungkinkan Angkatan Perang lebih leluasa mengambil tindakan-tindakan tegas dalam menanggulangi pemberontakan-pemberontakan daerah serta pengacauan yang dilakukan oleh gerombolan DI/TII diberbagai tempat yang sementara itu juga telah makin meningkat.

KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG-GOYONG (KOSGORO)

KOSGORO singkatan dari Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong, kemudian setelah berkembang menjadi Koperasi Serba usaha Gotong Royong.

Adapun sebagai faktor yang mendorong lahirnya KOSGORO adalah sejumlah pemuda-pemuda pejuang yang aktif pada masa Perang Kemerdekaan. Cara para pemuda tersebut adalah dengan mendatangi rumah-rumah kepartaian yang ada di masyarakat pada waktu itu. Dengan demikian tujuan berdirinya KOSGORO pada waktu itu adalah :

1. Mengabdikan untuk memerdekakan bangsa dari segala bentuk penjajahan.
2. Mengabdikan untuk mengangkat derajat kehidupan bangsa.

Dewasa ini KOSGORO disebut juga sebagai organisasi “ Golongan Karya KOSGORO “. Dan mewadahi 10 gerakan dan 7 Lembaga yaitu :

1. Warga Tani
2. PERKABI (Persatuan Karyawan dan Buruh Indonesia)
3. Nelayan KOSGORO
4. Pemuda KOSGORO
5. Ikatan Sarjana KOSGORO
6. Gema KOSGORO (Gerakan Mahasiswa KOSGORO)
7. GENSI (Gerakan Siswa Kosgoro)
8. Wanita KOSGORO
9. Persatuan Bahariawan KOSGORO (PERBARI)
10. Ikatan Perwira Pelayaran Nasional Indonesia (IPPNI)

Ketujuh Lembaga yang dimaksud adalah :

1. Lembaga Pendidikan Agama dan Spiritual
2. Lembaga Pembinaan Massa
3. Lembaga Pembangunan
4. Lembaga Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan
5. Lembaga Sosial dan Kebudayaan
6. Lembaga Kebudayaan dan Kesenian
7. Lembaga Penerbitan dan Pers.

KESEJAHTERAAN GURU, MURID, DAN ANAK-ANAK (KGMA)

Kesejahteraan Guru, Murid dan Anak-anak (KGMA) yaitu sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Berdiri pada bulan Oktober tahun 1952, atas prakarsa Bahder Djohan yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K).

Adapun maksud dan tujuan beliau mendirikan yayasan tersebut adalah agar masalah kesejahteraan para pengajar, murid dan anak-anak dalam masa pra sekolah mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini mengingat akan kondisi masa pemerintah Jepang sampai perjuangan kemerdekaan, nasib guru-guru sangat terlantar.

KOMISI *FACT FINDING* PARLEMEN

Komisi *Fact Finding* Parlemen atau disingkat dengan KFFP adalah suatu komisi yang khusus dibentuk oleh pemerintah pusat dalam rangka menyelesaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Sumatera. Inisiatif pembentukan KFFP ini diprakarsai oleh Panitia Permusyawaratan Parlemen dalam sidang istimewanya pada bulan Januari 1957, dengan tujuan untuk menyelidiki dengan seksama pokok pangkal penyebab terjadinya peristiwa tersebut.

Dari hasil penyelidikannya inilah nanti akan dapat diambil suatu rumusan untuk dicarikan penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan pokok pikiran ini maka dibentuklah tiga buah komisi yang diberi nama Komisi *Fact Finding* Parlemen yang daerah sasaran yang akan dituju adalah Sumatera Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Untuk Sumatera Tengah akan dipimpin oleh wakil Ketua III parlemen Z.A. Ahmad dan anggota-anggota lainnya terdiri dari Z.A. Tanamas dan Syahbuddin Latif. Adapun ketiga orang ini sehingga terpilih jadi utusan KFFP karena mereka berasal dari Sumatera Tengah dan dipandang cukup mengenal jiwa rakyat daerah tersebut.

KOMITE KESATUAN AKSI IRIAN BARAT

Komite Kesatuan Aksi Irian Barat merupakan suatu wadah yang dibentuk dalam rangka membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Organisasi ini dibentuk di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1950, dengan tujuan membantu pemerintah di dalam perjuangan membebaskan Irian Barat. Komite diketuai oleh Pratikno, dengan anggota organisasi yang terdiri dari semua organisasi massa dan partai-partai yang ada, seperti organisasi buruh, petani, pemuda, wanita, dan lain-lain.

KONFERENSI MAHASISWA ASIA-AFRIKA

Konperensi Mahasiswa Asia-Afrika adalah suatu konperensi antar mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara Asia Afrika. Konperensi bertujuan untuk mendorong, meningkatkan dan mempererat persahabatan dan kerjasama antara pemuda-pemuda Asia-Afrika, diselenggarakan pada tanggal 30 Mei-7 Juni 1956 di Bandung. Sebelum konperensi diadakan, pada bulan Oktober 1953 terlebih dahulu dilakukan pembicaraan pendahuluan antara wakil-wakil mahasiswa India, Iran, Libanon, Irak dan Indonesia, tentang Komite Persiapan. Kemudian pada bulan November 1954 dibentuk Panitia Persiapan Nasional Konperensi Mahasiswa Asia-Afrika (PPN-KMAA), dan dari pertemuan PPN-KMAA ini dibentuk Panitia Persiapan Nasional (PPN), dengan wakil-wakil mahasiswa India, Philipina, RRC, Jepang, Libanon dan Indonesia. Sesuai rencana, pada akhir Mei sampai awal Juni 1956 diadakan Konperensi Mahasiswa Asia-Afrika.

Dalam konperensi hadir wakil-wakil organisasi mahasiswa dari dua puluh enam negara Asia-Afrika. Masalah yang dibahas dalam konperensi ini antara lain, keadaan sosial, kesehatan dan kesejahteraan mahasiswa, fasilitas-fasilitas dalam pelajaran, kerjasama antara fakultas dan lain-lain di samping tukar menukar pengalaman dan pengetahuan.

KONFERENDI ASIA AFRIKA

Pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 diadakan konperensi Asia-Afrika di Bandung. Konperensi tersebut adalah suatu pertemuan negara-negara Asia-Afrika, yang diprakarsai oleh lima negara-negara asia yaitu : Indonesia, India, Pakistan, Birma dan Sri Langka. Konperensi ini diikuti oleh 29 negara Asia - Afrika yaitu Afganistan, Birma, Jepang, Ethiopia, Philipina, Cold Coast (Ghana), India, Indonesia, Irak, Iran, Kamboja, Laos, Libanon, Liberia, Libia, Muangthai, Mesir, Nepal, Pakistan, RRC, Saudi Arabia, Sri Langka, Sudan, Suriah, Turki, Vietnam Selatan, Vietnam Utara, Yaman dan

Yordania. Sebelum konferensi tersebut diadakan, kelima negara pemrakarsa telah mengadakan serangkaian pertemuan persiapan pertama di Kolombo, pada bulan April 1954 dan kemudian di Bogor pada bulan Desember dalam tahun yang sama.

Konferensi Asia Afrika diselenggarakan dalam suasana makin meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memperoleh kemerdekaannya serta usaha-usaha untuk menggalang persatuan dan solidaritas diantara negara-negara yang berkembang dan merdeka, Situasi internasional pada masa itu diliputi kecemasan akan timbulnya perang atom. Situasi ini mendorong negara-negara berkembang untuk mencari jalan membantu meredakan ketegangan dunia dan memelihara perdamaian. Dalam agenda konferensi tercantum pokok-pokok pembicaraan yang mencerminkan masalah-masalah Internasional termasuk beberapa aspek mengenai PBB, hidup berdampingan (*Co-existence*), soal Indocina, Aden, masalah pelucutan senjata dan masalah senjata penghancur yang dasyat (*Weapons of mass destruction*).

Konferensi ini menghasilkan berbagai keputusan penting yang dituangkan didalam suatu komunike bersama. Di samping itu telah pula disetujui prinsip-prinsip hubungan internasional dalam rangka memelihara dan memajukan perdamaian dunia. Prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan "Dasasila Bandung".

KONFERENSI TINGKAT MENTERI

Pada tanggal 23 April 1950 diadakan suatu Konferensi Tingkat Menteri antara negara Belanda dengan Indonesia di Jakarta. Konferensi dilaksanakan atas inisiatif pihak Republik Indonesia Serikat dengan misi perjuangan kembalinya Irian Barat. Kesempatan yang diperoleh antar ke dua negara adalah membentuk suatu panitia yang akan mengadakan persiapan guna membicarakan status wilayah Irian Barat. Hasil dari konferensi adalah dengan membentuk panitia gabungan yang disebut Komisi Guinea atau Komisi Irian. Anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil Belanda dan Indonesia. Komisi yang telah dibentuk segera turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan.

Dalam jangka tiga bulan komisi ternyata mampu menyelesaikannya dan hasil dari tugas mereka di laporkan saat berlangsungnya Konferensi Tingkat Menteri yang kedua di Den Haag pada tanggal 4 Desember 1950. Laporan-laporan yang diberikan oleh team komisi gabungan tersebut menurut kedua negara tidak memuaskan, namun laporan tersebut bagi Indonesia merupakan suatu perjuangan untuk merebut wilayah Indonesia yang diambil oleh kolonial Belanda. Masalah Irian Barat tahun demi tahun terus diperjuangkan oleh pihak Indonesia. Berbagai cara dilakukan Indonesia, apakah dengan diplomasi dan kekerasan/senjata. Perjuangan atau usaha-usaha yang dilakukan oleh Indonesia tersebut akhirnya berhasil. Pada tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat kembali kepangkuan Negara Republik Indonesia.

KONFERENSI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Konferensi Sekolah Menengah Atas diadakan oleh Kementrian PP dan K. Tujuan dari Konferensi tersebut adalah dalam hal meninjau kembali struktur dan sistem pendidikan. Setelah Negara Indonesia terbentuk menjadi negara Republik Indonesia Serikat dan kembalinya ke Negara Kesatuan, maka sekolah-sekolah yang ada turut mengalami penyesuaian sesuai dengan sistem pemerintah yang berlaku. Dari hasil Konferensi tersebut diketahui tingkat perkembangan pendidikan di Indonesia.

Ada empat kali Kementrian PP dan K mengadakan konferensi Sekolah Menengah Atas. Yaitu :

1. Tahun 1947 di kota Sala
2. Tahun 1950 di kota Yogyakarta
3. Tahun 1952 di kota Bogor dan
4. Tahun 1955 di kota Malang.

Pada umumnya konferensi yang diadakan pesertanya terdiri dari kepala sekolah-sekolah negeri dan swasta yang ada di Jakarta

dan di daerah-daerah. Dari kepala sekolah masing-masing diambil bahan masukan untuk dirumuskan bagaimana sistem pendidikan dan pengajaran yang diinginkan bangsa Indonesia.

Dari konperensi I sampai ke empat ternyata hasil konperensi menunjukkan proses perkembangan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia yang berciri nasional, terjadi penggodokan dari pengambil-alihan sekolah yang bercorak Belanda sampai terarahnya materi serta disederhanakan menjadi ciri nasional. Bahkan materi pelajaran yang tercakup dalam kurikulum juga mengalami proses perubahan dan perkembangan. Dan yang tidak kalah pentingnya Lembaga Sekolah Menengah Atas kedudukannya sebagai sekolah (tempat belajar) mendapat kejelasan. Yaitu bahwa fungsi SMA adalah menyiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna untuk perguruan dan lembaga-lembaga pendidikan yang lebih tinggi dari Sekolah Menengah Atas. Proses kejelasan fungsi SMA dapat dilihat dari hasil keputusan konperensi ke empat di kota Malang.

Adapun hasil keputusan yang diambil mengenai tiap-tiap bagian pada sekolah menengah atas adalah :

SMA bagian A. Adanya penyederhanaan pelajaran, dengan memperdalam isi mata pelajaran golongan pokok dan lebih memperhatikan mata pelajaran Ilmu Sosial. **SMA bagian B.** Memasukkan pelajaran Ilmu Ukur Analitika serta menyederhanakan Ilmu Ukur Melukis. Jam pelajaran untuk Bahasa Indonesia ditambah sedangkan mata pelajaran bahasa Prancis dihilangkan. **SMA bagian C.** Meningkatkan bahasa Indonesia menjadi materi pelajaran pokok Pelajaran ekonomi dan ilmu hukum diperluas. Sedangkan materi pelajaran aljabar dijadikan mata pelajaran penting.

Dari keterangan ini jelaslah bahwa hasil konperensi ke empat di Malang ini dapat dikatakan sebagai sebuah batu tonggak dalam sejarah perkembangan pendidikan SMA. Tujuan Sekolah Menengah Atas jelas dan Inspeksi SMA pun mulai bergerak kearah sana.

KONGRES BURUH UMUM

Kongres buruh seluruh Indonesia ini diselenggarakan di Bandung pada tanggal 5--9 Februari 1951 oleh Badan Perserikatan Buruh Seluruh Indonesia (BPBSI). Kongres diketuai Buntaran Martoatmodjo, dengan tujuan utama untuk mewujudkan cita-cita adanya satu induk Serikat Buruh Seluruh Indonesia.

Karena bagaimanapun organisasi buruh tidak terlepas dari pengaruh partai. Oleh sebab itu buruh Indonesia perlu mengkonsolidasikan organisasi, sehingga tidak terjadi perpecahan diantara organisasi buruh. Dalam kongres sendiri timbul perbedaan-perbedaan pendapat sehingga sulit untuk menghasilkan kata sepakat. Perbedaan ramai terutama mengenai tata tertib kongres, hak suara, penetapan *National Labour Platform* (Pentas Perburuhan Nasional) dan lain-lain.

Pada akhirnya kongres hanya berhasil membentuk badan federasi dengan nama Badan Koordinasi Buruh Indonesia (BKBI), dengan anggota antara lain Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dan Vaksentral.

KONGRES PEMUDA SELURUH INDONESIA

Kongres Pemuda Seluruh Indonesia diadakan pada tanggal 8 Juni 1950, di Balai Prajurit Surabaya. Kongres dipimpin oleh Sekretariat Pemuda Indonesia Yogyakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil dari seluruh Indonesia, diantaranya 14 badan federal dan badan koordinasi.

Kongres bertujuan untuk menggalang persatuan di kalangan organisasi-organisasi pemuda. Tetapi setelah melalui berbagai perdebatan, kongres yang berlangsung tidak berhasil menggalang persatuan.

Para peserta tidak menyetujui adanya suatu federasi pemuda yang kuat disebabkan penyalahgunaan dari pengalaman yang pahit sebelumnya mengenai badan kongres. Kongres hanya berhasil

membentuk kerjasama dengan nama Front Pemuda Indonesia yang tidak merupakan badan yang kuat.

Pembentukan pengurus diserahkan sepenuhnya kepada Sekretariat Pemuda Indonesia di Yogyakarta. Keputusan penting kongres pemuda Indonesia ini adalah pernyataan pemuda yang diputuskan oleh Kongres Pemuda sebelumnya tahun 1949 dan keputusan itu dipakai sebagai dasar kerjasama Front Pemuda Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.

KONGRES WANITA INDONESIA

Kongres Wanita Indonesia didirikan pada tanggal 28 November 1950 di Jakarta. Sebelum itu namanya adalah Pergerakan Wanita Indonesia. Dalam perkembangannya pergerakan Wanita Indonesia menganggap perlu mengadakan konsolidasi agar dapat menghadapi tugas dalam bidang sosial ekonomi maupun politik. Untuk itu, dirasakan perlu menciptakan suatu badan yang dapat menghubungkan organisasi-organisasi wanita Indonesia dalam kerjasama dengan saling menghargai idiologi masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, maka Badan Kontak yang berkedudukan di Jakarta bersama-sama dengan pengurus Kowani mengadakan Kongres Wanita Indonesia ke VIII di Jakarta pada tanggal 24--28 November 1950. Pada kongres yang berlangsung, badan kontak dan Kowani menggabungkan diri dengan nama **"Kongres Wanita Indonesia"**, nama tersebut tidak boleh disingkat. Ada empat kali, "Wanita Indonesia" mengadakan kongres, yaitu tahun 1950 di Jakarta; tahun 1952 di Bandung; tahun 1955 di Palembang dan tahun 1957 di Surabaya.

Kongres-kongres yang diadakan tahun demi tahun mengalami perkembangan yang pesat, dimana wanita Indonesia mampu mengembangkan sayapnya sehingga wanita Indonesia semakin memiliki pandangan yang luas terhadap tugas dan fungsinya sebagai wanita. Tujuan diadakannya Kongres Wanita Indonesia untuk memper-

juangkan perbaikan kedudukan wanita, mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dan mengisi kemerdekaan. Sementara itu Kongres Wanita Indonesia juga memiliki program-program berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, wanita dan anak-anak khususnya.

Program yang dimaksud adalah mendirikan yayasan-yayasan kesejahteraan anak dan yayasan Hari Ibu, sedangkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia adalah mengadakan rapat-rapat. Misalnya pada tahun 1958 lewat hasil rapat kongres menyatakan perasaan cemas terhadap peristiwa PRRI dan PERMESTA. Adapun wujud nyata yang diperjuangkan oleh wanita Indonesia adalah :

1. Atas permintaan kongres wanita Indonesia, maka pemerintah mendirikan badan penasehat perkawinan dan penyelesaian perceraian (BP4).
2. Keikutsertaan wanita Indonesia menyumbangkan pemikiran bagi pembentukan KOWAD (Korps Wanita AD).
3. Atas permintaan kongres, pemerintah menetapkan "Hari Ibu sebagai Hari Nasional".
4. Apabila ada konferensi Internasional yang berhubungan dengan wanita, maka wanita Indonesia turut mengirimkan utusannya.

KONSTITUANTE

Undang-Undang Dasar 1950 dengan tegas menyatakan dirinya masih bersifat sementara. Setelah itu diharapkan akan muncul suatu Undang Undang Dasar Republik Indonesia baru yang bersifat tetap. Mengenai konstitusi baru itu pasal 134 Undang Undang Dasar 1950 menyatakan bahwa " Konstituante bersama-sama Pemerintah secepat-lekasnya menetapkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia akan menggantikan Undang Undang Dasar Sementara ini ". Kemudian

dalam pasal 135 dinyatakan bahwa anggota Konstituante dipilih melalui Pemilihan Umum”.

Pemilihan Umum untuk memilih anggota Konstituante diadakan pada tanggal 15 Desember 1955 yaitu dua bulan setelah Pemilihan Umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat selesai. Kemudian pada tanggal 10 Nopember 1956 sidang pertama Konstituante untuk menyusun Undang Undang Dasar yang baru sebagai pengganti Undang Undang Dasar Sementara 1950 dibuka oleh Presiden Soekarno di Bandung, disertai harapan Konstituante dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu yang singkat.

KONSTITUSI RIS

Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau disingkat Konstitusi RIS adalah merupakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat yang berlaku dari tanggal 27 Desember 1949 sampai tanggal 17 Agustus 1950.

Konperensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung mulai tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 Nopember 1949 menghasilkan 3 buah persetujuan pokok, yaitu persetujuan-persetujuan tentang :

- a. didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)
- b. penyerahan (pengakuan) kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
- c. didirikannya Uni antara Republik Indonesia Serikat Dari Kerajaan Belanda.

Sementara itu untuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akan didirikan ini, akan dibuatkan sebuah Rancangan Undang Undang Dasar oleh delegasi Republik Indonesia bersama-sama dengan delegasi *Bijeenkomst Voor Federal Overleg* (BFO).

Setelah Rancangan Undang-Undang dasar itu dibuat dan setelah disetujui akhirnya diterima oleh kedua belah pihak, kemudian Undang

Undang Dasar tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 27 Desember 1949, dan Undang Undang dasar ini diberi nama dengan “ Konstitusi Republik Indonesia Serikat”. Kehadiran Konstitusi RIS yang terdiri dari : Mukadimah, 197 pasal, dan sebuah lampiran, yang diberlakukan sejak mulai tanggal 27 Desember 1949 telah mengubah secara mendasar konstelasi ketatanegaraan.

Hal tersebut dapat kita ketahui misalnya dari bentuk negaranya. Kalau dalam UUD 1945 bentuk negara yang ditentukan adalah “ Kesatuan “, akan tetapi dalam Konstitusi RIS bentuk negara yang dikehendaki adalah berbentuk “Federasi atau Serikat” (sesuai dengan nama Konstitusinya).

Mengenai bentuk negara ini di dalam Konstitusi RIS ditentukan dalam pasal 1 ayat 1 nya yang berbunyi :
 “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”.

Perlu kiranya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan negara yang berbentuk federasi atau federal atau serikat pada hakikatnya adalah suatu negara-negara bagian. Secara terinci negara federal memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kedaulatan ke luar dari negara-negara bagian diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Federal, sedangkan untuk kedaulatan ke dalam dibatasi.
2. Soal-soal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan pemerintah federal.
3. Bentuk ikatan kesatuan-kesatuan politik pada negara federal bersifat terbatas.

Mengenai bentuk pemerintahan yang dikehendaki oleh Konstitusi RIS pada prinsipnya sama dengan yang ditentukan oleh UUD 1945, yakni berbentuk “Republik”. Hanya saja Republik yang dimaksud pada periodisasi RIS ini adalah “Republik Fusi” atau Republik penggabungan dari beberapa negara. Sedangkan Republik pada periodisasi UUD 1945 adalah Republik dari negara kesatuan.

KONSEPSI SAPTA USAHA TAMA

Konsepsi Sapta Usaha Tama adalah rencana konsepsi pengajaran yang disusun pemerintah di bawah menteri PP dan K, Prof. Prijono pada tahun 1959. Konsepsi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa lapangan pendidikan dapat membawa jiwa baru dan dapat pula selaras dengan Program Kabinet Kerja. Konsepsi Sapta Usaha Tama ini terdiri atas tujuh ketentuan yang meliputi usaha-usaha :

1. Penertiban aparatur dan usaha-usaha Departemen P dan K.
2. Meningkatkan seni dan olah raga.
3. Mengharuskan ada halaman.
4. Mengharuskan penabungan.
5. Mewajibkan usaha-usaha koperasi.
6. Mengadakan kelas masyarakat.
7. Membentuk regu kerja dikalangan SLTA/SMA dan Universitas.

KONSERVATORI KARAWITAN

Konservatori Karawitan disingkat Kokar adalah lembaga pendidikan, penyelidikan, pemeliharaan dan pengembangan seni musik khususnya musik gamelan. Lembaga ini didirikan di Surakarta pada tanggal 27 Agustus 1950 yang pendiriannya mendapat persetujuan menteri pendidikan pengajaran dan kebudayaan pada tanggal 17 Juli 1950.

Maksud mendirikan Konservatori Karawitan didasarkan adanya kesadaran bahwa pelajaran karawitan belumlah sempurna dan jumlah tenaga ahli karawitan masih sedikit, terutama di daerah Yogyakarta dan Surakarta.

Konservatori juga bertujuan untuk mendemonstrasikan serta memberi dorongan dan kesempatan kepada segenap warga negara Indonesia bagi yang berminat besar serta mempunyai dasar kecakapan dalam karawitan.

Konservatori Karawitan ini mempunyai bagian-bagian antara lain perguruan, penyelidikan, perpustakaan, juru karawitan, hubungan masyarakat, tata usaha/umum. Dalam lingkungan perguruan diajarkan dan dilatih soal pengetahuan karawitan modern, sehingga para siswanya diharapkan dapat memiliki teknik menabuh dan sekaligus pengembangan bakat seni tarinya. Dalam bagian ini diajarkan pula tentang “Miyaga Karawitan” (intrumentalis, vokalis), “Empu Karawitan” (pengetahuan tentang komponis), guru karawitan dan ahli karawitan (musikolog), konser karawitan ini bersifat akademis, sesuai dengan perkembangan pendidikan modern.

KURSUS *SCIENCE TEACHING*

Pelaksanaan *Science Teaching* diputuskan oleh kementerian PP dan K untuk dicobakan di Sekolah Dasar di Jawa Barat mulai tanggal 1 oktober 1955. Secara berangsur-angsur di tempat lain juga harus melaksanakannya. Tujuan pokok ialah untuk membentuk manusia yang cakap dalam memecahkan masalah, terutama usaha keperluan sehari-hari seperti makanan, pakaian, perumahan, perhubungan dan pengetahuan. *Science Teaching* yang dilaksanakan untuk memberikan kepada murid-murid dalam kecakapan berpikir secara kritis dan ilmiah.

Dalam bulan Agustus 1958, berdasarkan hasil musyawarah pada konferensi para pengawas dan kepala-kepala Dinas PPK Daswati I seluruh Indonesia di Bandung, diputuskan untuk memulai secara serentak pemberian pelajaran *Science* (pengetahuan alam) dengan cara-cara baru di semua SD. Untuk itu bahan-bahan pelajaran diambil dari lingkungan sekolah seperti kebun sekolah, halaman, sawah dan lain-lain.

Science Teaching tidak ditujukan kepada ilmu alam dan hayat saja, melainkan ditujukan pula terhadap semua mata pelajaran, guna memupuk berpikir anak secara kritis. Dengan metode pengajaran baru ini, segi-segi kemasyarakatan, perekonomian dan kebudayaan dibawa ke sekolah, sedangkan pertanian, peternakan, kehutanan,

perikanan, industri, merupakan obyek penelitian dan kegiatan di sekolah.

KURSUS B I DAN B II

Kursus B I dan B II yaitu kursus khusus menyiapkan tenaga pengajar untuk sekolah lanjutan pertama. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1950 tentang kurangnya tenaga pengajar di sekolah-sekolah, maka pemerintah membuka kursus B I dan B II. Keinginan pemerintah tersebut didukung dengan semakin luasnya penyebaran Sekolah Menengah Atas di seluruh Indonesia. Walaupun begitu tidak terlepas pula perhatian pemerintah terhadap alat-alat sekolah seperti laboratorium dan buku-buku pelajaran, dan kelas-kelas rendah pada sekolah lanjutan atas. Kursus B I adalah sejenis ketrampilan pengetahuan yang didapatkan dalam jangka waktu yang singkat dengan materi Ilmu sosial dan Sastra. Sedangkan kursus B II yaitu khusus di bidang Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam perkembangannya bahwa Sekolah Menengah Atas terdiri dari bagian A, B, dan C. Bagian A difokuskan menyiapkan tenaga pengajar di bidang ilmu Sosial dan Sastra. Sedangkan bagian B di bidang Ilmu Pengetahuan Alam, dan Bagian C di bidang Ilmu Bahasa, Ekonomi dan Hukum. Dalam proses perkembangan pendidikan di Indonesia, bagian C akhirnya berbentuk Kejuruan yaitu Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA).

LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA (LVRI)

Organisasi ini berdiri secara resmi pada tanggal 2 Januari 1957 di Jakarta. Sebelumnya LVRI dikenal sebagai Hari Veteran Nasional. Organisasi Veteran RI adalah gabungan dari berbagai organisasi pejuang periode 1945 - 1956. Organisasi-organisasi tersebut adalah organisasi bekas tentara, gerilya, laskar gerakan bawah tanah, tentara pelajar, tawanan, pemberontakan bersenjata di daerah pendudukan sekutu Belanda, wanita bekas pejuang lokal di daerah-daerah setempat,

pejuang bersenjata yang berafiliasi/mantel organisasi partai-partai politik. Selain organisasi bekas pejuang tersebut yang termasuk menjadi anggota organisasi LVRI adalah :

1. PERPEPSI (Persatuan Bekas Pejuang Seluruh Indonesia)
2. IKABEPI (Ikatan Bekas Pejuang Islam)
3. Sekretariat Bersama Bekas Tentara Pelajar
4. ICVI (Ikatan Cacat Veteran Indonesia)
5. TRIP (Bekas Tentara Geni Pelajar RI)
6. CPN (Corps Pejuang Nasional Indonesia)
7. TGP (Bekas Tentara Geni Pelajar)
8. Gerakan Patriot Negara (Seksi Veteran)
9. BPBA APRI (Badan Pendidikan Bekas Anggota APRI)
10. DPPPD (Dewan Pimpinan Pusat Pelajar Pejuang Demobilisasi)
11. KBTP (Kesatuan Bekas Tentara Pelajar)
12. CDSI (Corps Demobilisasi Seluruh Indonesia)
13. Ex. CP (Coprps Pelajar)
14. IWCTN (Ikatan Warga Corps Cadangan Nasional)
15. PBGRI (Persatuan Bekas Gerilya RI)
16. Kongres Bekas Tentara Nasional Indonesia
17. IPPRI (Ikatan Pejuang Proklamasi RI)
18. CPPN (Corps Pemuda Pejuang Nasional)
19. Pelajar Pejuang Bekas Tentara Jawa Barat
20. Pimpinan Pusat Bekas TNI
21. DPPDP (Dewan Pimpinan Pusat Demobilisasi Pelajar).

Dengan diadakannya kongres Nasional pejuang kemerdekaan (Veteran) seluruh Indonesia di Jakarta dari tanggal 22 Desember sampai 2 Juni 1957, maka semakin jelaslah bentuk dan tujuan organisasi ini yang namanya adalah **Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)**. Tujuan berdirinya LVRI semata-mata didasari akan jasa-jasa masing-masing anggota bekas pejuang terhadap Negara Republik Indonesia.

Kemudian juga agar semangat juang yang ada semakin kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari, serta kesejahteraan bekas anggota pejuang juga mendapat

perhatian khusus. Hal-hal tersebut yang mendasari terbentuknya LVRI dan hal itu tercermin pula dari hasil keputusan dan resolusi yang disimpulkan antara lain :

1. Membentuk Anggaran Dasar LVRI
2. Membentuk rencana kerja
3. Masalah pendidikan
4. LVRI protes kepada negara-negara asing yang melanggar wilayah perairan dan udara Nasional Indonesia.
5. LVRI meminta perhatian pemerintah terhadap adanya korban sebanyak 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan.
6. LVRI mengharap supaya pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Veteran untuk mengajak para veteran lainnya yang telah tersesat kembali kepangkuan ibu pertiwi.
7. LVRI mengharapkan supaya pemerintah memberikan tanah kepada para veteran yang membutuhkannya.
8. LVRI menyerukan kepada organisasi veteran se dunia untuk menerima organisasi veteran RI, selaku World Veteran Federation
9. LVRI mengajak Veteran Asia Afrika untuk mengadakan konperensi Veteran Asia - Afrika.
10. LVRI mengadakan resolusi terhadap Biro Perancang Nasional, supaya turut duduk juga sebagai wakil veteran dan juga anggota veteran digunakan sebagai tenaga di personel Kementrian Veteran.
11. LVRI meminta kepada parlemen (DPR) segera meratifikasi UU Veteran, dengan tujuan anggota veteran memperoleh perlindungan hukum dalam penyelesaian masalah.
12. LVRI mengharapkan kepada pemerintah jika menerima tenaga dalam APRI harus mengutamakan dahulu tenaga-tenaga veteran RI.
13. LVRI mendesak kepada pemerintah agar panitia Ad-Hoc segera merealisasikan pembatalan persetujuan KMB dan segera

melaksanakan tugas dengan menyatakan dan menicap Belanda sebagai Agresor, karena terus menduduki Irian Barat, atau melikwidasi diri dan menyita semua modal Belanda di Indonesia, membatasi perundingan dengan Belanda, serta mengadakan mobilisasi umum dan membentuk Komando Irian Barat di Tidore.

14. LVRI mengharapkan agar ada wakil veteran duduk dalam Biro keamanan Negara, mulai dari pusat hingga kedaerah-daerah.
15. LVRI meminta kepada pemerintah lebih tegas menghadapi gerakan-gerakan subversif di Indonesia.
16. LVRI meminta kepada pemerintah lebih tegas menghadapi alat-alat negara yang telah bertindak merugikan negara.
17. LVRI mengharapkan supaya pemerintah lebih tegas menghadapi koruptor-koruptor.
18. LVRI mengharapkan supaya pemerintah mempercepat proses pembayaran hutang-hutang kepada rakyat. Hasil keputusan dan resolusi tersebut disahkan tanggal 31 Desember 1956 dan ditandatangani oleh presidium masing-masing. Dan hari itu juga dilaporkan kepada Presiden. Maka pada pukul 3 petangnya di depan Istana Merdeka diadakan upacara penyerahan **Panji Karya Dharma** kepada LVRI oleh presiden Sukarno kepada Let Kol R Pirngadi sebagai ketua umum LVRI yang disaksikan oleh Dr. Idham Chalid.

Dengan demikian organisasi pejuang yang ada di daerah-daerah otomatis masuk melebur diri menjadi satu yaitu LVRI cabang daerah. Dan mengikuti seluruh hasil keputusan serta resolusi yang telah disepakati bersama. LVRI kini merupakan organisasi yang cukup potensial bagi negara Indonesia, khususnya bagi personil veteran itu sendiri. Hal ini terbukti dari fungsi wadah tersebut yang mana LVRI berfungsi sebagai badan perjuangan, terutama menghadapi kelanjutan perjuangan Bangsa. Dan di sini organisasi LVRI menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para anggota veteran RI.

LEMBAGA KEBUDAYAAN RAKYAT (LEKRA)

LEKRA adalah bagian dari PKI di bidang kebudayaan. Didirikan tanggal 17 Agustus 1950 oleh DN. Aidit, MS Ashar, AS Dharta dan Nyoto.

Tahun 1951 cabang-cabang Lekra mulai tersebar hampir disemua kota di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Basis Lekra di daerah terdapat di Surabaya, Malang, Tuban, Yogyakarta, Semarang, Solo, Pati, Klaten, Cirebon, Bandung, Bogor, Jakarta, Palembang dan Bukit Tinggi. Lekra adalah bagian dari PKI bidang budaya, oleh sebab itu konsep perjuangan harus selaras dengan cita-cita partai. Aktivitas-aktivitas kultural Lekra selalu identik dengan ideologi Politik Komunis. Semboyan Lekra adalah " Seni untuk rakyat juga seni untuk revolusi ". Pada dasarnya Seniman Lekra mempergunakan sastra sebagai alat untuk memperjuangkan komunisme.

Nama seniman-seniman Lekra yang cukup potensial pada waktu itu adalah Nyoto, Hr. Bandaharo, Bakri Siregar, Buyung Saleh, Agam, Wispi, F.L. Risakato, Sobran Aidit, Utuy Tatang Sontani, Pramudya Ananta Toer, Rivai Apin, S. Anantaguna, Basuki Resobowo, Hendra Gunawan, Kotot Sukardi, Tjak Bowa, dan Sunita. Di Tahun 1959 Joebar Ajoeb menjabat sebagai sekretaris umum Lekra.

Judul puisi atau bentuk karangan sastra yang jelas diwarnai ideologi komunisme antara lain adalah karangan Hr. Bandaro yaitu Dari Bumi Merah. Kumpulan puisi S. Anantaguna, " Yang bertanah air tapi tak bertanah ". Kepada seniman yang berpotensi besar Lekra memberi kesempatan untuk lebih meluaskan pengalaman-pengalamannya. Mereka dikirimkan ke seminar-seminar di luar negeri, terutama ke negara-negara komunis. Misalnya seperti Ananta Toer, ia pernah belajar di negeri Belanda selama satu tahun (1953-1954), namun tidak mengurangi pola pikirnya terhadap ideologi yang dianut. Tahun 1956 ia diundang oleh lembaga sastra Tiongkok Pusat ke RRC untuk mengadakan peninjauan, disamping itu ia juga diundang

dalam rangka memperingati meninggalnya sastrawan Lu Shun. Dari hasil kunjungannya ke RRC tersebut ia berhasil membuat sajak yang berjudul "Dinasti 650 juta". Poros Lekra adalah realisme Sosialis. Artinya dalam mempraktekkan sosialisme tersebut difokuskan di bidang kreasi sastra. Sedangkan Humanismenya adalah humanisme proletar yaitu sebagai lawan dari humanisme barat atau humanisme universal.

Oleh karena itu bagi Lekra seakan mendapat angin segar untuk mempergunakan sastra sebagai lahan yang baik untuk menanamkan ideologi komunis. Sastra di pakai untuk menyebarkan propaganda. Pelopor realisme sosialisme adalah pengarang Maxim Corkylan Rusia dan Lu Shun. Sastrawan-sastrawan di luar Lekra dianggap sebagai manikebuis atau kelompok manifest kebudayaan.* (lihat Manifest Kebudayaan).

LEMBAGA KEBUDAYAAN INDONESIA (LKI)

Lembaga ini berdiri pada bulan Maret 1950 di Jakarta. Latar belakang terbentuknya LKI didasarkan dari hasil keputusan Kongres Kebudayaan I tahun 1948 di Magelang. Salah satu hasil keputusan kongres kebudayaan tersebut yaitu supaya mendirikan suatu badan sebagai pendorong dan penggiat terhadap segala usaha-usaha kebudayaan.

Jadi LKI berfungsi sebagai suatu forum atau laboratorium dimana para pakar budaya dapat menyampaikan ide, gagasan atau pemikiran-pemikirannya tentang perkembangan kebudayaan. Sebagai ketua LKI ketika itu adalah Dr. Bahder Djohan. Hasil perdana LKI sebagai forum adalah terwujudnya Kongres Kebudayaan ke II di kota Bandung, yang berlangsung dari tanggal 6--11 Oktober 1951. LKI memutuskan bahwa pokok pembicaraan pada kongres kedua ini adalah mengenai "Kebudayaan Indonesia dan Kebudayaan Asing". Sedangkan sebagai

acara sentral mengambil tema " Perkembangan Kesusastraan ", yang erat hubungannya dengan hak pengarang, kritik seni dan sensor film.

LISENSI ISKAQ

Salah satu masalah politik dan ekonomi di tahun 1950-an adalah munculnya persoalan lisensi istimewa Menteri Perekonomian Iskaq Tjokroadisuryo. Resminya disebut untuk memajukan pengusaha-pengusaha nasional. Akan tetapi menurut pendapat sementara orang atau oposisi adalah untuk menolong teman-teman separtai dan lain-lain. Pokoknya bersifat politis. Mosi Tjikwan di DPR mempertanyakan kebijaksanaan Mr. Iskaq ini. Menurut Menteri hanya diberikan kepada 95 orang importir menjelang lebaran 1954.

Menteri mengemukakan bahwa benar telah diberikan izin Isimewa yaitu untuk mencukupi kebutuhan pada hari lebaran nanti, pengeluaran buat lebaran tiap-tiap tahun diadakan dengan cara ekstra lepas daripada pembagian divisen biasa dan dalam hal ini selalu melebihi dari pada jatah divisen menurut rencana. Menteri Perekonomian diamankan oleh mayoritas partai-partai pemerintahan di DPR, bulan Nopember 1954 DPR membicarakan usul mosi Margono Djyohadikusumo dan kawan-kawan berupa angket terhadap beleid Menteri Iskaq.

Menyatukan bahwa nota pertimbangan yang diberikan oleh pemerintah amat menarik perhatiannya. Berbicara tentang timbulnya korupsi dikemukakan bahwa korupsi itu adalah sebagai akibat, bukan sebab. Dengan resmi dan positif oleh menteri perekonomian dinyatakan merajalelanya korupsi. Jadi sekarang yang diselidiki adalah hal-hal yang menyebabkan adanya korupsi itu. Jika DPRS berhasil mendapatkan sebab-sebab itu, maka DPRS sudah menuju kepada perbaikan.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA (MPRS)

Lembaga tertinggi negara yang dibentuk pada masa Demokrasi Terpimpin. Pembentukan MPRS ini merupakan pelaksanaan dari isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sesuai dengan Dekrit tersebut yang menetapkan, bahwa sebelum tersusun MPR menurut pasal 2 ayat 1 UUD 1945, pada tanggal 22 Juli 1959 dibentuklah Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS), yang anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan beberapa persyaratan yaitu :

1. Setuju kembali kepada UUD 1945
2. Setia kepada perjuangan RI dan
3. Setuju dengan Manifesto Politik

Anggota MPRS sesuai dengan UUD 1945 terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan wakil-wakil golongan. Keanggotaan MPRS yang diangkat berdasarkan Penpres No. 12 Tahun 1959 terdiri atas 261 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan wakil golongan karya sebanyak 200 orang, dengan tugas-tugas menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Semenjak dibentuknya MPRS telah mengadakan lima kali Sidang Umum dan sekali Sidang Istimewa, serta menghasilkan sejumlah 44 ketetapan MPRS. MPRS berakhir setelah terbentuknya MPR hasil Pemilihan Umum tahun 1971.

MANIPOL (MANIFESTO POLITIK)

Dalam rangka peringatan hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno mengucapkan pidato yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita", Pidato ini kemudian disebut "Manifesto Politik Republik Indonesia" (Manipol).

Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam sidangnya pada tanggal 23--23 September 1959 mengusulkan agar Manipol dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara yang diwujudkan dengan Penpres

nomor 1 tahun 1960, dikukuhkan oleh MPRS dengan Ketetapan Nomor 1 tahun 1960.

Sementara itu dalam pidato pembukaan kongres Pemuda di Bandung pada bulan Februari 1960, Presiden menyatakan bahwa intisari Manipol adalah Undang-undang Dasar 1945. Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (USDEK).

MANIFEST KEBUDAYAAN

Adalah pernyataan spontanitas dari pihak sastrawan Indonesia yang berideologi Pancasila. Kelompok Lekra menyebut mereka sebagai Manikebuis atau orang-orang yang kontra revolusi. Tokoh sastrawan yang tergabung dalam kelompok manifest kebudayaan adalah : H.B. Jassin, Trisno Sumardjo, Wiratmo Sukito, Zaini, Bokor Hutasuhut, Goenawan Muhammad, A. Bastari Asnim, Bur Rasuanto, Soe Hok Djin, Tanisan, Binsar Sitompul, Drs. Taufiq Ismail, M. Sarbini, Poernawan Tjondronagaro, Drs. Boen S. Oemarjati.

Munculnya kata “Manifest Kebudayaan” oleh pihak sastrawan tersebut disebabkan melihat begitu gawatnya situasi sosial budaya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKI dengan Lekranya *(lihat Lekra). Oleh sebab itu pada tanggal 19 Oktober 1963 para seniman dan cendekiawan dengan pimpinan HB Jassin dan Wiratmo Sukito menyiarkan Manifest Kebudayaan. Penyiaran dilakukan di Media Berita Republik yaitu dalam forum sastra/budaya, dan kemudian diulang kembali pada majalah Sastra No. 9/10 Tahun III 1963.

Adapun isi manifest kebudayaan tersebut adalah sebagai berikut: “Kami para Seniman dan Cendekiawan Indonesia dengan ini mengumumkan sebuah Manifest Kebudayaan, yang menyatakan pendirian, cita-cita dan politik kebudayaan nasional kami. Bagi kami kebudayaan adalah perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup

kami. Kami tidak mengutamakan salah satu sektor kebudayaan lain. Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan itu sesuai dengan kodratnya.

Dalam melaksanakan kebudayaan Nasional kami berusaha mencipta dengan kesungguhan yang sejukur-jujurnya sebagai perjuangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia ditengah-tengah masyarakat bangsa.

"Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami". Tindakan kelompok manifest kebudayaan ini ternyata mendapat dukungan atau perhatian yang cukup serius dari berbagai organisasi dan media masa. Adapun nama media masa yang mendukung pihak manifest kebudayaan adalah Harian Berita Republik, Majalah Sastra, Harian Semesta, Duta Masyarakat, Mingguan Gelora, Pos Minggu, Mingguan Surakarta, Majalah Basis, Mingguan Waspada Teruna dan Indonesia Baru.

Sedangkan organisasi-organisasi yang menyokong adalah Ikatan Sarjana Pancasila. Badan Pembina Teater Nasional Indonesia Sumatera Selatan, Lesbumi, Teater Muslimin Wilayah Palembang serta Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia.

MILITERISASI KEPOLISIAN NEGARA

Untuk kepentingan penyelenggaraan ketertiban keamanan umum serta pertahanan, pada tanggal 8 April 1959 Kepolisian Negara dimiliterisasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959. Sejak berlakunya peraturan Pemerintah ini, Mobile Brigade Polisi ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan militer.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 dikukuhkan dalam Ketetapan MPRS No. I dan II dalam tahun 1960 yang menyebutkan bahwa "Angkatan Bersenjata kita terdiri atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi Negara". Dengan demikian Polisi Negara

disamping melaksanakan tugas pokoknya juga harus turut dalam pelaksanaan tugas dibidang Pertahanan Keamanan Nasional.

Dengan melalui perjuangan yang cukup lama akhirnya pada tanggal 30 Juni 1961 terbentuklah Undang-Undang Pokok Kepolisian yang terkenal dengan UU No. 13 tahun 1961. Dalam pasal 3 UU Pokok Kepolisian menyebutkan bahwa Kepolisian Negara adalah Angkatan bersenjata. Oleh karena itu didalam UU Pokok Kepolisian ini telah jelas kedudukannya, tugas dan wewenang Korps Kepolisian Negara di dalam rangka ketatanegaraan, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, di dalam kehidupan masyarakat luas dan di dalam hubungan penyelesaian perjuangan Nasional.

Polisi Republik Indonesia sebagai unsur ABRI (KEPPRES No. 290/1964) mengemban tugas sebagi berikut :

- a. Alat Negara Penegak Hukum
- b. Koordinator Kepolisian Khusus
- c. Ikut serta dalam pertahanan
- d. Pembinaan KAMTIBNAS
- e. Kekaryaan
- f. Sebagai alat revolusi

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967 tanggal 24 Agustus 1967, Men Pangak (MENPANGAK) dirubah menjadi Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada MENHANKAM/PANGAB.

METODE KOMBINASI TIGA BENTUK PERJUANGAN (MKTB)

Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTB) adalah strategi suatu politik perjuangan Partai Komunis Indonesia (PKI) khusus dalam aspek kekuatan bersenjata. MKTB ditetapkan pada tahun 1954 ketika PKI mengadakan kongresnya yang kelima. Strategi yang dimaksud adalah meliputi :

1. Perjuangan gerilya di desa-desa yang didukung oleh kelas petani miskin.
2. Perjuangan revolusioner di kota-kota oleh kelas bawah terutama para pekerja di bidang alat transportasi.
3. Sasaran dengan upaya yang intensif untuk menanamkan faham komunisme di kalangan tentara (ABRI) baik secara bertahap maupun terbuka.

Strategi Perjuangan MKTB dilatarbelakangi keinginan tokoh PKI (DN Aidit) yang ingin membangun kembali kekuatannya dalam jangka panjang, setelah kegagalan Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948.

MUTUAL SECURITY ACT (MSA)

Mutual Security Act (MSA) yaitu undang-undang tentang keamanan bersama. Undang-undang ini dibuat antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam menjalin kerjasama di bidang ekonomi dan keamanan, dimana Amerika Serikat akan memberi bantuan ekonomi dan persenjataan kepada Indonesia berdasarkan MSA. Persetujuan ditandatangani pada bulan Januari 1952 (masa Kabinet Sukiman) antara Menteri Luar Negeri RI Ahmad Subadjo dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Merle Cochran.

Dalam perkembangannya persetujuan ini ternyata telah menimbulkan berbagai pertentangan di kalangan pemerintahan, karena dengan adanya persetujuan ini Indonesia dianggap telah masuk dalam salah satu blok, yang berarti melanggar politik bebas aktif Indonesia. Persetujuan inilah yang menjadi salah satu penyebab mundurnya Kabinet Sukiman.

MUKTAMAR NU KE -19

Muktamar NU ke-19 di Palembang dilaksanakan pada tanggal 26 April sampai 1 Mei 1952 sebagai realisasi Keputusan Rapat Pleno

PBNU di Surabaya pada tanggal 21 -- 22 Pebruari 1952. Mukhtamar Palembang akan membicarakan hubungan NU dengan Masyumi tentang perjuangan di bidang politik. Dari 134 cabang dari seluruh Indonesia, 86 cabang dapat hadir mengikuti Mukhtamar. Selain cabang-cabang di Jawa dan Sumatera juga hadir cabang Gorontalo, Manado, Makasar, Banjarmasin, Alabio, Amuntai, Ampenan dan Mataram (Lombok). Tokoh penting dalam dunia Islam yaitu Dr. Sukiman, Ketua DPP Masyumi, dan utusan Mukhtamar Alam Islam AS. Sayyid Muhammad Hasanaini ala Wartillani dari Aljazair hadir di tengah-tengah Mukhtamar NU.

Keputusan Mukhtamar menyatakan NU keluar dari Masyumi secara organisatoris dan NU menjadi Partai Politik. Keputusan itu berlangsung dalam perdebatan seru hingga dua kali pemandangan dengan jumlah 55 orang dari 77 orang utusan yang berhak berbicara. Hasilnya 67 setuju NU keluar dari Masyumi dan menjadi Partai Politik, 9 kontra dan 7 abstein. Pengambilan suara dilakukan setelah Nawawi Duski, utusan Pucuk Pimpinan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPPI) menyampaikan sambutannya.

Semangat para Mukhtamirin yang dasyat itu, menggetarkan tokoh perintis garis memisahkan diri dari Masyumi yaitu K.H.A. Wahid Hasyim bersama K.H. Masykur, K.H.M. Dahlan, Zainul Arifin dan lainnya. Kemudian keteguhan pendirian NU keluar dari Masyumi dipertegas oleh pernyataan Rois Aan PBNU, Ki Haji Abdulwahab Hasbullah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Mukhtamar NU itu segera dibentuk suatu delegasi untuk merundingkan teknis pelaksanaan secara organisatoris dan mengadakan negoisasi melalui musyawarah dengan Masyumi. Susunan delegasi terdiri dari Zainul Arifin, K.H.A. Wahab Hasbullah, Amin Iskandar, Otong Hulaini, Zainal Muttaqin, Husin Saleh dan Djanaidi Jasin.

Pihak Masyumi tidak membentuk delegasi khusus sehingga pertemuan pertama tanggal 22 Mei 1952 hanya dipimpin Wakil Ketua DPP Masyumi : Prawoto Mangkusaswito dan dihadiri Mr. Moh. Roem,

Mr. Syafruddin Prawironegoro, Mr. Kasman Singodimedjo dan lainnya. Sampai Bulan Juni 1952 DPP Masyumi tidak memberikan reaksinya. Akhirnya pendirian NU dituangkan dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada DPP Masyumi.

MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)

Dalam usaha untuk mencari penyelesaian masalah-masalah daerah secara musyawarah, pada tanggal 10--14 September 1957 di selenggarakan Musyawarah Nasional yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Nasional baik di Pusat maupun di daerah, termasuk bekas wakil presiden Moh. Hatta di Jakarta.

Di dalam musyawarah nasional tersebut dibicarakan antara lain masalah-masalah pemerintahan, soal-soal daerah, ekonomi, keuangan, angkatan perang, kepartaian, dan juga masalah yang menyangkut Dwitunggal Soekarno-Hatta.

Musyawarah nasional berhasil mengambil beberapa keputusan yang mencerminkan suasana saling pengertian selama musyawarah tersebut berlangsung. Pada penutupannya pada tanggal 14 September dikeluarkan suatu pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan bekas wakil presiden Moh. Hatta.

NASIONALISASI

Nasionalisasi adalah salah satu usaha yang ditempuh dari Kabinet Sukiman yang memegang pemerintahan selama sepuluh bulan sejak April 1951 sampai Februari 1952, yang berusaha mengatasi krisis moneter *Javasche Bank*. Krisis moneter yang dihadapi pemerintah ialah defisit anggaran Belanja pada tahun 1952 sebanyak tiga milyar rupiah ditambah dengan sisa defisit anggaran sebelumnya sebesar 1.7 milyar rupiah.

Meskipun dilanda krisis moneter, namun Menteri Keuangan Yusuf Wibisono memberikan perhatiannya kepada para pengusaha dan pedagang Nasional golongan ekonomi lemah. Sesuai dengan Program Benteng kepada mereka masih diberikan bantuan pinjaman uang. Dengan memberi bantuan tersebut diharapkan para pengusaha yang merupakan produsen dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

NEGARA SUMATERA TIMUR

Terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (1949), Sumatera Timur ditetapkan sebagai negara bagian RIS. Selanjutnya dibentuk Negara Sumatera Timur pada tanggal 25 Desember 1947 oleh suatu komite buatan Belanda yakni Komite Daerah Istimewa Sumatera Timur dengan mengangkat dr. T. Mansjur sebagai wali negara. Fungsi wali negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Sumatera Timur tidak terlaksana sepenuhnya, karena disamping wali negara terdapat lembaga yang lebih tinggi dan lebih berkuasa yaitu Recomba bersama Hoofd Tydelijk Bestuur.

Pada masa negara Sumatera Timur semua peraturan RI untuk Gemeente Medan tidak berlaku lagi karena peraturan ini telah diganti dengan peraturan Hoof Tijdelijk Bestuur. Kedudukan Gemeente Medan diteruskan dan diangkatlah wali kotanya yang pertama Datuk Hafis Haberham (Orang besar kerajaan Deli). Semua tugas-tugas Gemeenteraad diserahkan kepada walikota Medan sesuai dengan peraturan No. 44 tahun 1947. Dengan demikian sejak itu di kota Medan berlaku sistim pemerintahan tunggal, yaitu walikota yang menjalankan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat karena Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengganti Gemeenteraad untuk kota Besar Medan sebagai mana yang diinginkan UU No. 22/1948 belum terbentuk.

Pembentukan negara Sumatera Timur ini menimbulkan berbagai reaksi keras dari rakyat. Dengan melalui perjuangan yang cukup

panjang, akhirnya Negara Sumatera Timur dibubarkan dengan ditetapkan berdirinya Propinsi Sumatera Utara.

NEDERLANDSCH ROODE KRUIS AFDEELING INDIE (NERKAI)

Nederlandsch Roode Kruis Afdeeling Indie (NERKAI) adalah nama suatu organisasi/instansi yang didirikan Belanda yang bergerak di bidang kemanusiaan. Lembaga ini identik dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Masa berlangsungnya revolusi fisik di Indonesia, masing-masing antara yang bertikai (Belanda vs Indonesia) memiliki badan kemanusiaan untuk menolong korban perang. Pada tanggal 16 Januari 1950, setelah pengakuan kedaulatan, badan kemanusiaan milik kolonial Belanda itu diserahkan kepada pihak pemerintah Indonesia.

Namun pada saat waktu peralihan pemilikan kekuasaan, pihak Indonesia sedikit mengalami halangan sebab pihak NERKAI menginginkan adanya suatu penggabungan antara badan kemanusiaan Palang Merah Indonesia dengan NERKAI. Pihak NERKAI diwakili oleh Dr. Van Tricht dibantu dengan seorang sarjana Hukum bangsa Indonesia yang telah membelot kepada Belanda. Pihak Indonesia ketika itu diwakili oleh Mr. Ahmad Subardjo. Kedua belah pihak mengadakan pembicaraan yang berhubungan dengan penyerahan barang-barang milik NERKAI.

Pembicaraan sempat mengalami ketegangan, sebab pihak NERKAI menginginkan bahwa Palang Merah yang dimaksud adalah merupakan gabungan antara Palang Merah Indonesia dan NERKAI. Oleh pihak Indonesia permintaan ini ditolak dengan alasan bahwa RI merdeka bukan merupakan gabungan dari ciptaan bangsa Indonesia dan *Nederlandsch Indie*, dan begitu juga dengan Palang Merah Indonesia. Melihat reaksi dari pihak Indonesia tersebut maka pihak NERKAI akhirnya mau menyerahkan NERKAI ke tangan RI.

Adapun unit-unit yang diserahkan ketika itu adalah seluruh kekayaan yang telah dimiliki NERKAI termasuk transfusi Darah (Dinas

Dermawan Darah) yang ada di daerah Salemba. Untuk itu pulalah dipercayakan pihak Indonesia kepada Ny. Ratulangi agar memeriksa kantor NERKAI yang terletak di dekat Pasar Baru dan juga gudang serta sekaligus mengurus segala isinya.

OPERASI SAPTA MARGA

Setelah berhasil menguasai daerah Riau Daratan dan Pekanbaru, maka untuk melumpuhkan kekuatan pemberontak PRRI di Sumatera dilanjutkanlah operasi ke daerah Sumatera Utara dengan nama "Operasi Sapta Marga". Setelah perintah pemecatan Simbolon sebagai Panglima Tentara dan Teritorium I/Bukit Barisan, ia yang tidak banyak berhasil di Medan kemudian bergabung dengan pusat PRRI di Padang. Sementara itu Letnan Kolonel Djamin Gintings ditunjuk sebagai Panglima Tentara dan Teritorium I/Bukit Barisan menggantikan Simbolon.

Kekuatan kaum pemberontak di Sumatera Utara terutama adalah di daerah Tapanuli (Resimen Infantri 3/Bukit Barisan) di bawah pimpinan Sinta Pohan dan Boyke Nainggolan. Dalam mengusahakan perdamaian di Sumatera Utara, pemerintah telah beberapa kali mengusahakan jalan damai sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional. Kunjungan KSAD Jenderal Nasution serta misi pemerintah untuk bekerjasama membangun daerah Tapanuli telah ditolak oleh kaum pemberontak.

Mayor Sahala Hutabarat sebagai Komandan R. I. 3/BB tidak berhasil mematahkan kekuatan pasukan Sinta Pohan dan Nainggolan yang memberontak, malah kemudian ia ikut memberontak. Di kota Medan Letkol Djamin Gintings mengorganisir kekuatan pasukan yang masih taat kepada pemerintah Republik Indonesia. Letkol Djamin Gintings kemudian memusatkan kekuatannya di daerah Berastagi. Dalam pada itu Deputy Wilayah Sumatera, Brigjen GPH Djatikusumo memusatkan pertahanannya di Belawan. Letkol Sugiharto sebagai

Komandan KMKB Medan memimpin pertahanan sekitar lapangan Udara Polonia Medan bersama dengan kesatuan AURI yang bertekad untuk mempertahankan lapangan udara tersebut. Didaerah Pematang Siantar Mayor Manaf Lubis menyusun kekuatan untuk menghadapi kaum pemberontak, dengan mengorganisir pasukan R.I. 2 yang masih setia kepada Republik Indonesia.

Pada tanggal 16 Maret 1958 Nainggolan dengan kekuatan pasukan Yon 131 Melati di bawah pimpinan Mayor Henry Siregar mencoba melancarkan serangan ke kota Medan dengan nama Operasi Sabang Merauke. Gerakan Nainggolan untuk menguasai Medan dilancarkan pada jam 04.00 subuh dengan menduduki tempat-tempat penting serta melancarkan serangan ke pusat pertahanan TNI dan menangkapi pemimpin-pemimpin pemerintah yang menentang PRRI.

Pihak pasukan pemberontak mencoba mendatangkan bala bantuan dari daerah Tapanuli ke Medan. Gerakan pasukan pemberontak dari Tapanuli ini dapat digagalkan oleh pasukan Mayor Manaf Lubis dalam pertempuran yang sengit di Bukit Simarimbun. Pertahanan Mayor Manaf Lubis di Bukit Simarimbun kemudian dibantu oleh serangan PGT/AURI yang kemudian mendatangkan pasukan PGT/AURI dan RPKAD di bawah pimpinan Letnan Dua Benny. Pertahanan Mayor Manaf Lubis juga dibantu oleh pasukan Yon 133 di bawah pimpinan Raja Sjahnan, sehingga pertahanan Bukit Simarimbun ini telah berhasil mematahkan dan menghalangi usaha kaum pemberontak untuk memasuki Medan dan terpaksa kembali ke daerah Tapanuli setelah diserang oleh AURI.

Oleh karena pasukan pimpinan Brigjen GPH Djatikusumo terjepit di Belawan, maka KSAD telah memerintahkan pasukan Letnan Kolonel (U) Wiriadinata yang telah menguasai Pekan Baru untuk melakukan pendaratan di Belawan. Pada tanggal 17 Maret 1958 Letkol Wiriadinata mendaratkan pasukan RPKAD dan PGT di lapangan sepakbola Belawan, tanpa didahului dengan penembakan untuk menjaga keamanan rakyat di sekitarnya.

Pasukan yang didaratkan segera mengadakan gerakan menuju ke kota Medan dengan berjalan kaki, dan siang hari itu berhasil

bergabung dengan pasukan yang menguasai pangkalan udara Polonia yang dipertahankan oleh Mayor Basuki dan Letnan Udara Nikijuluw. Perlawanan di kota Medan di perkuat oleh pasukan KMK di bawah pimpinan Mayor Satibi Darwis. Setelah Letkol Wiriadinata berhasil mendarat di lapangan udara Polonia, maka menyusul didaratkan pasukan dari Yon 322/ Siliwangi di bawah pimpinan Mayor Sjafei yang kemudian mengadakan gerakan ke arah Tapanuli.

Sebagian dari pasukan PRRI yang melarikan diri dari kota Medan berusaha menuju Aceh di bawah pimpinan bekas Mayor Said Usman. Pasukan Said Usman di Pangkalan Berandan berhasil dihancurkan oleh Yon Kapten Malik dimana sebagian besar pasukan pemberontak menyerahkan diri.

OPERASI TEGAS

Operasi Tegas adalah merupakan operasi gabungan pertama yang dilancarkan di daerah Riau daratan, terutama untuk menduduki kota Pekan Baru. Operasi yang dilancarkan pada permulaan bulan Maret 1958 (Hari "H" tanggal 12 Maret 1958) itu dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharudin Nasution sebagai Komandan Operasi Letnan Kolonel (U) Wiriadinata sebagai Wakil Komandan I, dan Mayor (L) Indra Subagio sebagai Wakil Komandan II.

Operasi ini membawahi beberapa Komando Pasukan, yakni : Komando Pasukan "Dongkrak" di bawah pimpinan Mayor (Inf) Sukertijo, membawahi Pasukan "Kalajengking" di bawah pimpinan Mayor (Inf), Sukertijo, dan Pasukan "Kancil" di bawah pimpinan Indra subagijo. Komando "Kangguru" di bawah pimpinan Letnan Kolonel (U) Wiriadinata yang terdiri dari pasukan PGT dan RPKAD. Komando "Kangguru" membawahi Pasukan "X Ray" di bawah pimpinan Letnan Udara I Sukari dan Pasukan "Kuat" di bawah pimpinan Mayor (Inf) Tjiptomo.

Tujuan utama Operasi Tegas adalah untuk menguasai daerah Riau Perairan dan Riau Daratan dengan pusat Pekan Baru untuk menutup perembesan dan hubungan pemberontak ke luar negeri melalui Selat Malaka ke daerah Singapura dan Malaya. Dengan menutup daerah ini berarti mengisolir hubungan pemberontak ke luar negeri melalui Selat Malaka. Daerah Pekan Baru dan Riau merupakan daerah minyak yang merupakan potensi ekonomis dewasa itu dan terdapatnya perusahaan minyak asing seperti Caltek dan lain-lain yang harus segera diamankan karena mempunyai efek-efek yang berhubungan dengan luar negeri. Dari segi taktis dengan menguasai Pekan Baru dan daerah-daerah Riau Daratan akan merupakan landasan utama untuk loncatan operasi selanjutnya ke pusat pemberontak di Sumatra Barat dan Sumatera Utara.

Pada bulan Februari 1958 telah diberangkatkan ke daerah Bengkalis dan sekitarnya rombongan intelijen di bawah pimpinan Letnan Kolonel Sukendro untuk mengumpulkan data-data informasi. Kemudian diikuti dengan mendaratkan pasukan komando Dongkrak pimpinan Mayor Sukertijo dan Mayor Subagijo yang segera menguasai daerah Dumai dan Sungai Pakning dan terus bergerak melalui sungai Siak menuju Pekan Baru.

Pada hari "H" tanggal 12 Maret 1958 pasukan-pasukan PGT/AURI dan RPKAD telah disiapkan di Tanjung Pinang untuk diterjunkan menguasai Pekan Baru. Dengan bekal intelijen dan perlengkapan yang kurang lengkap, serta pengalaman operasi gabungan yang baru untuk pertama kali dilakukan di bawah, pimpinan langsung Letnan Kolonel (U) Wiriadinata, tetapi dilakukan juga serangan menduduki Pelabuhan Udara Pekan Baru dengan penuh keyakinan dan semangat.

Jam. 04.30 X-Ray diterbangkan menuju sasaran. Dalam keadaan cuaca yang jelek Letnan Kolonel (U) Wiriadinata memimpin penerbangan dan jam 07.00 lapangan udara Pekan Baru dikuasai oleh pasukan-pasukan TNI dalam waktu yang singkat. Pasukan-pasukan TNI menguasai Pekan Baru di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kaharudin Nasution dan Letnan Kolonel (U) Wiriadinata.

Pasukan Dongkrak yang melalui darat dan sungai dari Dumai dan Bengkalis terlambat memasuki Pekan Baru karena gangguan sungai dan jauhnya perjalanan darat. Mereka baru masuk Pekan Baru setelah berhasil memukul mundur pasukan pemberontak yang sebagian menyerahkan diri telah menggegerkan kaum pemberontak di Padang dan Medan.

Setelah menguasai Rumbai sebagai pusat Kegiatan perusahaan minyak Caltek, maka Pekan Baru dapat diamankan dan hari itu juga jam 14.00. KSAD Jenderal Nasution telah mendarat di Pekan Baru dan melakukan peninjauan. Setelah pasukan TNI pada tanggal 22 Maret 1958 menduduki Rengat dan Air Molek, maka pemberontak menarik pertahanannya kedaerah Bangkinang dan daerah Lubuk Jambi sehingga tujuan Operasi Tegas untuk menutup pintu bagian Timur dari PRRI berhasil tanpa menderita jatuh korban.

OPERASI SAPTAMARGA

Peristiwa kudeta yang dilakukan ex Mayor Boyke Henry Siregar terhadap pemerintahan di kota Medan merupakan daya pendukung PRRI di wilayah Sumatra Timur, Aceh dan daerah Tapanuli. Kejadian tanggal 16 Maret 1958 pukul 4.00 itu dihadapi kekuatan PRI di bawah Deputy KSAD untuk Sumatra (Brig. Jen. Djatikusumo yang dengan terpaksa menyingkir ke Belawan). Gerakan Nainggolan diperkuat 4 Batalyon dari Tapanuli pimpinan Kapten Sinta Pohan. Identitas Operasi Si Singamangaraja digunakan untuk menarik simpati masyarakat Tapanuli. Mereka menguasai kota Prapat dan Pematang Siantar. Pasukan RI-2 Pimpinan Mayor Manaf Lubis berhasil menghancurkan Pasukan Pemuda Pelopor pembangunan yang dipersenjatai secara darurat.

Kota Prapat direbut kembali pada tanggal 22 Maret 1958 sebagai hasil operasi yang dilancarkan sejak tanggal 17 Maret 1958 dari Jon 322/Siliwangi di bawah pimpinan mayor Syafei dan Panglima TT.I Let. Kol. Djamin Ginting dari Brastagi. Pasukan Boyke Nainggolan

dihancurkan dengan tembakan-tembakan 4 pesawat mustang AURI, di ruote Medan-Bangun Purbo Seribu Dolok. Pasukan Mayor Said Usman yang melarikan diri dari Medan menuju Pangkalan Brandan menyerahkan diri kepada Komando Daerah Militer Aceh. Penertiban Keamanan daerah Tapanuli dilakukan pasukan TT.I Jon 322/Siliwangi dan RPKAD dengan memutuskan hubungan Prapat Sidikalang-Tarutung dan menduduki Padang Sidempuan.

Dalam gerakan ini dilakukan Pasukan Mayor Klawi, Mayor Syafei, Mayor Raja Syahnan yang didampingi Brigjen Djatikusumo. Daerah-daerah yang dibebaskan meliputi jalur Sidikalang-Dolok-Sanggul-Siborong-borong ke Tarutung. Jalur lain : Prapat, Porsea-Balige-siborong-berong-Tarutung. Pasukan Raja Syahnan bersama Brigjen Djatikusumo bertugas merebut Rantau Prapat-Kota Pinang-Gunung Tua-Padang Sidempuan-Sibolga.

Gerakan yang dimulai pada tanggal 11 April 1958 selesai pada tanggal 27 April 1958 dengan menguasai Tarutung. Dengan demikian wilayah PPRI makin sempit, dengan kegagalan kudeta Mayor Nainggolan di Kota Medan itu. Daya dukung daerah-daerah lain tidak ada.

OPERASI BUKIT BARISAN

Untuk menghadapi gerakan pemberontak Nainggolan maka Panglima Tentara Teritorium I Letnan Kolonel Djamin Gintings telah membentuk Operasi Bukit Barisan I. Operasi ini dengan bantuan pasukan Operasi Sapta Marga telah berhasil melumpuhkan kekuatan pemberontak di kota Medan yang melarikan diri ke Tapanuli.

Untuk melakukan pengejaran dan pembersihan terhadap pemberontak, maka pada tanggal 7 April 1958 Panglima Tentara Teritorium I telah meluncurkan Operasi Bukit Barisan II, yang merupakan operasi besar-besaran untuk menghalaukan pemberontak

dari daerah Sumatera Utara. Operasi Bukti Barisan II ini merupakan rangkaian dari operasi Sapta Marga yang telah menyusun kekuatan sebagai berikut :

1. Komando Pimpinan Operasi : Panglima Tentara Teritorium I dengan Posko di Medan dan Pematang Siantar dengan kekuatan K1 CPM - 16 dibantu oleh Mustang AURI, pesawat pembom dan Harvard serta pasukan PGT/AURI.
2. Komando Barisan I di bawah pimpinan Komando Mayor Manaf Lubis dengan kekuatan organiknya dengan Posko di Perapat.
3. Komando Barisan II pimpinan Komandan KMKB Medan Mayor Satibi Darwis dengan kekuatan organiknya berkedudukan di Medan
4. Pasukan-pasukan yang dikerahkan dalam Operasi Bukit Barisan II
 - a. Pasukan Bukit 14 pimpinan Dan Yon 133 Mayor Radja Sjahnan berkedudukan di Langgapayung
 - b. Pasukan Bukit 15 pimpinan Dan Yon 322/Siliwangi Mayor Sjafei dengan bantuan 1 Rai Art Lapangan II, 1 Ton Panser Yon Kav. 6 berkedudukan di Prapat
 - c. Pasukan Bukit 16 pimpinan Dan Yon INF "A" Kapten Sanggap Gintings berkedudukan di Bandarpulau
 - d. Pasukan Bukit 17 pimpinan Dan Yon 137 Mayor Palawi berkedudukan di Sidikalang.

Gerakan pengejaran pemberontak yang berpusat di Dolok Sanggul, Lumbangdjulu dan Balige di bawah pimpinan Nainggolan dan Sinta Pohan dengan persenjataan hasil penyelundupan dan barter yang cukup kuat, ditambah dengan pasukan pemuda setempat yang berhasil dimobilisasi oleh pemberontak.

Untuk menghancurkan pemberontak di daerah Tapanuli ini, pasukan-pasukan Tentara Teritorium I yang menguasai daerah Sidikalang, Aek Natolu, Bandar Pulau dan Kota Pinang telah

melancarkan serangan kekuatan musuh dengan sasaran pokok Padang Sidempuan, Porsea, Siborong-borong dan Dolok Sanggul.

Penyerangan dimulai pada tanggal 11 April 1958.

Gerakan Penyerangan tersebut ialah :

- a. Komando Barisan I sebagai Koordinator Komando telah membuka serangan pada 03.00 tanggal 11 April 1958 dari pusat kedudukannya di Perapat di bawah pimpinan Mayor Manaf Lubis.
- b. Pasukan Bukit 14 dari garis awal di Langgapayung telah bergerak menuju Gunung Tua dan berhasil menguasainya dan pada tanggal 12 April 1958 berhasil menduduki Padang Sidempuan. Selanjutnya menuju Sibolga dan Kotanopan.
- c. Pasukan Bukit 15 bergerak dari garis Aek Natolu (Perapat) yang berhasil menduduki daerah Porsea, Siborong-borong dan selanjutnya bergerak menuju Tarutung
- d. Pasukan Bukit 16 di bawah pimpinan Dan Yonif "A" Mayor Sanggap Ginting bergerak dari Dolok Maraja menuju Porsea untuk membersihkan kekuatan musuh yang melarikan diri akibat serangan dari pasukan Bukit 15. Dari Porsea pasukan Bukit 16 terus bergerak ke timur.
- e. Pasukan Bukit 17 pimpinan Dan Yonif 137 Mayor Palawi bergerak dari tempat kedudukannya di Sidikalang menuju Dolok Sanggul terus ke Siborong-borong untuk mencegat pelarian musuh dari Porsea.

Dengan dilancarkanya Operasi Bukit Barisan II ini, maka berhasil dihalau pasukan Nainggolan dan Sinta Pohan dari daerah Sumatera Timur ke daerah Tapanuli.

ORGANISASI GELAP MANGUNI

Berdiri pada tahun 1958 di Jakarta. Tokoh pendirinya adalah Sam Karundeng, yaitu salah seorang tokoh penggerak PERMESTA. Organisasi ini lebih bersifat kedaerahan. Organisasi Gelap Manguni

bergabung dengan Legiun Sunda/Front Pemuda Sunda (FPS) serta DI/TII. Penggabungan ini mereka sebut dengan **Komando Operasi Perdamaian Nasional**, dibawah pimpinan Kolonel Sukanda Bratamenggala. Organisasi Gelap Manguni mempunyai lima cabang yang bernama Maniporak, Masarang, Mahatus, Mahawa, dan Saputan.

Latar belakang berdirinya organisasi Manguni ini adalah sebagai realisasi kelanjutan gerakan PERMESTA yang gagal melaksanakan rencananya. Dari bulan Nopember 1959 Sam Karundeng disinyalir beberapa kali mengadakan rapat gelap, antara lain di Gedung Gereja Blok A Kebayoran Baru pada tanggal 25 Desember 1959. Rapat dihadiri sebanyak 10 orang. Maksud rapat adalah membicarakan pembentukan pasukan guna melancarkan pengacauan di Ibukota. Rencana ditentukan pada tanggal 15 Januari 1960.

Adapun strategi Operasi Pengacau yang berhasil disusun pada waktu itu adalah sebagai berikut : Jakarta di bagi dalam beberapa sektor yaitu sektor (a) Kebayoran Baru dipimpin oleh T.H. Tombeng, (b) Jakarta Kota dipimpin oleh Nim Mole, (c) Menteng dipimpin oleh Utu, (d) Tanah Abang dipimpin oleh Boetje Pajau, dan (e) Kramat dan Jatinegara dipimpin oleh Jack dan seorang anggota Yon 324 Cililitan.

Dalam rangka kerjasama dengan kolonel Sukanda Bratamenggala maka di susun Komando yang terdiri dari Kolonel Bratamenggala, Mayor Benyamin, Letnan Kolonel Djaelani, Didi Kartasasmita, Kolonel Otong (Tisna) dan Kolonel Akil. Untuk penyerangan dengan Pesawat ditugaskan D.A. Maukar. Lokasi sasaran yang sudah ditentukan adalah Istana Negara, Lapangan terbang Kemayoran, Tanjung Priok dan obyek penting di ibukota. Pada tanggal 1 Januari 1960 Sam Karundeng kembali mengadakan rapat gelap dengan tujuan memantapkan hasil rapat pada tanggal 25 Desember 1959. Namun waktu rencana operasi yang telah ditentukan akhirnya dibatalkan karena adanya instruksi dari Bandung dan Semarang. Pada tanggal 11 Februari 1960 T.H. Tombeng tertangkap. Ia menyimpan senjata secara gelap. Dengan tertangkapnya T.H. Tombeng tersebut terbongkarlah segala rencana kegiatan pengacau Manguni oleh militer di Ibukota Jakarta.

PERSATUAN ANGKAT BESI SELURUH INDONESIA (PABSI)

Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) atau IAWLA (Indonesia Amateur Wight Lifter Association). Sebelum organisasi ini berdiri telah ada perkumpulan angkat besi yang bernama JAWLA singkatan dari *Java Amateur Wight Lifters Associante*, pemberian nama ini karena waktu itu perkumpulan angkat besi yang ada dan yang aktif tahun 1910-1940 baru perkumpulan yang ada di pulau Jawa saja.

Akan tetapi mengingat semakin berkembangnya olahraga angkat besi yang meluas ke daerah-daerah di luar pulau Jawa serta persiapan untuk menjadi anggota Federasi Angkat Besi Internasional (FIHC), maka pada tahun 1950 dalam kongres JAWLA di Semarang secara resmi JAWLA diubah menjadi IAWLA atau PABSI. Pada tahun 1951 IAWLA/PBSI masuk menjadi anggota Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI). Dalam perkembangan selanjutnya pada 14 Juli 1952 secara resmi IAWLA/PBSI di terima menjadi Anggota Federasi Angkat Besi Internasional dalam konggres tahunan FIHC.

PANITIA PENYELESIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D)

Dalam hal perburuan di Sumatera Utara pada tahun-tahun 1951 terjadi kekerasan dan pemogokan. Para buruh tergabung dalam organisasi SARBUPRI (Serikat Buruh Internasional RI), SBII (Serikat Buruh Islam Indonesia), Rukun Tani Indonesia (RTI) serta Serikat Kaum Tani Indonesia (SAKTI) dan lainnya melancarkan tuntutan perbaikan upah dan jaminan-jaminan sosial serta keinginan untuk ikut mengurus perusahaan. Disamping itu pengurangan buruh dan penutupan perkebunan-perkebunan seperti Tuntungan Deli Tua, Gelugur, Binjai serta perusahaan angkutan *Delispoor AVROS Transport Oudemering (DAT)* yang mengeluarkan 220 orang buruhnya dapat meningkatkan aksi-aksi pemogokan. Dengan adanya gelombang pemogokan bukan hanya kedudukan dan kepentingan

majikan saja yang terancam tetapi pasaran ekonomi, kepentingan masyarakat dan penghasilan Negara ikut terpukul.

Negara Indonesia sedang dalam taraf pemilihan setelah kembali ke Negara Kesatuan. Oleh karena itu pemerintah merasa perlu untuk menghindari akibat buruk pemakaian hak mogok yang dipertajam itu.

Dengan demikian pada tanggal 13 Pebruari 1951 pada tanggal 17 September 1951 yang menetapkan bahwa pemogokan tidak dilarang tetapi harus untuk kepentingan Negara dan masyarakat pada umumnya.

Pemerintah kemudian membentuk Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) yang diresmikan Kombang Harahap. Tugas P4D berusaha mengatasi perburuhan seperti menegakkan dan menyusun organisasi-organisasi buruh yang kuat, teratur untuk dapat mewujudkan perbaikan-perbaikan dalam lapangan perburuhan dan perekonomian. Perhatian pemerintah terhadap keinginan dan tindakan organisasi buruh tidak dapat dipisahkan dari tindakan kaum pengusaha agar sesuai dengan keinginan dan politik yang dijalankan pemerintah. Penyelesaian menurut hukum mulai ditegakkan karena itu ancaman-ancaman pemogokan harus disampaikan kepada P4D untuk dibawa ke meja perundingan yang dengan lebih dulu diurus Kantor Penyuluh Perburuhan (KPP) di Medan.

Selama tahun 1952 terdapat 1402 perselisihan perburuhan yang dibawa ke meja perundingan oleh P4D sebanyak 129 dan 37 masalah diurus oleh Jawatan Pengawasan Perburuhan. Sementara itu yang lainnya diselesaikan antara buruh dengan majikan perusahaan masing-masing.

PANITIA PENAMPUNGAN OPERASI KEUANGAN (PPOK)

PPOK dibentuk untuk menampung akibat-akibat dari tindakan moneter pada bulan Agustus 1959. Rangkaian peraturan-peraturan

moneter yang dilakukan sesudah tanggal 25 Agustus 1959, diakhiri dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 6/1959, yang isi pokoknya adalah ketentuan, bahwa bagian lembaran Rp. 1.000,- dan Rp. 500,- yang masih berlaku (dan yang kini bernilai Rp. 100,- dan Rp. 50,-) harus ditukar dengan uang kertas bank baru pada tanggal 1 Januari 1960.

Tugas pokok dari panitia ini adalah menyelenggarakan tindak lanjut dari tindakan moneter itu, tanpa mengurangi tanggung jawab menteri, di parlemen dan jawatan yang bersangkutan.

PARTAI RAKYAT INDONESIA

Partai Politik Kebangsaan yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1950 di bawah pimpinan Sutomo (Bung Tomo). Organisasi ini didirikan karena adanya berbagai macam pertentangan antara berbagai macam kepercayaan agama, aliran golongan dan lain sebagainya yang makin meruncing dan makin sukar didamaikan, selain gejala-gejala lain yang membahayakan keselamatan rakyat dan negara. Dengan maksud menghentikan gejala-gejala tersebut, maka para pejuang '45 menyatukan diri dalam suatu organisasi yang diberi nama Partai Rakyat Indonesia (PRI).

PRI berdasarkan Pancasila dan bertujuan mempertahankan dan menegakkan kedaulatan negara kesatuan RI. Dalam Pemilihan Umum akhir tahun 1955 PRI memperoleh kursi Konstituante. Selanjutnya, karena peraturan kepartaian yang berlaku setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang tidak memasukan PRI sebagai partai-partai yang diakui, PRI hilang dari gelanggang partai politik.

PARTAI RAKYAT NASIONAL

Didirikan pada tanggal 23 Juli 1950 di bawah pimpinan Djodi Gondokusumo, bekas wakil ketua II PNI tahun 1947. Partai Rakyat

Nasional (PRN) ini merupakan pecahan dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Hak ini terjadi karena perselisihan paham dengan PNI, sehingga Djodi Gondokusumo memisahkan diri dan bersama-sama kawannya membentuk PNI merdeka yang kemudian menjadi PRN pada tanggal 23 Juli 1950, dan diresmikan pada bulan Oktober 1950.

Menurut anggaran dasarnya, PRN berdasarkan kebangsaan dan kekeluargaan, dan bertujuan negara hukum berdasarkan kerakyatan masyarakat yang makmur sejahtera. Sampai bulan Oktober 1954 Fraksi PRN dalam DPR RI beranggotakan sembilan orang. Setelah Pemilihan Umum 1955, PRN memperoleh dua kursi DPR dan tiga kursi Konstituante. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, PRN pecah menjadi dua yaitu PRN Djodi dan PRN Babasa, Wakil Ketua II Dewan Partai Rakyat Nasional (PRN). Oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat peraturan pemerintah mengenai kepartaian yang ditetapkan pemerintah sejak Dekrit presiden, kedua partai tersebut bubar dari gelanggang politik.

PERSATUAN BOLA VOLI SELURUH INDONESIA (PBVSI).

Singkatan dari Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Organisasi ini terbentuk pada tanggal 22 Januari 1955 dan diketuai oleh W.J. Latumeten. Sebelum organisasi ini terbentuk telah ada perkumpulan bolavoli di Surabaya (IBVOS) dan PERVID di Jakarta.

Kedua perkumpulan ini menjadi pelopor pembentukan organisasi induk cabang olahraga bolavoli di Indonesia dan kemudian atas prakarsa Dr. Aziz Saleh selaku Komisaris Teknik Komite Olimpiade Indonesia (KOI) mengadakan pertemuan dengan kedua perkumpulan tersebut yang menghasilkan kata sepakat untuk membentuk organisasi induk bolavoli nasional.

PEMBATALAN PERJANJIAN KMB

Pembatalan Perjanjian KMB adalah pembatalan secara sepihak perjanjian KMB berupa pembatalan hubungan Republik Indonesia dengan kerajaan Belanda. Untuk maksud tersebut pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap diajukan Rancangan Undang-Undang pembatalan perjanjian Konperensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 21 Februari 1956. Pada tanggal 28 Februari 1956 DPRS menyetujui rancangan tersebut.

Namun demikian rancangan undang-undang tersebut menjadi mengambang, karena kelanjutan dari rancangan undang-undang pembatalan perjanjian KMB yang dimaksud belum menjadi Undang-undang. Sebab setelah diadakannya PEMILU I di Indonesia tahun 1955, otomatis Kabinet Burhanuddin Harahap meletakkan jabatannya. Dalam masa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil PEMILU, yang duduk di pemerintahan adalah Kabinet Ali Sastroamidjoyo. Dan pada masa Kabinet beliau juga mengajukan rancangan Undang-Undang mengenai hal yang sama pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap.

Setelah mengalami pembicaraan yang panjang lebar, maka akhirnya pada tanggal 21 April 1956 rancangan Undang-undang tersebut dapat disetujui oleh DPR untuk menjadi Undang-Undang. Dengan sendirinya setelah pembatalan tersebut hubungan diharapkan biasa saja, yaitu antara negara-negara yang berdaulat penuh berdasarkan Hukum Internasional. Kepentingan bangsa Belanda di Indonesia diperhatikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan UU yang berlaku di Indonesia.

PEMBATALAN UNI INDONESIA-BELANDA

Menghadapi sikap Belanda yang terus mempertahankan Irian Barat, sejak 10 Agustus 1954 Pemerintah Indonesia mulai mengambil reaksi keras dengan memutuskan secara unilateral hubungan Uni Indonesia-Belanda, yaitu suatu hubungan khusus antara Indonesia-

Belanda dimana keduanya saling mempunyai keterikatan yang erat, yang dibentuk pada waktu Konperensi Meja Bundar (KMB). Pembatalan bertujuan untuk melepaskan ikatan Uni Indonesia-Belanda yang telah mempersempit ruang gerak Indonesia dalam melakukan hubungan diplomatik dengan luar negeri atau bidang-bidang lain.

Dengan demikian berarti pemerintah Indonesia berhasil mengembalikan status negara Indonesia kepada status yang dimaksudkan oleh proklamasi, yaitu suatu negara merdeka yang berdaulat penuh dengan tiada ikatan sedikitpun pada negara lain yang akan mengurani kedaulatan. Tindakan ini dilanjutkan dengan pembatalan isi seluruh persetujuan KMB. *(lihat Pembatalan Perjanjian KMB).

PEMBENTUKAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

Sesudah melalui sidang Parlemen maka terciptalah UU No. 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang ditetapkan berlaku oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 1 Januari 1957. Pada tanggal 9 Januari 1957 Gubernur Milono menyerahkan kekuasaan kepada masing-masing Gubernur Kalimantan Barat : A.R. Afloes. Kalimantan Selatan : Syarkawie dan Kalimantan Timur : Bambang Pranoto. MENDAGRI Mr. Hazairin meresmikan pula kantor Gubernur Pembentukan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

Tuntutan otonomi Kalimantan Tengah dicetuskan oleh rakyat melalui mosi dan resolusi baik oleh partai, organisasi, Kongres Rakyat Kalimantan Tengah dan melalui surat-surat kabar. Kabinet karya kemudian menetapkan dengan UU Darurat No. 10 tahun 1957 L.N. No. 53. Kongres Rakyat Kalimantan Tengah dipimpin M. Mahar dan tokoh-tokoh Kalimantan Tengah seperti J.M. Nahan, M. Ismael, Paul Alang yang duduk dalam Panitia Penyalur Hasyrat Rakyat Kalimantan Tengah. Keputusan-keputusan rapat Rakyat berasal dari Kabupaten Kapuas, Barito-Sampit/Kotawaringin dan resolusi mereka

tanggal 17 April 1954 merupakan desakan kuat untuk terbentuknya Propinsi Kalimantan Tengah itu. Peranan Tjilik Riwut sebagai Bupati Sampit sangat menentukan bagi terwujudnya otonomi ini. Beliau kemudian ditetapkan sebagai Gubernur Kalimantan Tengah yang pertama.

Undang-Undang Darurat No. 10 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra propinsi Kalimantan Tengah ditetapkan pada tanggal 23 Mei 1957 oleh Presiden Soekarno dan diundangkan oleh Menteri Kehakiman RI G.A. MAENGKOM pada hari itu juga. Pahandut dipilih sebagai ibukota tempat kedudukan pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Tengah. Presiden Soekarno telah berkenan meletakkan batu pertama Ibu Kota Propinsi Kalimantan Tengah.

Di Pahandut (Palangka Raya) tepat pada tanggal 17 Juli 1957, suatu ibukota Propinsi terbaru di Indonesia, di hutan yang tidak ada satu pun gedung peninggalan kolonial. Semboyan mereka adalah *"Marilah ke hutan untuk dijadikan Kota Pangka Raya"*.

PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH PROVINSI

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1950 terbentuk kembali setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan. Pernyataan bersama pemerintah RIS dan RI tanggal 19/20 Juli 1950 yang ditetapkan dalam sidang Dewan Menteri tanggal 8 Agustus 1950 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950. Pemerintah RIS bertindak atas mandat penuh Pemerintah NIT dan Negara Sumatera Timur (NST). Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950 itu tentang pembentukan daerah-daerah propinsi sebagai persiapan pembentukan daerah otonom.

Menurut Peraturan Pemerintah itu menyangkut daerah Republik Indonesia Serikat setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terbagi atas daerah-daerah Propinsi yang meliputi : Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa

Timur, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Tengah, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Kalimantan, Propinsi Sulawesi, Propinsi Sunda Kecil dan Propinsi Maluku.

Dalam peraturan itu diputuskan bahwa segala Peraturan yang bertentangan dengan PP No. 21/1950 tidak berlaku lagi. Perubahan yang menyangkut Sumatera, masing-masing propinsi merupakan daerah pemerintahan propinsi yang bersifat administratif. Di kemudian hari propinsi yang bersifat administratif akan dibangun menjadi Daerah Propinsi otonom yang mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada waktu itu sifatnya masih sementara mengingat belum dilaksanakan pemilihan umum.

PEKAN OLAH RAGA NASIONAL III

Panitia Besar (*Organising Committee*) pekan Olah Raga Nasional ke III telah dibentuk pada tanggal 24 Januari 1952 di kota Medan. Secara resmi pembentukan itu sebagai pelaksanaan Keputusan Komite Olympiade Indonesia di Jakarta yang mengusulkan supaya PON ke III dalam tahun 1953 diadakan di Medan.

Sebagai langkah pertama pembentukan Panitia Besar PON ke III dalam pertemuannya telah membentuk dewan formateur yang terdiri atas seorang ketua dan 2 (dua) orang anggota masing-masing yaitu Mr. Djaidin Purba, Mr. Teuku Hanafiah dan G.B. Josua. Dewan ini bertugas melengkapi susunan pengurus Panitia Besar PON ke III untuk disahkan dalam rapat pembentukan yang resmi dihadiri Pengurus Komite Olympiade Indonesia dari Jakarta.

Pada hari itu juga terbentuk dengan resmi Panitia Besar Pekan Olah Raga Nasional ke III di ibukota Propinsi Sumatera Utara. Pembentukan Panitia Besar PON ke III di Medan berarti kepercayaan seluruh Indonesia yang terbesar dibebankan kepada Sumatera Utara.

Di beberapa kota daerah Sumatera Utara sudah nampak kesibukan-kesibukan berlatih, mengadakan pertandingan-pertandingan

dan pertemuan-pertemuan dan sebagainya merupakan tanda kegembiraan masyarakat Sumatera Utara untuk menyelenggarakan PON ke III agar berhasil dengan baik. Namun demikian keinginan dan kesempatan berolah raga belum cukup memadai bagi daerah-daerah sekitar kota dan di desa-desa. Kecuali permainan-permainan yang umum digemari orang seperti sepak bola dan bulutangkis, diperkenalkan juga permainan bola volley-ball dan atletik.

PON ke III yang diselenggarakan dalam bulan September 1953 di kota Medan itu akhirnya dihentikan kegiatannya mengingat keamanan tidak terjamin. Bersamaan dengan PON ke III di kota Medan, di daerah Aceh timbul pemberontakan Daud Beureueh yang dapat mengganggu pelaksanaan PON ke III. Kegagalan PON ke III yang sudah dipersiapkan benar-benar dengan segala fasilitasnya itu tidak mengendorkan tumbuhnya organisasi-organisasi olahraga di wilayah Sumatera Utara terutama di luar kota.

PEKAN PEMUDA

Pekan Pemuda adalah suatu kegiatan para pemuda yang diadakan dalam rangka menggalang persatuan dan meningkatkan kekompakan diantara organisasi pemuda. Kegiatan ini diadakan atas gagasan Mr. Sudarpo yang mengetuai Yayasan Sentrum Pemuda, diselenggarakan di Surabaya pada 3 sampai 9 Maret 1957.

Sebagai pelindung acara ini Presiden Soekarno dan para anggota kehormatan terdiri dari Walikota pekan pemuda Ny. Utami Suryadarma, Prof. Dr. Bahder Djohan, Prof. Dr. Priyono, Haryono, Sudargo, Sudarsono, Hamka, Harsono Tjokroaminoto, Harjati Adnan, Intojo, Wim Latumenten dan Sudaryo Tjokrosiswoyo, Mr. Sudarpo sendiri menjadi ketua panitia dengan dibantu sejumlah personalia yang mewakili organisasi masing-masing.

PEMBERONTAKAN APRA

Adalah pasukan bersenjata yang dipimpin oleh Kapten "Truk" Westerling. Pasukan ini terbentuk sekitar awal tahun 1950 dan berpusat di Bandung. APRA dapat dikatakan sebagai kekuatan bersenjata pemecah belah yang didalangi oleh penjajah (Belanda). Nama ratu adil digunakan untuk merebut simpati masyarakat yang percaya akan datangnya ratu adil sesuai dengan ramalan Jayabaya.

Berawal dari Negara RIS adalah negara merdeka dan berdaulat. Maka negara RIS itu bekerja bersama-sama dengan pemerintah Federal, Parlemen dan Senat. Pada waktu itu, menurut perjanjian Konferensi Meja Bundar diputuskan berdirinya RIS. Pihak Belanda yang tidak ingin melihat Negara Republik Indonesia sebagai negara yang bersatu, berusaha mempengaruhi beberapa orang pemuka masyarakat agar tiap-tiap negara Federal dibentuk Angkatan Perang masing-masing.

Dengan adanya Konstitusi RIS, rakyat semakin gelisah dan tidak setuju apabila perjanjian tersebut diberlakukan secara dominan. Hal ini mengingat akan keputusan konfrensi Antar Indonesia di Yogyakarta. Hasil keputusannya adalah mengakui Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) sebagai satu-satunya Angkatan Bersenjata di Indonesia. Kota Bandung pada masa itu termasuk wilayah Negara Federal Pasundan. APRA menyatakan dirinya sebagai tentara Negara Federal Pasundan. Pernyataan ini tidak dapat diterima oleh Pemerintah RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA menyerang kedudukan APRIS di Bandung. Dengan mengerahkan anggota sebanyak 800 orang, gerombolan ini menyerang daerah Cimahi dan Kota Bandung. Alat yang mereka pergunakan adalah kendaraan berlapis baja dan akhirnya untuk beberapa waktu lamanya mereka dapat menguasai kota Bandung. Dengan dikuasainya kota Bandung, tentara APRA banyak melakukan kerugian bagi rakyat, baik materi maupun moral. Tentara APRA melakukan perampokan-perampokan harta benda milik rakyat.

Sementara itu untuk mengendalikan situasi serta mengamankan kota Cimahi dan Bandung, pihak TNI turun tangan. Dan dalam melaksanakan tugasnya sebanyak 79 orang dari TNI gugur termasuk Letnan Kolonel Lembong. Banyaknya dari pihak TNI yang mati disebabkan penyerbuan yang dilakukan tidak terduga sama sekali. Disamping itu pertahanan TNI berupa perlengkapan senjata-senjata masih kurang dimana para anggota TNI baru selesai melaksanakan tugas gerilya, sedangkan di pihak APRA kekuatannya dapat dikatakan masih utuh yaitu dengan bermodalkan kekuatan tentara Belanda.

Walaupun mengalami banyak pengorbanan, pihak TNI bertanggung jawab sepenuhnya dibidang keamanan. Usaha yang dilakukan pihak TNI adalah memperkuat pertahanan di Jakarta. Yaitu dengan menarik kesatuan-kesatuan tentara pelajar di daerah ke Jakarta. Misalnya Kompi I TRIP Jawa Timur, berangkat dari Surabaya menuju Malang dengan tujuan selanjutnya dikirim ke Jakarta. Dengan segala daya upaya dari pihak TNI, akhirnya pemberontakan-pemberontakan dapat diatasi. Seperti di Jakarta terbukti bahwa kerusuhan-kerusuhan yang akan terjadi dapat digagalkan.

PEMBERONTAKAN IBNU HADJAR

Pemberontakan Ibnu Hadjar adalah pemberontakan yang dilakukan Ibnu Hadjar pada tanggal 10 Oktober 1950. Ia adalah seorang bekas Letnan dua Tentara Nasional Indonesia. Beliau memiliki nama samaran dengan sebutan Haderi bin Umar dan Angli. Beliau menginginkan wilayah Kalimantan Selatan sebagai Negara Islam Indonesia (NII). Dengan pasukan beliau yang bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Mereka menyerang pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan-tindakan pengacauan. Aksi-aksi yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar sangat berani. Hal ini disebabkan adanya dukungan dari gerakan DI/TII pimpinan Kartosuwirjo. Dengan adanya aksi dari pihak Ibnu Hadjar tersebut,

Pemerintah berusaha untuk mengadakan pendekatan dan menginstruksikan supaya secepatnya menghentikan pemberontakan.

Bahkan pemerintah masih memberikan waktu kepada Ibnu Hadjar untuk menghentikan petualangannya secara baik-baik. Beliau pernah menyerahkan diri dengan kekuatan pasukan beberapa peleton dan diterima kembali ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia. Tetapi setelah menerima perlengkapan, Ibnu Hadjar melarikan diri lagi dan melanjutkan pemberontakannya. Berkali-kali beliau melakukan tindakan tidak terpuji ini, sehingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan tegas dengan menggempur gerombolan Ibnu Hadjar. Pasukan Ibnu Hadjar dapat dimusnahkan dan beliau dapat ditangkap. Pada akhir tahun 1959 petualangan Ibnu Hadjar berakhir sudah.

PEMBERONTAKAN ABDUL QAHHAR MUDZAKAR

Pemberontakan ini timbul karena alasan-alasan tertentu. Sebelumnya Qahar Mudzakar adalah komandan Batalyon tengkorak empat puluh ribu orang, dengan pangkat Letnan Kolonel. Atas aktivitasnya, beliau ditugaskan untuk membentuk Komando Groep Seberang dan staf komando pasukan TNI. Wilayahnya meliputi Sulawesi, Nusatenggara dan Kalimantan. Sebagai wakil komandan ketika itu adalah Saleh Syahban. Atas perintah Qahhar Mudzakkar, Saleh Syahban segera mengkoordinir pasukan gerilya di seluruh Sulawesi Selatan yang disebut dengan KGSS (Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan) Tahun 1952 Qahhar Mudzakkar mengganti nama pasukannya dengan Tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR). Terbentuknya TKR dilatarbelakangi keinginan Qahhar Mudzakar untuk membentuk Sulawesi Selatan menjadi sebuah Negara Islam Indonesia (NII).

Keinginan ini terwujud karena beliau melihat bahwa Kartosuwirjo pemimpin DI/TII wilayah Jawa Barat berhasil memproklamasikan berdirinya NII di Jawa Barat. Melihat kondisi ini maka wilayah Jawa

Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh dan Kalimantan Selatan turut melibatkan diri. Pada tahun 1950 setelah penyerahan kedaulatan, persoalan penyelesaian masalah bekas pejuang di dalam periode Perang Kemerdekaan merupakan masalah. Para bekas pejuang tersebut mengharapkan mereka dijadikan sebagai anggota tentara dalam tubuh APRI. Keinginan tersebut tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, artinya tidak semua bekas pejuang di daerah-daerah dapat dijadikan sebagai anggota tentara, karena untuk menjadi anggota tentara diperlukan persyaratan-persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang berkehendak menjadi tentara.

Hal inilah melahirkan kekecewaan yang amat besar dikalangan para bekas pejuang. Salah satu adalah pejuang asal Sulawesi Selatan Letnan Kolonel Abdul Qahhar Mudzakkar. Tanggal 7 Agustus 1953 beliau sebagai pimpinan TKR mengumumkan penggabungan diri pasukan dan daerah "kekuasaannya" menjadi bagian dari gerakan DI/TII pimpinan Kartosuwirjo di Jawa Barat. Tujuan beliau adalah ingin mendirikan NII. Abdul Qahhar Mudzakkar melakukan pemberontakan kepada pemerintah RI. Dari pihak pemerintah segera melakukan operasi militer untuk membendung pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah.

Operasi militer dilakukan secara lebih terorganisir tetapi sekaligus diadakan pendekatan damai terhadap tokoh-tokoh pemberontak. Sampai tahun 1962 daerah yang belum dapat diselesaikan masalah keamanannya ialah daerah Sulawesi Selatan Tenggara. Di daerah ini gerakan DI/TII pimpinan Abdul Qahhar Mudzakkar masih melanjutkan perlawanan terhadap pemerintah RI. Di dalam melanjutkan perlawanannya itu Abdul Qahhar Mudzakkar melakukan langkah-langkah untuk memperkuat diri.

Hal ini di dukung pula dengan bergabungnya PRRI/PERMESTA melakukan pendekatan kepada pimpinan DI/TII Aceh dan Sulawesi. Penggabungan ini akhirnya melahirkan Republik Persatuan Indonesia (RPI). RPI gagal dan dilanjutkan dengan membentuk Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII). RPII juga tidak mengalami keberhasilan. Sementara itu pihak pemerintah secara intensif melakukan operasi militer yang mana akhirnya operasi militer berhasil

menyergap dan menembak mati Abdul Qahhar Mudzakkar, yang mengaku sebagai pejabat Chalifah presiden RPII, pada 2 Pebruari 1965.

PEMBERONTAKAN DI/TII DAUD BEUREUEH

Pemberontakan DI/TII di Aceh dimulai dengan "Proklamasi" Daud Beureueh bahwa Aceh merupakan bagian "Negara Islam Indonesia" di bawah pimpinan Imam Katosuwirjo pada tanggal 20 September 1953.

Daud Beureueh pernah memegang jabatan sebagai "Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh" sewaktu agresi militer pertama Belanda pada pertengahan tahun 1947. Sebagai Gubernur Militer ia berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer.

Sebagai seorang tokoh ulama dan bekas Gubernur Militer, Daud Beureueh tidak sulit memperoleh pengikut. Daud Beureueh juga berhasil mempengaruhi pejabat-pejabat Pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidie. Untuk beberapa waktu lamanya Daud Beureueh dan pengikut-pengikutnya dapat menguasai sebagian besar daerah Aceh termasuk sejumlah kota.

Sesudah bantuan datang dari Sumatera Utara dan Sumatera Tengah, operasi pemulihan keamanan segera dimulai. Satu demi satu kota-kota yang dikuasai pemberontak direbut kembali. Setelah didesak dari kota-kota besar, Daud Beureueh meneruskan perlawanannya di hutan-hutan.

Penyelesaian terakhir Pemberontakan Daud Beureueh ini dilakukan dengan suatu "Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh" pada bulan Desember 1962 atas prakarsa Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M. Jassin. Dengan kembalinya Daud Beureueh ke masyarakat, keamanan di daerah Aceh sepenuhnya pulih kembali.

PEMIKIRAN EKONOMI NASIONAL

Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo, yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi yang umumnya dari ekonomi Kolonial ke ekonomi Nasional. Sumitro mencoba mempraktekkan pemikirannya pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus selekas mungkin menumbuhkan kelas pengusaha.

Para pengusaha Indonesia pada umumnya bermodal lemah, diberi kesempatan untuk berpartisipasi membangun ekonomi nasional. Pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha itu, baik dalam bentuk bimbingan konkrit atau dengan bantuan pemberian kredit, karena pemerintah menyadari bahwa pengusaha-pengusaha Indonesia pada umumnya tidak mempunyai modal yang cukup. Apabila usaha ini berhasil, secara bertahap pengusaha bangsa Indonesia akan dapat berkembang maju, maka tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial dibidang perdagangan akan tercapai. Gagasan Sumitro dituangkan dalam Program kabinet Natsir (September 1950-April 1951).

PENGGUNTINGAN UANG (SANERING)

Pengguntingan uang atau Sanering adalah merupakan kebijaksanaan pemerintah (**Keputusan Menteri Keuangan RIS NO PU I Tanggal 19 Maret 1950**). Pengguntingan ini dikenal juga dengan sebutan "Gunting Syafrudin". Uang digunting menjadi dua yaitu setengah dari harga nominal. Uang yang digunting ditukar dengan surat hutang Pemerintah yang dibayar kembali secara berangsur, jadi bersifat wajib pinjam. Sebagai tindak lanjut moneter tersebut, pemerintah mengeluarkan uang kertas baru yang berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1950. Isi Undang-Undang tersebut menyatakan tentang pengeluaran uang baru.

Peraturan-peraturan ini kemudian mempunyai pengaruh yang besar atas pertumbuhan kearah tercapainya ekonomi kesatuan, dan diharapkan pemerintah juga dapat mengatasi moneter keuangan Negara. Adapun yang melatarbelakangi terjadinya pengguntingan uang tersebut berawal dari perang kemerdekaan selama lima tahun yang mengakibatkan perekonomian Indonesia dalam keadaan terbengkalai.

Untuk mengatasi moneter keuangan negara Indonesia, maka salah satu program Kabinet Hatta pada masa Republik Indonesia Serikat adalah mengadakan usaha memperbaiki ekonomi rakyat atau peraturan tentang penyehatan keuangan. Ketika perang gerilya terjadi, Negara Indonesia banyak mengalami kerugian baik berupa sarana dan prasarananya. Untuk merehabilitasi kerusakan-kerusakan yang dialami perlu pengeluaran dana yang menyebabkan semakin meningkatnya gejala inflasi di Indonesia. Untuk mengatasi inflasi tersebut dengan keadaan terpaksa pemerintah mengadakan tindakan moneter secara drastis. Oleh karena tindakan pemerintah tersebut tentu akan banyak berpengaruh atau akibatnya akan sangat terasa oleh golongan pegawai dan buruh, begitu pula dengan para penabung.

PENGIRIMAN MISI GARUDA

Pada bulan Oktober 1957, Inggris, Perancis dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir yang telah menasionalisir Terusan Suez pada tanggal 26 Juli 1956.

Beberapa Kota di sepanjang Terusan Suez dibom dan wilayah Mesir di Huai diduduki. Situasi ini mengancam perdamaian dunia sehingga Dewan Keamanan PBB turun tangan dan mendesak pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding. Perundingan-perundingan ternyata tidak berjalan lancar.

Dalam Sidang Umum PBB Menteri Luar Negeri Kanada Lester B. Pearson mengusulkan agar dibentuk suatu pasukan PBB untuk

menjaga perdamaian di Timur Tengah. Usul yang disetujui sidang itu segera dilaksanakan dengan membentuk sebuah Komando PBB dengan nama *UNITED NATIONS EMERGENCY FORCES (UNEF)* pada tanggal 5 Nopember 1956.

Pada tanggal 8 Nopember 1956 Indonesia menyatakan kesediaannya untuk turut serta menyumbangkan pasukan dalam UNEF. Untuk itu segera dibentuk sebuah pasukan yang berkekuatan satu detasemen (550 orang) pada tanggal 28 Desember 1965. Pasukan itu terdiri kesatuan-kesatuan :

- Teritorium IV/Diponogoro (TT IV/Diponogoro)
- Teritorium V/Brawijaya (TT V/Brawijaya)

Komandan Kontingen Indonesia ditunjuk Kolonel Hartoyo yang keemudian digantikan Letnan Kolonel Suadi. Upacara pelepasan Garuda dilaksanakan di halaman Istana Merdeka oleh Presiden Soekarno pada tanggal 31 Desember 1956. Kontingen Indonesia untuk UNEF yang diberi nama Pasukan Garuda I yang diberangkatkan ke Timur Tengah pada permulaan bulan Januari tahun 1957. Keterlibatan Indonesia dalam UNEF mengingat negara kita telah menjadi anggota PBB sejak 30 September 1950 dan suatu kewajiban menjunjung tinggi tujuan dan asas-asas PBB. Politik luar negeri kita yang bebas aktif menjadi fondamen ikut serta menciptakan perdamaian dunia. Dalam Pembukaan UUD 1945 jelas-jelas sudah dinyatakan sedemikian rupa tentang perjuangan bangsa Indonesia.

Pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah RI selalu mengirimkan Kontingen Indonesia Garuda ke daerah-daerah yang bergolak seperti di Kongo (Zaire) tergabung dalam UNOC sejak 10 September 1960. Komandan Pasukan Indonesia Garuda III dipimpin Brig. Jen Kemal Idris. Kontingen Garuda IV tergabung dalam Komisi Pengawas Gencatan Senjata di Vietnam (ICCS) dengan pimpinan Let. Jen. H. R. Dharsono.

PENYEDERHANAAN SISTEM KEPARTAIAN

Sistim multy partai yang didorong Maklumat Wakil Presiden No. X/1945 menimbulkan perasaan tidak senang bagi rakyat umum. Tindakan pemimpin partai dalam masa liberal tidak menjamin stabilitas pemerintahan dan terhambatnya pembangunan. Presiden Soekarno menghendaki penyederhanaan dalam sistim kepartaian melalui persetujuan musyawarah dengan Perdana Menteri dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Dalam sidang yang ke-IV tanggal 25 Oktober 1959 Dewan Pertimbangan Agung dengan keputusan No. 6/Kpts/SD/IV/1959 telah menetapkan UU Kepartaian. Antara lain ditegaskan adanya partai-partai politik yang telah berdiri waktu dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan yang tidak terlibat pemberontakan-pemberontakan atau partai itu tidak secara resmi menyalahkan pembuatan anggota-anggotanya.

Berdasarkan surat keputusan tanggal 25 November 1959 itu, Presiden RI mengeluarkan Penetapan Presiden (Pen. Pres) No. 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat dan penyederhanaan partai-partai/kepartaian. Partai-paratai yang sudah ada waktu mendapatkan pengakuan harus mendaftarkan anggota-anggotanya dan sanggup menyesuaikan anggaran dasarnya.

Partai politik yang diakui hanya 10 (sepuluh) partai politik yaitu: Nahdlatul Ulama (NU), Partai Indonesia (Partindo), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Murba, Partai Sjarikat Islam Indonesia, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholik Republik Indonesia, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Tarbiyatul Islamiyah (PERTI).

Dengan terhapusnya partai-partai/organisasi-organisasi lain, maka Pemerintah lebih mudah untuk mengetahui kehendak rakyat pada umumnya. Oleh karena penyederhanaan ini belum memuaskan dalam menampung kehendak rakyat, dibentuklah Front Nasional yang anggota-anggotanya dari partai politik, karyawan-karyawan (tentara), organisasi massa, tani dan perorangan.

PERSATUAN HOKI SELURUH INDONESIA (PHSI)

Persatuan Hoki Seluruh Indonesia (PHSI) adalah organisasi induk cabang olahraga yang dibentuk atas prakarsa berbagai tokoh olahraga, antara lain Yusuf Ismail, Padmo Sumasto dan Asikin pada tahun 1954. Setelah organisasi ini terbentuk barulah PHSI diterima sebagai anggota federasi internasional/*Federation International de Hockey* (FIH) pada tahun 1956 yang ketika sedang berlangsung Olimpiade XVI di Melbourne. Dengan masuknya PHSI menjadi anggota FIH membuka kemungkinan mengikuti turnamen-turnamen di luar negeri. Dalam cabang olahraga ini Indonesia untuk pertama kalinya ikut bertanding dalam SEA Games 1970 di Kuala Lumpur.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1959

Dalam rangka usaha membendung inflasi dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1959 pukul 06.00 pagi. Peraturan itu dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran untuk kepentingan perbaikan keadaan keuangan dan perekonomian negara. Untuk mencapai tujuan itu nilai uang kertas pecahan Rp. 500,- dan Rp. 1000,- yang ada dalam peredaran ditekan dengan pada Rp. 50,- dan Rp. 100,-.

Selain dari pada itu dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1959 tentang pembukaan sebagai dari simpanan pada bank-bank yang dimaksudkan untuk mengurangi banyaknya uang dalam peredaran, yang terutama dalam tahun 1957 dan 1958 sangat meningkat jumlahnya.

Hak-hak yang mengenai keuangan negara adalah antara lain penghasilan negara berupa devisa dan penghasilan lain yang merupakan sumber-sumber penting untuk penerimaan negara dalam mata uang rupiah ikut merosot. Dengan demikian anggaran belanja menjadi lebih besar lagi, yang hanya sebagian kecil saja dapat ditutup dengan pinjaman-pinjaman dari luar negeri. Hal-hal itu menyebabkan bertambahnya pencetakan uang kertas.

PERSATUAN CATUR SELURUH INDONESIA (PERCASI)

Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) berdiri pada 17 Agustus 1950 atas prakarsa Dr. Suwito Mangkusuwondo yang peresmiannya dihadiri oleh berbagai wakil-wakil dari daerah antaralain Solo, Yogyakarta dan Madiun. Sejak organisasi terbentuk telah dilakukan berbagai kegiatan. Di bidang organisasi telah mengadakan kongres secara bergiliran diberbagai kota di Indonesia, sedangkan yang meliputi kegiatan keolahragaan adalah dengan mengikuti pertandingan dalam dan luar negeri ditambah dengan menerima kunjungan dari pecatur-pecatur luar negeri untuk mengadu kekuatan di Indonesia. Partisipasi PERCASI di forum internasional sudah dimulai pada tahun 1960 di Olimpiade Leipzig.

Pada tahun yang sama PERCASI diterima menjadi anggota *Federation International De Echecs* (FIDE) dan pada tahun 1967 menjadi anggota KONI Pusat. Adapun prestasi yang pernah dicapai pada pertandingan diluar negeri adalah pada tahun 1982 di Luzern, Ardiansyah mencapai Internasional Grand Master (IGM) yang pertama dan Eddy Handoko memperoleh predikat Internasional (IM).

PERISTIWA TELUK NIBUNG

Peristiwa penyelundupan di Teluk Nibung, Sumatera Timur terjadi pada pertengahan tahun 1956. Peristiwa ini merupakan salah satu dari serangkaian peristiwa yang terjadi akibat rasa tidak puas pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, karena alokasi dana yang tidak seimbang antara pusat dan daerah. Peristiwa dipelopori oleh Kolonel Simbolon, Panglima Divisi Bukit Barisan di Sumatera Utara dengan dibantu oleh seorang pedagang besar Cina di Medan.

Dengan alasan untuk memperoleh dana bagi proyek-proyek kehidupan anak buahnya yang sangat buruk akibat kurangnya dana dari pusat, maka tindakan tersebut dilakukan. Akan tetapi pemerintah tidak menerima alasan tersebut. Walaupun kemudian pemerintah tidak mengambil tindakan tegas karena alasan politik. Pada tanggal

8 Juli 1956 pemerintah mengeluarkan perintah untuk menghentikan penyelundupan itu, dengan pemberitahuan bahwa tidak akan diambil tindakan pidana terhadap para pelakunya.

PERJANJIAN PERDAMAIAN JEPANG DAN INDONESIA

Perjanjian Perdamaian Indonesia dan Jepang disingkat PPJ, merupakan perjanjian antara Indonesia-Jepang mengenai berakhirnya keadaan perang yang diwarisi dari Hindia Belanda dalam Perang Dunia II di Indonesia. PPJ ditandatangani pada tanggal 20 Januari 1958 antara Republik Indonesia dan Jepang. Dalam Perjanjian ini antara lain diatur mengenai pembayaran pampasan oleh Jepang kepada Indonesia guna mengganti kerusakan dan penderitaan yang disebabkan oleh Jepang selama perang.

Sebelum PPJ ditandatangani kedua belah pihak, telah lebih dahulu diadakan Konperensi PPJ yang diprakarsai oleh Inggris dan Amerika Serikat. Konperensi diadakan di New York, Amerika Serikat pada 4--8 September 1951. Konperensi dihadiri oleh negara-negara yang pernah dijajah Jepang, negara-negara pemrakarsa dan negara-negara besar lain seperti Uni Soviet. Dalam konperensi ini Indonesia yang pernah dijajah Jepang, menuntut agar Jepang membayar kerugian atas kerusakan-kerusakan dan penderitaan negara bangsa yang disebabkan oleh pendudukan dan kekejaman bala tentara Jepang.

Di samping itu pemerintah Indonesia meminta agar Jepang jangan menjadi negara militer yang kuat demi keamanan dunia dan menuntut mengenai persoalan penangkapan ikan agar diatur dan dibatasi demi kepentingan kedua negara. Setelah melalui berbagai perdebatan, akhirnya konperensi berhasil menghasilkan beberapa pasal PPJ, antara lain pasal 14 PPJ yang menentukan secara terperinci bahwa Jepang diwajibkan sesegera mungkin mengadakan perundingan tentang pembayaran kerugian perang negara-negara yang wilayahnya diduduki bala tentaranya. Konperensi ditutup pada 8 September 1951 Gedung *Opera Dera Archeson* (Amerika Serikat). Dalam penutupan itu ditandaatangani pasal-pasal PPJ oleh negara peserta. Sebagai tindak

lanjut pasal 14 PPJ, maka pada tanggal 20 Januari 1958 diadakan Perjanjian Perdamaian antara Republik Indonesia dan Jepang .

Dalam perjanjian ini, mengenai pampasan perang, disetujui bahwa jumlah pampasan yang akan dibayarkan kepada RI sebesar 80.308.8000 yen atau US \$ 223.080.000 dalam bentuk barang dan jasa. Pembayaran pampasan perang tersebut dibayar secara berangsur selama 12 tahun. Sebagai pelaksanaannya antara lain melalui pengiriman pemuda dan mahasiswa Indonesia untuk belajar di Jepang. PPJ ini disahkan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1958.

PERISTIWA CIKINI

Peristiwa Cikini yang terjadi pada tanggal 30 November 1957 adalah usaha percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Ketika itu Presiden sedang menghadiri pesta ulang tahun ke-15 perguruan Cikini, tempat dimana putra-putri baliu bersekolah.

Percobaan pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan granat tangan sehingga menimbulkan banyak korban, terutama pada anak-anak sekolah yang berada di halaman sekolah. Berkat kesigapan dan kecepatan bertindak ajudannya Mayor Sudarto, presiden Soekarno terhindar dan dapat diselamatkan.

Sekalipun tidak terbukti peristiwa ini dinyatakan sebagai perbuatan para perwira, tetapi peristiwa ini dilakukan oleh orang-orang yang tergabung dalam suatu gerakan yang dinamakan gerakan Anti Komunis (GAK) yang pelindungnya adalah Kolonel Zulkifli Lubis.

Akibat dari peristiwa Cikini persoalan pengampunan umum dari panitia Tujuh terhadap golongan militer yang melakukan pelanggaran disiplin menjadi mentah dan akan ditinjau kembali. Para pelaku segera dapat ditangkap dan diajukan kepengadilan. Mereka yang terbukti bersalah kemudian di jatuhi hukuman mati.

PERISTIWA HALIM

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Desember 1955 saat Komodor Hubertus Suyono akan diambil sumpahnya oleh Menteri Pertahanan Burhanuddin Harahap. Tiba-tiba segerombolan prajurit dari pasukan kehormatan serentak maju dan berteriak, "tidak setuju, tidak setuju". Kemudian mereka meninggalkan barisan diikuti oleh pasukan pembawa panji-panji Angkatan Udara. Karena adanya insiden itu maka Menteri Pertahanan Burhanuddin Harahap membatalkan upacara pelantikan dengan alasan tidak ada panji-panji.

Dalam kericuhan ini seorang Perwira Tinggi AURI Komodor Udara Muda Wiweko Supeno mendapat serangan dari sersan udara Kalebus. Guna mengatasi peristiwa tersebut maka dilakukan tindakan-tindakan penangkapan terhadap pelaksana huru-hara, dan masalah pengusutannya diserahkan kepada Jaksa Tentara Agung. Kemudian oleh presiden / panglima tertinggi dengan didampingi oleh KSAU Laksamana Muda Suryodarma dan Komodor Noordrawen memberikan amanatnya di hadapan para perwira AURI di Halim dan dalam penjelasannya juga, menyatakan bahwa ia telah menerima permohonan berhenti dari KSAU Suryadarma, tetapi telah ditolak. Peristiwa Halim ini sebenarnya bermula pada masalah intern Angkatan Udara yang timbul sejak tahun 1950, yaitu antara lain : diadakannya rapat pada tanggal 28--29 Januari 1950 atas inisiatif Komodor Dr. Hardjonitiro. Rapat ini untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh Angkatan Udara dan dihadiri oleh 10 perwira senior AURI yang dipimpin oleh Komodor muda Suyono. Kemudian rapat yang sama di selenggarakan di Bandung dari tanggal 30 Januari sampai tanggal 9 Februari dipimpin oleh Komodor Muda Wibiho.

Dalam rapat ini pimpinan AURI dikecam dan dianggap tidak mempunyai kebijaksanaan yang tegas. Sementara itu juga diadakan rapat pada tanggal 2 Juli dan 12 Juli 1952 di pangkalan Halim yang tujuannya untuk membahas masalah pendidikan dan penerbangan yang dipimpin oleh Komodor Muda Sarjono.

Dengan terjadinya rentetan rapat-rapat tersebut menunjukan bahwa dibadan perwira AURI terdapat dua kelompok. Sebagian

mendukung KSAU dan sebagian lagi menentang kebijaksanaan KSAU. Pada bulan intern AURI ini dan mengatakan mempertahankan Suryadarma sebagai KSAU, sedangkan kepala Sujono dan rekan-rekannya yang semua mengajukan permohonan pengunduran diri karena tidak menyetujui kebijaksanaan KSAU diajukan pilihan akan tinggal atau keluar dari AURI. Untuk Komodor Muda Sarjono dikenakan tahanan kemudian direhabilitasi dan untuk sementara ditugaskan pada kementerian pertahanan. Untuk penyesuaian masalah peristiwa Halim dan masalah intern AURI dilakukan oleh menteri pertahanan Burhanuddin Harahap.

PERISTIWA 27 JUNI 1955

Adalah peristiwa pemboikotan terhadap pelantikan Kolonel Bambang Utoyo sebagai KSAD pada tanggal 27 Juni 1955 oleh para perwira Senior Angkatan Darat. Meskipun pertentangan didalam tubuh Angkatan Darat, sehubungan dengan peristiwa 17 Oktober telah dapat diakhiri setelah diadakannya RACO di Yogyakarta yang menghasilkan piagam Keutuhan Angkatan Darat atau biasa disebut "Piagam Yogyakarta", tetapi antara Angkatan Darat dan pemerintah tetap tidak tercapai kesepakatan mengenai peristiwa tersebut. Oleh sebab itu KSAD Kolonel Bambang Sugeng meletakkan jabatannya karena merasa tidak mampu melaksanakan isi piagam Yogyakarta.

Selama jabatan KSAD belum terisi, pimpinan Angkatan Darat oleh pemerintah diserahkan kepada wakil Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Zulkifli Lubis. Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah memutuskan mengangkat Kolonel Bambang Utojo, Panglima Tentara dan Teritorium II/Sriwijaya sebagai KSAD. Pengangkatan Kolonel Bambang Utojo sebagai KSAD mendapat tantangan dari wakil KSAD kolonel Zulkifli Lubis dan kalangan Angkatan Darat sendiri.

Upacara pelantikan Kolonel Bambang Utojo sebagai KSAD pada tanggal 27 Juni 1955 di boikot oleh para perwira senior Angkatan Darat, sedangkan Zulkifli Lubis sebagai pejabat KSAD menolak untuk melaksanakan serah terima.

Peristiwa ini akibat dari pemerintah yang tidak mendapat dukungan Angkatan Darat, tidak dapat melaksanakan suatu tindakan terhadap Kolonel Zulkifli Lubis, sehingga kewibawaan pemerintah menurun apalagi dengan adanya mosi Zainul Baharuddin terhadap kebijaksanaan menteri pertahanan.

Mosi tersebut mendorong Mr. Iwa Kusuma Sumantri mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri pertahanan. Krisis ini bertambah parah setelah partai-partai mendukung pemerintah menarik dukungannya, dan mengakibatkan jatuhnya kabinet Ali-Wongso.

Masalah penggantian pimpinan Angkatan Darat akhirnya diselesaikan oleh Kabinet Baharuddin Harahap yang menggantikan Kabinet Ali-Wongso. Pada tanggal 28 Oktober 1955 Kabinet memutuskan untuk mengangkat Kolonel A.H. Nasution sebagai KSAD dan pelantikannya dilakukan pada tanggal 7 November 1955.

PERISTIWA 17 OKTOBER 1952

Terjadinya demonstrasi masyarakat yang menuntut dibubarkannya parlemen (Dewan Perwakilan Sementara) dan diadakan pergantian parlemen baru, juga mereka menuntut agar secepat mungkin diadakan pemilihan umum serta diadakan pembersihan dalam kementerian-kementerian.

Demonstrasi ini terjadi pada hari Jumat dimana massa bergerak menuju gedung DPR dan kemudian ke Istana Merdeka untuk menyampaikan tuntutan tersebut kepada presiden. Menghadapi demonstrasi ini sebelumnya telah diadakan penjagaan pada posisi yang strategis seperti di Lapangan Banteng dan Lapangan Merdeka.

Pada malam hari sebelum terjadi demonstrasi presiden Soekarno sudah diberitahukan melalui Kolonel dr. Mustopo, oleh sebab itu beliau tidak terlalu terkejut atas adanya demonstrasi masyarakat. Di hadapan para demonstran, Presiden Soekarno menolak desakan itu dan hanya berjanji akan menyelidiki lebih dahulu keinginan rakyat

di luar Jakarta. Disamping itu akan meminta kepada pemerintah untuk mempercepat diadakan pemilihan umum.

Akibat peristiwa 17 Oktober 1952 ini telah mempertajam pertentangan-pertentangan yang ada dalam TNI Angkatan Darat dan memerlukan waktu beberapa tahun untuk mengatasinya. Di beberapa daerah terjadi pengambilalihan pimpinan Teritorium dari panglima yang mendukung pernyataan pimpinan Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952. Kolonel AH. Nasution sebagai KSAD menyatakan bertanggung-jawab atas terjadinya peristiwa tersebut dan mengajukan permohonan berhenti kepada pemerintah.

Kejadian ini kemudian dikenal sebagai "peristiwa 17 Oktober " mempunyai faktor-faktor penyebab di masa-masa sebelumnya. Sebagai akibat dari selesainya perang Kemerdekaan Indonesia menghadapi banyak persoalan, diantaranya :

1. Keadaan politik
2. Keadaan sosial- ekonomi yang semakin memburuk dan korupsi yang semakin luas
3. Persoalan pembebasan Irian Jaya yang tidak cepat selesai
4. Pemerosotan integritas dan kemampuan aparaturnya pemerintahan, misalnya pertentangan antar dan intern partai-partai dan pergolakan intern dalam Angkatan Perang (AP).

Pada waktu itu pimpinan AP, khususnya Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sedang melakukan konsolidasi di dalam proses peralihan dari tentara gerilya, sehingga harus menghadapi berbagai masalah. Selain masalah psikologis yang timbul sebagai akibat pelaksanaan persetujuan KMB, antara lain masalah bekas KNIL dan adanya misi militer Belanda, juga timbul persoalan-persoalan politik atau lainnya.

Sebagai akibat permainan politik itu, dalam tubuh Angkatan Perang terjadi pergolakan-pergolakan, khususnya di lingkungan TNI AD. Beberapa orang perwira TNI AD yang tidak sependapat dengan kebijaksanaan Kepala Staf Angkatan Darat telah meminta kepada presiden Soekarno untuk mengganti KSAD Kolonel A.H. Nasution,

Kolonel Bambang Supeno mendatangi panglima-panglima daerah dan mengajak mereka untuk menandatangani pernyataan agar presiden mengganti Kolonel A.H. Nasution sebagai KSAD. Tetapi cara yang ditempuh Kolonel Bambang Supeno tidak mendapat persetujuan oleh perwira-perwira pimpinan Angkatan Darat dari pusat maupun daerah karena merasa merusak solidaritas intern Angkatan Perang.

Dalam pada itu di luar TNI AD ada dua orang anggota parlemen yaitu Bebasa Daeng Lalo dan Rondonuwu telah mengirim surat kepada pemerintah yang mencela kebijaksanaan Kolonel Gatot Subroto Panglima Tentara Teritorium VII/Indonesia Timur dalam melaksanakan pemulihan keamanan di Sulawesi Selatan. Surat ini telah menimbulkan kegemparan di kalangan anggota parlemen.

Sementara itu timbul peristiwa-peristiwa baru yang meruncingkan suasana DPR. Dimulai dengan perdebatan yang panas diparlemen selama berbulan-bulan mengenai pro dan yang karena kebijaksanaan Menteri pertahanan dan pimpinan Angkatan Darat, kemudian perkembangan di parlemen kian meningkat dengan diajukannya mosi Zaenal Baharuddin. Ketua Seksi pertahanan dalam DPR, yang tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan. Mosi itu menuntut juga diadakannya reorganisasi Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang.

Di parlemen suasana panas terus berlangsung dan ini mempunyai pantulannya di kalangan masyarakat luas terutama pers dan partai-partai politik. Fokus pembicaraan meluas sehingga oleh pihak-pihak yang kontra diberberkan berbagai kelemahan Angkatan Darat, antara lain mengenai korupsi. Hal ini yang menimbulkan kemarahan kaum militer tidak hanya ditujukan kepada parlemen tetapi juga kepada partai-partai politik.

Dengan adanya rentetan peristiwa-peristiwa tadi maka tanggal 17 Oktober hanya merupakan suatu ledakan dari sumber pertentangan yang sudah ada didalam kalangan Angkatan Darat.

Untuk mengakhiri krisis dan perpecahan didalam tubuh Angkatan Darat, maka para perwira Angkatan Darat mengadakan "Rapat Collegiul" di Yogyakarta pada tahun 1955.

PERISTIWA TANJUNG MORAWA

Peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Maret 1953 tidak dapat dilepaskan dari adanya posisi modal asing di Indonesia. Dimana pemerintah, sesuai dengan yang diputuskan dalam persetujuan KMB, mengijinkan pengusaha asing kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan.

Di Sumatera Timur terdapat tanah yang cukup luas, pada masa pemerintah Belanda berkuasa disewakan kepada perusahaan asing yaitu *Deli Planters Veregening* (DVP), tetapi selama pendudukan tentara Jepang dan semasa revolusi fisik tanah-tanah tersebut tidak digarap atau dipergunakan. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, oleh penduduk setempat tanah-tanah itu dimanfaatkan penduduk tanah-tanah yang kebanyakan milik pemerintah Belanda ingin dikembalikan kepada yang berhak.

Untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 1951, Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Sukiman, Mr. Iskaq Tjokroadisurjo sudah mengadakan kompromi sebagai dasar penyelesaian masalah perusahaan asing. DVP bersedia mengembalikan tanah seluas 130.000 ha dari 250.000 ha tanah yang menjadi konsensinya. Asalkan pemerintahan Indonesia memberikan izin sewa tanah sisanya seluas 125.000 ha untuk jangka waktu 30 tahun. Dengan pengertian bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pemindahan sejumlah 62.000 penduduk yang bertempat tinggal di tanah itu sejak zaman pendudukan Jepang pada masa revolusi fisik. Sebelum di laksanakan keputusan tersebut telah terjadi pergantian Kabinet sehingga persoalan Tanjung Morawa belum terselesaikan.

Kabinet Wilopo dan Menteri Dalam Negeri Mohammad Roem kemudian mengambil tindakan untuk mewujudkan apa yang sudah

dicapai oleh kabinet sebelumnya. Tetapi usaha-usaha tersebut menemui tantangan-tantangan berat dari para petani yang menggarap tanah yang terdiri dari orang-orang Cina dan orang-orang Indonesia (pribumi) yang terletak di kecamatan Tanjung Morawa dekat Medan.

Oleh karena mengalami hambatan, maka pada tanggal 16 Maret 1953 pemerintah terpaksa menggunakan alat kekuasaan negara untuk memindahkan penduduk dari daerah tersebut. Sebagai akibatnya terjadilah bentrokan senjata. Dalam insiden ini telah jatuh korban, yakni 5 orang mati, di antaranya petani Cina. Sedangkan penangkapan-penangkapan kemudian menyusul.

Peristiwa ini menjadi sorotan tajam dan emosional baik dari pers maupun dalam perlemen. Pada pertengahan bulan Mei kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri Mr. Roem mengenai bidang pertanahan ini menjadi dasar diajukan usul mosi tidak percaya oleh Serikat Tani Indonesia (SAKTI) yang dikenal dengan Mosi Sidik Kertapati. Beberapa hari kemudian mosi ini menetapkan beberapa prodifikasi dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dari PNI dalam DPR. Akhirnya dalam mosi itu dinyatakan tuntutan kepada pemerintah untuk menghentikan sama sekali usaha pengosongan tanah yang diberikan DVP sesuai dengan keputusan pemerintah Sukiman dan semua tahanan yang ada sangkut pautnya dengan peristiwa Tanjung Morawa ini segera dibebaskan.

PERSETUJUAN 15 MEI 1950

Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 dengan bantuan Konperensi Meja Bundar, ternyata umurnya tidak lama. Hal tersebut disebabkan bentuk negara Federasi (Serikat) bukan bentuk negara yang berakar pada kehendak rakyat, melainkan pembentukan negara RIS ini oleh rakyat tetap dipandang sebagai hasil politik Belanda semata-mata dengan maksud memecah belah persatuan bangsa. Itulah sebabnya sesudah pengakuan kedaulatan Belanda di daerah-daerah bagian timbul pergolakan-pergolakan dan pernyataan-pernyataan yang spontan dari rakyat untuk

kembali ke Negara Kesatuan dengan jalan menggabungkan diri kepada Negara Bagian Republik Indonesia.

Tuntutan-tuntutan untuk kembali ke negara kesatuan semakin lama menjadi semakin kuat. sehingga seperti yang telah dikatakan negara dan/atau daerah-daerah bagian satu persatu menggabungkan diri kembali kepada Negara Republik Indonesia. Sebagai akibat penggabungan ini akhirnya di dalam negara yang berbentuk federal ini negara bagiannya hanya masih tinggal tiga saja, yakni Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur.

Selain dari itu keadaan-keadaan di daerah menjadi sukar untuk diperintah dan kewibawaan Pemerintah Negara Federal menjadi semakin berkurang di daerah. Untuk mengatasi keadaan yang demikian ini akhirnya diselenggarakan suatu musyawarah antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia. Dalam musyawarah tersebut Pemerintah Negara Republik Indonesia Serikat bertindak pula mewakili Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur.

Sejak awal bulan Mei dimulai perundingan antara Perdana Menteri Drs. Mohammad Hatta yang mewakili RIS dengan Negara Bagian Indonesia Timur dan Sumatera Timur serta Republik Indonesia Yogyakarta pimpinan Dr. Abdul Halim. Proses perundingan berjalan sampai tanggal 19 Mei 1950, di mana pada hari itu dicapai persetujuan bersama antara pihak-pihak yang berunding untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persetujuan itu dikenal dengan nama Persetujuan 19 Mei 1950 yang pada pokoknya berisikan persetujuan bahwa :

1. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya disetujui untuk bersama-sama melaksanakan negara kesatuan sebagai jelmaan dari Negara Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Akan diberlakukan sebuah Undang-Undang Dasar Sementara dari negara kesatuan ini, yaitu dengan cara mengubah Konstitusi

RIS sedemikian rupa sehingga esensialis UUD 1945, yaitu antara lain pasal 27, pasal 28 dan pasal 23 ditambah dengan bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS termasuk di dalamnya.

PERSATUAN JUDO SELURUH INDONESIA (PJSI)

Judo adalah suatu permainan dan cara pembelaan diri tanpa senjata. Menurut sejarah permainan ini berasal dari Tiongkok. Judo muncul di Indonesia setelah perang dunia ke II dan mulai terkenal dan populer pada tahun 1950an setelah tumbuh perkumpulan-perkumpulan berbagai cabang olahraga atas jasa Prof. Makino. Pada tahun 1955 didirikan Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI), sebagai ketua adalah Sutjipto Judohardjo. Setelah organisasi ini terbentuk maka muncullah persatuan-persatuan Judo di berbagai daerah.

PRESIDEN (REKTOR) UNIVERSITAS INDONESIA

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1950 dibentuklah Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan peleburan antara Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia (didirikan pada tanggal 19 Agustus 1945) di Jakarta dan *Universiteit van Indonesie*. Untuk itu sebagai Presidennya (Rektornya) diangkat Ir. R.M.R. Surakhman Tjokroadisurjo. Nama Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia berubah menjadi Universiteit Indonesia pada tahun 1952, dan berubah nama menjadi Universitas Indonesia sejak tahun 1956.

Perjuangan Ir. Surakhman dalam pembangunan Universitas Indonesia antara lain pembongkaran pabrik opium yang kemudian dijadikan Kantor Rektor.

PEMERINTAHAN REVOLUSI REPUBLIK INDONESIA (PRRI)

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia berdiri pada tanggal 15 Februari 1958 di Sumatera. Tokoh penggerak dari PRRI

tersebut adalah para tokoh dewan, seperti dewan Banteng, Gajah, Garuda dan Manguni. Dewan-dewan ini membentuk PRRI sebagai tandingan dan puncak dari pertualangan mereka yang memberontak kepada pemerintah. *(lihat dewan-dewan). Gerakan mereka lebih bersifat separatis dan membentuk suatu kabinet dimana duduk beberapa orang tokoh politik dan militer.

Latar belakang dari timbulnya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia berawal dari ketidakpuasan Politik dalam usaha mencari saluran baru untuk menyampaikan tuntutan kepentingan dan ditambah pula dengan adanya permasalahan di tubuh Angkatan Darat seperti peristiwa 17 Oktober 1952. Menurut Bruce Grant bahwa tindakan-tindakan pimpinan pemberontak lahir dari perasaan frustrasi, bukan berdasarkan perencanaan politik yang praktis, mungkin ada yang didorong oleh ambisi pribadi, namun mempunyai sikap idealis.

Kesulitan mereka adalah bahwa meskipun mereka mempunyai pandangan yang jelas tentang apa yang mereka sukai dalam politik, mereka ragu-ragu tentang apa yang mereka inginkan sebagai penggantinya. PRRI berakhir pada tanggal 5 Oktober 1961, yaitu dengan adanya penyerahan diri dari Ahmad Husein, Mauludin Simbolon dan Kawilarang.

PERSERIKATAN RENANG SELURUH INDONESIA (PRSI)

Pada awal kemerdekaan perkembangan olahraga renang renang di tanah air agak menurun disebabkan bangsa Indonesia baru saja terlibat dalam perjuangan fisik melawan penjajah. Pada waktu itu belum terbuka kemungkinan terbentuknya organisasi induk cabang olahraga di Indonesia. Baru pada tanggal 21 Maret 1951 ketika kongres pertama di Jakarta, pembentukan organisasi bentuk renang terwujud dan yang menjadi ketuanya Prof. Dr. Poerwo Soedarmo.

Organisasi ini mula-mula bernama PBSI (Persatuan Berenang Seluruh Indonesia) tetapi singkatannya sama dengan Persatuan Bulu

Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), maka diubah lagi menjadi Perserikatan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) pada tahun 1959. Dalam usaha menyempurnakan bidang organisasi pada tahun 1952 PRSI menjadi anggota resmi Federasi Renang Dunia, *Federation Internationale de nation Ameteur* (FINA) dan juga menjadi anggota resmi *Internasional Olympic Conmonittee* (IOC), Komite Olimpiade Internasional. Adapun cabang-cabang olahraga yang masuk didalam olahraga renang antara lain : renang, polo air dan loncat indah.

PERGURUAN TINGGI PENDIDIKAN GURU (PTPG)

Perguruan Tinggi Pendidikan Guru didirikan pada tahun 1954. Latar belakang pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru tersebut adalah ketika diadakannya kursus B I dan B II dimana hasilnya menunjukan suatu keseimbangan perkembangan antara jumlah murid dengan jumlah guru. (lihat kursus B I dan B II).

Pada tahun 1958 PTPG dijadikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Setelah berdirinya FKIP sangat dirasakan bahwa masalah tenaga pengajar dapat teratasi. Cuma kendala yang dihadapi adalah tidak bersedianya para tenaga guru tersebut untuk ditempatkan di daerah-daerah. Sementara itu masalah guru bidang studi ilmu-ilmu eksakta juga mengalami kekurangan. Hal inilah kelemahan dari FKIP yang ketika itu terlampau banyak menghasilkan guru studi Ilmu-ilmu sosial.

PUSAT LATIHAN TARI BAGONG KUSSUDIARJO

Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo di desa Kembaran, Kelurahan Taman Tirto Kasihan Bantul Yogyakarta menjadi pusat perkembangan seni kreasi baru. Bagong Kusudiarjo sebagai pendiri, pencipta tari kreasi baru dengan gaya tersendiri yang mengambil intisari penggabungan dari beragam bentuk dasar tari milik daerah di seluruh wilayah Indonesia, bahkan dasar tari dari negara asing diambilnya. Pertama kali ia menciptakan tari layang-layang pada tahun 1954.

Banyak tantangan yang dihadapinya dengan tuduhan ia merusak bentuk tari yang sudah ada.

GPH Tejkusuma, seniman kawakan tari yang disegani di Yogyakarta memberi dorongan Bagong untuk mengembangkan idenya. Dukungan kalangan seniman sastra, lukis dan musik menimbulkan semangat baru tanpa mengenal menyerah dalam membuat wajah dan nafas baru dalam tari. Tari baru ciptaannya makin bermunculan lebih-lebih setelah pulang dari belajar di Amerika Serikat memenuhi "*Grand Rockefeller Foundation*". Perkembangan tari tidak harus berhenti apalagi dalam pembinaan tari Indonesia. Kita tidak meletakkan tari di dalam sangkar emas yang setiap waktu kita lihat, dinikmati keindahannya dan dikagumi sebagai benda keramat dengan nilai luhur. Pembinaan dilakukan sebagai unsur pengembangan yang berarti dijamin, diolah untuk menghasilkan tari baru.

Pada tanggal 5 Maret 1958 berdiri Pusat Latihan Tari Bagong Kusudiarjo tempat menampung dan mengolah gagasan dan usaha Bagong dengan pendukung-pendukungnya. Di sini PLT Bagong bekerja memberi nafas dan warna dalam mencipta tariannya. Sejak tahun 1960 tari ciptaannya makin cerah. Di beberapa kota seperti Semarang, Surabaya, Jombang, Jakarta, Jember, Malang dan daerah-daerah di Kalimantan, Sumatera menaruh minat mendirikan cabangnya. Prospek tari kreasi baru Bagong mulai tampak corak pada tahun 1964. Kalangan seniman tari mulai menerima ide dan pembaruan tari ciptaannya. Perkembangan pesat dari aneka ragam seni dan kreativitas warisan nenek moyang harus dilestarikan dan dikembangkan.

Tempat Pusat Latihan Tari Bagong Kusudiarjo dipindahkan ke desa Kembaran, Taman Tirto, Kasihan, Bantul dan disini berdiri padepokan baru. Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo berdiri pada tanggal 30 September 1978. Namanya hingga sekarang makin terkenal baik di kalangan masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya serta kota-kota lain diseluruh Indonesia. Beberapa negara ASEAN pun tak ketinggalan mengirimkan utusannya untuk belajar suatu seni tari. Sampai sekarang perkembangannya terus meningkat berkat dorongan dari berbagai pihak seperti instansi pemerintah dan lain-lain pihak.

RAPAT GELAP SUNGAI DAREH

Sejumlah tokoh-tokoh militer dan politik mengadakan suatu pertemuan dan pembicaraan rahasia bertempat di Sungai Dareh, sebuah kota kecil di perbatasan antara Sumatera Barat dan Jambi, pada tanggal 9 Januari 1958. Rapat tersebut diadakan sebelum dinyatakan berdirinya PRRI. Hadir dalam pertemuan rahasia itu antar lain : Kol. Zulkifli Lubis, Kol. Mauludin Simbolon, Kol. Dahlan Djambek, Letkol Ahmad Husein, Letkol. Ventje Sumual, Letnan Kolonel Barlian, Moh. Natsir, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo. Dalam rapat ini dibicarakan berbagai masalah politik. Setelah rapat sehari semalam, diakhiri dengan tidak mencapai suatu kebulatan tekad.

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN (PRLT), 1956--1961

Pada masa Perdana Menteri Ali Sastramidjojo I, pemerintah membentuk Biro Perancang Negara. Biro ini dibentuk dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Karena pemerintah yang terdahulu lebih menekankan program jangka pendek, sehingga belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena masa kerja masing-masing kabinet terlalu singkat dan programnya selalu berganti-ganti, maka tidaklah terdapat program politik.

Biro ini dipimpin Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Pada bulan Mei 1956 Biro ini menghasilkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) (1956-1961). Rancangan Undang-undang tentang Rencana Pembangunan ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 11 November 1958, yang mempunyai daya surut mulai tanggal 1 Januari 1956. Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun kemudian terpaksa dirubah dan sasarannya pada tahun 1957 sesudah diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan (MUNAP).

RENCANA PELAJARAN SMA TAHUN 1952

Rencana Pelajaran SMA tahun 1952 adalah sejenis dengan Kurikulum, yaitu susunan berbagai materi pelajaran sekolah di Sekolah Menengah Atas. Kurikulum (rencana pelajaran sekolah menengah atas) dirumuskan dan mulai berlaku pada tahun 1952. Adapun sebagai panitia team perumus kurikulum tersebut adalah terdiri dari wakil-wakil dari perguruan tinggi, inspeksi SMA dan SMP serta wakil-wakil dari perguruan swasta ditambah dengan beberapa orang penasehat terutama dari kalangan SMA.

Hasil perumusan yang dibahas mencakup bahwa tujuan diadakannya pendidikan Sekolah Menengah Atas adalah bersifat dualistik. Yaitu disamping mendidik sebagai manusia yang berbudi baik dan mempunyai kepandaian juga dipersiapkan untuk memasuki perguruan tinggi. Adapun susunan materi pelajaran yang telah tersusun di bagi atas : SMA dengan jurusan A, dengan pelajaran pokok meliputi:

1. Bahasa dan Kesusatraan Indonesia	4	4	5
2. Bahasa Daerah	2	2	-
3. Jawa Kono	2	2	-
4. Bahasa Inggris	4	4	6
5. Bahasa Prancis	3	3	3
6. Bahasa Jerman	3	3	3
7. Sejarah	3	3	3
8. Ilmu Bumi	2	2	2

Pelajaran Penting meliputi :

9. Sejarah Kesenian	1	1	1
10. Sejarah Kebudayaan	2	2	2
11. Ilmu Bangsa-bangsa	1	1	1
12. Ekonomi	2	2	2
13. Tata Negara dan Keuangan Negara	2	2	3

Pelajaran Pelengkap meliputi :

14. Aljabar	1	1	-
15. Ilmu Kesehatan	1	1	-
16. Menggambar	2	2	2
17. Pendidikan Jasmani	3	3	2
18. Pendidikan Agama	2	2	2

SMA bagian (Jurusan B) Pelajaran Pokok :

1. Aljabar	2	2	3
2. Ilmu Ukur Sudut	2	2	2
3. Ilmu Ukur Ruang	2	2	2
4. Ilmu Ukur Melukis	1	1	1
5. Ilmu Alam	4	5	5
6. Mekanika	1	2	3
7. Ilmu Kimia	4	5	5
8. Ilmu Hayat dan Kesehatan	2	2	2

Pelajaran Penting :

9. Bahasa Indonesia	2	2	2
10. Bahasa Inggris	3	3	4

Pelajaran Pelengkap :

11. Bahasa Jerman	2	2	1
12. Bahasa Perancis	2	2	1
13. Ilmu Bumi Alam dan Falak	2	1	-
14. Sejarah	2	1	-
15. Tata Negara dan Kewarganegaraan	2	1	-
16. Ekonomi	1	1	-
17. Tata Buku	2	2	-
18. Menggambar	2	2	2
19. Pendidikan Jasmani	3	3	2

SMA bagian (Jurusan) C Pelajaran Pokok :

1. Tata Negara dan Kewarganegaraan	2	2	2
2. Tata Hukum	1	2	1
3. Ekonomi	3	3	3
4. Ilmu Bumi Sosial dan Ekonomi	3	3	3
5. Ilmu Bangsa-bangsa	1	1	1
6. Sejarah	2	2	2

Pelajaran Penting :

7. Pengetahuan dan Hitung Dagang	2	2	2
8. Tata Buku	2	3	3
9. Sejarah Perekonomian	-	2	2
10. Bahasa Indonesia	3	4	3
11. Bahasa Inggris	4	4	4

Pelajaran Pelengkap :

12. Bahasa Jerman	2	2	2
13. Bahasa Perancis	2	2	2
14. Ilmu Kimia dan Pengetahuan Bahan	2	1	2
15. Aljabar	2	2	-
16. Ilmu Kesehatan	1	1	-
17. Menggambar	2	2	2
18. Pendidikan Jasmani	2	2	2
19. Pendidikan Agama	2	2	2

SAPTA MARGA

Sapta Marga kode etik prajurit Indonesia yang menegaskan bahwa TNI akan tetap menegakkan negara kesatuan yang berdasar Pancasila. TNI menyatakan secara tegas bahwa TNI adalah pendukung dan pembela Pancasila yang tidak kenal menyerah. Sapta Marga lahir

pada tanggal 5 Oktober 1951. Munculnya istilah “Sapta Marga” berawal dari keinginan pihak TNI Angkatan Darat untuk memperbaiki disiplin ketentaraan. Hal ini di dukung pula dengan kondisi Republik Indonesia Serikat yang berubah kembali menjadi Negara Kesatuan, seiring dianutnya paham supremasi sipil dengan sistem banyak partai.

Dengan keadaan tersebut ternyata pembangunan kehidupan politik tidak memperoleh kemajuan dan belum dapat menciptakan suatu pemerintah yang stabil. Sementara itu TNI sebagai angkatan perang RI pada masa itu juga sedang menghadapi pemberontak-pemberontak di daerah seperti DI/TII, Republik Maluku Selatan dan lain-lain. Pada saat seperti ini pula Kolonel Infanteri Bambang Soepono menerbitkan sebuah buku kecil yang berjudul “Sapta Marga”. Adapun uraian daripada Sapta Marga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kami warga negara kesatuan RI yang bersendikan Pancasila.
2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara, bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami kesatria Indonesia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami prajurit TNI adalah rajangkari negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami prajurit TNI mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
7. Kami prajurit TNI setia dan menepati janji, serta Sumpah Prajurit.

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TELADAN

Sekolah Menengah Atas (SMA) Teladan adalah SMA yang ditunjuk oleh UPSMA (Urusan Pendidikan SMA) sebagai *Model*

School (Sekolah Teladan). Hal ini berlatar belakang keinginan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperbaiki pendidikan dengan mempertinggi pelajaran di SMA. Maka pada tanggal 16 Desember 1957 Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusannya. Adapun sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah ada sebanyak lima buah yaitu :

1. SMA Negeri III Bagian B di Jakarta diubah menjadi SMA teladan Bagian B (Ilmu Pasti/Alam).
2. SMA Negeri I Bagian A dan II di Yogyakarta menjadi SMA teladan Bagian A (Sastra).
3. SMA Negeri IV Bagian C di Surabaya menjadi SMA teladan bagian C (Ekonomi, Kemasyarakatan dan Kehukuman).
4. SMA Negeri I Bagian B di Medan menjadi SMA Teladan Bagian B (Ilmu Pasti/Alam).
5. SMA Negeri II Bagian A dan C di Bukit Tinggi menjadi SMA Teladan Bagian A (Sastra). Setelah adanya penunjukan tersebut oleh masing-masing sekolah diambil inisiatif tersendiri untuk melaksanakan rencana pelajarannya.

SENTRAL ORGANISASI BURUH RI

Didirikan pada awal Februari 1951 di Bandung atas prakarsa dua belas peserta Kongres Buruh Umum dengan nama Vaksentral Baru. Di dalam kongres ini dinyatakan, bahwa berdirinya Vaksentral Baru itu semata-mata didasarkan atas dan untuk penyederhanaan jumlah serikat buruh yang ada, dengan azas dan tujuan untuk mengambil konsepsi yang sedianya diperuntukkan bagi induk organisasi serikat buruh. Selanjutnya dalam kongresnya yang pertama di Jakarta pada akhir tahun 1951, yang diadakan dalam rangka mengesahkan anggaran dasar organisasi, nama Vaksentral Baru diubah menjadi SOBRI. Susunan SOBRI berbentuk sekretariat, dengan sekretariat pertama Budyanto Martaatmadja.

Dalam organisasi ini tergabung $\pm$ 19 serikat buruh. Ketika dikeluarkan Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/KOTI/1960 tanggal 6 Januari yang melarang buat sementara segala kegiatan partai MURBA beserta lembaga-lembaga dan anggota-anggotanya, SOBRI yang bernaung di bawah panji-panji parpol Murba turut terkena.

SENTRAL ORGANISASI BURUH PANCASILA

Organisasi yang disingkat Sentral Pancasila ini adalah sebuah organisasi buruh bentukan kaum Katolik. Organisasi ini mula-mula didirikan di Semarang pada bulan Juni 1954 dan kemudian berkembang ke kota-kota lain. Perhimpunan mempunyai azas Pancasila menurut pengertian Katolik dengan tujuan masyarakat gotong royong. Di sini dijelaskan dasar-dasar perkumpulan bertolak dari kedudukan antara manusia dan Tuhan, manusia dengan manusia, serta hak dan kewajibannya. Soal perburuhan adalah soal manusia, ciptaan dan hak milik Tuhan Yang Maha Esa. Hidup aman, tentram dan bahagia akan tercapai jika diperoleh keseimbangan milik buruh berupa kebendaan (materiil), moril, intelektual dan spirituil. Sentral Pancasila akan berusaha diadakan ketetapan tentang upah keluarga dan pembagian keuntungan.

Selain itu organisasi berusaha memberi penerangan dan pendidikan kaum buruh dengan segala alat hukum. Agar supaya organisasi ini tidak menyimpang dari ajaran Katolik, diadakan penasihat rohani yang ditunjuk gereja setempat. Berdasarkan hasil kongres di Jakarta pada bulan April 1957 dibentuk induk organisasi dengan nama Sentral Pancasila.

SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 316 TAHUN 1959

Kedudukan Maria Ulfah sebagai Direktur Kabinet Perdana Menteri, telah ikut membantu perjuangan Kowani (Kongres Wanita Indonesia). Tokoh ini dengan mudah dapat berkomunikasi secara informal mengenai masalah-masalah kaum wanita dengan pejabat-

pejabat yang berkepentingan seperti Hari Ibu 22 Desember agar disejajarkan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Usul itu baru disetujui setelah ia jauh dari panggung politik yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden No. 316 Tahun 1959, dimana Hari Ibu dijadikan sebagai hari Nasional bersejarah lainnya dan bukan hari libur.

Salah satu usaha Kowani lainnya yang berhasil ialah gagasan memberi kesempatan pada kaum wanita untuk masuk dalam ABRI. Maria Ulfah menghadap Jenderal Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat untuk membicarakan hal tersebut. Pada tanggal 22 Desember 1961 lahirlah Kowad (Korp Wanita Angkatan Darat). Selain pernah menjabat Direktur Kabinet Perdana Menteri, Kepala Sekretariat Kowani, dan Menteri Sosial, Maria Ulfah juga menjabat sebagai Ketua Panitia Sensor Film Indonesia pada tahun 1950 sampai 1961.

TRIBRATA

Pada mulanya *Tribrata* lahir di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang menjadi pengikat disiplin universitas bagi para mahasiswa PTIK. Perkataan *Tribrata* yang berasal dari Prof. Dr. Prijono dipergunakan pertama kali dalam salah satu Sidang Dewan Guru Besar PTIK pada tahun 1953. Perumusan *Tribrata* merupakan hasil penelitian ilmiah dibawah pimpinan Prof. Mr. Dr. Djoko Soetono, sebagai anggota Panitia Negara yang ditugaskan untuk menyusun Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara. Beliau memperkenalkan *Tribrata* pertama kali pada upacara pembayatan Doktorandi PTIK angkatan ke II tanggal 3 Mei 1954 yang diucapkan dalam bahasa Sansekerta oleh Drs. Soeparno Soeriatmadja sebagai kaul.

Prof. Dr. Mr. Djoko Soetono menjelaskan didalam rapat Dewan Kurator Dewan Guru Besar PTIK tanggal 28/29 Juni 1955 bahwa *Tribrata* suatu ujar atau kaul yang timbul dari dalam, dari jiwa pejabat Polisi sendiri, bersumber pada perkembangan sejarah Kepolisian Republik Indonesia. Dirumuskan dari jiwa, sifat dan kepribadian Indonesia dan berdasar atas kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Pada hari Kepolisian pertama, tanggal 1 Juli 1955 diselenggarakan upacara pemberian panji-panji kepolisian negara di Lapangan Banteng, Jakarta yang dihadiri Presiden Soekarno, Perdana Menteri, pembesar-pembesar Pemerintah Sipil dan Militer dan rakyat. Saat itu Kepala Kepolisian Negara mengikrarkan Tribrata sebagai kaul, sebagai cita-cita kepribadian Kepolisian Republik Indonesia

Tribrata memberikan pedoman hidup bagi POLRI sampai sekarang seperti yang tersimpul sebagai berikut :

- Brata I : *Rastra Sewakottama* : Abdi utama, sebagai pedoman patriotisme.
- Brata II : *Negara Janottama* : warganegara utama, sebagai pedoman Nasionalisme.
- Brata III : *Jana Anucasana Dharma* : penjaga ketertiban pribadi rakyat, sebagai pedoman karya POLRI.

UNDANG-UNDANG POKOK PENDIDIKAN

Pada masa Mr. Ali Sastro Amijoyo sebagai Menteri PP dan K (tahun 1948) berhasil dibentuk Panitia Pembentukan Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran. Ki Hajar Dewantara sebagai Ketua Panitia bekerja dengan memperhatikan hasil-hasil pekerjaan Panitia-panitia terdahulu termasuk hasil Kongres Pendidikan. Hasil-hasil pekerjaan panitia yang dibentuk dalam tahun 1946-1947 sebagai berikut :

Ketika Menteri PP dan K dijabat Mr. Soewandi, dalam tahun 1946 telah dibentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran yang diketuai Ki Hajar Dewantara. Tugas Panitia adalah meninjau kembali dasar, isi, susunan dan seluruh usaha pendidikan pengajaran. Usaha menggantikan pendidikan kolonial dengan pendidikan nasional yang demokratis juga dilakukan pemerintah RI dengan mengadakan Kongres Pendidikan Indonesia. Antara tanggal 4--7 Maret 1947, kongres itu diadakan di Solo di bawah pimpinan Prof. Sunarya Kolopaking.

Dalam Kongres Pendidikan di Yogyakarta pada tahun 1949 Menteri PP dan K, Ki Sarmidi Mangunsarkoro mengharapka kongres dapat menghasilkan bahan-bahan yang berguna bagi penyusunan Undang-Undang Pokok Pendidikan. Panitia RUUPP & P berhasil menyusun Rencana Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran setelah melalui perjuangan yang gigih. Atas persetujuan BPKNIO yang kemudian disahkan Pejabat Presiden RI Mr. Assat dan Menteri PP dan K, dapat dihasilkan UU No. 4 tahun 1950 dengan nama : "Undang-Undang tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran Undang-Undang itu hanya berlaku di daerah RI Yogyakarta".

Pada waktu pemerintahan Negara Kesatuan RI, UU Pendidikan No. 4 tahun 1950 diberlakukan diseluruh Indonesia. Keputusan itu diambil setelah UU No. 4/1950 diterima Parlemen pada tanggal 27 Januari 1954 dan disahkan Pemerintah RI pada tanggal 12 Maret 1954 yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 1954. UU No. 4 tahun 1950 menjelma menjadi UU No. 12 tahun 1954. Penyempurnaan UU Pokok Pendidikan selanjutnya telah dilakukan Komisi Pembaharuan Pendidikan, bahkan dalam tahun 1963 oleh Majelis Pendidikan Nasional tetapi tetap gagal merumuskan hasil musyawarah nya.

UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA 1950

Sebagaimana telah diketahui, bahwa pada tanggal 15 Mei 1950 telah tercapai persetujuan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai jelmaan dari Negara Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945, dan untuk itu akan diberlakukan sebuah Undang-Undang Dasar Sementara dari negara kesatuan tersebut.

Di dalam Piagam Persetujuan tersebut, ditentukan prosedur untuk mewujudkan Negara Kesatuan, di antaranya tentang bentuk Undang-Undang Dasar Negara. Dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan yang baru, akan didasarkan atas UUD (Konstitusi RIS) setelah diadakan perubahan-perubahan seperlunya. Kemudian melalui suatu pemilihan umum akan dibentuk suatu Badan Pembentuk Undang-Undang Dasar (Konstituante) yang

ditugaskan untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap. Untuk melaksanakan persetujuan tersebut, dibentuklah sebuah Panitia bersama antara kedua pemerintah yang masing-masing diketuai oleh Prof. Mr. Soepomo Menteri Kehakiman Kabinet RIS dan Mr. Abdul Hakim wakil Perdana Menteri RI Yogyakarta. Panitia bersama bertugas merencanakan sebuah Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Mei itu juga telah ditetapkan beberapa pokok mengenai Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu :

1. UUDS Negara Kesatuan diperoleh dengan mengubah Konstitusi RIS sedemikian rupa dan memasukkan bagian-bagian yang esensial dari UUD 1945 ke dalamnya, antara lain pasal 27, pasal 28, pasal 29.
2. Di dalam dimasukkan pokok "Hak milik adalah suatu fungsi sosial".
3. Diadakan perubahan ketentuan Konstitusi RIS antara lain :
 - a. Senat dihapuskan.
 - b. DPRS terdiri dari gabungan DPR RIS dan BPKNIP RI ditambah dengan anggota yang diangkat Presiden atau usul pemerintah RIS dan RI.
 - c. DPR RIS dan BPKNIP RI merupakan Majelis perubahan Undang-Undang Dasar.
 - d. Presiden ialah Presiden Soekarno.
 - e. Dewan Menteri harus bersifat Parlemen.
 - f. DPA dihapuskan.

Sebelum memulai pekerjaannya semua anggota panitia dilantik oleh Presiden RIS pada tanggal 3 Juni 1950. Tanpa mengalami kesulitan yang berarti berhasil disusun Rancangan Undang Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan pada tanggal 29 Juni 1950. Pada tanggal 30 Juni 1950 Rancangan Undang Undang Dasar Sementara diserahkan kepada Pemerintah RIS di Jakarta dan Pemerintah RI di Yogyakarta. Setelah pembahasan selama kurang lebih satu pekan tanpa banyak perubahan Pemerintah RIS dapat menerima UUD Sementara.

Selanjutnya diserahkan kepada DPR RIS dan Senat pada tanggal 27 Juli 1950. Sedangkan Pemerintah RI menyerahkan kepada BPKNIP pada tanggal 26 Juli 1950. Rancangan Undang Undang Dasar Sementara ini oleh Badan Pekerja KNIP pada sidangnya tanggal 12 Agustus 1950 diterima dengan baik, demikian juga oleh DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat dalam sidangnya pada tanggal 14 Agustus 1950.

Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Undang Undang No. 7 Tahun 1950 ditetapkan perubahan Konstitusi RIS menjadi Undang Undang Dasar Sementara berdasar pasal 127 a, pasal 190, dan pasal 191 ayat 2 Konstitusi RIS.

UNDANG-UNDANG PERTAHANAN

Kabinet Wilopo pertamakali mengusahakan suatu rencana membentuk Undang-Undang Pertahanan. Rancangan Undang-Undang Pertahanan hampir selesai ketika Kabinet Wilopo menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Sukarno pada tanggal 3 Juni 1953. Baru pada jaman Kabinet Ali Sastroamijoyo. Menteri Pertahanan Mr. Iwa Kusuma Sumantri minta pendapat Gabungan Kepala-Kepala Staf untuk meninjau RUU itu dengan beberapa perubahan. Perubahan itu atas pertimbangan GKS bersama Sekretaris Jenderal Kementrian Pertahanan yaitu R. Hidayat. Undang-Undang diajukan ke Kabinet dan Parlemen setelah dibahas lebih dulu dalam seksi pertahanan DPRS.

Pokok-pokok penting isi Undang-Undang Pertahanan itu sebagai berikut :

1. Prinsip bahwa tiap-tiap warganegara wajib dan berhak turut serta dalam pertahanan negara untuk membela kemerdekaan, dan bahwa hal ini adalah suatu kehormatan baginya.
2. Bahwa pertahanan negara bersifat pertahanan rakyat yang teratur, dan untuk itu diadakan wajib latih dan wajib militer.

3. Presiden ialah Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia dan bahwa beliau memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.
4. Bahwa Menteri Pertahanan dapat mewajibkan setiap warganegara yang berumur antara 15 dan 55 tahun untuk mengikuti latihan pertahanan diluar pekerjaannya sehari-hari dengan tidak merugikan mata pencahariannya (pasal 6).
5. Tentang hak kewajiban anggota Angkatan Perang, yang sangat penting dalam materi pasal 27 dan 28 yang berbunyi :
 - a. Bahwa seorang anggota Angkatan Perang tidak boleh menjalankan politik, dalam arti bahwa ia tidak boleh mengambil sikap atau tindakan yang dapat mengurangi tata tertib (disiplin) tentara.
 - b. Bahwa seorang Angkatan Perang harus memberitahukan lebih dulu kepada atasannya untuk menjadi anggota sesuatu perkumpulan, kecuali jika ditetapkan lain oleh Menteri Pertahan.

Peraturan-peraturan ini sangat perlu bagi pemeliharaan disiplin ketentaraan, sedangkan perkumpulan/organisasi yang diperbolehkan bagi anggota tentara untuk menjadi anggotanya diatur berdasarkan instruksi Menteri Pertahanan No. III/H/20/54 tanggal 27 Oktober 1954. Jabatan Kepada Staf Angkatan Perang tidak terdapat lagi didalam UU Pertahanan itu. Rancangan UU Pertahanan kemudian menjadi Undang-Undang No. 29 tahun 1954 yang telah menjadi dasar dari peraturan-peraturan bagi perkembangan Angkatan Perang Republik Indonesia selanjutnya.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Persiapan didirikan universiteit di Madiun adalah prakarsa Gubernur Abdul Hakim, atas dasar anjuran rakyat Sumatera Utara. Untuk itu rakyat diminta mengumpulkan dana demi terselenggaranya satu perguruan tinggi (universitas) di Sumatera Utara. Didalam surat tertanggal 26 Nopember 1951 yang ditunjukkan kepada Koordinator

Pemerintahan Aceh, Tapanuli dan seluruh Bupati-bupati di Sumatra Utara agar diusahakan sumbangan umum. Hal ini ditempuh untuk mengatasi kepentingan pendidikan rakyatnya yang seharusnya tidak selalu tergantung pada kesanggupan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 94/XII/PSU tanggal 31 Desember 1951 diputuskan untuk :

1. Membentuk satu Panitia Persiapan Mendirikan Perguruan Tinggi (PPMPT) di Medan yang terdiri dari 5 orang dan bertugas membuat Usul-usul dan rancangan dalam usaha mengadakan satu Perguruan Tinggi di Medan.
2. a. Menunjuk ketua merangkap anggota : Dr. Sumarsono, Kepala Jawatan Kesehatan Rakyat Propinsi sumatra Utara di Medan.
- b. Anggota-anggota terdiri :
Dr. A. Sofian, Dokter Pemimpin RSU Medan.
Ir. Danunegoro Kepala Jawatan PU dan Tenaga Mr. Djaidin Purba, Wali Kota besar Medan.
- c. Sekretaris : Tengku Usman Fachruddin Pegawai Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Tugas Panitia menyelidiki dengan sebaik-baiknya kemungkinan mendirikan Universiteit di Medan yang dimulai dengan mendirikan Fakultas Kedokteran dalam tahun 1952. Pada tanggal 20 Agustus 1952 Fakultas Kedokteran Sumatra Utara di Medan telah dibuka. Pada mulanya memang sudah dibuka Perguruan Tinggi Islam Indonesia yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 1952.

Dalam perkembangannya maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 1957 tanggal 30 Oktober 1957 Perguruan Tinggi Sumatera Utara dijadikan Universitas Negeri bernama Universitas Sumatra Utara di Medan. Fakultas-fakultas yang sudah ada terdiri dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum dan pengetahuan masyarakat serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sampai sekarang USU tumbuh pesat dengan banyaknya cabang keilmuan yang lain.

YAYASAN KREDIT DAERAH

Berdasarkan Keputusan Menteri Perekonomian RI No. 7227 /M tanggal 4 Januari 1952, mulai tanggal 16 Juni 1952 dibentuk Yayasan Kredit Daerah untuk ketiga propinsi di Sumatra. Oleh karena itu Gubernur/Kepala Daerah Propinsi di Sumatra Utara dengan surat No : 781/VII/P.S.U. mengharapkan agar usaha-usaha daerah dapat berkembang secara sehat. YKD ini mengurus masalah perkreditan untuk usaha-usaha pembangunan ekonomi daerah yang besarnya tidak lebih dari seratus ribu rupiah, untuk tiap-tiap usaha yang berjangka waktu tidak lebih tiga tahun. Kalau perusahaan-perusahaan yang mengkhususkan kepentingan daerah, dapat diijinkan diberi kredit lebih besar dari seratus ribu (Rp. 100.000,-)

Pemberian kredit lebih diutamakan untuk alat-alat produksi atau perindustrian kecil yang sifatnya merata diantara usaha-usaha itu. Perkreditan di lapangan sosial kebudayaan dan perdagangan tidak termasuk urusan YKD. Yayasan Kredit Pusat untuk pertama kali menyediakan Rp. 5.000.000,- buat persediaan Yayasan Kredit Daerah. Syarat-syarat untuk mendapatkan kredit bagi Kredit Daerah. Syarat-syarat untuk mendapat kredit bagi mereka perseorangan atau badan hukum piutang. Manajer berpengalaman dan mempunyai keahlian dalam mengembangkan usahanya.

Pemerintah dalam hal ini berusaha menggalakan pembangunan perekonomian daerah, biarpun tiap propinsi tersedia lima juta rupiah tetapi bermanfaat bagi usaha-usaha yang terencana dalam meningkatkan produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Cindy. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat*, Gunung Agung, Jakarta, 1966.
- Almanak Sumatera Tahun 1969.**
- BKS-PM. *BKS-PM Menyongsong Kembali ke UUD 1945*, Jakarta, 1959.
- Dinas Sejarah Militer TNI AD. Cuplikan *Sejarah Perjuangan TNI AD*, PT Virgasari, Jakarta, 1972.
- Katoppo, E. *Perjuangan Irian Barat Kembali Ke Dalam Wilayah Indonesia* Kilat Maju, Bandung, 1952.
- Lembaga Study Ilmu-ilmu Kemasyarakatan, *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis Di Indonesia* PT Yoooha Corporation, Jakarta, 1983.
- Mona Lohanda Cs. *Sejarah Peralihan Pemerintah RIS Ke RI*, Depdikbud, Proyek IDSN, 1986.
- Nasution, A.H. *"Front Nasional Pembebasan Irian Barat Pidato Penguasa Perang Pusat (KSAD) " Pada tanggal 4 Januari 1958 di Gedung Pantja Prasetya*, Jakarta, 1958.
- Nurliana, dkk. *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia (PRRI)*, Proyek IDSN, Jakarta, 1992.
- Panitia Pusat peringatan HUT RI, *Seperempat Abad Legiun Veteran RI* Humas LVRI,.....
- Perangin-angin Tridah Cs. *Susunan dan Program Kabinet-Kabinet 1945-1988*, Yayasan pendidikan Bangun, Jakarta,....
- Poesponegoro Djoened Marwati, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Radianti, Yakoba Titi, *Garuda Indonesia Airways dan Nasionalisasi 1945-1958* (Skripsi Sarjana Sastra Sejarah UI, 1992).

- Rumidjah Siti Jumeiri, Ny. **RM. Bambang Sumodarmoko, Karya dan Pengabdiannya**, Proyek IDSN, Jakarta, 1986.
- Sekretaris Negara, **Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka Jilid II 1950-1964**, Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, 1985.
- Sastroamidjojo, Ali. **Tonggak-Tonggak di Perjalananku**, Kinta, Jakarta, 1985.
- Smith, C. John. **Dekolonisasi Indonesia : Fakta dan Ulasan**, Pustaka Azet, Jakarta, 1987.
- Sugianto, **Sejarah Perkembangan Sekolah Lanjutan Umum Tingkat Atas di Indonesia**, Wijaya, Jakarta, 1971.
- Siregar, MP M.SC. dkk. **Sejarah Olah Raga Indonesia**, Kantor Menteri Negara Pemuda Dan Olah Raga, CV. Tumaritis, Jakarta, 1991.
- Yamin, Muhammad, tt. **Pembentukan dan Pembubaran UNI**, Bulan Bintang, Jakarta....
- . **Bahder Djohan Pengabdi Kemanusiaan**, PT Gung Agung, Jakarta, 1980.
- . **Wilopo 70 Tahun**, PT Gunung Agung, Jakarta, 1979.
- . **Sejarah Surat Perintah Sebelas Maret 1966**, Depdikbud, Ditjarahnitra, Proyek IDSN, Jakarta, 1986.

002893.1

A1.1